

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami persembahkan kehadiran Allah Yang Kuasa karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya jualah kami dapat menyelesaikan pembuatan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2012 disusun dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat serta Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan perpustakaan dan kearsipan yang hendak dicapai dalam periode 2016-2021 dengan mempertimbangkan capaian pembangunan perpustakaan dan kearsipan yang telah dicapai saat ini .

Renstra ini juga digunakan sebagai bahan dan pedoman dalam penyusunan untuk pembuatan (1) Rencana Kerja (Renja); (2) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Perpustakaan dan Kearsipan; (3) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Perpustakaan dan kearsipan; (4) Laporan Tahunan; dan (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Badan Perpustakaan dan Kearsipan serta para pemangku kepentingan perpustakaan dan kearsipan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan secara sinergis dan berkesinambungan.

Demikianlah Rencana Strategis ini disusun untuk dapat dipedomani dalam perencanaan dan penganggaran Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat , dan sebagai dokumen untuk melaksanakan evaluasi keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 2 September 2016

KEPALA  
BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

**Drs. ALWIS**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19610303 198210 1002**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah bagian yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah adalah strategi awal dalam menyusun rencana strategis pembangunan yang harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan memperhatikan sinkronisasi dan koordinasi yang berkelanjutan melalui tahapan yang jelas, mulai dari tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sesuai Peraturan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 tahun 2008, sehingga perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional sesuai dengan rumpun bidang tugas pokok dan fungsinya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional. Pembangunan bidang perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan bangsa dan menumbuhkan kembangkan minat serta kegemaran membaca melalui perpustakaan yang mampu menjamin kebutuhan masyarakat kini dan yang akan datang, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 8 yang berbunyi Pemerintah daerah menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah; menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing; menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan; memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Dalam bidang kearsipan bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, serta mendinamiskan sistem kearsipan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kearsipan dengan melakukan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan serta pengelolaan arsip sesuai dengan kewenangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang

kearsipan untuk Penyelenggaraan kearsipan (Pasal 6); Pembinaan kearsipan (Pasal 7-8); Pengelolaan kearsipan (Pasal 9); Sistem Kearsipan Daerah (SKD); Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD) (Pasal 14); Pembentukan Unit dan lembaga kearsipan (Pasal 16,17,22,23); Pengembangan SDM Kearsipan (Pasal 29-30); Penyediaan Prasarana dan Sarana (Pasal 31-32); Perlindungan dan penyelamatan arsip baik di dalam maupun di luar negeri; Penyelamatan arsip dari SKPD yang digabung dan/atau dibubarkan (Pasal 35); Sosialisasi Kearsipan (Pasal 36); Kerjasama (Pasal 37); Pendanaan (Pasal 38).

Berdasarkan hal tersebut seluruh unsur dilingkungan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat dan Lembaga Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota Arsip dari pimpinan, para pejabat struktural, fungsional perpustakaan dan kearsipan serta staf Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat dan Tim Penyusun Perencanaan dan Penganggaran yang telah ditetapkan pada Keputusan Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 11/ SK/ BPA-2016 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Perencanaan dan Penganggaran Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 , menyusun Rencana Strategis Tahun 2010-2015 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi Sumatera Barat dan kewenangan Pemerintah daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

## **1.2 Landasan Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
- 2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah dirubah terakhir beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2015.
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

- 7) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- 8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 9) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan System dan Transaksi Elektronik;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang nomor 24 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
- 18) Keputusan Presiden 105/2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 ( Lampiran IV ) tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 20) Peraturan Kepala ANRI Nomor 6/2005 tentang Pedoman Perlindungan Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
- 21) Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2012 Tentang Kearsipan Tahun 2012 Tentang Kearsipan
- 22) Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.114 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penggunaan Peralatan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah;
- 23) Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
- 24) Pergub No. 7 tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Arsip Media Baru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- 25) Pergub no. 51 tahun 2007 tentang Pengelolaan Arsip Statis Pemerintah Provinsi

### Sumatera Barat

- 26) Pergub No. 124 tahun 2006 tentang Petunjuk Pengelolaan Arsip Dinamis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- 27) Pergub No. 25 tahun 2006 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- 28) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 93 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan
- 29) Surat Edaran Gubernur Nomor 050/291/V/ eko/ Bappeda- 2016 tentang Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2016 – 2021 .
- 30) Keputusan Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 11 / SK/ BPA-2016 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Perencanaan dan Penganggaran Badan Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2016 .
- 31) Prosiding Rapat Evaluasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2010-2015 Tanggal 28 Januari 2016 .
- 32) Prosiding Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2016 -2020 Tanggal 9 Februari 2016 .

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat adalah untuk merumuskan kebijakan, program dan kegiatan lingkup Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan agar lebih efisien dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance ).

Tujuan Rencana Startegis Tahun 2016 -2020 Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat adalah :

- a. Pedoman untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat setiap tahun.
- b. Sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah khususnya Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat .
- c. Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat.
- d. Untuk mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi kepada masa depan, serta peningkatan mutu berbagai produk perencanaan secara optimal.
- e. Untuk mencapai sasaran yang meliputi kebijaksanaan program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa yang akan datang.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, yaitu:

- |         |                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAB I   | Pendahuluan                                                                 | : | Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan, memberikan gambaran dan informasi tentang latar belakang disusunnya rencana strategis Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat                                                                                                                                                            |
| BAB II  | Gambaran Pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat | : | Mencakup Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat , Sumber Daya Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat, Kinerja Pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat                  |
| BAB III | Isu–isu Strategis Berdasarkan tugas dan fungsi                              | : | Mencakup telaahan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga , Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat dan penentuan isu –isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan                |
| Bab IV  | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan                         | : | Mencakup : Visi dan Misi badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat , Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat<br>Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat.                                                   |
| Bab V   | Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Target Kinerja.             | : | Mencakup : Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Target Kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Sumatera Barat . Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). |

Bab VI      Indikator Kinerja                      :   Mencakup : Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Utama yang Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera mengacu pada Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang Tujuan dan Sasaran akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai RPJMD. komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA BARAT

#### 2.1. Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 93 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan yang diemban Badan Perpustakaan dan Kearsipan adalah :

##### 1. Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat

Memimpin pelaksanaan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam di atas Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perpustakaan dan Kearsipan lingkup Provinsi dan Kabupaten Kota;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- e. Pelaksanaan tugas di Bidang Layanan Perpustakaan; Otomasi dan Pengolahan Bahan Pustaka; Deposit Pengamatan dan Pelestarian Bahan Pustaka; Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan; Pengolahan Arsip Statis; Pengolahan Arsip in Aktif; Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip;
- f. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### 2. Sekretariat

###### ***Tugas Pokok***

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan umum dan kepegawaian .



***Fungsi***

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan;
- b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian;

**3. Bidang Layanan Perpustakaan*****Tugas Pokok***

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang layanan umum ,layanan ekstensi dan promosi.

***Fungsi***

- a. Penyiapan Bahan Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang layanan umum;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang layanan ekstensi dan promosi.

**4. Bidang Otomasi Dan Pengelolaan Bahan Pustaka*****Tugas Pokok***

Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Otomasi Perpustakaan, Pengolahan dan Pengembangan Bahan Pustaka.

***Fungsi***

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang otomasi perpustakaan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan dan pengembangan bahan pustaka.

**5. Bidang Deposit, Pengamatan dan Pelestarian Bahan Pustaka*****Tugas Pokok***

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan, di Bidang Deposit, Pengamatan dan Pelestarian Bahan Pustaka.

***Fungsi***

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang deposit, pengamatan dan pelestarian banhan pustaka;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pelestarian Bahan Pustaka .

## **6. Bidang Pembinaan Perpustakaan Dan Kearsipan**

### ***Tugas Pokok***

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan SDM kelembagaan dan sistem perpustakaan, pembinaan SDM dan sistem kearsipan.

### ***Fungsi***

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pembinaan SDM kelembagaan dan sistem perpustakaan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan SDM dan Sistem Kearsipan.

## **7. Bidang Pengelolaan Arsip Statis**

### ***Tugas Pokok***

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang akusisi dan pengolahan, layanan dan perluasan khasanah.

### ***Fungsi***

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang akusisi dan pengolahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang layanan dan perluasan khasanah.

## **8. Bidang Pengelolaan Arsip In Aktif**

### ***Tugas Pokok***

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyimpanan dan pengolahan, pengawasan kearsipan.

### ***Fungsi***

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyimpanan dan pengolahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan kearsipan .

## **9. Bidang Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip**

### ***Tugas Pokok***

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bahan konvensional dan bahan media baru.

### ***Fungsi***

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bahan konvensional

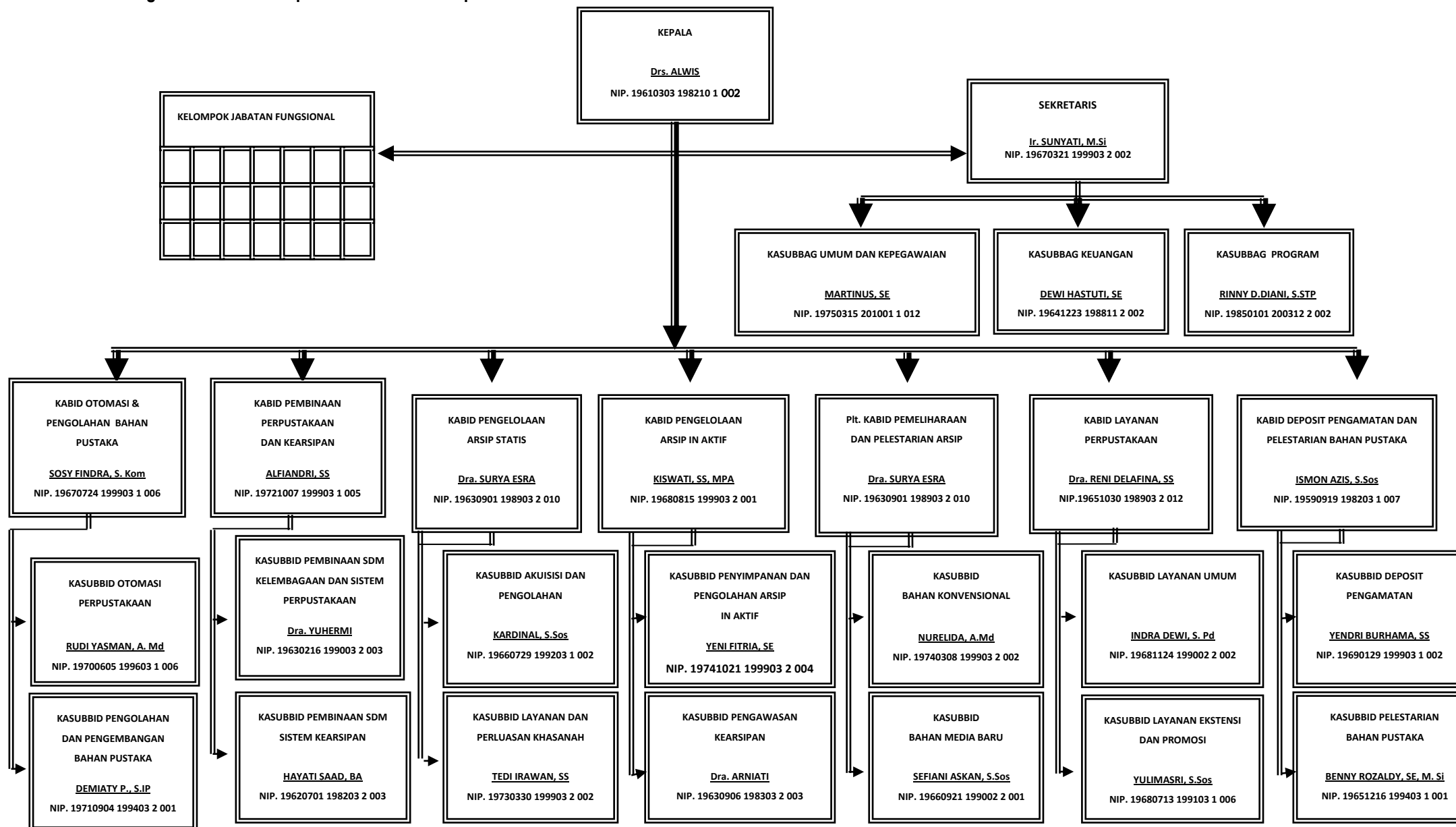
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bahan media baru.

#### **10. Kelompok Jabatan Fungsional**

##### ***Tugas Pokok***

Mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 2.2. Struktur Organisasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat



### 2.3. Sumber Daya Manusia

Secara umum sumber daya manusia yang ada di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat dari segi latar belakang Pendidikan sudah memenuhi beberapa kualifikasi yang dibutuhkan diantaranya terdapat 4 (empat) orang sarjana strata 2, Sarjana 42 (empat puluh dua) orang, Diploma (DIII, DII, dan DI) 11 (sebelas) orang, SLTA 56 (lima puluh enam) orang, SLTP 2 (dua) orang dan SD 3 (tiga) orang, namun disisi lain dengan berjalannya waktu ada pegawai yang telah pensiun dan ini perlu ada penambahan pegawai baru terutama yang diprioritaskan untuk tenaga teknis baik itu untuk bidang perpustakaan maupun untuk bidang kearsipan.

Dalam rangka menjalankan roda organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka organisasi harus digerakkan oleh seluruh elemen yang ada baik pejabat struktural, pejabat fungsional maupun staf.

Struktur Pegawai Badan Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan kepangkatan dan golongan.

**TABEL 2.1**  
**DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT KEPANGKATAN DAN GOLONGAN**  
**KEADAAN SEPTEMBER 2016**

| NO  | PANGKAT / GOLONGAN | JUMLAH   |
|-----|--------------------|----------|
| 1.  | GOL IV/c           | -        |
| 2.  | GOL IV/d           | 1 orang  |
| 3.  | GOL IV/c           | -        |
| 4.  | GOL IV/b           | 3 orang  |
| 5.  | GOL IV/a           | 7 orang  |
| 6.  | GOL III/d          | 25 orang |
| 7.  | GOL III/c          | 14 orang |
| 8.  | GOL III/b          | 25 orang |
| 9.  | GOL III/a          | 7 orang  |
| 10. | GOL II/d           | 4 orang  |
| 11. | GOL II/c           | 10 orang |
| 12. | GOL II/b           | 14 orang |
| 13. | GOL II/a           | 2 orang  |
| 14. | GOL I/d            | -        |

|               |         |                  |
|---------------|---------|------------------|
| 15.           | GOL I/c | 2 orang          |
| 16.           | GOL I/b | 1 orang          |
| 17.           | GOL I/a | -                |
| <b>JUMLAH</b> |         | <b>116 orang</b> |

*Sumber Data : Subag umum dan Kepegawaian*

**TABEL 2.2**  
**DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN**  
**KEADAAN SEPTEMBER 2016**

| <b>NO</b>    | <b>JABATAN FUNGSIONAL</b> | <b>JUMLAH<br/>(ORANG)</b> |
|--------------|---------------------------|---------------------------|
| 1            | S 2                       | 4                         |
| 2            | S 1                       | 42                        |
| 3            | DIII/ DII/ DI             | 10                        |
| 4            | SLTA/ Sederajat           | 56                        |
| 5            | SLTP/Sederajat            | 2                         |
| 6            | SD                        | 2                         |
| <b>Total</b> |                           | <b>116</b>                |

*Sumber Data : Subag umum dan Kepegawaian*

**TABEL 2.3**  
**DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL**  
**KEADAAN SEPTEMBER 2016**

Pejabat Fungsional Badan Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan rumpun jabatan:

| <b>NO</b>    | <b>JABATAN FUNGSIONAL</b>       | <b>JUMLAH</b> |
|--------------|---------------------------------|---------------|
| 1            | Arsiparis Tingkat Keahlian      | 8             |
| 2            | Arsiparis Tingkat Keterampilan  | 9             |
| 3            | Pustakawan Tingkat Ahli         | 5             |
| 4            | Pustakawan Tingkat keterampilan | 6             |
| <b>Total</b> |                                 | <b>28</b>     |

*Sumber Data : Subag umum dan Kepegawaian*

#### 2.4. Sarana dan Prasarana

Tersedianya 2 (dua) lokasi gedung Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat berlokasi di Jalan Pramuka V No.2 Khatib Sulaiman dan satu lokasi gedung layanan Perpustakaan Umum Provinsi Sumatera Barat di Jalan Diponegoro Nomor 4, Padang telah diresmikan pada Tanggal 30 Oktober Tahun 2014.

**TABEL 2.4**  
**TABEL ASSET TANAH**  
**BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

|   | Jenis Asset                                                                          | Luas Bangunan        | Kondisi                         | Konstruksi Bangunan<br>Status Tanah |           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah ( Gedung Kantor Badan Perpustakaan dan Kearsipan)   | 6.277 M <sup>2</sup> | Jln Pramuka V<br>No. 2 Padang   | APBD                                | Hak Pakai |
| 2 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah ( Gedung Perpustakaan Umum Provinsi Sumatera Barat) | 2.374 M <sup>2</sup> | Jln. Diponegoro<br>No. 4 Padang | APBD                                | Hak Pakai |

*Sumber Data : Subag umum dan Kepegawaian*

**TABEL 2.5**  
**TABEL ASSET BANGUNAN**  
**BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

|   | Jenis Asset                                                                          | Luas Tanah           | Alamat                          | Asal –<br>usul | Status Tanah |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah ( Gedung Kantor Badan Perpustakaan dan Kearsipan)   | 6.277 M <sup>2</sup> | Jln Pramuka V<br>No. 2 Padang   | APBD           | Hak Pakai    |
| 2 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah ( Gedung Perpustakaan Umum Provinsi Sumatera Barat) | 2.374 M <sup>2</sup> | Jln. Diponegoro<br>No. 4 Padang | APBD           | Hak Pakai    |

*Sumber Data : Subag umum dan Kepegawaian*

**TABEL 2.6**  
**TABEL ASSET KENDARAAN**  
**BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

|           | Jenis Asset                       | Jumlah         | Asal – Usul | Tahun Pembelian |
|-----------|-----------------------------------|----------------|-------------|-----------------|
| <b>I</b>  | <b>Kendaraan Roda 4 ( Empat )</b> | <b>11 Unit</b> |             |                 |
| 1         | Minibus (Mitsubishi /L.300)       | 1              | APBN        | 1999            |
| 2         | Minibus (Toyota)                  | 1              | APBD        | 2004            |
| 3         | Minibus (Kijang Inova)            | 1              | APBD        | 2011            |
| 4         | Mobil Rescue ( Ford / Ranger )    | 1              | APBN        | 2011            |
| 5         | Minibus Puskel ( Truk)            | 1              | APBN        | 1986            |
| 6         | Minibus Puskel ( Toyota)          | 1              | APBN        | 2003            |
| 7         | Minibus Puskel ( Toyota)          | 1              | APBN        | 2003            |
| 8         | Minibus Puskel ( Toyota)          | 1              | APBN        | 2009            |
| 9         | Minibus Puskel ( Toyota)          | 1              | APBD        | 2009            |
| 10        | Minibus Puskel ( Toyota)          | 1              | APBD        | 2009            |
| 11        | Truk Sadar Arsip (Isuzu)          | 1              | APBN        | 2010            |
| <b>II</b> | <b>Kendaraan Roda 2 ( dua )</b>   | <b>4 Unit</b>  |             |                 |
| 1         | Sepeda Motor ( GL. Max )          | 1              | APBN        | 1996            |
| 2         | Sepeda Motor ( GL. Pro )          | 1              | APBN        | 1997            |
| 3         | Sepeda Motor ( Suzuki )           | 1              | APBN        | 1999            |
| 4         | Sepeda Motor ( Honda Win )        | 1              | APBN        | 1999            |

*Sumber Data : Subag umum dan Kepegawaian*

**TABEL 2.7**  
**TABEL JENIS DAN JUMLAH FASILITAS / SARANA INFORMASI**  
**PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

| No | Fasilitas/Prasarana | Jumlah | Ket |
|----|---------------------|--------|-----|
| 1  | Papan Pengumuman    | 2      |     |
| 2  | Kotak Pengaduan     | 2      |     |
| 3  | Jenis Bahan Promosi | 3      |     |
| 4  | Mobil Keliling      | 5      |     |
| 5  | Mobil Operasional   | 3      |     |
| 6  | Mobil Rescue        | 1      |     |



|    |                         |   |  |
|----|-------------------------|---|--|
| 7  | Mobil Sadar Arsip       | 1 |  |
| 8  | Website                 | 3 |  |
| 9  | E-mail                  | 1 |  |
| 10 | Call Center             | - |  |
| 11 | Media Center            | - |  |
| 12 | Majalah                 |   |  |
| 13 | Buku Data dan Informasi |   |  |
| 14 | Booklet Informasi       |   |  |

Sumber Data : Subag umum dan Kepegawaian

## 2.5. Peraturan Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan.

Kewenangan Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan sesuai dengan lampiran Undang Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah dengan pembagian kewenangan berikut ini :

| NO | Sub Urusan                                   | Pemerintah Pusat                                                                                                                                                                              | Daerah Provinsi                                                                                                                        | Daerah Kabupaten Kota                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                            | 3                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                       |
| 1  | Pembinaan Perpustakaan                       | a. Penetapan standar dan akreditasi perpustakaan<br><br>b. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Nasional<br>c. Pembudayaan gemar membaca tingkat nasional                                         | a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah / Provinsi<br><br>b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat daerah Provinsi                      | a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota<br><br>b. Pembudayaan Gemar Membaca tingkat daerah Kab/ Kota                                |
| 2  | Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | a. Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Nasional<br>b. Penerbitan Katalog Induk Nasional dan Bibliografi Nasional<br>c. Pelestarian Naskah Kuno dan Penegembalian Naskah Kuno dari | a. Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi<br><br>b. Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi | a. Pelestarian Naskah Kuno Milik daerah Kab/ Kota<br><br>b. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan Oleh Pemerintah daerah Kab/ Kota |

|   |                                                                             |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |                                                                             | luar Negeri<br>d. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang berasal dari Luar negeri dan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah pusat | Daerah<br>c. Pelestarian Naskah Kuno Milik daerah Provinsi<br>d. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi |   |
| 3 | Sertifikasi Pustakawan dan Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan | Penyelenggaraan Sertifikasi Pustakawan dan Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan                                                                         | -                                                                                                                                                           | - |

Selanjutnya Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan sesuai dengan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 dapat dilihat dengan Tabel berikut ini :

| No | Sub Urusan        | Pemerintah Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Daerah Kabupaten / Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. | Pengelolaan Arsip | a. Pengelolaan Arsip Dinamis Lembaga Negara , BUMN dan Perguruan Tinggi Negeri<br>b. Pengelolaan Arsip Statis yang diciptakan oleh Lembaga Negara di Pusat dan Daerah, BUMN, Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Nasional, Organisasi Politik Tingkat Nasional, Tokoh Nasional dan Perusahaan Swasta yang memiliki Arsip bernilai guna sejarah yang cabang usahanya lebih dari | a. Pengelolaan Arsip Dinamis Pemerintah Daerah Provinsi dan BUMD/ Provinsi<br>b. Pengelolaan Arsip Statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, BUMD Provinsi, Perusahaan Swasta yang cabang usahanya lebih dari satu daerah / Kabupaten atau Kota dalam satu daerah provinsi Organisasi Kemasyarakatan | a. Pengelolaan Arsip Dinamis Pemerintah Daerah / Kabupaten atau Kota dan BUMD Kabupaten / Kota<br>b. Pengelolaan Arsip Statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah / Kabupaten atau Kota, BUMD Kabupaten/ Kota, Perusahaan Swasta yang Kantor Usahanya dalam satu daerah Kabupaten atau Kota, Organisasi Kemasyarakatan tingkat |

|   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                     | <p>satu , daerah provinsi.</p> <p>c. Pengelolaan Laporan dan salinan otentik naskah asli, arsip terjaga dari lembaga negara, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi negeri, BUMN, dan BUMD.</p> <p>d. Pengelolaan Informasi Kearsipan dalam SIKN melalui JIKN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Tingkat daerah Provinsi, Organisasi politik tingkat daerah provinsi, tokoh masyarakat tingkat daerah provinsi</p> <p>c. Pengelolaan Simpul Jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat Provinsi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Daerah Kabupaten atau Kota, Pemerintahan Desa dan Tokoh Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.</p> <p>c. Pengeloaan Simpul Jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat Kabupaten atau Kota.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | <p>a. Persetujuan tertulis Jadwal Retensi Arsip (JRA) Lembaga Negara, Pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan Perguruan tinggi negeri</p> <p>b. Persetujuan tertulis pemusnahan arsip dilingkungan lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/ Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN, Perguruan Tinggi Swasta dan Perusahaan Swasta yang kegiatannya dibiayai dari anggaran negara atau bantuan luar negeri yang memiliki retensi sekurang-kurangnya paling sedikit 10 Tahun</p> <p>c. Perlindungan dan Penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala nasional</p> <p>d. Penyelamatan arsip lembaga negara yang digabung dan/ atau dibubarkan</p> <p>e. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan</p> | <p>a. Pemusnahan arsip dilingkungan pemernitah daerah provinsi yang memiliki retensi di bawah 10 tahun</p> <p>b. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala provinsi</p> <p>c. Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan / atau dibubarkan, dan pemekaran daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>d. Melakukan Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi</p> <p>e. Melakukan Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip</p> | <p>a. Pemusnahan arsip lingkungan pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun</p> <p>b. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota</p> <p>c. Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang di gabung dan/atau di bubarkan,serta pemekaran kecamatan dan Desa / Kelurahan</p> <p>d. Melakukan Autentikasi arsip statis dan arsip alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten / Kota</p> <p>e. Melakukan Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenagan daerah / Kabupaten / Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip .</p> |

|   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |  |
|---|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                            | nasional<br>f. Melakukan Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar Pencarian Arsip                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |  |
| 3 | Akreditasi dan Sertifikasi | a. Akreditasi kearsipan terhadap penyelenggaraan kearsipan pada lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi, BUMN dan BUMD .<br>b. Akreditasi terhadap lembaga penyelenggara jasa kearsipan, pendidikan kearsipan, dan diklat kearsipan<br>c. Sertifikasi arsiparis yang mengikuti uji kompetensi<br>d. Penetapan tunjangan profesi arsiparis |                                                                                                                   |  |
| 4 | Formasi Arsiparis          | Penetapan hasil analisis kebutuhan arsiparis nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |  |
| 5 | Perizinan                  | Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di ANRI                                                                                                                                                                                                                                                                           | Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang tersimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota |  |

Sumber : Lampiran Undang –Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dimana pada pasal 8 dinyatakan bahwa : Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing

- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah wilayahnya.

Dalam penyelenggaraan perpustakaan telah ditetapkan regulasi yaitu Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 tentang Setrah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam .

Untuk penyelenggaraan Kearsipan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, dan disesuaikan dengan Undang-Undang yang baru Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pada Bab III Penyelenggaraan Kearsipan, Pasal 6 antara lain menyatakan bahwa Penyelenggaraan kearsipan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah provinsi dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan provinsi.

Dalam penyelenggaran kearsipan di Provinsi Sumatera Barat telah diterbitkan berbagai peraturan yang menyangkut masalah kearsipan antara lain Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini dimaksudkan agar penyelenggaraan kearsipan bisa berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan kebutuhan informasi kearsipan baik dari aparat, ilmuwan, instansi swasta serta masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Peraturan ini secara teknis diimplementasikan melalui :

- Peraturan Gubernur Sumatera barat Nomor 124 Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 114 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Peralatan Kearsipan Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Peralatan Arsip Media Baru di lingkungan Provinsi Sumatera Barat

## **2.6. Kinerja Pelayanan Badan perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 -2015**

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, perlu dilakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Demikian pula halnya dengan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat, untuk mengukur tentang sejauhmana keberhasilan rencana strategis Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015, diperlukan adanya evaluasi kinerja. **Evaluasi kinerja** mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat sebelumnya, pada dasarnya telah dilaksanakan dan berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

### **2.6.1. Capaian Kinerja Berdasarkan LAKIP Badan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2015**

Adapun capaian Kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Sasaran yaitu :

#### **1. Sasaran Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca**

Urusan Perpustakaan merupakan salah satu urusan yang memiliki kedudukan signifikan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan Undang –Undang No 43 Tahun 2007 BAB XII Pasal 50 Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakansarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses Tentang Pembudayaan point 4 menjadi payung tentang Perpustakaan dimana pengembangan Perpustakaan di Sumatera Barat merupakan wadah pembelajaran sepanjang hayat.

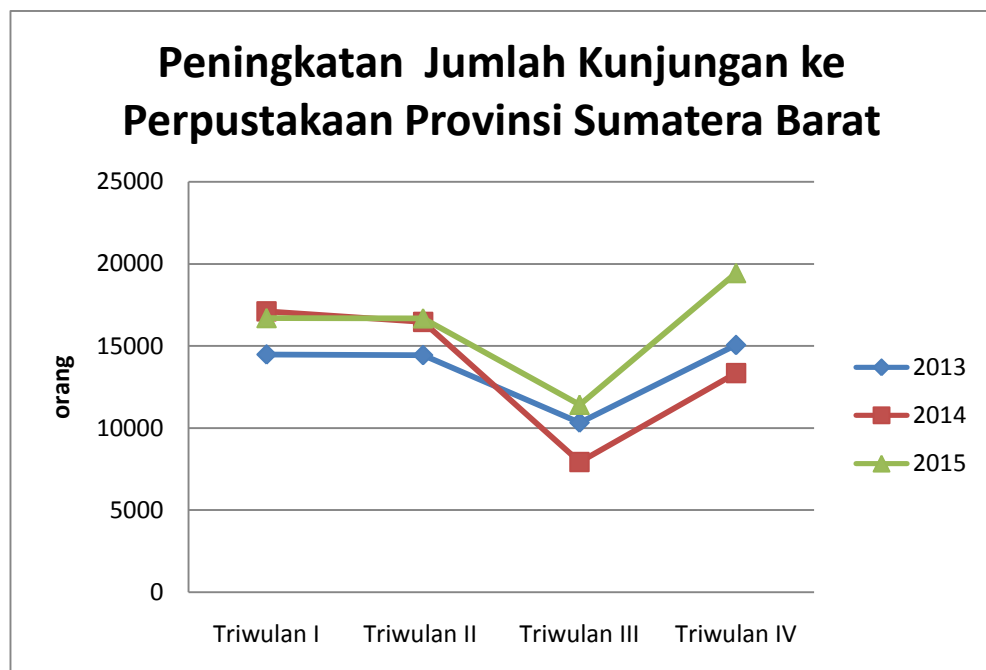
**TABEL 2.8**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca Urusan Perpustakaan**

| No | Indikator                               | Capaian 2014 | Target 2015     |                    |               | Target Renstra<br>(orang) | Capaian s.d. 2015 terhadap 2015 (%) |
|----|-----------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------|
|    |                                         |              | Target (orang ) | Realisasi (orang ) | Realisasi (%) |                           |                                     |
| 1. | -Kenaikan Jumlah Kunjungan Perpustakaan | - 510 orang  | 500             | 9.401              | 1.880         | 500                       | 100                                 |
|    | - Kenaikan Jumlah Anggota               | -112 orang   | 100             | 603                | 603           | 100                       | 100                                 |

*(Sumber Data: LAKIP Badan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2015)*

**Kenaikan jumlah Kunjungan Pertriwulan :**

**Gambar 2.1**

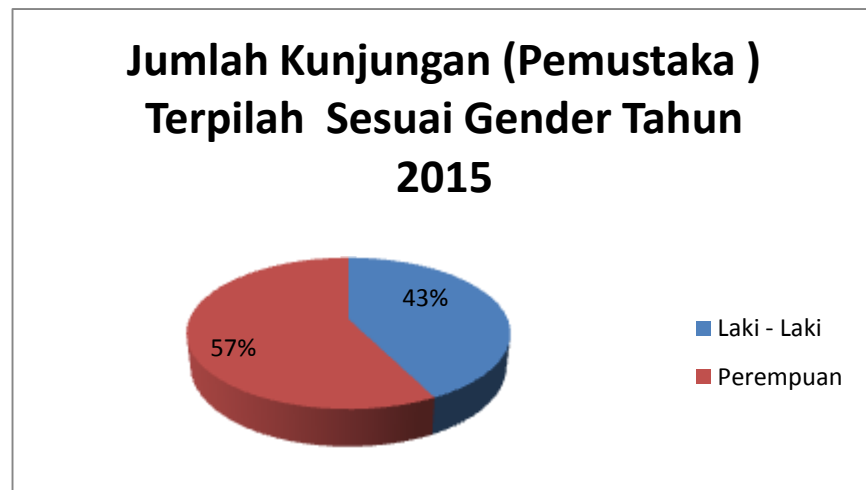


*(Sumber Data: LAKIP Badan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2015)*

Sesuai dengan diagram (Chart) di atas dapat dilihat kenaikan jumlah kunjungan pada tahun 2015 di triwulan IV mengalami kenaikan cukup signifikan hal ini karena Badan Perpustakaan dan Kearsipan mendapatkan penambahan anggaran yang diakomodir untuk

peningkatan sarana prasarana serta meningkatnya aktivitas masyarakat di Perpustakaan Umum Provinsi Sumatera Barat, seperti kunjungan grouping dari sekolah –sekolah, kunjungan dari pustakawan seluruh Indonesia yang juga menghadiri Kongres Nasional IPI tanggal 6 -9 Oktober 2016, adanya bazar buku, launching buku dan mendongeng secara berkala yang dilaksanakan bekerjasama dengan komunitas dan organisasi perpustakaan seperti Dewan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, PD –IPI Sumatera Barat, Komunitas Kampung Dongeng Provinsi Sumatera Barat, Penulis Kretif Anak, Komunitas Fotografi, Komunitas Seribu Guru dan berbagai komunitas lainnya. secara keseluruhan dapat disimpulkan pada tahun 2015 ini terjadi peningkatan jumlah kunjungan sejumlah **1.880** orang dari tahun 2014.

**Gambar 2.2**



(Sumber Data: LAKIP Badan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2015 )

Sesuai dengan diagram diatas dapat dilihat kunjungan pemustaka perempuan lebih banyak dari kunjungan pemustaka laki dengan total kunjungan di tahun 2015 sebanyak 64.220 orang, 27.332 Orang pengunjung/ 43 % (pemustaka ) Laki- laki dan 36.888 orang pengunjung/ 57 % (Pemustaka ) perempuan hal ini menggambarkan bahwa perempuan sumatera barat memiliki kegemaran membaca di perpustakaan provinsi dibandingkan dengan laki –laki .

Analisis capaian kinerja jumlah pada indikator kinerja Peningkatan jumlah kunjungan ke perpustakaan dengan target peningkatan 500 orang selama 1 tahun, data diperoleh dari jumlah kunjungan pada Perpustakaan Umum Provinsi, Peningkatan jumlah kunjungan sebanyak 9.401. orang, di atas dari target yang ditetapkan menggambarkan bahwa dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik dan banyaknya aktivitas masyarakat setiap hari di Perpustakaan dapat meningkatkan jumlah pengunjung ( pemustaka ) pada Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat .



Peningkatan kualitas layanan pada Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat saat ini masih menjadi prioritas pemerintah provinsi, dengan penambahan anggaran tahun 2015 sebesar **Rp. 1.323.171.500,-** yang digunakan untuk melengkapi fasilitas, sarana dan prasarana dimana Perpustakaan akan menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi masyarakat menjadi salah satu destinasi wisata edukasi ( wahana rekreasi bagi pembelajar sepanjang hayat ).

Jumlah Anggota Baru pada perpustakaan Umum Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2015 adalah sebanyak 1.589 orang sedangkan di tahun 2014 jumlah anggota baru adalah sebanyak 986 orang , maka dapat diketahui bahwa jumlah anggota baru pada layanan perpustakaan umum Provinsi Sumatera Barat meningkat sebanyak 603 orang melebihi dari target yang ditetapkan . Peningkatan ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan budaya gemar membaca di Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Program dan kegiatan yang dilakukan guna pencapaian kinerja ini adalah sebagai berikut :

**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dimana telah dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 530.883.900,-**

- 1.Penyediaan Bantuan Pengembangan Layanan Umum dan Layanan Sabtu-Minggu
- 2.Penyediaan Pengembangan Layanan Ekstensi Pustaka Keliling
- 3.Penilaian Pemustaka Terbaik
- 4.Penilaian Pos Layanan Perpustakaan Keliling Se-Sumatera Barat

Pada Tahun 2015 Badan Perpustakaan dan Kearsipan mengadakan Road Show Perpustakaan keliling pada 6 ( enam ) Kabupaten / Kota antara lain Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Dhamasraya .

**Permasalahan:**

1. Dalam implementasi program dan kegiatan terutama yang berasal dari Dana APBD dihadapkan pada persoalan keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam hal ini latar belakang pendidikan dan kompetensi PNS penyelenggara dalam hal ini dalam memberikan pelayanan publik setiap hari nya dan layanan pada hari libur dan sabtu minggu, Motivasi dan Moralitas PNS dalam melakukan pelayanan sepenuh hati dan quick responsive masih rendah.
2. Kurangnya kajian dan analisa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari keterlibatan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan budaya baca

ataupun kajian dan analisa kebutuhan terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk pencapaian sasaran.

3. Jumlah SDM di layanan umum sebanyak 8 orang sementara standar kebutuhan SDM dilayanan adalah sebanyak 24 orang sehingga masih dibutuhkan 16 orang tenaga yang berlatar belakang perpustakaan, dari 8 orang pada bidang layanan yang memiliki pendidikan hanya 2 orang (Pejabat eselon III dan IV yang membidangi layanan).

**Solusi:**

1. Melakukan perekrutan PNS dan melakukan mutasi dan refresh bagi PNS yang sudah lama agar dirotasi dan mutasi ke tempat yang baru sehingga masing-masing PNS bisa mengembangkan kretivitasnyaditempat yang baru dan bertukar pengalaman
2. Disusunnya analisa dan kajian tentang kebutuhan masyarakat terkait pelayanan publik baik dari segi peralatan, perlengkapan, SDM pelayanan, jaringan, dengan memperhatikan kenyamanan masyarakat dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

**2. Sasaran Bertambah dan terpeliharanya bahan pustaka dalam bentuk koleksi karya tulis , karya cetak dan atau karya rekam**

yang dimaksud dengan sasaran ini adalah bertambahnya dan terpeliharanya bahan pustaka dalam berbagai bentuk pada Perpustakaan Provinsi sesuai dengan pasal 12 undang –undang no 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan berbunyi : 1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. (2) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Tabel 2.9

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Bertambah dan terpeliharanya bahan pustaka dalam bentuk koleksi karya tulis , karya cetak dan atau karya rekam**

| No | Indikator                                           | Capaian 2014     | 2015             |                                |             | Target Renstra 2010-2015 | Capaian s.d. 2015 terhadap 2015 (%) |
|----|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|
|    |                                                     |                  | Target           | Realisasi                      | Realisasi % |                          |                                     |
| 1. | Jumlah Penambahan Koleksi Bahan Pustaka             | 10.400 eksemplar | 10.000 eksemplar | 10.246 Eksemplar (1.730 judul) | 102 %       | 50.000 eksemplar         | 61.858 eksemplar                    |
| 2  | Persentase Buku/ Koleksi pustaka dalam kondisi baik | 80 %             | 90%              | 95%                            | 105%        | 100%                     | 100%                                |

(Sumber Data: LAKIP Badan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2015 )

Terkait dengan indikator Persentase Buku/ Koleksi Pustaka dalam Kondisi baik sesuai dengan hasil pendataan pada kegiatan Stock Opname adalah sebanyak 90.019 Eksemplar , yaitu 95 % dari jumlah buku yang ada dalam kondisi baik, dan 5 % buku rusak berat dan ringan yaitu sebanyak 2.500 eksemplar yang telah diperbaiki .

Dari tahun ketahun dilakukan pengadaan dan penambahan koleksi dengan memperhatikan kebutuhan dan buku – buku yang menarik serta dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Dalam tahun 2015, kegiatan yang dilakukan untuk sasaran strategis ini terdiri dari :

1. Pengadaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
2. Pemeliharaan buku-buku dan pelestarian bahan perpustakaan
3. Penerbitan literatur sekunder
4. Penyusunan indeks berkala
5. Sosialisasi Perda Provinsi Sumatera Barat No.9 tahun 2014 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
6. Hunting Karya Cetak Karya Rekam

**Permasalahan:**

1. Dalam penyelenggaraan kegiatan yang mendukung tentang pelayanan Perpustakaan Keliling, dari koleksi yang dilayankan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah terpencil dan tidak terjangkau,

**Solusi:**

1. Dilakukan survey kebutuhan pemustaka dan hasil survey menjadi prioritas dalam pengadaan.
2. Pengefektifkan jam layanan efektif untuk layanan hari sabtu
3. Menambah pemandu dengan cara rekrutmen, mutasi atau rotasi.
4. Menambah tenaga outsourcing yang memiliki pendidikan ilmu perpustakaan dan teknologi informasi

**3. Sasaran Mewujudkan Perpustakaan Digital sesuai dengan Pengembangan**

perpustakaan, sebagaimana maksud di atas dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga memudahkan aksesibilitas informasi dan penelusuran secara digital. Capaian kinerja berikut ini, merupakan hasil dari berbagai kegiatan yang dilakukan.

**Tabel 2.10****Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Sasaran Mewujudkan Perpustakaan Digital**

| No | Indikator                                                                     | Capaian 2014 | Target 2013 |           |             | Target Renstra | Capaian s.d. 2014 terhadap 2015 (%) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|----------------|-------------------------------------|
|    |                                                                               |              | Target      | Realisasi | Realisasi % |                |                                     |
| 1. | Persentase Koleksi Perpustakaan yang dapat dicari melalui penelusuran digital | 80%          | 80%         | 80%       | 100%        | 80%            | 80%                                 |

(Sumber Data: LAKIP Badan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2015)

Dalam tahun 2015, program yang dilakukan untuk sasaran strategis ini terdiri dari Kegiatan yaitu :

- a) Otomasi Perpustakaan
- b) Pengembangan Perpustakaan Digital
- c) Alih Media Naskah Kuno

## d) Pengembangan Informasi Budaya Local / Center of Excellent

Pada Tahun 2015 Masyarakat telah dapat mengakses / penelusuran buku secara digital sebanyak 100.000 Eksemplar selain dari buku pengadaan sejumlah 10.246 Eksemplar yang telah sesuai dengan ditargetkan yaitu 100 % tercapai, ditambah juga melakukan pengntryan buku bantuan diperoleh dari berbagai sumber lainnya peningkatan database mencapai 100 % Pada Tahun 2015 Pentryan dilakukan sebanyak 22.000 eksemplar dengan rincian 10.246 eksemplar dari buku APBD (yang menjadi target ) dan sisanya buku dari sumber lainnya. Pada APBD Perubahan Tahun 2015 Badan Perpustakaan dan Kearsipan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 290.000.000, untuk pengembangan Jaringan dan peningkatan kapasitas IT Layanan Perpustakaan sehingga akses layanan internet dan digital lebih cepat sehingga permasalahan jaringan ditahun 2014 dapat teratasi dan menjadi bagian terpenting dalam penganggaran pada APBD Perubahan Tahun 2015.

**4. Sasaran Meningkatnya SKPD Provinsi yang tertib Arsip,**

Capaian kinerja di atas, merupakan hasil dari berbagai kegiatan yang dilakukan .

Dalam tahun 2015,

program yang dilakukan untuk sasaran strategis ini terdiri dari Kegiatan yaitu Penataan dan

Pengelolaan Arsip in Aktif pada SKPD, Pendataan Arsip in Aktif, Pengawasan Pengelolaan Kearsipan pada SKPD Tingkat Provinsi, Lomba Pengelolaan dan Tertib Arsip pada unit kearsipan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Penataan dan Pengelolaan Arsip in Aktif pada unit kearsipan II.

**Tabel 2.11**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya jumlah SKPD Provinsi**  
**yang tertib arsip**

| No | Indikator                                                     | Capaian 2014 | Target 2015 |           |             | Target Renstra | Capaian s.d. 2014 terhadap 2015 (%) |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|----------------|-------------------------------------|
|    |                                                               |              | Target      | Realisasi | Realisasi % |                |                                     |
| 1. | Jumlah SKPD yang telah mengimplementasikan regulasi kearsipan | 2 SKPD       | 2 SKPD      | 2 SKPD    | 100%        | 2              | 50 %                                |

(Sumber Data: LAKIP Badan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2015)

SKPD yang telah mengimplementasikan regulasi kearsipan sesuai dengan hasil evaluasi dan monitoring, penilaian berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 0.45.7/62.a/ BPA-2015 pada Lomba Unit Kearsipan Provinsi se Sumatera Barat pada Tahun 2015 yang telah dilaksanakan pada 48 SKPD, diperoleh data Pemenang Lomba yaitu :

1. Terbaik I : Rumah Sakit Jiwa HB.Saanin
2. Terbaik II : Kantor Penghubung Sumatera Barat
3. Terbaik III : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumatera Barat

SKPD terbaik dari hasil evaluasi dan monitoring di lapangan dari 49 yang dibina SKPD yang telah menerapkan regulasi Kearsipan terdiri dari **2 SKPD yaitu : Rumah Sakit Jiwa HB. Saanin dan Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat.**

#### 5. Sasaran Meningkatnya kualitas SDM Penyelenggara Perpustakaan dan Kearsipan

Capaian kinerja di atas, merupakan hasil dari berbagai kegiatan yang dilakukan. Dalam tahun 2015, program yang dilakukan untuk sasaran strategis ini terdiri dari Kegiatan yaitu :

- Bimbingan Teknis Perpustakaan Sekolah
- Pembinaan Perpustakaan Tingkat Provinsi ,
- Penilaian Kinerja Pustakwan
- Bimtek Kearsipan Kab/ Kota se Sumatera Barat
- Bimbingan Teknis Kearsipan Tingkat Provinsi
- Peningkatan Kualitas dan Wawasan Fungsional Arsiparis
- Pembinaan dan Penilaian Kinerja Arsiparis

**Tabel 2.12**

#### **Rencana dan Realisasi Capaian Meningkatnya kualitas SDM Penyelenggara Perpustakaan dan Kearsipan**

| No | Indikator                                        | Capaian 2014 | Target 2015 |           |             | Target Renstra | Capaian s.d. 2015 terhadap 2015 (%) |
|----|--------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|----------------|-------------------------------------|
|    |                                                  |              | Target      | Realisasi | Realisasi % |                |                                     |
| 1  | Jumlah SDM Perpustakaan (peserta Bimtek Terbaik) | 10 Orang     | 10 orang    | 10 orang  | 100%        | 10 orang       | 100%                                |

|   |                                                |          |          |          |      |          |     |
|---|------------------------------------------------|----------|----------|----------|------|----------|-----|
| 2 | Jumlah SDM Kearsipan (peserta Bimtek Terbaik ) | 10 Orang | 10 orang | 10 orang | 100% | 10 orang | 50% |
|---|------------------------------------------------|----------|----------|----------|------|----------|-----|

(Sumber Data: LAKIP Badan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2015)

**2.6.2. Evaluasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2010 S.d. 2015 ( Berdasarkan Prosiding Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2010 s.d. 2015 Tanggal 9 Januari 2016)**

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan capaian kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2010 - 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.12**  
**Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2010 – 2015**

| No | Bidang Urusan / Indikator                                          | Satuan    | Tahun   |         |         |         |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |                                                                    |           | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |
| 1. | SKPD yang telah dibina dengan sistem pengelolaan arsip secara baku | SKPD      | 3/ 43   | 5/43    | 11/ 45  | 10/46   | 15/48   | 48      |
| 2. | Jumlah SDM pengelola kearsipan yang dibina                         | Orang     | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      |
| 3. | Pengelola Perpustakaan yang dibina                                 | Orang     | 138     | 145     | 127     | 183     | 213     | 60      |
| 4. | Jumlah Pengunjung Perpustakaan / Thn                               | Orang     | 6.575   | 31.543  | 63.186  | 54.309  | 54.819  | 64.220  |
| 5  | Koleksi / Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah                | Eksemplar | 143.004 | 168.146 | 181.146 | 191.391 | 201.791 | 212.037 |

**a) Capaian Kinerja Program Tahun 2010**

- ✓ Bertambahnya jumlah Arsip statis yang terselamatkan sebanyak 11 books , melebihi target yang ditetapkan 10 books
- ✓ Bertambahnya Jumlah SKPD / Lembaga Kearsipan yang dibina yaitu sebanyak 3 SKPD .

- ✓ Bertambahnya jumlah tenaga pengelola arsip dengan melakukan pembinaan pada 33 orang
- ✓ Bertambahnya jumlah tenaga pengelola perpustakaan dengan melakukan pembinaan pada 40 orang

**b) Capaian Kinerja Program Tahun 2011**

- ✓ Bertambahnya jumlah Arsip statis yang terselamatkan sebanyak 11 books , melebihi target yang ditetapkan 10 books
- ✓ Bertambahnya Jumlah SKPD / Lembaga Kearsipan yaitu sebanyak 15 SKPD ( Bapedalda, DPRD, Badan Diklat, BKD, BPA, Dinas Prasjaltarkim, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan ESDM, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, Kesbang Linmas, dan Kantor Penghubung )
- ✓ Bertambahnya jumlah tenaga pengelola arsip dengan melakukan pembinaan pada 44 orang
- ✓ Bertambahnya jumlah tenaga pengelola perpustakaan dengan melakukan pembinaan pada 60 orang

**c) Capaian Kinerja Program Tahun 2012**

- ✓ Bertambahnya jumlah Arsip statis yang terselamatkan sebanyak 11 books , melebihi target yang ditetapkan 10 books
- ✓ Bertambahnya Jumlah SKPD / Lembaga Kearsipan yaitu sebanyak 15 SKPD (Bapedalda, DPRD, Badan Diklat, BKD, BPA, Dinas Prasjaltarkim, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan ESDM, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, Kesbang Linma, dan Kantor Penghubung)
- ✓ Bertambahnya jumlah tenaga pengelola arsip dengan melakukan pembinaan pada 44 orang
- ✓ Bertambahnya jumlah tenaga pengelola perpustakaan dengan melakukan pembinaan pada 60 orang

**d) Capaian Kinerja Program Tahun 2013**

- ✓ Bertambahnya jumlah Arsip statis yang terselamatkan sebanyak 5 dokumen (Arsip Batas Wilayah ke Kabupaten Solok Selatan, Arsip Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat, Arsip Tokoh Budayawan Taufik Ismail, Arsip Tokoh Mantan Gubernur Sumatera Barat Harun Zein, Penyerahan Arsip dari Badan Pemeriksa Keuangan RI).
- ✓ Bertambahnya Jumlah SKPD / Lembaga Kearsipan yaitu sebanyak 15 SKPD dan UPTD terkait.



- ✓ Bertambahnya jumlah tenaga pengelola arsip dan pustaka dengan melakukan pembinaan pada 283 orang (pada kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Arsip Dinamis bagi aparatur SKPD, Bimbingan Teknis Manajemen Dinamis bagi aparatur UPTD, Pembinaan Perpustakaan nagari dan kelurahan, Pembinaan Perpustakaan Rumah Ibadah, Bimbingan Teknis Tenaga Penyuluh Minat Baca, Bimbingan Teknis Pengembangan Profesi Pustakawan).

**e) Capaian Kinerja Program Tahun 2014**

Jumlah SKPD yang telah dibina sebanyak 15 SKPD yaitu DinasKoperindag Prov. Sumbar, Kantor Satpol PP Prov. Sumbar, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar, BPBD Prov. Sumbar, DPRD Prov. Sumbar, DinasPemuda dan Olah Raga Prov. Sumbar, Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Sumbar, Badan Ketahanan Pangan Prov. Sumbar, RS HB. Saanin Prov. Sumbar, RSUD Solok, RSUD Ahmad Muctar, RSUD Pariaman, Badan Kepegawaian DaerahProv. Sumbar .

SKPD terbaik dari hasil evaluasi dan monitoring di lapangan dari 15 yang dibina SKPD yang telah menerapkan regulasi Kearsipan terdiri dari 2 SKPD yaitu: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

**f) Capaian Kinerja Program Tahun 2015**

SKPD yang telah mengimplementasikan regulasi kearsipan sesuai dengan hasil evaluasi dan monitoring, penilaian berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 0.45.7/62.a/ BPA-2015 pada Lomba Unit Kearsipan Provinsi se Sumatera Barat pada Tahun 2015 yang telah dilaksanakan pada 48 SKPD, diperoleh data Pemenang Lomba yaitu :

Terbaik I : Rumah Sakit Jiwa HB.Saanin

Terbaik II : Kantor Penghubung Sumatera Barat

Terbaik III : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumatera Barat

**2.6.3. Alokasi Anggaran Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat**

Pendanaan Program dan Kegiatan Badan Perpustakaan dan kearsipan ditampung pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanj Daerah) Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat, setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kinerja badan perpustakaan dan kearsipan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.13**  
**APBD Tahun 2010 – 2016**

| Tahun | Anggaran            | Belanja Tidak Langsung | Belanja Langsung   | Belanja Langsung Pokok | Urusan Kearsipan   | Urusan Perpustakaan | Pendapatan      |
|-------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 2010  | Rp.12.686.753.783,- | Rp. 8.071.080.093,-    | Rp.4.615.673.290,- | Rp.1.203.801.100,-     | Rp.1.284.859.250,- | Rp.2.127.012.940,-  | Rp.10.000.000,- |
| 2011  | Rp.15.462.276.319,- | Rp.7.407.025.444,-     | Rp.8.055.250.875,- | Rp.2.649.794.900,-     | Rp.3.028.700.575,- | Rp.2.376.755.400,-  | Rp.2.500.000,-  |
| 2012  | Rp.16.530.637.442,- | Rp.8.953.523.542,-     | Rp.7.577.113.900,- | Rp.2.537.211.850,-     | Rp.2.041.901.150,- | Rp.2.998.000.000,-  | Rp.2.500.000,-  |
| 2013  | Rp.16.751.672.125,- | Rp.9.585.746.200,-     | Rp.7.165.925.925,- | Rp.3.104.750.025,-     | Rp.1.476.017.350,- | Rp.2.585.158.550,-  | Rp.2.500.000,-  |
| 2014  | Rp.17.504.604.290,- | Rp.9.858.212.011,-     | Rp.7.646.392.279,- | Rp.3.509.132.929,-     | Rp.1.844.538.150,- | Rp.2.292.721.200,-  | Rp.3.000.000,-  |
| 2015  | Rp.20.320.160.501,- | Rp.10.887.491.476,-    | Rp.9.432.669.025   | Rp.5.174.495.950,-     | Rp.1.516.304.350,- | Rp.2.741.868.725,-  | Rp.3.500.000,-  |

Sumber Data : Prosiding Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2010 – 2015

Badan Perpustakaan dan Kearsipan dalam penyelenggaraan pembangunan Tahun 2010 s.d. 2016 juga mendapatkan Dana Dekonsentrasi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional) dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

| Perpustakaan Nasional RI |                                                                                                      |                    |                 |                    |                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tahun                    | Program                                                                                              | Anggaran           | Realisasi Fisik | Realisasi Keuangan | Bantuan Buku dan Bimtek Perpustakaan pada Desa/ Kelurahan |
| 2010                     | Program Pengembangan Perpustakaan Pengadaan Buku dan Bimtek pengelola Perpustakaan pada Nagari/ desa | Rp.5.137.150.000,- | 100%            | 92,44%             | 78 Desa/ Kel                                              |
| 2011                     | Program Pengembangan Perpustakaan Pengadaan Buku dan Bimtek pengelola Perpustakaan pada Nagari/ desa | Rp.4.425.250.000,- | 100%            | 92,36%             | 80 Desa/ Kel                                              |
| 2012                     | Program Pengembangan Perpustakaan Pengadaan Buku dan Bimtek pengelola Perpustakaan pada Nagari/ desa | Rp.3.445.377.000,- | 100%            | 98,40%             | 82 Desa/ Kel                                              |

|      |                                                                                                            |                                                     |      |        |                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|--------|----------------|
| 2013 | Program Pengembangan Perpustakaan<br>Pengadaan Buku dan Bimtek pengelola Perpustakaan<br>pada Nagari/ desa | Rp.4.222.400.000,-<br>Rp. 5.000.000.000<br>(APBN-P) | 100% | 92,48% | 250 Desa / Kel |
| 2014 | Program Pengembangan Perpustakaan<br>Lomba Perpustakaan                                                    | Rp.397.957.000,-                                    | 100% | 98,22% | -              |
| 2015 | Program Pengembangan Perpustakaan<br>Lomba Perpustakaan                                                    | Rp. 417.855.000 ,-                                  | 100% | 92,91% | -              |

Sumber Data : Prosiding Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2010 – 2015

| Dana Dekonsentrasi Arsip Nasional RI |                                                                                                |                  |                 |                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Tahun                                | Program                                                                                        | Anggaran         | Realisasi Fisik | Realisasi Keuangan |
| 2010                                 | Penyelenggaraan Kearsipan Nasional Bimtek Kearsipan Nagari dan Kelurahan<br>(30 Nagari/Desa)   | Rp.143.351.000,- | 100%            | 97,00%             |
| 2011                                 | Penyelenggaraan Kearsipan Nasional Bimtek Kearsipan Nagari dan Kelurahan<br>(30 Nagari/ Desa ) | Rp.143.351.000,- | 100%            | 97,49%             |
| 2012                                 | Penyelenggaraan Kearsipan Nasional Bimtek Kearsipan Nagari dan Kelurahan<br>(30 Nagari/ Desa ) | Rp.143.351.000,- | 100%            | 98,88%             |
| 2013                                 | Penyelenggaraan Kearsipan Nasional Bimtek Kearsipan Nagari dan Kelurahan<br>(30 Nagari/ Desa ) | Rp.163.351.000,- | 100%            | 96,50%             |
| 2014                                 | Penyelenggaraan Kearsipan Nasional Bimtek Kearsipan Nagari dan Kelurahan<br>(30 Nagari/ Desa ) | Rp.184.005.000,- | 100%            | 97,13%             |
| 2015                                 | Penyelenggaraan Kearsipan Nasional Bimtek Kearsipan Nagari dan Kelurahan<br>(30 Nagari/ Desa ) | Rp.183.012.000,- | 100%            | 99,42%             |

Sumber Data : Prosiding Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2010 – 2015

**Tabel T.IV.C.2**

**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi  
Sumatera Barat**

| NO  | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD                     | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- |      |        |       |       | Realisasi Capaian Tahun ke- |      |        |       |       | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------------------------|------|--------|-------|-------|-----------------------------|------|--------|-------|-------|------------------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                    |            |            |                          | 1                             | 2    | 3      | 4     | 5     | 1                           | 2    | 3      | 4     | 5     | 1                            | 2    | 3    | 4    | 5    |
| (1) | (2)                                                                | (3)        | (4)        | (5)                      | (6)                           | (7)  | (8)    | (9)   | (10)  | (11)                        | (12) | (13)   | (14)  | (15)  | (16)                         | (17) | (18) | (19) | (20) |
| I   | KEARSIPAN                                                          |            |            |                          |                               |      |        |       |       |                             |      |        |       |       |                              |      |      |      |      |
|     | SKPD yang telah dibina dengan sistem pengelolaan arsip secara baku | -          | -          | -                        | 3/ 43                         | 5/43 | 11/ 45 | 10/46 | 15/48 | 3/ 43                       | 5/43 | 11/ 45 | 10/46 | 15/48 | 100%                         | 100% | 100% | 100% | 100% |
|     | Jumlah SDM pengelola kearsipan yang dibina                         | -          | -          | -                        | 30                            | 30   | 30     | 30    | 30    | 30                          | 30   | 30     | 30    | 30    | 100%                         | 100% | 100% | 100% | 100% |
|     | Pengelola Perpustakaan yang dibina                                 |            |            |                          | 138                           | 145  | 127    | 183   | 213   | 60                          | 145  | 127    | 183   | 213   | 60                           |      |      |      |      |

| NO  | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD      | Target SPM | Target IKK         | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- |        |        |         |         | Realisasi Capaian Tahun ke- |         |         |         |         | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|---------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|------|------|------|------|
|     |                                                     |            |                    |                          | 1                             | 2      | 3      | 4       | 5       | 1                           | 2       | 3       | 4       | 5       | 1                            | 2    | 3    | 4    | 5    |
| (1) | (2)                                                 | (3)        | (4)                | (5)                      | (6)                           | (7)    | (8)    | (9)     | (10)    | (11)                        | (12)    | (13)    | (14)    | (15)    | (16)                         | (17) | (18) | (19) | (20) |
| II  | PERPUSTAKAAN                                        |            |                    |                          |                               |        |        |         |         |                             |         |         |         |         |                              |      |      |      |      |
|     | Koleksi / Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah |            | 10.000 Eks / Tahun | -                        | 10.000                        | 10.000 | 10.000 | 10.000  | 10.000  | 143.004                     | 168.146 | 181.146 | 191.391 | 201.791 | *)                           | *)   | *)   | -    | -    |
|     | Jumlah Pengunjung Perpustakaan / Thn                | -          | 50.000 org/tahun   | -                        | *)                            | *)     | *)     | 216.000 | 216.000 | 6.575                       | 31.543  | 63.186  | 54.309  | 54.819  | -                            | -    | -    | -    | -    |

## 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN.

### 2.4.1. Peluang dan Tantangan Pengembangan Urusan Perpustakaan.

#### 1) Kebutuhan Akses Informasi dan Literasi cepat ke sumber Ilmu dalam era globalisasi

Paradigma global dalam penyelenggaraan informasi dan Ilmu Pengetahuan memberikan tantangan sekaligus peluang bagi Badan Perpustakaan dan perpustakaan sebagai pusat Informasi edukasi, penelitian, reservasi dan rekreasi secara profesional dan berkelanjutan dan harus berkembang berbasis Teknologi Informasi

#### 2) Kewajiban Menyelenggarakan Manifesto Unesco Perpustakaan.

Kewajiban mengembangkan minat baca, menyediakan Koleksi bacaan, memberikan bahan bacaan yang menjadi topik hangat dimasyarakat, turut meningkatkan ekonomi masyarakat melalui jasa perpustakaan dan melestarikan Budaya setempat (local culture) adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

#### 3) Dukungan pembangunan karakter anak nagari

Perkembangan Budaya Sumatera Barat dengan adanya akses informasi global memberikan dampak pergeseran nilai-nilai dan moralitas anak nagari sehingga perlu peran perpustakaan untuk memberikan informasi karya-karya inspiratif dan kearifan lokal.

#### 4) Kurangnya ruang untuk apresiasi masyarakat

Perpustakaan sebagai Agen perubahan perlu memberikan ruang untuk aktualisasi dan apresiasi masyarakatnya serta memberikan sarana untuk aktivitas akademik seperti diskusi, seminar dan workshop dan kegiatan cultural lainnya.

#### 5) Perpustakaan Sumatera Barat menjadi Center of Excellent

Di negara maju perpustakaan bukan saja memberikan jasa bahan bacaan dan

sumber belajar tetapi juga sebagai pusat informasi kota, informasi penyelenggaraan dan tugas pokok pemerintahan, politik, ekonomi, budaya dan semua informasi publik yang dilayankan oleh Pemerintah maupun swasta sehingga semua aspek kehidupan perkotaan dapat terekam dan tersaji untuk masyarakat yang membutuhkannya maka perlu dikondisikan agar Badan Perpustakaan dan Kearsipan mampu melaksanakan ruang lingkup tugas tersebut.

**6) Perpustakaan Umum Daerah sebagai Sumber Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Daerah.**

Dengan terbitnya Peraturan Daerah No.9 Tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat harus melakukan pengelolaan karya-karya tersebut secara profesional dengan memperhatikan sumber informasi lokal, pusat rujukan karya-karya intelektual daerah.

**7) Media elektronik yang semakin menarik dan atraktif**

Pengelolaan yang profesional dan konsep penyelenggaraan perpustakaan yang jitu dengan layanan yang prima, harus dibangun dengan berbasis pengembangan kualitas SDM dan Teknologi Informasi sehingga mampu memberikan perimbangan layanan pandang dengar yang dilakukan oleh media elektronik lainnya yang jasanya semakin menarik dan atraktif.

**8) Mahalnya penerapan teknologi berbasis TI**

Informasi yang handal membutuhkan sarana teknologi yang memadai, dan membutuhkan biaya yang besar, strategi jitu dengan skala prioritas yang tajam dan efektif memberikan manfaat yang besar bagi penyelenggaraan dan operasionalisasi tugas pokok dan fungsi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat.

**2.4.2. Peluang dan Tantangan Pengembangan Urusan Kearsipan**

- 1) Pekerjaan pemenuhan hak keperdataan rakyat membutuhkan kerja besar yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dengan operasionalisasi berbasis Teknologi Informasi;
- 2) Semua Proses Politik dan Birokrasi yang memungkinkan terjadinya dinamika perubahan struktur kelembagaan dan proses debirokratisasi harus terekam dalam bentuk dokumen sebagai dasar fungsi lembaga kearsipan sebagai simpul kronologis sejarah dan pertanggungjawaban pemerintah daerah;

- 3) Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik, dan Peraturan Pemerintah penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik nomor 82 Tahun 2012  
semakin mengukuhkan peranan/arti penting arsip dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- 4) Ketersediaan arsip yang autentik dan reliable merupakan keharusan dalam akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menuju *Good Governance*;
- 5) Dinamisasi Provinsi dalam segala bentuk peristiwa dan proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi seluruh penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu perekaman secara komprehensif dan pengelolaan yang baik sebagai upaya meningkatkan salah satu tugas yaitu Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat sebagai pusat record dan data sejarah Sumatera Barat ;
- 6) Kasus pengalihan aset Pemerintah Daerah ke pihak non pemda memberikan bukti perlunya penanganan dan pengelolaan arsip aset Pemerintah daerah yang serius dan benar;
- 7) Semakin meningkatnya sadar arsip masyarakat dan jasa kearsipan dalam usaha penyelamatan dan penyimpanan arsip pada instansi pemerintah serta swasta di Sumatera Barat memberikan peluang Pendapatan Daerah melalui Retribusi Kearsipan Daerah;
- 8) Belum semua SKPD mempunyai unit kearsipan yang berfungsi mengelola arsip sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 9) Perlunya pembiayaan urusan kearsipan yang memadai mengingat pentingnya fungsi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat sebagai Lembaga Kearsipan Daerah;
- 10) Jumlah arsiparis dengan beban kerja yang semakin besar menciptakan kesenjangan antara SDM dan beban kerja sehingga terjadi keterbatasan hasil pekerjaan berbanding dengan jumlah pekerjaan, sehingga perlu penciptaan arsiparis/SDM kearsipan yang berkesinambungan.

## BAB III

## ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dari penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas yang dihadapi tentu ada keberhasilan maupun permasalahan yang dihadapi, dengan segala keterbatasan / permasalahan yang ada justru menjadikan motivasi untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik, berikut ini disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel T-IV.C.9**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
**Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat**

| Aspek Kajian                                            | Capaian/Kondisi Saat ini                                                           | Standar yang Digunakan                                         | Faktor yang Mempengaruhi            |                                                 | Permasalahan Pelayanan SKPD                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                    |                                                                | INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)          | EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)              |                                                                                                                      |
| (1)                                                     | (2)                                                                                | (3)                                                            | (4)                                 | (5)                                             | (6)                                                                                                                  |
| Pelayanan publik / Pelayanan prima layanan perpustakaan | Fasilitas dan Prasarana peralatan dan perlengkapan perpustakaan yang belum memadai | Standar dan syarat ruang layanan dari perpustakaan Nasional RI | Anggaran, sdm, sarana dan prasarana | Kebijakan anggaran yang diberikan terhadap SKPD | 1. Rendahnya SDM di Bidang pelayanan<br>2. Terbatasnya sarana dan prasarana<br>3. Terbatasnya anggaran yang tersedia |
| Pelayanan publik / Pelayanan prima layanan kearsipan    | Pelayanan belum optimal, karena ruangan kecil dan belum memenuhi persyaratan       | Standar dan syarat ruang layanan dari Arsip Nasional RI        | Anggaran, sdm, sarana dan prasarana | Kebijakan anggaran yang diberikan terhadap SKPD | 1. Ruangan pelayanan yang kurang representatif<br>2. Terbatasnya sarana dan prasarana<br>3.                          |

| Aspek Kajian                     | Capaian/Kondisi Saat ini                                     | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi                |                                    | Permasalahan Pelayanan SKPD                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                              |                        | INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)              | EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD) |                                                                                                                                |
| (1)                              | (2)                                                          | (3)                    | (4)                                     | (5)                                | (6)                                                                                                                            |
|                                  |                                                              |                        |                                         |                                    | Terbatasnya anggaran yang tersedia                                                                                             |
| Peningkatan budaya gemar membaca | Rendahnya minat baca di perpustakaan                         | Jumlah kunjungan       | Koleksi buku, sdm, sarana dan prasarana | Kebijakan anggaran                 | 1. Ruangan pelayanan yang kurang representatif<br>2. Terbatasnya sarana dan prasarana<br>3. Terbatasnya anggaran yang tersedia |
| Peningkatan budaya sadar arsip   | Rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang arti penting arsip | Jumlah kunjungan       | Khasanah arsip                          | Kebijakan anggaran                 | Ruangan, sarana, anggaran, dsb                                                                                                 |

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020

Dari penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk mendukung dan menterjemahkannya ke dalam beberapa program dan kegiatan, namun dalam pelaksanaannya tentu ditemui permasalahan serta terdapat pula faktor pendorong dan faktor penghambatnya antara lain, seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini:



**Tabel T-IV.C.11**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**  
**berdasarkan RPJMD Tahap 3 (tiga) Tahun 2016 – 2021**

| Visi: "Terwujudnya Masyarakat Yang Madani dan Sejahtera" |                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                       | Misi dan Program                                                                                                                | Permasalahan Pelayanan SKPD                                                           | Faktor                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |
|                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                       | Penghambat                                                                                                                                                   | Pendorong                                                                                                                         |
| (1)                                                      | (2)                                                                                                                             | (3)                                                                                   | (4)                                                                                                                                                          | (5)                                                                                                                               |
| 1                                                        | Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional                                                                | Terbatasnya anggaran, Terbatasnya sarana dan prasarana, Terbatasnya sdm yang terampil | Kurangnya inovasi untuk melayani lebih baik, kurangnya dukungan dari SKPD terkait baik di Prop. Maupun Kab / Kota terhadap bidang perpustakaan dan kearsipan | Jumlah Pegawai, peraturan perundangan seperti UU 43/2007 tentang Perpustakaan dan UU 43 /2009 tentang Kearsipan, terbentuknya SOP |
|                                                          | a. Program<br>b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
|                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
| 2                                                        | Peningkatan Kualitas Pendidikan                                                                                                 | Terbatasnya anggaran, Terbatasnya sarana dan prasarana, Terbatasnya sdm yang terampil | Kurangnya inovasi untuk melayani lebih baik, kurangnya dukungan dari SKPD terkait baik di Prop. Maupun Kab / Kota terhadap bidang perpustakaan dan kearsipan | Jumlah Pegawai, peraturan perundangan seperti UU 43/2007 tentang Perpustakaan dan UU 43 /2009 tentang Kearsipan, terbentuknya SOP |
|                                                          | a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan<br>b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan |                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Perpustakaan dan Kearsipan

Penyusunan Renstra Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat berpedoman dan mengacu kepada RPJMD, Visi dan Misi Kepala Daerah dan juga menyelaraskan dengan kebijakan yang disusun oleh Instansi Pembina Pusat yaitu Perpustakaan

Nasional RI dan Arsip Nasional RI, sehingga dalam Renstra ini ada keselarasan dan sinergi antara Program pusat, Provinsi maupun dengan Kabupaten dan Kota.

**I. Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia** ( *Keputusan Kepala Perpustakaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia* )

Visi dan Misi Perpustakaan Nasional RI Tahun 2015 – 2019

**1) Visi :**

” Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui Gemar Membaca dengan Memberayakan Perpustakaan “

Dengan *tagline* : “ **INDONESIA GEMAR MEMBACA 2019** “

**2) Misi :**

- 1) Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir
- 2) Mengembangkan diversifikasi layanan perpustakaan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK )
- 3) Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas
- 4) Mewujudkan tenaga perpustakaan yang Kompeten dan profesional
- 5) Menggalakan sosialisasi / promosi / pemasyarakatan gemar membaca
- 6) Mengembangkan infrastruktur perpustakaan yang modern

**3) Program dan Kegiatan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia**

**A. Program Pengembangan Perpustakaan** , dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional
- 2) Pengelolaan Deposit Terbityan Nasional
- 3) Preservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno
- 4) Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi
- 5) Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca
- 6) Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan
- 7) Pengembangan Perpustakaan
- 8) Pengembangan Pustakawan
- 9) Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi

**B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional** , dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Operasional Perkantoran Perpustakaan Nasional.

2. Perencanaan, Hukum dan Humas Perpustakaan Nasional.
3. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Perpustakaan Nasional.

### **C. Program dan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

**Perpustakaan Nasional** , dilakukan dengan kegiatan Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

#### **4) Kerangka Regulasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia**

Agar Tugas, fungsi, dan kewenangan Perpustakaan Nasional RI dapat berjalan dengan baik dalam melaksanakan program dan kegiatan, diperlukan dukungan regulasi yang memadai. Kerangka regulasi yang akan disusun pada tahun 2015-2019 antara lain adalah Peraturan Kepala sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yaitu tentang 1) Standar tenaga Perpustakaan dan 2) Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan serta peraturan kepala tentang : 1) Pembudayaan Gemar Membaca 2) Grand Desain Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional dan 3) Pembangunan Perpustakaan Model sebagaimana tercantum dalam tabel lampiran 3.

#### **5) Kerangka Kelembagaan**

Pelaksanaan Pembangunan di bidang Perpustakaan memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat sebagai mana di amanatkan Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Prioritas Perpustakaan penguatan kelembagaan tahun 2015-2019 antara lain melalui :

1. Penguatan Kapasitas kelembagaan perpustakaan.
2. Pembentukan Dewan Perpustakaan.
3. Pembinaan Organisasi profesi pustakawan.
4. Penguatan lembaga akreditasi Perpustakaan dan sertifikasi pustakawan.
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama pusat, daerah, masyarakat, satuan pendidikan dan pihak swasta dalam pembangunan perpustakaan.

## **II. Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia (Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019)**

1) **Visi** dan Misi Arsip Nasional RI Tahun 2015 – 2019

**Visi :**

" Arsip sebagai Pilar *Good Governance* dan intergrasi memori kolektif bangsa".

2) **Misi :**

- 1) Mewujudkan Arsip sebagai indikator kinerja lembaga dan obyek pemeriksaan dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintah melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/ L di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat ;
- 2) Mewujudkan pengelolaan arsip asset melalui pengembangan aplikasi *electronic record system*;
- 3) Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melestarikannya melalui sistem seleksi makro strategis , sistem restorasi modern , digitalisasi dan sistem jaringan informasi ;
- 4) Mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi sistem jaringan aplikasi kearsipan
- 5) Mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai Alat Kontrol ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan.
- 6) Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/ L di Pusat dan Daerah terutama Organisasi Kearsipan ( unit dan lembaga kearsipan ) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung dan ICA dan Sarbica.

3) **Program dan Kegiatan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2016 - 2021**

| No | Program Lintas/<br>program/<br>Kegiatan<br>Prioritas<br>Nasional | Sasaran                                                                                                                     | Indikator                                                                                                                                          | Target<br>Penanggung Jawab / Pelaksanaan |           |           |           |           | Penanggu<br>ng<br>Jawab/<br>Pelaksan<br>a |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------|
|    |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                    | 2015                                     | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      |                                           |
| 1  | Pembinaa<br>Kearsipan<br>Daerah I                                | Meningkatkan<br>efekstifitas<br>penyelenggaraan sistem<br>kearsipan di lembaga<br>kearsipan daerah<br>provinsi dan kab/kota | Jumlah Pemerintah<br>Prov./Kab/Kota<br>yang Mendapatkan<br>Kemampuan Teknis<br>Pengelolaan Arsip<br>Aset sesuai dengan<br>Peraturan<br>Perundangan | 3<br>Prov/<br>Kab/<br>Kota               | 2<br>Prov | 2<br>Prov | 2<br>Prov | 1<br>Prov | ANRI                                      |

|   |                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                |             |             |             |             |             |      |
|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 2 | Pembinaan Kearsipan Daerah II (unit baru)                        | Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan sistem kearsipan di lembaga kearsipan daerah provinsi dan kabupaten/kota | Jumlah Pemerintah Prov/ Kab/ Kota yang Mendapatkan kemampuan Teknis Pengelolaan Arsip Aset sesuai dengan Peraturan Perundangan | 4 Prov      | 2 Prov      | 2 Prov      | 2 Prov      | 1 Prov      | ANRI |
| 3 | Pembinaan Kearsipan Pusat                                        | Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan sistem kearsipan di lembaga negara dan badan pemerintahan pusat          | Jumlah Instansi Pusat yang sudah Menerangkan SIKD-TIK                                                                          | 11 Instansi | 25 Instansi | 35 Instansi | 45 Instansi | 55 Instansi | ANRI |
| 4 | Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional                                                      | Pengelolaan Sistem dan jaringan Informasi Kearsipan Nasional (rioritas nasional) (diusulkan)                                   | 35 simpul   | 40 simpul   | 45 simpul   | 60 simpul   | 75 simpul   | ANRI |

#### 4) Arah Kebijakan dan Strategi ANRI

##### Arah Kebijakan ANRI

Sejak dengan amanat Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan bahwa penyelenggaraan kearsipan nasional menjadi tanggung jawab ANRI yang meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip. Dengan demikian kewenangan pemerintah pusat (ANRI) hanya berperan sebagai regulator yang mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan dan kearsipan secara nasional yang akan menjadi acuan dalam perumusan dan penetapan peraturan dan kebijakan pembangunan kearsipan di lembaga kearsipan daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu ANRI juga berperan sebagai fasilitator, agar mampu mengembangkan jaringan kerja yang lebih harmonis dalam rangka efisiensi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kementerian/lembaga maupun Pemerintah Provinsi/Kota.

Dengan Peran dan tugas tersebut di atas, maka arah kebijakan pembangunan kearsipan Tahun 2015-2019 adalah:

##### - Kebijakan Kearsipan

Kebijakan kearsipan sebagai landasan dalam melaksanakan penyelenggaraan kearsipan nasional yang meliputi (a) pengembangan NSPK sebagai alat perantara terhadap penyelenggaraan kearsipan melalui penyusunan peraturan di bidang kearsipan di kementerian/ lembaga (Pusat) dan pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota; (b) Penyusunan

NSPK sebagai amanat undang-undang nomor 43 tahun 2009 dan pertaruan pemerintah nomor 28 tahun 2012 yang berimplikasikan pada kementrian/ lembaga (pusat) dan pemerintahan daerah yang menyangkut 10 area yaitu: (b1) Pembinaan; (b2) Pengelolaan arsip; (b3) Pembangunan sistem informasi keasipan nasional (SIKN) dan pembentukan jaringan Informasi kearsipan nasional (JIKN); (b4) Organisasi; (b5) Pengembangan sumber daya manusia; (b6) Prasarana dan prasarana keasipan; (b7) Perlindungan dan penyelamatan arsip; (b8) Sosialisasi kearsipan; (b9) Kerjasama; dan (b10) Pendanaan

- **Pembinaan Keasipan**

Dalam rangka meningkatkan kemajuan penyelenggaraan keasipan nasional perlu; (a) Penguatan dan penataan lembaga kearsipan, yang meliputi penguatan penataan secara struktural unit keasipan pada kementrian/lembaga, lembaga kearsipan di daerah dan perguruan tinggi; serta penguatan peranan dan fungsi unit dan lembaga keasipan pada kementrian/lembaga dan daerah serta perguruan tinggi. Penataan dan penguatan organisasi kearsipan diharapkan dapat memudahkan penugasan dan koordinasi organisasi kearsipan, sehingga akan terciptanya efesiensi dan efektifitas kinerja organisasi keasipan.

Dengan mengupayakan pemisahan lembaga keasipan dengan perpustakaan karna kedua lembaga tersebut mempunyai fungsi yang berbeda, sehingga terwujud lembaga kearsipan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Oleh karena itu, ANRI mendorong percepatan revisi Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 untuk mengatur pembentukan organisasi yang berdasarkan urusan pemerintahan; (b) Penguatan penerapan sistem pengelolaan arsip dinamis berbasis TIK di tingkat pusat dan daerah melalui pengembangan Sentral Arsip Aktif (central file) dan Sentral Arsip Inaktif (records center) dan pengembangan depot arsip statis; (c) pengembangan sarana dan prasarana keasipan melalui standarisasi gedung, peralatan, dan sistem jaringan kearsipan; (d) Jaringan dan sinergitas dan koneksi dengan unit lembaga kearsipan; (e) Peran dan partisipasi masyarakat menuju sadar arsip; (f) Hal yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen arsip dinamis dan statis. Untuk mewujudkan sistem kearsipan secara menyeluruh, perlu dilakukan pembinaan sumber daya manusia (Arsiparis).

Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ANRI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi, termasuk pembinaan Arsiparis.

**Tabel 3.1**  
**Permasalahan dan Faktor Penghambat serta Pendorong Pelayanan**

| NO | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L                       | Permasalahan Pelayanan SKPD                                                                                                                                          | Sebagai Faktor                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                           |                                                                                                                                                                      | Penghambat                                                                                                                                                                                              | Pendorong                                                                                                                                                     |
|    | <b>Perpustakaan Nasional RI</b>                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |
| 1  | Peningkatan Kegemaran Membaca                             | Jumlah Koleksi yang kurang memadai , serta proses pengadaan koleksi yang lama, serta kurangnya pengelolaan pada perpustakaan masyarakat                              | Anggaran kurang memadai, layanan paket koleksi untuk masyarakat kurang memadai, SDM Pustakawan kurang                                                                                                   | Adanya aktivitas komunitas masyarakat yang berkegiatan diperpustakaan seperti Kampung Dongeng Sumatera Barat ,Kelas Menulis Kreatif Anak dan Remaja (pemula). |
| 2  | Pengembangan Semua Jenis Perpustakaan                     | Kewenangan pemerintah provinsi sesuai dengan UU.No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah                                                                        | Anggaran kurang memadai, terkendalanya pengembangan perpustakaan desa, nagari, kelurahan dan sekolah, rumah ibadah karena adanya regulasi tentang Hibah Bansos dan Belanja Modal, SDM Pustakawan kurang | Pengembangan jenis perpustakaan dengan peningkatan SDM pengelola perpustakaan melalui Bimtek dan seminar.                                                     |
| 3  | Peningkatan Kualitas dan Diversikasi layanan perpustakaan | Belum terintegrasinya aplikasi dalam satu sistem , perlunya interoperability atau satu gateway system yang mewadahi semua perkembangan aplikasi layanan perpustakaan | SDM IT belum memadai , Budaya kerja IT belum sempurna                                                                                                                                                   | Telah dibangunnya jaringan e library dan pendaftaran online serta server pada jaringan perpustakaan digital.                                                  |
| 4  | Peningkatan kualitas SDM perpustakaan                     | Kurangnya tenaga teknis pustakawan yang memadai dan kecilnya anggaran untuk pengembangan kompetensi pegawai                                                          | Meningkatnya jumlah kunjungan dan aktivitas masyarakat di perpustakaan umum                                                                                                                             | Rekrutmen PNS dan melibatkan dewan perpustakaan sebagai konsultan dalam peningkatan kualitas SDM perpustakaan                                                 |

|   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 5 | Peningkatan Koleksi Nasional dan Pelestarian Koleksi Warisan Dokumen Budaya Bangsa Indonesia                                                                                                                     | <p>Perlunya <i>reward</i> dan <i>Punishment</i> bagi penerbit yang berprestasi dalam mematuhi UU dan Perda KCKR</p> <p>Belum representatif nya peralatan dan perlengkapan serta laboratorium perawatan dan pelestarian koleksi</p> | <p>Belum semua penerbit di Sumatera Barat mematuhi regulasi KCKR</p> <p>Keterbatasan anggaran dan pengetahuan tentang</p> |   |
| 6 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Nasional yang Modern                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                         | - |
|   | <b>Arsip Nasional RI</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |   |
| 1 | Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah , lembaga pendidikan ( PTN ), Perusahaan BUMN, BUMD, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perseorangan / tokoh nasional |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |   |
| 2 | Terwujudnya Penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |   |
| 3 | Terselenggaranya Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |   |
| 4 | Terwujudnyann peningkatan tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja yang profesional dan transparan                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |   |



Demikian Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi Berdasarkan Sasaran Renstra K/L, beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Dari segi tugas pokok dan fungsi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat pada dasarnya menyelenggarakan tugas dan urusan di bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota.

Analisis lingkungan strategis yang merupakan hasil analisis swot yang menjelaskan tentang berbagai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat serta berbagai peluang dan tantangan yang berasal dari lingkungan eksternal Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat. Analisa lingkungan strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

#### **Perkiraan keadaan :**

**Sistem Perekonomian** rata-rata pendapatan penduduk Provinsi Badan Perpu 2017 adalah sebesar US \$ 16.000, kini Index lebih bagus, Pengangguran 6 % dan kemiskinan pada angka 3,5 %,

**Sistem Sosial** Tingkat Pendidikan Dasar sudah memakai standar 12 tahun pertama di Indonesia, Jaminan Sosial tahun 2014 Kementrian Kesehatan sudah implementasi SJSN / BPJS semua penduduk di asuransikan, angka kriminalitas makin tinggi.

Tahun 2014 Kementerian Kesehatan RI akan mengimplementasikan Sistem Jaminan Sosial Nasional / Badan Pengelola Jaminan Sosial

**Sistem Lingkungan Hidup**, Polusi Udara yang semakin buruk, RTH 12%, Polusi air (Sungai, danau, setu, air tanah) dan Polusi tanah.

Kebijakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi harus antisipatif mengikuti dan bersinergi dan mempersiapkan diri karena negara-negara di wilayah Asia Tenggara akan membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA merupakan bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Terdapat empat hal yang akan menjadi fokus MEA pada tahun

2015 yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia. Pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi *competition policy*, *consumer protection*, *Intellectual Property Rights* (IPR), *taxation*, dan *E-Commerce*. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil; terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem *Double Taxation*, dan; meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis *online*.

Ketiga, MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi.

Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangan paket bantuan teknis kepada negara-negara Anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatan partisipasi mereka pada skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global (maka perubahan sistem, pola untuk jasa dan pengadaan akan berubah sehingga perlunya persiapan yang handal agar MEA (Masyarakat Economy Asean) memberikan peluang yang baik sekaligus tantangan bagi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat untuk bersama-sama dengan Perpustakaan Nasional RI dan Arsip Nasional RI dan pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Sumatera Barat lainnya melakukan tugas dan fungsinya. Sistem tersebut dapat berjalan dengan baik didukung dengan Reformasi Birokrasi yang baik dengan Pengawasan, Efisiensi Anggaran dan penyelenggaraan program yang tepat sasaran.

Tabel : KEKUATAN DAN KELEMAHAN

| NO | KEKUATAN                                                                                                                  | KELEMAHAN                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | Adanya potensi dan sumber daya aparatur (tenaga administrasi, Pustakawan, Fungsional Arsiparis dan tenaga teknis lainnya) | Rendahnya layanan teknologi informasi dan alih media komunikasi  |
| 2  | Adanya sumber dana (APBN dan APBD)                                                                                        | Kualitas sumber daya manusia belum memadai                       |
| 3  | Adanya Undang-Undang tentang Perpustakaan dan Kearsipan serta peraturan perundangan undangan lainnya                      | Belum terimplementasinya kebijakan sesuai dengan yang diharapkan |

## 2. Analisis Lingkungan Eksternal

Tabel : PELUANG DAN TANTANGAN

| NO | PELUANG                                                                 | TANTANGAN                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dan pemustaka                | Rendahnya kesadaran dan minat baca sebagian masyarakat, serta kurangnya sadar arsip oleh masyarakat |
| 2  | Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan baca dan informasi   | Koleksi bahan bacaan yang kurang bervariasi                                                         |
| 3  | Adanya kesiapan masyarakat mengakses teknologi informasi dan komunikasi | Perlunya Sumber Daya Manusia yang aktif , kreatif di bidang teknologi                               |

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis yang dapat diamati dalam pengembangan lembaga Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 antara lain:

1. Peningkatan Budaya Gemar membaca

- Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat guna mewujudkan masyarakat gemar membaca kearah kebiasaan membaca, sehingga membaca menjadi suatu kebutuhan dan pada akhirnya tercipta budaya gemar membaca masyarakat .
- Meningkatkan kualitas dan kapasitas perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat yang ditandai oleh meningkatnya standar mutu perpustakaan dan kompetensi SDM di semua jenis perpustakaan
- Meningkatkan intensitas dan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi yang ditandai adanya layanan perpustakaan digital
- Mengembangkan, mengelola dan mendayagunakan semua karya tulis, karya cetak dan karya rekam hasil karya intelektual masyarakat Sumatera barat, yang ditandai oleh meningkatnya koleksi deposit dan terlaksananya pelestarian bahan perpustakaan

2. Peningkatan Budaya Sadar Arsip

- Meningkatkan penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan arsip
- Meningkatkan dan mengembangkan SDM, sistem dan kelembagaan kearsipan
- Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan arsip.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Kepemerintahan yang baik ( *Good Governance*) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi public dewasa ini. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Disamping adanya pengaruh globalisasi. Tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar bahkan merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk meresponnya dengan melakukan perubahan – perubahan kearah yang lebih baik demi terwujudnya *Good Governance*.

Upaya untuk mewujudkan *Good Governance* tersebut, diantaranya adalah dengan jalan Reformasi Birokrasi dan Penataan Kelembagaan perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Paradigma tersebut diatas berimplikasi pada penggabungan Badan Perpustakaan dan Badan Kearsipan, sebagaimana mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang dijelaskan lebih lanjut bahwa bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan suatu rumpun urusan yang diwadahi dalam bentuk Badan.

Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai bidang garapan yang sama, yakni sama-sama mengelola informasi dan memberikan layanan pada publik. Persamaan mendasar dari arsip dan bahan perpustakaan adalah bahwa keduanya membutuhkan pemeliharaan dan pelestarian. Media simpan bahan perpustakaan dan arsip dapat berupa media simpan konvensional (kertas), media simpan digital dan elektronik, serta media simpan khusus (*in special formats*).

Perbedaannya adalah bahwa Perpustakaan mengelola informasi dalam bingkai *information product*, yakni informasi yang sengaja diciptakan untuk didesiminasikan kepada publik adapun Kearsipan mengelola informasi terutama *information by product*, yakni informasi yang lahir karena adanya kegiatan organisasi atau institusi

Hal ini sejalan dengan tujuan perpustakaan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menyatakan bahwa “perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran

membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa” demikian pula sejalan dengan tujuan penyelenggaraan kearsipan yang dialamatkan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, yang menyatakan bahwa “ **Tujuan Kearsipan** “ adalah :

- a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipanan nasional
- b. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah
- c. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya
- e. Mendinamisasikan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu
- f. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- g. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat dituntut untuk melakukan upaya penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya serta melakukan upaya pengelolaan kearsipan secara baik dan benar berdasarkan kaidah kearsipan dengan efektif dan efisien.

#### **4.1. Visi dan Misi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat**

Dari pemaparan yang telah dikemukakan di atas, maka untuk berhasilnya penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan agar dapat mencapai hasil yang optimal, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan Visi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat.

##### **Visi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat**

**Tahun 2016 - 2021**

**“ Menjadikan Perpustakaan dan Kearsipan Sebagai Pusat Informasi Untuk Mencerdaskan Masyarakat dan Menyelamatkan Memori Daerah “.**

Definisi Operasional Visi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

|    |                 |   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Perpustakaan    | : | a.                                                                                                        | Tempat, gedung, ruang yang disediakan untuk pemeliharaan, koleksi buku, majalah dan bahan kepustakaan lainnya yang disimpan, dibaca, dipelajari dan dibicarakan;                                                                        |
|    |                 |   | b.                                                                                                        | Institusi pembina semua jenis perpustakaan, pengelola karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para pemustaka; |
|    |                 |   | c.                                                                                                        | Sistem yang memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk meningkatkan kecerdasan untuk keberdayaan bangsa .                                                       |
| 2. | Kearsipan       | : | a.                                                                                                        | Sistem penyelenggaraan pengelolaan dan pengurusan arsip yang meliputi pengelolaan arsip dinamis dan statis;                                                                                                                             |
|    |                 |   | b.                                                                                                        | Pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan;                                                                                                                                                                                            |
|    |                 |   | c.                                                                                                        | Pemberdayaan Arsip                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                 |   | d.                                                                                                        | Penegakan hukum kearsipan                                                                                                                                                                                                               |
|    |                 |   | e.                                                                                                        | Penelitian dan pengembangan kearsipan                                                                                                                                                                                                   |
| 3. | Pusat Informasi | : | Sumber Penerangan terkemuka di Sumatera Barat                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. | Untuk           | : | Tujuan                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. | Mencerdaskan    | : | Menyempurnakan perkembangan akal dan budi (untuk berfikir dan mengerti melalui pengetahuan dan literasi ) |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. | Masyarakat      | : | Masyarakat Sumatera Barat sebagai pengguna utama informasi perpustakaan dan kearsipan                     |                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |               |   |                                                                                                            |
|----|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Menyelamatkan | : | Upaya menambah kuantitas dan memperbaiki (kualitas) khasanah dan koleksi serta memelihara dan melestarikan |
| 8. | Memori Daerah | : | Pusat ingatan/ rekaman aktivitas pemerintah dan Masyarakat Sumatera Barat                                  |

Untuk menjabarkan Visi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat, disusun

**Misi** sebagai berikut :

1. Mengembangkan Budaya Gemar Membaca
2. Mengembangkan dan melestarikan bahan pustaka
3. Mendayagunakan dan mengembangkan semua jenis perpustakaan
4. Meningkatkan penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan arsip
5. Meningkatkan dan mengembangkan SDM, Sistem dan Kelembagaan Kearsipan dan perpustakaan
6. Meningkatkan pengelolaan, dan pengawasan Arsip

#### 4.2. Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana Visi dan Misi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan diatas, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak 2011 – 2015.

Tabel T-IV.C.24  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat

| NO. | TUJUAN                                                                          | SASARAN STRATEGIS                                                               | INDIKATOR KINERJA UTAMA                   | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- |                  |                  |                  |                  |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|
|     |                                                                                 |                                                                                 |                                           | 2016                          | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021 |
| (1) | (2)                                                                             | (3)                                                                             | (4)                                       | (5)                           | (6)              | (7)              | (8)              | (9)              | (10) |
| 1   | Menumbuhkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat<br><i>Misi 1, 2 dan 3</i> | Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca                                     | - Jumlah kunjungan perpustakaan           | 57.500 orang                  | 58.000 orang     | 59.000 orang     | 60.000 orang     | 61.000 orang     |      |
|     |                                                                                 |                                                                                 | - Jumlah Anggota Baru                     | 1000 orang                    | 1000 orang       | 1.000 orang      | 1000 orang       | 100 orang        |      |
|     |                                                                                 | Bertambah dan terpeliharanya bahan pustaka dalam bentuk koleksi karya tulis dan | - Jumlah Penambahan Koleksi Bahan Pustaka | 13.000 eksemplar              | 13.000 eksemplar | 10.000 eksemplar | 10.000 eksemplar | 10.000 eksemplar |      |



| NO. | TUJUAN                                                                                                                                        | SASARAN STRATEGIS                                                              | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                  | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- |               |               |               |               |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|     |                                                                                                                                               |                                                                                |                                                          | 2016                          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021        |
| (1) | (2)                                                                                                                                           | (3)                                                                            | (4)                                                      | (5)                           | (6)           | (7)           | (8)           | (9)           | (10)        |
|     |                                                                                                                                               | karya cetak dan atau karya rekam                                               |                                                          |                               |               |               |               |               |             |
|     |                                                                                                                                               |                                                                                | - Jumlah Koleksi bahan pustaka yang terpelihara          | 750 Eksemplar                 | 750 Eksemplar | 750 Eksemplar | 750 Eksemplar | 750 Eksemplar |             |
|     |                                                                                                                                               | Mewujudkan Perpustakaan Digital                                                | - Jumlah Entrian Database Bahan Pustaka                  | 4.000 Entry                   | 4.000 Entry   | 4.000 Entry   | 4.000 Entry   | 4.000 Entry   | 4.000 Entry |
| 2   | Terwujudnya pelayanan informasi kearsipan<br><i>Misi 4 dan 6</i>                                                                              | Meningkatnya kuantitas informasi kearsipan                                     | - Jumlah Arsip Statis yang terselamatkan                 | 4 Dokumen                     | 4 Dokumen     | 4 Dokumen     | 4 Dokumen     | 4 Dokumen     | 4 Dokumen   |
| 3   | Meningkatnya tata kelola kearsipan dan perpustakaan pada semua SKPD, Lembaga Kearsipan dan Perpustakaan Kab/ Kota dan Nagari<br><i>Misi 5</i> | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Perpustakaan dan Kearsipan | - Jumlah SKPD yang tertib arsip                          | 2 SKPD                        | 2 SKPD        | 2 SKPD        | 2 SKPD        | 2 SKPD        | 2 SKPD      |
|     |                                                                                                                                               |                                                                                | - Jumlah SKPD yang dibina untuk tata kelola perpustakaan | 30 SKPD                       | 10 SKPD       | 10 SKPD       | 10 SKPD       | 10 SKPD       |             |

#### 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Konsep dan kerangka strategi manajemen Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat, disusun atas dasar permasalahan dan isu - isu strategis nasional yang ada dan dengan memperhatikan sasaran - sasaran yang ditetapkan terkait dengan agenda pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Secara kontekstual dan konseptual, penyusunan kerangka strategi diorientasikan atas dasar pendekatan terhadap aspek internal dan aspek eksternal.

##### 1. Strategi pendekatan eksternal

Strategi ini digunakan untuk merespon permasalahan-permasalahan maupun isu-isu strategis yang ada dan disusun sebagai berikut :

- a. Implementasi upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang langsung menyentuh rakyat melalui kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota dan lembaga perpustakaan dan kearsipan di daerah
- b. Melengkapi pelaksanaan upaya pemberdayaan masyarakat miskin di bidang pendidikan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di provinsi dan daerah
- c. Pelaksanaan upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peran perpustakaan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga perpustakaan dan kearsipan di daerah serta dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi / daerah

## 2. Strategi pendekatan internal

Strategi ini diterapkan dalam mendukung pilihan strategi pendekatan eksternal di atas dirumuskan sebagai berikut :

- a. Memberikan dukungan operasional dan administratif melalui perencanaan dan koordinasi integratif kepada seluruh bidang-bidang teknis yang ada di lingkungan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi dalam mengimplementasikan program kerja
- b. Memobilisasi sumberdaya internal serta mengembangkan jaringan informasi dan sistem komputerisasi yang mempunyai aksesibilitas tinggi terhadap berbagai sumber data dan kebutuhan untuk peningkatan efisiensi, produktivitas dan efektivitas kerja.

Mengacu pada **Strategi Pembangunan Sumatera Barat tahun 2016 s.d. 2021** agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan serta secara bersamaan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih.

Berikut ini beberapa upaya penjabaran strategi dan prioritas pemerintah provinsi yang terkait dan mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan strategi dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

- a. Upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang akan ditempuh melalui :
  - ✓ Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan mengurangi angka pengangguran
  - ✓ Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas

✓ Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik

b. Untuk terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Sumatera Barat perlu didukung dengan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

### 3. Kebijakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat

Beberapa arah kebijakan berikut ini akan menjadi acuan dan pertimbangan dalam upaya melaksanakan misi, tujuan dan sasaran di lingkup tugas-tugas

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat :

a. Membangun sistem administrasi kearsipan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan penyediaan pedoman kearsipan dalam bentuk regulasi, meliputi :

- Menyusun peraturan / pedoman sistem kearsipan
- Mengembangkan kearah sistem administrasi kearsipan digital
- Optimalisasi pelatihan – pelatihan SDM kearsipan baik pejabat fungsional arsiparis maupun pengelola arsip

b. Optimalisasi akuisisi, perbaikan dan alih media arsip yang bernilai guna meliputi :

- Akuisisi arsip statis baik diinstansi Pemerintah, BUMN/D, Orsospol/ Ormas, Swasta maupun Perorangan
- Meningkatkan preservasi dan alih media arsip statis
- Mengelola dan merawat arsip baik statis maupun inaktif

c. Optimalisasi pelayanan dan sosialisasi kearsipan yang dilakukan dengan berbagai metode sosialisasi, seperti :

- Pameran arsip
- Promosi jasa kearsipan
- Penerbitan naskah sumber dan buletin kearsipan
- Pelayanan informasi arsip

d. Menyelenggarakan tugas pelayanan dengan melakukan optimalisasi SDM dan pelayanan publik; pembentukan posko pelayanan publik untuk bahan pustaka maupun arsip; melakukan debirokratisasi dan deregulasi dalam meningkatkan pelayanan publik

e. Menyelenggarakan tugas pengaturan dengan memberikan pembinaan kepada seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat di daerah untuk mengembangkan pelayanan publik yang baik dan optimal, khususnya di bidang perpustakaan

f. Melakukan optimalisasi fasilitas perpustakaan yang sesuai dengan standar perpustakaan

g. Meningkatkan dan mengembangkan koleksi perpustakaan serta memfasilitasi pengembangan koleksi semua jenis perpustakaan

Dalam upaya untuk mengakomodasi dan merespon perubahan kebijakan pemerintah secara menyeluruh sesuai dengan paradigma baru yang berkembang di tataran nasional dan terefleksi pada penyadaran pemikiran masyarakat, berikut ini beberapa perumusan kebijakan terkait dengan reposisi peran perpustakaan dan arsip di waktu-waktu mendatang:

- a. Perpustakaan dan arsip merupakan wadah pendidikan demokratis masyarakat dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa
- b. Perpustakaan dan arsip dapat berperan sebagai pusat pembelajaran masyarakat secara independen, sehingga perlu mendapatkan kepedulian dari semua pihak, terutama fasilitas dari pihak pemerintah
- c. Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk mampu mengakomodasi berbagai perubahan kebutuhan dan keinginan masyarakat terkait dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi .
- d. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi diarahkan untuk mampu mengembangkan kerjasama yang saling mendukung serta menguntungkan dengan seluruh pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat
- e. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk dapat mengikuti perkembangan dan berperan secara nyata dalam proses pemberdayaan masyarakat dan daerah
- f. Badan Perpustakaan dan Kearsipan diharapkan menjadi pusat informasi penting se Sumatera Barat yang menyediakan informasi bersejarah yang berguna bagi penelusuran penulisan kesejarahan

[illegible]

## **5.1. Rencana Program dan Kegiatan Non Urusan ( Belanja Langsung Pokok )**

### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik
- c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- d) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f) Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- g) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- h) Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- i) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- j) Penyediaan Makanan dan Minuman
- k) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah
- l) Penyediaan Jasa Sopir Kantor
- m) Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a) Pengadaan Meubelir
- b) Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
- c) Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi
- d) Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
- e) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- f) Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Kantor
- g) Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
- h) Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi dan Jaringan

- i) Pengolahan, Pengawasan dan Pengendalian Aset
- j) Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- a) Pengadaan Pakaian dinas berserta perlengkapannya

### **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur**

- a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang -Undangan

### **5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
- c) Penatausahaan Keuangan SKPD
- d) Pengembangan dan Peningkatan Data dan Informasi

## **5.2. Rencana Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan**

### **Perpustakaan**

#### **1. Program Pengembangan Budaya baca dan pembinaan perpustakaan**

**Tujuan** program adalah untuk meningkatkan minat dan budaya gemar membaca dan Literasi masyarakat serta meningkatkan kompetensi SDM Perpustakaan

**Sasarannya** adalah: Meningkatkan efektifitas pelayanan perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca dan budaya literasi

**Indikator Kinerja Program** Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan Perpustakaan antara lain :

- Out Put : Jumlah ketersediaan buku perpustakaan
- Out Come : Meningkatnya layanan perpustakaan, pelestarian fisik dan kandungan naskah kuno dan budaya gemar membaca dan budaya literasi di masyarakat

**Kegiatan** yang mendukung Program Pengembangan Budaya baca dan pembinaan perpustakaan

- a) Layanan Jasa Perpustakaan Umum
- b) Otomasi Perpustakaan
- c) Pemeliharaan Buku – Buku dan Pelestarian Bahan Pustaka
- d) Pembinaan Perpustakaan Instansi Provinsi
- e) Perpustakaan Digital
- f) Penilaian Kinerja Pustakawan
- g) Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan
- h) Pengembangan Koleksi Perpustakaan
- i) Electronic Library
- j) Perluasan Layanan Perpustakaan

### **5.3. Rencana Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan**

Untuk mengimplementasikan kebijakan Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat, maka program/kegiatan Urusan Kearsipan yang akan dilaksanakan melalui APBD maupun APBN tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

#### **a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan**

Tujuan program adalah untuk mewujudkan pelayanan informasi kearsipan yang berkualitas

Sasarannya adalah : Terselenggaranya pelayanan kearsipan secara efektif dan efisien

Indikator Kinerja Program :

- Out Put : Jumlah arsip/dokumen daerah yang terhimpun, tersusun dan terselamatkan
- Out Come : Persentase Dokumen Daerah yang terselamatkan

Kegiatan-Kegiatan yang dilaksanakan dalam program di atas adalah sebagai berikut :

1. Simulasi Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Bencana
2. Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip Statis
3. Pelayanan Informasi Kearsipan
4. Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip Konvensional



5. Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dokumen dan Perawatan Arsip Media Baru

**b. Pembinaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sistem Kearsipan**

Tujuan program adalah meningkatnya pembinaan dan kualitas SDM Pengelolaan Sistem Kearsipan

Sasarannya adalah : Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan di SKPD Provinsi

Indikator Kinerja program :

- Out Put : Jumlah SKPD yang dibina
- Out Come : meningkatnya kualitas SDM kearsipan dan Perpustakaan pada SKPD Provinsi dan Kab/ Kota.

Kegiatan-Kegiatan yang dilaksanakan dalam program di atas adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Arsip Dinamis Aktif pada SKPD
2. Penilaian Kinerja Arsiparis
3. Pembinaan Kualitas dan Wawasan Fungsional Arsiparis
4. Bimbingan Teknis Kearsipan SKPD Tingkat Provinsi
5. Bimbingan Teknis Kearsipan Kab/Kota Se Sumatera Barat
6. Pengawasan Tata Kelola Kearsipan
7. Penataan dan Pengelolaan Arsip In Aktif

**5.4. Rencana Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan**

program/kegiatan Urusan Kearsipan yang akan dilaksanakan melalui APBD maupun APBN tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

**a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**

Tujuan program adalah untuk mewujudkan pelayanan informasi kearsipan yang berkualitas

Sasarannya adalah :

Indikator Kinerja Program :

- Out Put : Jumlah Ketersediaan Buku Perpustakaan
- Out Come : Meningkatnya layanan perpustakaan, pelestarian fisik dan kandungan naskah kuno dan budaya gemar membaca di masyarakat

Kegiatan-Kegiatan yang dilaksanakan dalam program di atas adalah sebagai berikut :

1. Layanan Jasa Perpustakaan Umum
2. Otomasi Perpustakaan
3. Pemeliharaan Buku-buku dan Pelestarian Bahan Pustaka
4. Pembinaan Perpustakaan Instansi Provinsi
5. Perpustakaan Digital
6. Penilaian Kinerja Pustakawan
7. Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah
8. Pengembangan Koleksi Perpustakaan
9. Electronic Library
10. Perluasan Layanan Perpustakaan
11. Promosi Pengembangan Budaya Baca
12. Pembudayaan Gemar Membaca dengan Berbagai Kelompok Masyarakat
13. Survey Kebutuhan Pemakai Bahan Bacaan dan Indeks Kepuasan Masyarakat
14. Pemanfaatan dan Pelestarian Naskah Kuno
15. Pengembangan Koleksi Budaya Sumatera Barat dan Etnis Minangkabau
16. Kerjasama Perpustakaan
17. Orientasi Perpustakaan
18. Story Telling
19. Bengkel Penulis Muda
20. Kelas Penulis Kreatif
21. Layanan Sahabat Perpustakaan
22. Sosialisasi Perpustakaan

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU**  
**PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa untuk tahun 2010 -2015 telah ditetapkan Visi dan Misi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan :

1. Menumbuhkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat
2. Terwujudnya Pelayanan Informasi Kearsipan
3. Meningkatnya tata kelola kearsipan dan perpustakaan pada semua SKPD

Tabel  
 Indikator Kinerja Utama Badan Perpustakaan dan Kearsipan  
 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016 -2021

| INDIKATOR KINERJA UTAMA                                            | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                    | 2016                          | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |
| (1)                                                                | (2)                           | (3)              | (4)              | (5)              | (6)              | (7)              |
| - Jumlah kunjungan perpustakaan ( Rata - rata kenaikan per tahun ) | 1000 orang                    | 1000 orang       | 1000 orang       | 1000 orang       | 1000 orang       | 1000 orang       |
| - Jumlah Anggota Baru                                              | 1000 orang                    | 1000 orang       | 1.000 orang      | 1000 orang       | 100 orang        | 100 orang        |
| - Jumlah Penambahan Koleksi Bahan Pustaka                          | 13.000 eksemplar              | 13.000 eksemplar | 13.000 eksemplar | 13.000 eksemplar | 13.000 eksemplar | 13.000 eksemplar |
| - Jumlah Koleksi bahan pustaka yang terpelihara                    | 750 Eksemplar                 | 750 Eksemplar    | 750 Eksemplar    | 750 Eksemplar    | 750 Eksemplar    | 750 Eksemplar    |
| - Jumlah Entran Database Bahan Pustaka                             | 4.000 Entry                   | 4.000 Entry      | 4.000 Entry      | 4.000 Entry      | 4.000 Entry      | 4.000 Entry      |
| - Jumlah Arsip Statis yang terselamatkan                           | 4 Jenis Arsip                 | 4 Jenis Arsip    | 4 Jenis Arsip    | 4 Jenis Arsip    | 4 Jenis Arsip    | 4 Jenis Arsip    |
| -Jumlah SKPD yang tertib arsip                                     | 2 SKPD                        | 2 SKPD           | 2 SKPD           | 2 SKPD           | 2 SKPD           | 2 SKPD           |
| - Jumlah SKPD tata kelola perpustakaan baik                        | 2 SKPD                        | 2 SKPD           | 2 SKPD           | 2 SKPD           | 2 SKPD           | 2 SKPD           |

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016- 2021 bertujuan untuk memberi arah kepada pelaksanaan strategi, program, kebijakan dan kegiatan di bidang perpustakaan dan kearsipan yang dilaksanakan sehingga hasil (output) yang diperoleh sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana strategis ini disusun mengacu rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat serta memperhatikan Rencana Jangka Menengah Nasional.

Proses perencanaan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), yang telah mengakomodasi kebutuhan penyesuaian program dan kegiatan prioritas yang memungkinkan terlaksananya seluruh tugas, fungsi, dan tanggung jawab Badan Perpustakaan dan Kearsipan.

Keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan sangat tergantung pada komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Stakeholders dan seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat. Untuk itu penyusunan kebijakan ini dapat dijadikan pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan penyelenggara pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten / Kota Se Sumatera Barat.

Di dalam pelaksanaannya Renstra Badan Perpustakaan Dan Kearsipan selama kurun waktu 2016 -2021 , tidak akan mungkin terlepas dengan kondisi yang terus berkembang di tingkat Daerah maupun Nasional sehingga pada waktunya diperlukan upaya-upaya penyempurnaan program maupun kegiatan, sehingga diharapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

KEPALA  
BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

**Drs. ALWIS**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19610303 198210 1002**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami persembahkan kehadiran Allah Yang Kuasa karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya jualah kami dapat menyelesaikan pembuatan Rencana Srtategis (Renstra) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat disusun dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat serta Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan perpustakaan dan kearsipan yang hendak dicapai dalam periode 2016-2021 dengan mempertimbangkan capaian pembangunan perpustakaan dan kearsipan yang telah dicapai saat ini .

Renstra ini juga digunakan sebagai bahan dan pedoman dalam penyusunan untuk pembuatan (1) Rencana Kerja (Renja); (2) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Perpustakaan dan Kearsipan; (3) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Perpustakaan dan kearsipan; (4) Laporan Tahunan; dan (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Badan Perpustakaan dan Kearsipan serta para pemangku kepentingan perpustakaan dan kearsipan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan secara sinergis dan berkesinambungan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Padang, 2 September 2016

KEPALA  
BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

**Drs. ALWIS**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19610303 198210 1002**

LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR :  
TANGGAL :  
\_\_\_\_\_

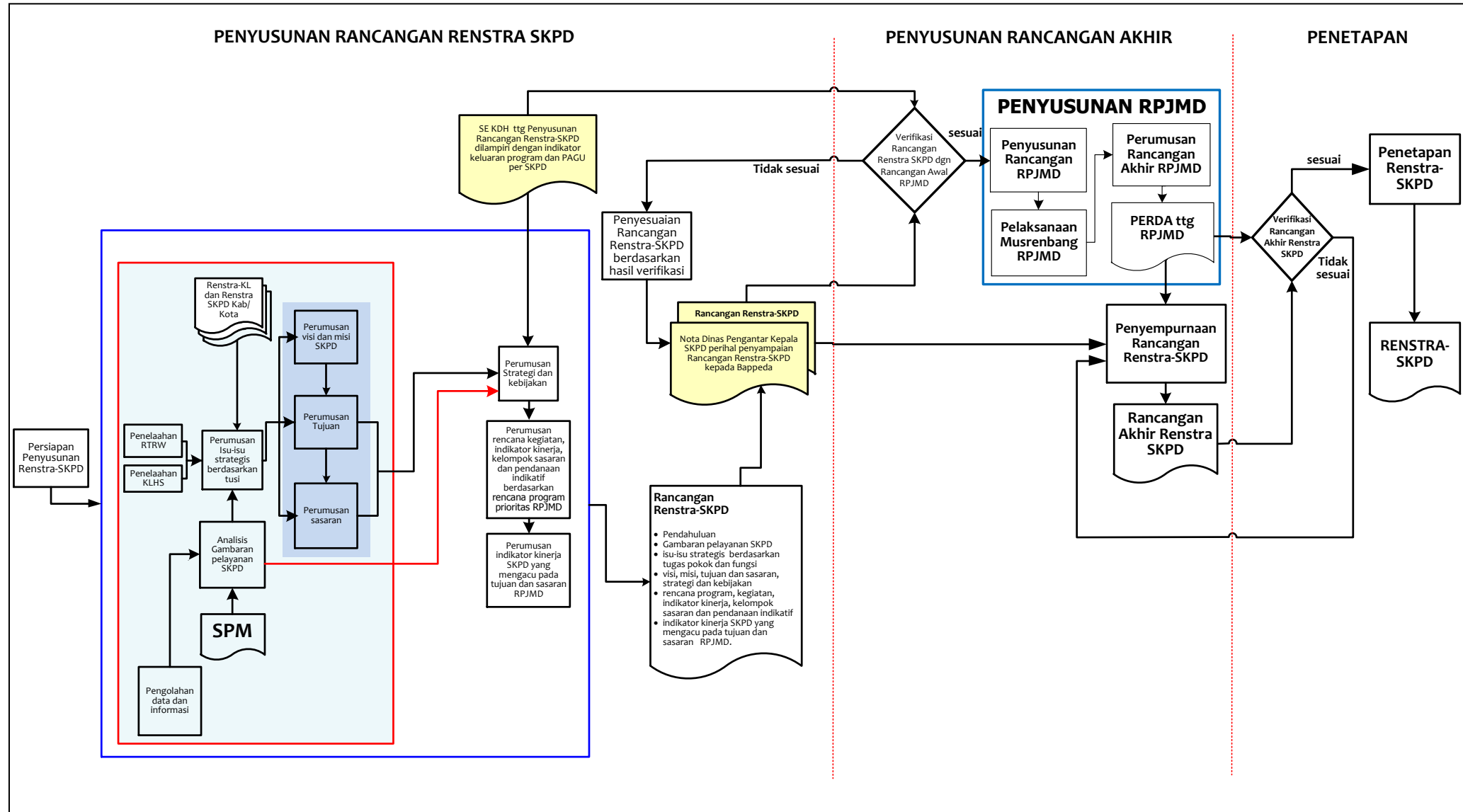
TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN  
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(RENSTRA SKPD)

- A. BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD
- B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD
- C. PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD
- D. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA SKPD
- E. PENETAPAN RENSTRA SKPD

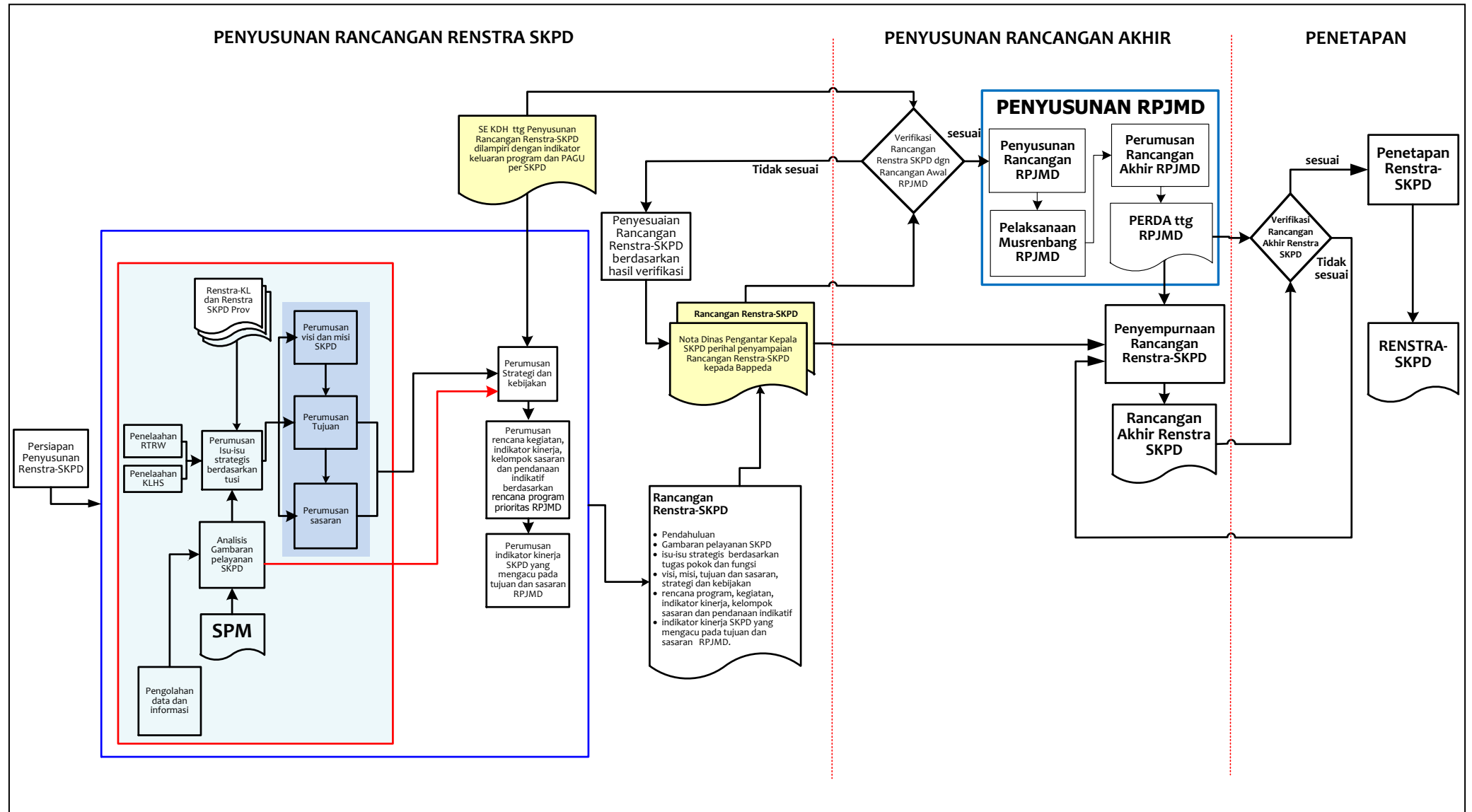
A.

# BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD.

Gambar. G-IV.A.1  
Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi



Gambar. G-IV.A.2  
Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota





## B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD

Tahapan persiapan penyusunan Renstra SKPD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra SKPD provinsi dan kabupaten/kota.

### B.1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD

Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD provinsi dan kabupaten/kota. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf SKPD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran.

Anggota tim penyusun yang dilibatkan harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra SKPD. Dengan demikian perlu dipilih orang-orang yang mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas SKPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja (bagian/bidang/subdin/atau sebutan lain) yang ada di masing-masing SKPD dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Tugas tim penyusun Renstra SKPD dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkan Renstra SKPD.

Tim penyusun Renstra SKPD dipersiapkan oleh Kepala SKPD dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah.

Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra SKPD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Ketua Tim : Kepala SKPD

Sekretaris Tim : Kasubag TU/pejabat lainnya

Kelompok Kerja : Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan, yang diketuai oleh kepala unit kerja dengan anggota pejabat/staf SKPD dan unsur non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli.

### B.2. Orientasi mengenai Renstra SKPD

Orientasi mengenai Renstra SKPD kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra SKPD.

Bahan orientasi mengenai Renstra SKPD, mencakup:

1. Peraturan perundang-undangan, antara lain: tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan anggaran.
3. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

### B.3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra SKPD

Rencana kegiatan tim penyusun Renstra SKPD disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran KDH hingga verifikasi rancangan Renstra SKPD sebagai bahan musrenbang.

Agenda kerja ini juga membantu koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan Renstra SKPD dengan penyusunan RPJMD.

Contoh agenda kerja penyusunan dokumen Renstra SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel.T-IV.C.1  
Contoh Agenda Kerja Penyusunan Renstra SKPD

| NO | Kegiatan                           | Bulan I |   |   |   | Bulan II |   |   |   | Bulan III |   |   |   | Bulan IV |   |   |   |
|----|------------------------------------|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-----------|---|---|---|----------|---|---|---|
|    |                                    | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 |
| A. | PERSIAPAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD  |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |
| B. | PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD  |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |
| D. | PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD  |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |
| 1  | Penyampaian rancangan Renstra SKPD |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |
| 2  | Verifikasi rancangan Renstra SKPD  |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |
| E. | MUSRENBANG RPJMD                   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |          |   |   |   |

B.4. Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Renstra SKPD perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra SKPD dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
2. Mengumpulan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun Renstra SKPD, antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
2. Kebijakan pemerintah yang terkait;
3. Dokumen-dokumen:
  - a. RPJMD provinsi, RTRW provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPJMD provinsi;
  - b. RPJMD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RPJMD provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPJMD kabupaten/kota;
  - c. Hasil evaluasi Renstra SKPD periode lalu;
4. Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.

Jenis data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun dokumen Renstra SKPD antara lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

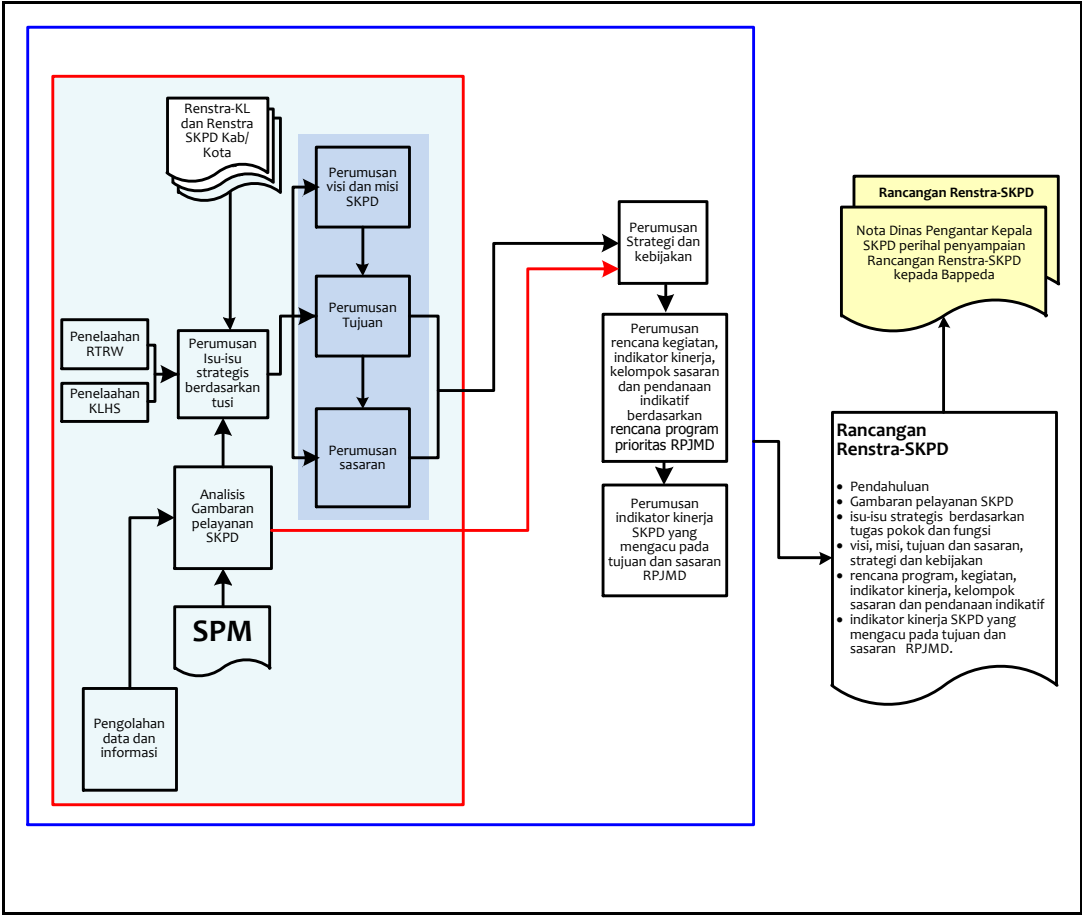
C. PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD

Tahap penyusunan rancangan Renstra SKPD terdiri dari dua tahap, yaitu:

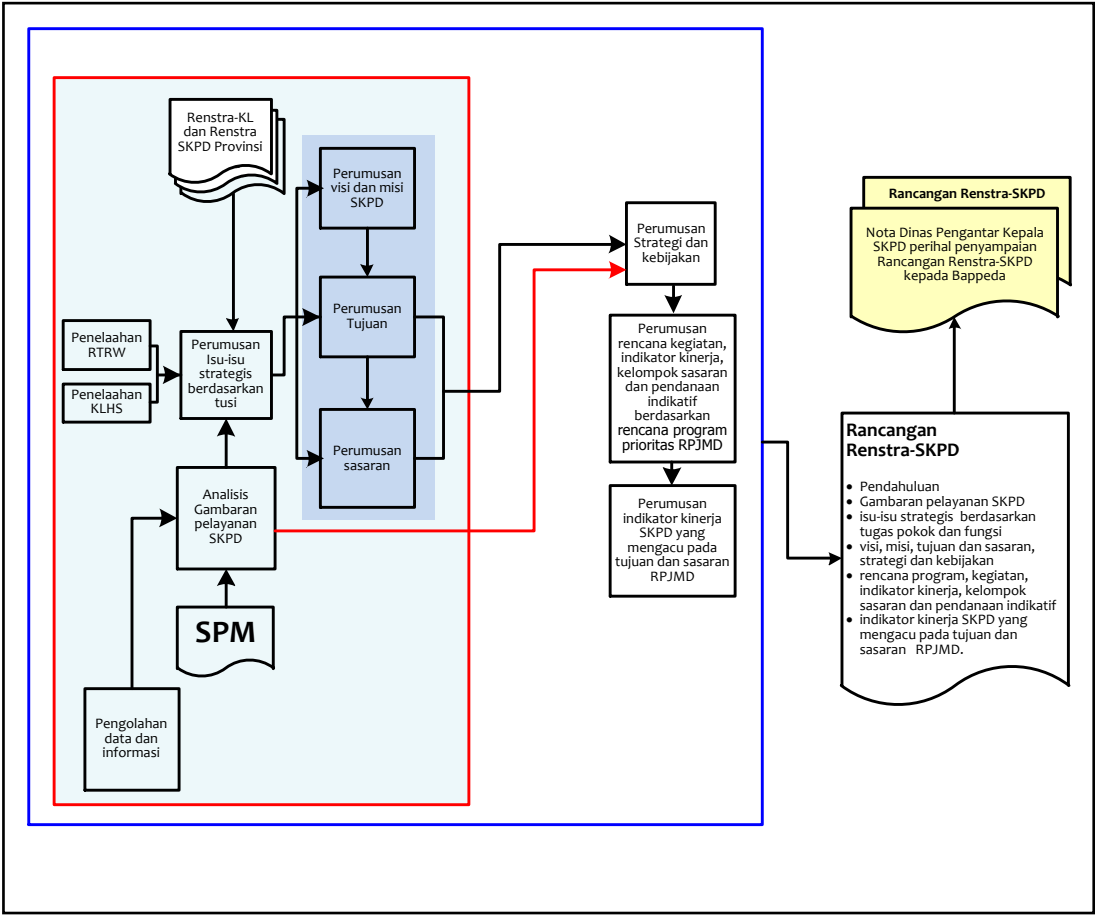
1. Tahap perumusan rancangan Renstra SKPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renstra SKPD.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra SKPD dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

GAMBAR. G-IV.C.1  
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Provinsi



GAMBAR. G-IV.C.2  
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Kabupaten/Kota



### C.1 Tahap Perumusan Rancangan Renstra SKPD

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra SKPD sangat menentukan kualitas dokumen Renstra SKPD yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra SKPD adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD terkait.

Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja (*working paper*). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan Renstra SKPD merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen) Renstra SKPD.

Kegiatan-kegiatan tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

Kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra SKPD yang dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD terdiri dari:

#### 1. Pengolahan data dan informasi

- a) data dan informasi gambaran pelayanan SKPD; mencakup (1) struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan SKPD, (2) data dan informasi yang menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra SKPD periode sebelumnya, (3) data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan SKPD.
- b) data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD: mencakup (1) data pendapatan SKPD, (2) data belanja SKPD, (3) data pembiayaan SKPD (khusus Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/SKPKD).

#### 2. Analisis gambaran pelayanan SKPD, terdiri dari:

- a) analisis gambaran umum pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan SKPD.
- b) analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD.

#### 3. Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD

Untuk penyusunan rancangan Renstra SKPD provinsi, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota, yang mencakup:

- a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L;
- b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
- c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota; dan
- d) program prioritas SKPD kabupaten/kota dan target kinerja serta lokasi program prioritas.

Untuk penyusunan rancangan Renstra SKPD kabupaten/kota, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, yang mencakup:

- a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L;
- b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
- c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi; dan
- d) program prioritas SKPD provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.

#### 4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup:

- a) tujuan dan sasaran RTRW;
- b) struktur dan pola ruang; dan
- c) indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

#### 5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi SKPD.

#### 6. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan:

- a) Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD (potensi dan permasalahan pelayanan SKPD);
  - b) Hasil review Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota untuk penyusunan Renstra SKPD provinsi dan hasil review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi untuk penyusunan Renstra SKPD kabupaten/kota;
  - c) Hasil penelaahan RTRW;
  - d) Hasil analisis dokumen KLHS; dan
  - e) Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD berdasarkan huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d).
7. Perumusan visi dan misi SKPD;
  8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD; dan
  9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan setelah SKPD menerima surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD adalah:

1. Mempelajari surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD;
2. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
3. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD;
4. Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan
5. Pelaksanaan forum SKPD.

#### C.1.1. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan (*slide* atau *white paper*), hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan renstra SKPD.

Mengingat pentingnya kesiapan data dan informasi dalam proses perumusan renstra SKPD, perlu ditunjuk anggota tim yang secara khusus ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengolahan data (dan bagaimana data itu harus diperoleh) sangat penting. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan yaitu bahwa pengolahan data dan informasi hendaknya tidak dilakukan hanya disaat dimulainya perencanaan, tetapi kegiatan ini harus berlangsung terus menerus setiap hari (kontinyu), seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berhubung pengolahan/tersedianya data dan informasi yang akurat merupakan salah satu kelemahan atau kurang mendapat perhatian hampir diseluruh lingkungan kehidupan kita, maka perlu ditingkatkan/ditumbuhkembangkan kesadaran betapa pentingnya data dan informasi utamanya untuk penyusunan rencana pembangunan daerah.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan sebagai bahan kajian/analisis dalam perumusan rancangan Renstra SKPD yakni yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD mencakup:

1. Regulasi yang menjadi asas legal bagi SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta struktur organisasi, tata laksana, dan kepegawaian SKPD;
2. Renja SKPD tahun berjalan untuk menginformasikan kondisi terkini isu-isu pelayanan SKPD dan perkiraan tingkat capaian target Renstra SKPD sampai dengan akhir tahun berjalan;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;

4. Data perkembangan pengelolaan keuangan dan aset SKPD paling kurang 5 (lima) tahun terakhir;
5. Standar Pelayanan Minimal/SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya;
6. Renstra K/L;
7. Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota;
8. RTRW;
9. Peraturan perundang-undangan terkait pelayanan SKPD; dan
10. Informasi lain yang terkait pelayanan SKPD.

Hasil evaluasi Renstra SKPD periode sebelumnya merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra SKPD periode berikutnya. Mengingat bahwa pada saat rancangan Renstra SKPD disusun, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sampai dengan tahun ke-5 belum diperoleh, maka digunakan hasil evaluasi sementara Renstra SKPD yang memuat hasil evaluasi Renstra SKPD sampai dengan pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun berjalan (periode sebelum tahun rencana).

Pengolahan data dan informasi diatas perlu memperhatikan tingkat urgensi data dan informasi dalam analisis/kajian yang diperlukan bagi penyusunan suatu Renstra SKPD.

Hal ini guna memastikan efektivitas dan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya yang dialokasikan dalam pengumpulan dan pengolahan data/informasi. Data dan informasi yang digunakan hendaknya memiliki tingkat keakurasian, validitas, dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### C.1.2. Analisis Gambaran Pelayanan SKPD

Analisis gambaran pelayanan SKPD untuk menunjukkan:

1. Peran SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
2. Sumber daya SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;
3. Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya;
4. Capaian kinerja antara Renstra SKPD dengan RPJMD periode sebelumnya; dan
5. Hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi.

Analisis gambaran pelayanan SKPD diharapkan mampu mengidentifikasi:

1. Tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Indikator yang dimaksud adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini;
2. Potensi dan permasalahan pelayanan SKPD; dan
3. Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan SKPD.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berkenaan, sebagaimana dimuat dalam Lampiran I peraturan menteri ini. Dalam keadaan indikator kinerja yang dimaksud tidak tersedia, maka SKPD perlu menyepakati indikator kinerja mandiri untuk mengukur kinerja SKPD berkenaan.

Adapun informasi yang diperlukan untuk mendukung analisis ini, sekurang-kurangnya mencakup:

- a) Regulasi yang menjadi asas legal bagi SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD untuk menunjukkan peran SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b) Struktur organisasi SKPD untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme);
- c) Renja SKPD tahun berjalan untuk menginformasikan isu-isu terkini pelayanan SKPD dikaitkan dengan isu-isu krusial dan aktual daerah (sebagaimana dimuat dalam RKPD

tahun berjalan), isu strategis dalam Renstra SKPD periode sebelumnya, dan perkiraan tingkat pencapaian target Renstra SKPD sampai dengan akhir tahun berjalan;

- d) Laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu untuk menunjukkan tingkat capaian/realisasi terhadap target kinerja yang harus dicapai selama pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, pelayanan yang mencapai target atau yang belum mencapai target, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tercapai tidaknya target pelayanan tersebut;
- e) Berita acara forum SKPD tahunan (yang dapat menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan SKPD); dan
- f) Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya

Informasi dari butir (c) sampai dengan (f) dianalisis untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD, masalah yang dihadapi, dan potensi pengembangan pelayanan SKPD.

- g) Data perkembangan pendanaan pelayanan SKPD (pendapatan, belanja, dan pembiayaan) minimal 5 (lima) tahun terakhir untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan SKPD (rasio antara dana yang dianggarkan dengan yang direalisasikan), dan kapasitas pendanaan pelayanan SKPD, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan aspek pendanaan pelayanan SKPD.

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Indikator yang digunakan mengacu pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra SKPD periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Langkah-langkah analisis tingkat kinerja pelayanan SKPD adalah:

1. Tentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD sekurang-kurangnya mencakup salah satu dari kelompok indikator berikut ini:
  - a) Indikator kinerja SPM, jika SKPD telah memiliki SPM;
  - b) Indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. SKPD menggunakan indikator dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berkenaan;
  - c) Indikator yang telah dikembangkan SKPD secara mandiri berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi SKPD tersebut; dan
  - d) Indikator *Millennium Development Goals* (MDGs) ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berkenaan.
2. Identifikasi target (besaran) kinerja menurut SPM, indikator kinerja kunci (IKK) atau hasil analisis kebutuhan, pada setiap indikator;
3. Identifikasi target (besaran) kinerja dalam Renstra SKPD (periode sebelumnya) yang dirinci per tahun;
4. Hitung realisasi capaian target kinerja setiap tahun sampai dengan tahun ke-5 dalam Renstra SKPD dan sampai dengan saat penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Renja SKPD tahun berjalan;
5. Hitung rasio antara capaian kinerja dengan kinerja yang dibutuhkan/ditargetkan untuk menunjukkan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan;
6. Identifikasi pada pelayanan mana saja target telah tercapai dan belum tercapai;
7. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target tersebut, baik berupa faktor pendukung maupun faktor kendala pencapaian sebagai bahan perumusan permasalahan pelayanan SKPD untuk ditangani pada Renstra berikutnya;
8. Jika SKPD belum mempunyai SPM dan dokumen Renstra SKPD-nya belum mencantumkan indikator maupun target kinerjanya, maka analisis tingkat capaian pelayanan mengacu pada IKK serta analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi SKPD;
9. Bila pada IKK angka standarnya tidak tersedia atau target kinerjanya tidak tercantum dalam Renstra SKPD, maka analisis capaian kinerja dihubungkan dengan indikator kinerja

SKPD yang terkait dengan SPM;

10. Bila target kinerja dalam IKK belum tercantum, maka perlu dilakukan analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai dengan norma dan standar pelayanan masing-masing SKPD; dan
11. Hasil dari langkah-langkah analisis tersebut diatas, dapat diajikan dalam contoh tabel (contoh untuk layanan SKPD/dinas pendidikan) seperti Tabel.T-IV.C.2 berikut:



Tabel.T-IV.C.2  
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Pendidikan\*)  
Provinsi/Kabupaten/Kota \*\*) .....

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| NO  | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***) | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- |     |     |     |      | Realisasi Capaian Tahun ke- |      |      |      |      | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
|     |                                                     |            |            |                          | 1                             | 2   | 3   | 4   | 5    | 1                           | 2    | 3    | 4    | 5    | 1                            | 2    | 3    | 4    | 5    |
| (1) | (2)                                                 | (3)        | (4)        | (5)                      | (6)                           | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)                        | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)                         | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 16  | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs                   |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
| 17  | Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA                |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
| 18  | Angka Kelulusan (AL) SD/MI                          |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
| 19  | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs                        |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
| 20  | Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA                     |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
| 21  | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs        |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
| 22  | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA   |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
| 23  | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV              |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |

Catatan:

\*) Contoh untuk SKPD Pendidikan

\*\*) Diisi nama provinsi/ kabupaten/kota

\*\*\*) Sesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi/ kabupaten/kota





| Uraian ***)                                                               | Anggaran pada Tahun ke- |     |     |     |     | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |     |     |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |      |      |      |      | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|-----|-----|------|------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
|                                                                           | 1                       | 2   | 3   | 4   | 5   | 1                                 | 2   | 3   | 4    | 5    | 1                                             | 2    | 3    | 4    | 5    | Anggaran              | Realisasi |
| (1)                                                                       | (2)                     | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)                               | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)                                          | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)                  | (18)      |
|                                                                           |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
| BELANJA DAERAH                                                            |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
| Belanja tidak langsung                                                    |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
| - Belanja pegawai                                                         |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
| - Belanja bunga                                                           |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
| - Belanja subsidi                                                         |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
| - Belanja hibah                                                           |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
| - Belanja bantuan sosial                                                  |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
| - Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
| - Belanja tidak terduga                                                   |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
| Belanja langsung                                                          |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
| - Belanja pegawai                                                         |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
| - Belanja barang dan jasa                                                 |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
| - Belanja modal                                                           |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
| PEMBIAYAAN                                                                |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
| Penerimaan pembiayaan                                                     |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
| - Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya               |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
| - Pencairan dana cadangan                                                 |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
| - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan                         |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
| - Penerimaan pinjaman daerah                                              |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
| - Penerimaan kembali pemberian pinjaman                                   |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
| - Penerimaan piutang daerah                                               |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
| Pengeluaran pembiayaan                                                    |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
| - Pembentukan dana cadangan                                               |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
| - Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah                          |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
| - Pembayaran pokok utang                                                  |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
| - Pemberian pinjaman daerah                                               |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
| Total                                                                     |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |

\*) diisi dengan nama SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota  
\*\*) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota  
\*\*\*) disesuaikan dengan kewenangan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

Petunjuk cara pengisian Tabel.T-IV.C.3:

- Kolom (1) diisi dengan uraian jenis pendapatan/belanja/pembiayaan sesuai dengan kebutuhan;
- Kolom (2) sampai dengan Kolom (6) diisi dengan data anggaran SKPD sesuai yang tercantum pada APBD dalam 5 (lima) tahun pelaksanaan Renstra SKPD;
- Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan data realisasi penyerapan anggaran SKPD sesuai laporan pelaksanaan APBD/Renja SKPD pada tahun berkenaan;
- Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan rasio antara realisasi penyerapan anggaran dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD; dan
- Kolom (17) diisi dengan angka rata-rata pertumbuhan anggaran, yaitu: (jumlah anggaran pada tahun ke-5 – jumlah anggaran pada tahun ke-1)/5.
- Kolom (18) diisi dengan angka rata-rata pertumbuhan realisasi, yaitu: (jumlah realisasi pada tahun ke-5 – jumlah realisasi pada tahun ke-1)/5.

Tabel.T-IV.C.3 merupakan salah satu tabel yang dimuat dalam dokumen Renstra SKPD. Dari tabel diatas, dapat dilihat pada tahun mana saja rasio antara realisasi penyerapan anggaran dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya perlu diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Dengan demikian, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan pendanaan pelayanan SKPD untuk diatasi melalui strategi/kebijakan dalam Renstra SKPD periode berikutnya. Tabel diatas juga menunjukkan kapasitas pendanaan pelayanan SKPD dalam 5 (lima) tahun terakhir, sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis dan program strategis SKPD pada Renstra SKPD yang akan disusun.

C.1.3. Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD

1. Untuk Provinsi

Analisis Renstra K/L dan SKPD kabupaten/kota (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD provinsi telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota; dan
- b. apakah tingkat capaian kinerja Renstra SKPD provinsi melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L atau rata-rata Kabupaten/kota.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra SKPD provinsi melebihi sasaran Renstra K/L atau rata-rata kabupaten/kota, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja SKPD sudah baik secara nasional dan regional. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa SKPD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan, dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/kebijakan pelayanan yang ditempuh.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota yang masih berlaku ini menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD yang akan ditangani pada Renstra SKPD provinsi periode berikutnya.

Jika Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota tahun rencana telah tersedia, maka review dilakukan pada:

- a. isu-isu strategis pelayanan K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota;
- b. tujuan dan sasaran;
- c. strategi dan kebijakan;
- d. program prioritas beserta target kinerjanya;
- e. indikasi lokasi program prioritas;
- f. indikasi besaran pendanaan program strategi; dan
- g. tahapan pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota tahun rencana, ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra SKPD provinsi. Review merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra SKPD provinsi dengan Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota serta mencegah tumpang tindih antara program dan kegiatan pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

Tabel.T-IV.C.4  
Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota\*) dan Renstra K/L

| No  | Indikator Kinerja | Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi | Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten/Kota*) | Sasaran pada Renstra K/L |
|-----|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| (1) | (2)               | (3)                                   | (4)                                        | (5)                      |
| 1   |                   |                                       |                                            |                          |
| 2   |                   |                                       |                                            |                          |
| 3   |                   |                                       |                                            |                          |
| dst |                   |                                       |                                            |                          |

\*) Rata-rata Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.4:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai kebutuhan;
- Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran yang terdapat pada Renstra SKPD provinsi;
- Kolom (3) diisi dengan data capaian sasaran jangka menengah Renstra SKPD provinsi untuk setiap indikator kinerja pada kolom (2);
- Kolom (4) diisi dengan data sasaran jangka menengah Renstra SKPD kabupaten/kota untuk setiap indikator kinerja pada kolom (2). Jika suatu indikator kinerja tidak termasuk

dalam indikator kinerja sasaran Renstra SKPD kabupaten/kota, maka pada data sasaran untuk indikator kinerja yang tidak termasuk tersebut cukup ditulis dengan (-), yang berarti Renstra SKPD kabupaten/kota tidak mencakup indikator kinerja tersebut beserta data sasaran kinerjanya; dan

Kolom (5) diisi dengan data sasaran jangka menengah Renstra K/L untuk setiap indikator kinerja pada kolom (2). Jika suatu indikator kinerja tidak termasuk dalam indikator kinerja sasaran Renstra K/L, maka pada data sasaran untuk indikator kinerja yang tidak termasuk tersebut cukup ditulis dengan (-), yang berarti Renstra K/L tidak mencakup indikator kinerja tersebut beserta data sasaran kinerjanya.

2. Untuk Kabupaten/Kota

Analisis Renstra K/L dan SKPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra SKPD provinsi dan Renstra K/L; dan
- b. apakah tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kabupaten/kota melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra SKPD provinsi atau Renstra K/L.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kabupaten/kota melebihi sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja SKPD sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa SKPD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan, dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/ kebijakan pelayanan yang ditempuh.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi yang masih berlaku, menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD yang akan ditangani pada Renstra SKPD kabupaten/kota periode berikutnya.

Jika Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi tahun rencana telah tersedia, maka review dilakukan pada:

- a. isu-isu strategis pelayanan K/L dan Renstra SKPD provinsi;
- b. tujuan dan sasaran;
- c. strategi dan kebijakan;
- d. program prioritas beserta target kinerjanya;
- e. indikasi lokasi program prioritas;
- f. indikasi besaran pendanaan program strategis; dan
- g. tahapan pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra SKPD kabupaten/kota. Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra SKPD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

Tabel.T-IV.C.5  
Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota  
terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

| No  | Indikator Kinerja | Capaian Sasaran<br>Renstra SKPD<br>Kabupaten/Kota | Sasaran pada<br>Renstra SKPD<br>Provinsi | Sasaran pada<br>Renstra K/L |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| (1) | (2)               | (3)                                               | (4)                                      | (5)                         |
| 1   |                   |                                                   |                                          |                             |
| 2   |                   |                                                   |                                          |                             |
| 3   |                   |                                                   |                                          |                             |
| dst |                   |                                                   |                                          |                             |

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.5:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai kebutuhan;
- Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran yang terdapat pada Renstra SKPD kabupaten/kota;
- Kolom (3) diisi dengan data capaian sasaran jangka menengah Renstra SKPD kabupaten/kota untuk setiap indikator kinerja pada kolom (2);
- Kolom (4) diisi dengan data sasaran jangka menengah Renstra SKPD provinsi untuk setiap indikator kinerja pada kolom (2). Jika suatu indikator kinerja tidak termasuk dalam indikator kinerja sasaran Renstra SKPD provinsi, maka pada data sasaran untuk indikator kinerja yang tidak termasuk tersebut cukup ditulis dengan (-), yang berarti Renstra SKPD provinsi tidak mencakup indikator kinerja tersebut beserta data sasaran kinerjanya; dan
- Kolom (5) diisi dengan data sasaran jangka menengah Renstra K/L untuk setiap indikator kinerja pada kolom (2). Jika suatu indikator kinerja tidak termasuk dalam indikator kinerja sasaran Renstra K/L, maka pada data sasaran untuk indikator kinerja yang tidak termasuk tersebut cukup ditulis dengan (-), yang berarti Renstra K/L tidak mencakup indikator kinerja tersebut beserta data sasaran kinerjanya.

C.1.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

- 1. Rencana struktur tata ruang;
- 2. Struktur tata ruang saat ini;
- 3. Rencana pola ruang;
- 4. Pola ruang saat ini; dan
- 5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Tabel.T-IV.C.6  
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah  
Provinsi/Kabupaten/Kota....\*)

| No  | Rencana Struktur Ruang | Struktur Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD |
|-----|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| (1) | (2)                    | (3)                     | (4)                                                                   | (5)                                                               | (6)                                       |
| 1   |                        |                         |                                                                       |                                                                   |                                           |
| 2   |                        |                         |                                                                       |                                                                   |                                           |
| 3   |                        |                         |                                                                       |                                                                   |                                           |
| dst |                        |                         |                                                                       |                                                                   |                                           |

\*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.6:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan;
- Kolom (2) diisi dengan daftar Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang direncanakan di wilayah provinsi/kabupaten/kota, rencana bandara, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, terminal, stasiun kereta, jaringan jalan primer/sekunder, jaringan prasarana sumber daya air, jaringan prasarana energi/listrik, dan jaringan prasarana telekomunikasi;
- Kolom (3) diisi dengan daftar Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang telah ada di wilayah provinsi/ kabupaten/kota, ketersediaan bandara, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, terminal,

- stasiun kereta, jaringan jalan primer/sekunder, jaringan prasarana sumber daya air, jaringan prasarana energi/listrik, dan jaringan prasarana telekomunikasi;
- Kolom (4) diisi dengan indikasi program pemanfaatan ruang untuk setiap rencana struktur ruang; dan
- Kolom (5) diisi dengan perbandingan antara kondisi rencana dan kondisi saat ini, dan indikasi program pemanfaatan ruang pada periode berkenaan dengan tahun perencanaan Renstra SKPD, lakukan identifikasi apakah ada pengaruhnya kepada kebutuhan pelayanan SKPD. Jika ada, identifikasilah bentuk kebutuhan tersebut, perkiraan besaran kebutuhan, dan lokasinya; dan
- Kolom (6) diisi dengan daftar lokasi berdasarkan hasil pada kolom (5). Daftar lokasi ini menjadi arahan lokasi pengembangan pelayanan SKPD untuk mendukung perwujudan struktur ruang wilayah.

Tabel.T-IV.C.7  
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

| No  | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD |
|-----|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| (1) | (2)                | (3)                 | (4)                                                                   | (5)                                                           | (6)                                       |
| 1   |                    |                     |                                                                       |                                                               |                                           |
| 2   |                    |                     |                                                                       |                                                               |                                           |
| 3   |                    |                     |                                                                       |                                                               |                                           |
| 4   |                    |                     |                                                                       |                                                               |                                           |
| dst |                    |                     |                                                                       |                                                               |                                           |

\*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.7:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai kebutuhan;
- Kolom (2) diisi dengan daftar kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan strategis yang direncanakan di wilayah provinsi/kabupaten/kota;
- Kolom (3) diisi dengan daftar kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan strategis yang telah ada (eksisting) di wilayah provinsi/kabupaten/kota;
- Kolom (4) diisi dengan indikasi program pemanfaatan ruang untuk setiap rencana pola ruang;
- Kolom (5) diisi dengan perbandingan antara kondisi rencana dan kondisi saat ini, dan indikasi program pemanfaatan ruang pada periode berkenaan dengan tahun perencanaan Renstra SKPD, lakukan identifikasi apakah ada pengaruhnya kepada kebutuhan pelayanan SKPD. Jika ada, identifikasilah bentuk kebutuhan tersebut, perkiraan besaran kebutuhan, dan lokasinya; dan
- Kolom (6) diisi dengan daftar lokasi berdasarkan hasil pada kolom (5). Daftar lokasi ini menjadi arahan lokasi pengembangan pelayanan SKPD untuk mendukung perwujudan pola ruang wilayah.

C.1.5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain;

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan

2. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Tabel.T-IV.C.8  
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS  
Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)  
SKPD.....

| No  | Aspek Kajian                                                              | Ringkasan KLHS | Implikasi terhadap Pelayanan SKPD | Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                       | (3)            | (4)                               | (5)                                              |
| 1.  | Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan |                |                                   |                                                  |
| 2.  | Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup                     |                |                                   |                                                  |
| 3.  | Kinerja layanan/jasa ekosistem                                            |                |                                   |                                                  |
| 4.  | Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam                                    |                |                                   |                                                  |
| 5.  | Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim        |                |                                   |                                                  |
| 6.  | Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati                       |                |                                   |                                                  |

\*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.8:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai kebutuhan;  
Kolom (2) diisi dengan aspek kajian KLHS;  
Kolom (3) diisi dengan ringkasan KLHS untuk setiap aspek kajian berkenaan;  
Kolom (4) diisi dengan pengaruh yang mungkin/dapat terjadi terhadap kebijakan pelayanan SKPD; dan  
Kolom (5) diisi dengan catatan yang harus diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan agar tidak bertentangan dengan KLHS.

C.1.6. Perumusan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

- 1. Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD (Tabel.T-IV.C.2 dan Tabel.T-IV.C.3);
- 2. Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra-SKPD provinsi/kabupaten/kota (Tabel.T-IV.C.4 untuk provinsi) atau (Tabel.T-IV.C.5 untuk kabupaten/kota);
- 3. Hasil telaahan RTRW (Tabel.T-IV.C.6 dan Tabel.T-IV.C.7); dan
- 4. Hasil analisis KLHS (Tabel.T-IV.C.8)

Informasi tersebut dapat disusun kedalam contoh tabel matriks sebagai berikut:

Tabel.T-IV.C.9  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Pendidikan\*)  
Provinsi.....\*\*)

| Aspek Kajian | Capaian/Kondisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi   |                                    | Permasalahan Pelayanan SKPD |
|--------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|              |                          |                        | INTERNAL (KEWENANGAN SKPD) | EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD) |                             |
| (1)          | (2)                      | (3)                    | (4)                        | (5)                                | (6)                         |
|              |                          |                        |                            |                                    |                             |
|              |                          |                        |                            |                                    |                             |
|              |                          |                        |                            |                                    |                             |
|              |                          |                        |                            |                                    |                             |
|              |                          |                        |                            |                                    |                             |

\*) Sebagai contoh adalah SKPD pendidikan provinsi

\*\*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi.

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.9:

- Kolom (1) diisi dengan judul aspek-aspek kajian yang telah dilakukan, yaitu: Gambaran pelayanan SKPD, Kajian terhadap Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota, Kajian terhadap Renstra K/L, Kajian terhadap RTRW, Kajian KLHS;
- Kolom (2) diisi dengan kesimpulan setiap aspek kajian tentang capaian/kondisi saat ini
- Kolom (3) diisi dengan standar yang digunakan pada setiap aspek kajian untuk menilai kualitas capaian/kondisi saat ini;
- Kolom (4) diisi dengan faktor-faktor yang dapat dikendalikan melalui kewenangan SKPD;
- Kolom (5) diisi dengan faktor-faktor yang berada diluar kewenangan SKPD; dan
- Kolom (6) diisi dengan rumusan permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan informasi pada kolom (2), kolom (3), kolom (4), dan kolom (5).

Selanjutnya, dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnya dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-IV.C.10  
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

| No  | Isu Strategis          |                   |                         |           |
|-----|------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
|     | Dinamika Internasional | Dinamika Nasional | Dinamika Regional/Lokal | Lain-lain |
| (1) | (2)                    | (3)               | (4)                     | (5)       |
| 1   |                        |                   |                         |           |
| 2   |                        |                   |                         |           |
| 3   |                        |                   |                         |           |
| 4   |                        |                   |                         |           |

\*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota



Cara Pengisian Tabel.T-IV.C.10:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan nomor urutan.
- Kolom (2) diisi dengan isu strategis yang diidentifikasi dari dunia Internasional.
- Kolom (3) diisi dengan isu strategis yang diidentifikasi di tingkat nasional.
- Kolom (4) diisi dengan isu strategis yang diidentifikasi se-wilayah provinsi/kab/kota.
- Kolom (5) diisi dengan isu-isu strategis lain yang berasal dari dunia akademik, usaha/ bisnis, sosial budaya, penemuan-penemuan teknologi, dan lain-lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menelaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Tabel.T-IV.C.11  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD  
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| Visi: ..... |                                             |                             |            |           |
|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| No          | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor     |           |
|             |                                             |                             | Penghambat | Pendorong |
| (1)         | (2)                                         | (3)                         | (4)        | (5)       |
| 1           | Misi 1.....                                 |                             |            |           |
|             | Program.....                                |                             |            |           |
| 2           | Misi 1.....                                 |                             |            |           |
|             | Program.....                                |                             |            |           |

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.11:

- Kolom (1) diisi dengan nomor sesuai kebutuhan;
- kolom (2) diisi dengan uraian misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Setiap uraian misi disertai dengan uraian program;
- Kolom (3) diisi dengan permasalahan pelayanan SKPD hasil Tabel.T-IV.C.9 yang dapat mempengaruhi pencapaian misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;
- Kolom (4) diisi dengan faktor penghambat pelayanan SKPD yang menyebabkan permasalahan pelayanan dan dapat menghambat pencapaian misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
- Kolom (5) diisi dengan faktor pendorong pelayanan SKPD yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat mendorong pencapaian misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

1. Untuk provinsi:

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/Ldan Renstra SKPD kabupaten/kota (lihat kembali Tabel.T-IV.C.4), SKPD provinsi juga perlu menyusun faktor-faktor

baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong, yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi.

2. Untuk kabupaten/kota:

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi (lihat kembali Tabel.T-IV.C.5), SKPD kabupaten/kota menyusun faktor-faktor baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong, yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi.

Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:

Tabel.T-IV.C.12  
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No  | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota | Sebagai Faktor |           |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|
|     |                                     |                                                     | Penghambat     | Pendorong |
| (1) | (2)                                 | (3)                                                 | (4)            | (5)       |
|     |                                     |                                                     |                |           |
|     |                                     |                                                     |                |           |
|     |                                     |                                                     |                |           |
|     |                                     |                                                     |                |           |
|     |                                     |                                                     |                |           |
|     |                                     |                                                     |                |           |
|     |                                     |                                                     |                |           |

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.12:

- Kolom (1) diisi dengan nomor sesuai kebutuhan;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran jangka menengah Renstra K/L sebagaimana tercantum dalam Renstra K/L, untuk setiap indikator kinerja pelayanan SKPD. Indikator kinerja pelayanan SKPD yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum dalam Renstra SKPD;
- Kolom (3) diisi dengan permasalahan pelayanan SKPD hasil Tabel.T-IV.C.9 berdasarkan kesenjangan antara capaian Renstra SKPD dengan sasaran Renstra K/L;
- Kolom (4) diisi dengan faktor penghambat pelayanan SKPD yang menyebabkan permasalahan pelayanan SKPD dan menghambat pencapaian sasaran Renstra K/L; dan
- Kolom (5) diisi dengan faktor pendorong pelayanan SKPD yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat mendorong pencapaian sasaran Renstra K/L.

1. Untuk provinsi:

Demikian pula hal-nya dengan hasil analisis terhadap Renstra SKPD kabupaten/kota, SKPD provinsi perlu menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada Tabel.T-IV.C.9.

Tabel.T-IV.C.13  
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No  | Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kabupaten/kota | Permasalahan Pelayanan SKPD | Sebagai Faktor |           |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|
|     |                                                     |                             | Penghambat     | Pendorong |
| (1) | (2)                                                 | (3)                         | (4)            | (5)       |
|     |                                                     |                             |                |           |
|     |                                                     |                             |                |           |
|     |                                                     |                             |                |           |
|     |                                                     |                             |                |           |
|     |                                                     |                             |                |           |

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.13:

- Kolom (1) diisi dengan nomor sesuai kebutuhan;
- Kolom (2) diisi dengan rata-rata sasaran jangka menengah Renstra SKPD kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD masing-masing kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut, untuk setiap indikator kinerja pelayanan SKPD provinsi. Indikator kinerja pelayanan SKPD provinsi yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum dalam Renstra SKPD provinsi;
- Kolom (3) diisi dengan permasalahan pelayanan SKPD hasil Tabel.T-IV.C.9 berdasarkan kesenjangan antara capaian Renstra SKPD provinsi dengan rata-rata sasaran Renstra SKPD kabupaten/kota;
- Kolom (4) diisi dengan faktor penghambat pelayanan SKPD provinsi yang menyebabkan permasalahan pelayanan SKPD dan menghambat pencapaian sasaran Renstra SKPD kabupaten/kota; dan
- Kolom (5) diisi dengan faktor pendorong pelayanan SKPD yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat mendorong pencapaian sasaran Renstra SKPD kabupaten/kota.

2. Untuk kabupaten/kota:

Demikian pula hal-nya dengan hasil analisis terhadap Renstra SKPD provinsi, SKPD kabupaten/kota perlu menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada Tabel.T-IV.C.9.

Tabel.T-IV.C.14  
Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No  | Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi | Permasalahan Pelayanan SKPD | Sebagai Faktor |           |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|
|     |                                               |                             | Penghambat     | Pendorong |
| (1) | (2)                                           | (3)                         | (4)            | (5)       |
|     |                                               |                             |                |           |
|     |                                               |                             |                |           |
|     |                                               |                             |                |           |
|     |                                               |                             |                |           |
|     |                                               |                             |                |           |
|     |                                               |                             |                |           |
|     |                                               |                             |                |           |

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.14:

- Kolom (1) diisi dengan nomor sesuai kebutuhan;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran jangka menengah Renstra SKPD provinsi sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD provinsi untuk setiap indikator kinerja pelayanan SKPD kabupaten/kota. Indikator kinerja pelayanan SKPD kabupaten/kota yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota;
- Kolom (3) diisi dengan permasalahan pelayanan SKPD hasil Tabel.T-IV.C.9 berdasarkan kesenjangan antara capaian Renstra SKPD kabupaten/kota dengan sasaran Renstra SKPD provinsi;
- Kolom (4) diisi dengan faktor penghambat pelayanan SKPD yang menyebabkan permasalahan pelayanan SKPD dan menghambat pencapaian sasaran Renstra SKPD provinsi; dan
- Kolom (5) diisi dengan faktor pendorong pelayanan SKPD yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat mendorong pencapaian sasaran Renstra SKPD provinsi.

Demikian pula selanjutnya dilakukan hal yang sama pada hasil telaahan RTRW.

Tabel.T-IV.C.15  
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No  | Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor     |           |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|
|     |                                                          |                             | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2)                                                      | (3)                         | (4)        | (5)       |
|     |                                                          |                             |            |           |
|     |                                                          |                             |            |           |
|     |                                                          |                             |            |           |
|     |                                                          |                             |            |           |

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.15:

- Kolom (1) diisi dengan nomor sesuai kebutuhan;
- Kolom (2) diisi dengan hasil telaahan RTRW terkait tugas dan fungsi SKPD;
- Kolom (3) diisi dengan permasalahan pelayanan SKPD hasil Tabel.T-IV.C.9 berdasarkan implikasi RTRW terhadap macam dan tingkat pelayanan SKPD yang dibutuhkan;
- Kolom (4) diisi dengan faktor penghambat pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD dan menghambat terwujudnya RTRW; dan
- Kolom (5) diisi dengan faktor pendorong pelayanan SKPD yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat mendorong terwujudnya RTRW.

Demikian pula selanjutnya dilakukan hal yang sama pada hasil telaahan terhadap KLHS.

Tabel.T-IV.C.16  
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No  | Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor     |           |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|
|     |                                          |                             | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2)                                      | (3)                         | (4)        | (5)       |
|     |                                          |                             |            |           |
|     |                                          |                             |            |           |
|     |                                          |                             |            |           |
|     |                                          |                             |            |           |

Cara pengisianTabel.T-IV.C.16:

- Kolom (1) diisi dengan nomor sesuai kebutuhan;
- Kolom (2) diisi dengan hasil analisis terhadap KLHS terkait tugas dan fungsi SKPD;
- Kolom (3) diisi dengan permasalahan pelayanan SKPD hasil Tabel.T-IV.C.9 berdasarkan implikasi KLHS terhadap pelayanan SKPD;
- Kolom (4) diisi dengan faktor penghambat pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD sebagai implikasi dari hasil KLHS; dan
- Kolom (5) diisi dengan faktor pendorong pelayanan SKPD yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan sehingga sesuai dengan hasil KLHS.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan SKPD antara lain dapat dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel dengan contoh sebagai berikut:

Tabel.T-IV.C.17  
Contoh Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

| No     | Kriteria*)                                                                                                           | Bobot**) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1      | Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota | 20       |
| 2      | Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD                                                                              | 10       |
| 3      | Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik                                                                           | 20       |
| 4      | Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah                                                                        | 10       |
| 5      | Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani                                                                        | 15       |
| 6      | Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan                                                                        | 25       |
| Dst... | Dst...                                                                                                               |          |
|        | Total                                                                                                                | 100      |

\*) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut pada angka b), dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-IV.C.18  
Nilai Skala Kriteria

| No    | Isu Strategis | Nilai Skala Kriteria ke- |     |     |     |     |     |        | Total Skor |
|-------|---------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------------|
|       |               | 1                        | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | Dst... |            |
| (1)   | (2)           | (3)                      | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)    | (10)       |
| 1     |               |                          |     |     |     |     |     |        |            |
| 2     |               |                          |     |     |     |     |     |        |            |
| 3     |               |                          |     |     |     |     |     |        |            |
| 4     |               |                          |     |     |     |     |     |        |            |
| 5     |               |                          |     |     |     |     |     |        |            |
| 6     |               |                          |     |     |     |     |     |        |            |
| 7     |               |                          |     |     |     |     |     |        |            |
| Dst.. |               |                          |     |     |     |     |     |        |            |

Cara Pengisian Tabel.T.IV.C.18:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) diisi sesuai isu strategis yang teridentifikasi
- Kolom (3) s.d Kolom (9) diisi dengan total skor per kriteria
- Kolom (10) diisi dengan total skor isu strategis dari seluruh kriteria.

c. Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-IV.C.19  
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

| No.   | Isu-Isu Strategis | Total Skor | Rata-Rata skor |
|-------|-------------------|------------|----------------|
| (1)   | (2)               | (3)        | (4)            |
| 1     |                   |            |                |
| 2     |                   |            |                |
| 3     |                   |            |                |
| 4     |                   |            |                |
| Dst.. |                   |            |                |

Cara Pengisian Tabel.T.IV.C.19:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi sesuai dengan isu strategis yang teridentifikasi baik isu dari dunia internasional, nasional dan regional.
- Kolom (3) diisi dengan total akumulasi nilai skor dari isu-isu strategis.
- Kolom (4) diisi dengan nilai rata-rata dari total skor tiap-tiap isu strategis.

Teknik atau metode di atas dapat digunakan untuk melakukan pemeringkatan sejenis bidang lainnya, seperti memprioritaskan program prioritas, kegiatan prioritas, usulan permasalahan pembangunan, dan lain-lain.

#### C.1.7. Perumusan Visi dan Misi SKPD

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (*wishfull thinking*), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

##### Perumusan Visi SKPD

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi SKPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Kriteria suatu rumusan visi SKPD antara lain:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi pembangunan masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang;
2. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan;
3. Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan SKPD, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD; dan
4. Sejalan dengan visi dan misi kepala daerah dan arah pembangunan daerah jangka menengah.

Visi SKPD yang baik harus dapat memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Dapat dibayangkan oleh semua pelaku/pemangku kepentingan pelayanan SKPD (*imaginable*);
2. Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan (*desirable*);
3. Memungkinkan, wajar, dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi, dan kapasitas yang ada (*feasible*);
4. Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien, dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah dimasa depan (*focused*);
5. Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman (*flexible*);
6. Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh semua pelaku (*communicable*); dan
7. Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas, dan padat.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan visi SKPD adalah:

1. Visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dan arah pembangunan daerah jangka menengah;  
  
Visi SKPD yang akan dirumuskan dalam Renstra SKPD harus memiliki keterkaitan dengan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD. Dengan demikian, sebelum merumuskan visi SKPD, perlu dilakukan kajian terhadap visi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rancangan awal RPJMD adalah untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.  
  
Hal ini menjadikan tim penyusun Renstra SKPD perlu selalu berkoordinasi dengan tim penyusun RPJMD guna memahami penjelasan visi, uraian misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang dimuat dalam rancangan awal RPJMD, serta bagaimana target indikator kinerja yang dibutuhkan dari SKPD dalam .
2. Hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD propinsi  
  
Pernyataan visi dalam Renstra SKPD propinsi harus dapat merespon (merupakan jawaban) atas isu-isu strategis SKPD tersebut.

Proses Perumusan Visi

Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah (PPD) untuk menemukan perwujudan visi. Suatu permasalahan pembangunan di tingkat SKPD adalah berbagai permasalahan pembangunan yang berhubungan layanan atau peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan terkait. Perwujudan visi merupakan gambaran paling sederhana dan dengan bahasa yang mudah dikomunikasikan tentang wujud nyata kondisi, keadaan dan impian SKPD dalam 5 (lima) tahun yang akan dicapai dimasa mendatang. Untuk memperjelas gambaran suatu perwujudan visi dapat ditambahkan dengan atribut atau ciri-ciri lain tentang suatu wujud visi, dengan mengisi tabel dibawah ini.

Tabel.T-IV.C.20  
Perumusan Perwujudan Visi

| Isu Strategis<br>Permasalahan<br>Pembangunan Daerah | Isu Strategis<br>1       |                      | Isu Strategis<br>2       |                      | Isu Strategis<br>3       |                      | Dst                      |     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----|
|                                                     | <input type="checkbox"/> | Perwujudan<br>Visi 1 | <input type="checkbox"/> | Perwujudan<br>Visi 2 | <input type="checkbox"/> | Perwujudan<br>Visi 3 | <input type="checkbox"/> | Dst |
| PPD 1                                               | <input type="checkbox"/> |                      | <input type="checkbox"/> |                      | <input type="checkbox"/> |                      | <input type="checkbox"/> |     |
| PPD 2                                               | <input type="checkbox"/> |                      | <input type="checkbox"/> |                      | <input type="checkbox"/> |                      | <input type="checkbox"/> |     |
| PPD 3                                               | <input type="checkbox"/> |                      | <input type="checkbox"/> |                      | <input type="checkbox"/> |                      | <input type="checkbox"/> |     |
| Dst                                                 | <input type="checkbox"/> |                      | <input type="checkbox"/> |                      | <input type="checkbox"/> |                      | <input type="checkbox"/> |     |

Perwujudan visi diidentifikasi melalui proses FGD atau teknik lain yang secara efektif dapat menghasilkan rumusan tentang bagaimana wujud nyata kondisi, keadaan dan impian SKPD dalam 5 (lima) tahun ke depan yang dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategisnya. Di sini masing-masing anggota tim perumus perlu diberi waktu yang cukup untuk memaparkan gambaran masing-masing tentang wujud dari visi yang diinginkan pada akhir tahun ke-5 (lima), berikut pemikiran atau hasil analisis yang mendasarinya.

Namun, sebelum menentukan identifikasi perwujudan visi, terlebih dahulu dibuat analisis keterhubungan antara permasalahan pembangunan dengan isu strategis (misal, dengan

memberi tanda (x) untuk yang tidak berkesesuaian dan tanda (√) untuk yang berkesesuaian. Bagi sel (kotak) yang bertanda (√) itulah dibuatkan perwujudan dimaksud pada tabel diatas.

Perlu diingat bahwa untuk menghasilkan perwujudan visi yang salah satunya berlandaskan pada kekuatan terbaik SKPD, identifikasi permasalahan SKPD harus mampu mengungkapkan peta kekuatan yang paling dominan dalam realisasi pembangunan daerah dimasa-masa lalu. Permasalahan SKPD harus dapat pula mengungkapkan kantong-kantong kekuatan layanan yang selama ini terabaikan untuk dijadikan salah satu faktor keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dimasa 5 (lima) tahun mendatang.

Setelah berbagai identifikasi perwujudan visi dibuat, lakukan pembahasan masing-masing perwujudan visi menjadi pokok-pokok visi. Suatu perwujudan visi merupakan kalimat yang relatif masih lengkap dalam menggambarkan wujud visi masa datang, termasuk atribut-atribut yang menjelaskannya. Berbagai atribut sangat penting dalam memberi bobot dan kejelasan bahwa perwujudan visi dimaksud penting bagi SKPD dalam menentukan kondisi dalam 5 (lima) tahun mendatang. Pembahasan tentang wujud apa yang paling baik atau sesuai bagi suatu SKPD dimasa datang sangat ditentukan bagaimana anggota tim mengenali, memahami, dan membandingkan atribut-atribut dari berbagai perwujudan visi yang berbeda-beda. Untuk membantu identifikasi dan mengukur capaian kinerja, perwujudan visi dapat disebutkan target waktu pencapaiannya.

Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) perwujudan visi ke dalam satu-dua kata dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut yang bukan inti dari perwujudan visi dimaksud. Selanjutnya, dari keseluruhan pokok-pokok visi dibuatlah pernyataan visi, sehingga keseluruhan langkah diatas dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-IV.C.21  
Perumusan Visi

| No. | Perwujudan Visi | Pokok-pokok Visi | Pernyataan Visi |
|-----|-----------------|------------------|-----------------|
|     |                 |                  |                 |
|     |                 |                  |                 |
|     |                 |                  |                 |
|     |                 |                  |                 |
|     |                 |                  |                 |

Suatu pernyataan visi dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, lugas, dan jelas serta memenuhi kriteria atau karakteristik visi sebagaimana telah dijelaskan di awal. Suatu pernyataan visi dapat berupa satu atau lebih pernyataan atau kalimat yang merangkum atau menggabungkan berbagai pokok visi terpilih. Namun, dengan kesederhanaan kalimat, diupayakan visi adalah satu kalimat dengan pokok-pokok visi dapat lebih dari satu. Untuk memberi penekanan atas keyakinan bahwa target dapat dicapai pada akhir periode perencanaan maka pernyataan visi dapat secara spesifik menyebutkan waktu capaian. Penjelasan visi dibuat untuk menjelaskan masing-masing pokok visi, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-IV.C.22  
Penyusunan Penjelasan Visi

| Visi | Pokok-pokok Visi | Penjelasan Visi |
|------|------------------|-----------------|
|      |                  |                 |
|      |                  |                 |
|      |                  |                 |
|      |                  |                 |
|      |                  |                 |
|      |                  |                 |



Dengan demikian, suatu penjelasan visi pada dasarnya menguraikan kembali pokok-pokok visi yang telah disepakati ke dalam perwujudan visi dengan merinci lebih baik berbagai atribut atau penjelasan masing-masing pokok visi.

#### Perumusan Misi SKPD

Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Rumusan misi SKPD yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi SKPD yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh SKPD bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi SKPD.

Rumusan misi dalam dokumen Renstra SKPD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi SKPD. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Kriteria suatu rumusan misi:

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh SKPD dalam rangka mewujudkan visi SKPD.
2. Memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah.
3. Menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah dipahami.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan misi SKPD adalah:

1. Pernyataan visi SKPD.
2. Hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.

Berdasarkan kedua informasi tersebut, SKPD mengidentifikasi keadaan dan/atau kondisi yang harus ada atau dicapai supaya visi SKPD benar-benar terwujud di akhir periode perencanaan. Rumusan misi merupakan upaya untuk mewujudkan keadaan atau kondisi yang diinginkan. Upaya-upaya yang akan dikembangkan, harus memanfaatkan faktor-faktor pendorong dan mengantisipasi faktor-faktor penghambat yang telah diidentifikasi pada perumusan isu strategis.

Jika pernyataan visi menunjukkan keadaan/kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, maka pernyataan misi menunjukkan kerja-kerja/upaya untuk mewujudkan visi tersebut.

#### Proses Perumusan Misi

Setelah dibuat visi, termasuk pokok-pokok visi dan penjelasan visi, selanjutnya dibuat misi, termasuk penjelasan misi didalamnya. Mengingat bahwa misi harus dibuat penjelasannya, maka pengertian misi harus sederhana, singkat dan lugas dalam menjelaskan bagaimana visi akan dicapai. Alasan utama pengembangan visi adalah pada pokok-pokok visi karena pada pokok-pokok visi tersebut terkandung ulasan-ulasan apa yang akan dijadikan untuk dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan oleh SKPD.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa misi juga menyangkut komitmen pada *stakeholder* utama atau apa yang ingin diwujudkan oleh visi, maka pengembangan misi harus dijabarkan terlebih dahulu kepada *stakeholder* utama pembangunan, dalam hal ini masyarakat daerah (secara keseluruhan), SKPD (pelaku organisasi), pelaku ekonomi di daerah, dan *stakeholder* pembangunan daerah lainnya.

Teknisnya, pokok visi harus diidentifikasi terlebih dahulu *stakeholder* mana yang menjadi pelaku atau terkena dampak atas pokok visi dimaksud. Atau *stakeholder* yang berhubungan atau terkait dengan pokok visi tersebut, kemudian dibuatlah rincian misi. Proses perumusan misi dicontohkan pada tabel berikut ini:

Tabel.T-IV.C.23  
Perumusan Misi

| No. | Visi | Pokok-pokok visi | Stakeholder layanan |              |                  |   |                |              |         |              | Misi |
|-----|------|------------------|---------------------|--------------|------------------|---|----------------|--------------|---------|--------------|------|
|     |      |                  | SKPD lain           |              | Pengguna layanan |   | Pelaku Ekonomi |              | Lainnya |              |      |
|     |      |                  | (√)                 | Rincian misi | (x)              | - | (√)            | Rincian misi | (√)     | Rincian misi |      |
|     |      |                  |                     |              |                  |   |                |              |         |              |      |
|     |      |                  |                     |              |                  |   |                |              |         |              |      |
|     |      |                  |                     |              |                  |   |                |              |         |              |      |
|     |      |                  |                     |              |                  |   |                |              |         |              |      |
|     |      |                  |                     |              |                  |   |                |              |         |              |      |

Visi dan pokok-pokok visi yang telah diperoleh dalam proses penyusunan visi, selanjutnya pokok-pokok visinya disandingkan dengan *stakeholder* pembangunan/layanan yang terpengaruh atau terkait visi tersebut dengan (√) dan dijelaskan sebagai rincian misi kenapa *stakeholder* tersebut mempengaruhi pokok-pokok misi. Setelah diketahui *stakeholder* yang terpengaruh atau berhubungan dengan pokok-pokok visi dan dijelaskan dalam “rincian misi”, selanjutnya dibuat pernyataan misinya. Pengemasan menjadi kalimat misi dapat dilakukan dengan bermacam cara, namun harus tetap mempertahankan substansi. Sebagai contoh, misi dapat dibuat spesifik setiap pokok visi dengan merangkum masing-masing rincian misinya. Lalu, tiap-tiap misi dibuat sub-misi berdasarkan rincian misi; yang mana, masing-masing sub-misi tersebut pada dasarnya adalah misi.

Selanjutnya, dibuat penjelasan misi dengan menggunakan dasar rincian atau sub-misi yang telah dibuat untuk menjelaskan berbagai hal sehingga misi menjadi mudah dipahami.

C.1.8. Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja (*verb*) yang menjelaskan arah keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan suatu kata benda (*noun*) yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian, misalnya:

- 1. Menurunkan angka pengangguran; dan
- 2. Meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi SKPD dan memiliki keterkaitan dengan visi SKPD yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Rumusan tujuan harus realistis dan dapat dicapai. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan:

- 1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi SKPD yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
- 2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan

3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Adapun langkah-langkah perumusan tujuan berdasarkan penjabaran visi dan misi SKPD dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mereview pernyataan visi dan misi SKPD;
2. Mereview pernyataan tujuan pembangunan jangka menengah dalam rancangan awal RPJMD untuk dikaitkan dengan tugas dan fungsi SKPD;
3. Mereview hasil perumusan isu-isu strategis SKPD; dan
4. Merumuskan pernyataan tujuan dengan cara: mendeskripsikan setiap pernyataan misi dalam satu atau beberapa tujuan yang menggambarkan kondisi atau keadaan yang harus ada supaya pernyataan misi dapat tercapai.

C.1.9. Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Langkah yang diperlukan dalam perumusan sasaran sebagai berikut:

1. Mereview pernyataan tujuan pelayanan jangka menengah yang telah dirumuskan;
2. Mereview program prioritas beserta target indikator kinerja dari Rancangan Awal RPJMD yang menjadi tanggung jawab SKPD;
3. Merumuskan pernyataan sasaran untuk masing-masing tujuan;
4. Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tugas dan fungsi SKPD; dan
5. Memeriksa kembali konsistensi pernyataan sasaran terhadap tujuan dan misi serta melakukan penyempurnaan bila diperlukan.

Dalam merumuskan sasaran yang perlu diperhatikan adalah:

1. Sasaran harus dapat menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik, dan sesuai dengan bidang layanan SKPD;
2. Indikator kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
3. Kelompok sasaran yang dilayani;
4. Profil pelayanan terkait indikator kinerja;
5. Isu-isu strategis SKPD yang sesuai dengan bidang layanan SKPD;
6. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan;
7. Pencapaian satu tujuan dapat saja melalui beberapa sasaran; dan
8. Kriteria SMART-C yaitu:
  - a) *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
  - b) *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
  - c) *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
  - d) *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
  - e) *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
  - f) *continously improve* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD selanjutnya disusun dalam Tabel.T-IV.C.24 berikut.

Tabel.T-IV.C.24 ini selanjutnya ditampilkan dalam dokumen Renstra SKPD.

Tabel.T-IV.C.24  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- |     |     |     |     |
|-----|--------|---------|-------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|     |        |         |                   | 1                             | 2   | 3   | 4   | 5   |
| (1) | (2)    | (3)     | (4)               | (5)                           | (6) | (7) | (8) | (9) |
|     |        |         |                   |                               |     |     |     |     |
|     |        |         |                   |                               |     |     |     |     |
|     |        |         |                   |                               |     |     |     |     |

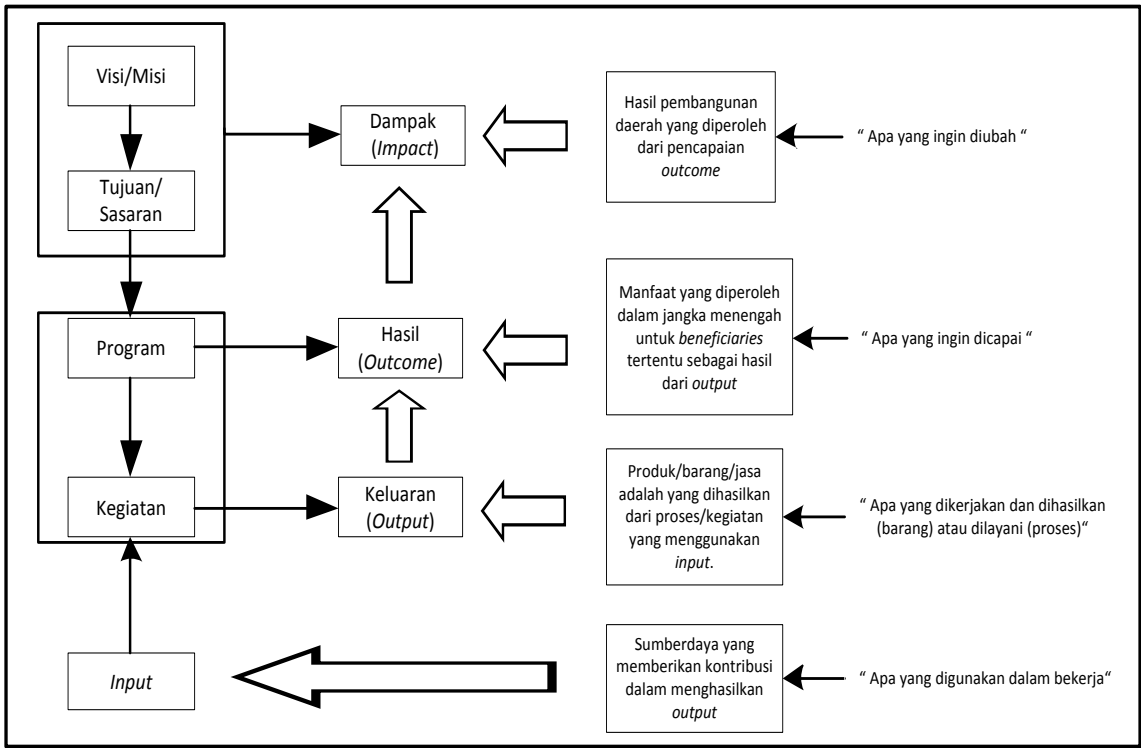
| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- |     |     |     |     |
|-----|--------|---------|-------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|     |        |         |                   | 1                             | 2   | 3   | 4   | 5   |
| (1) | (2)    | (3)     | (4)               | (5)                           | (6) | (7) | (8) | (9) |
|     |        |         |                   |                               |     |     |     |     |

Cara pengisian Tabel.T-IV.C.24:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai kebutuhan
- Kolom (2) diisi dengan uraian tujuan
- Kolom (3) diisi dengan uraian sasaran untuk setiap tujuan.Tujuan dapat dijabarkan dalam satu sasaran atau lebih
- Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja setiap sasaran
- Kolom (5) sampai dengan (9) diisi dengan target kinerja sasaran yang harus dicapai pada tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra SKPD.

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR. G-IV.C.3  
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

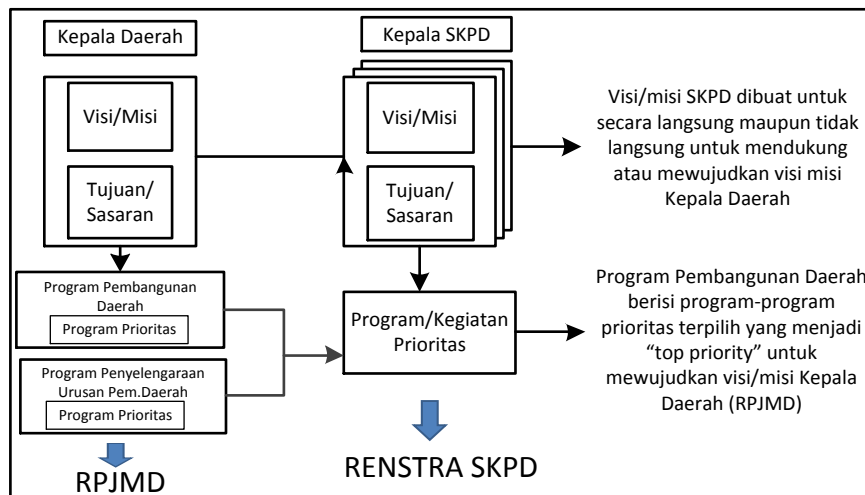


Dari gambar di atas, jelas bahwa tujuan dan sasaran mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan SKPD secara keseluruhan.

Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan SKPD pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan SKPD lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara Kepala Daerah dan SKPD dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini:

GAMBAR. G-IV.C.4  
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi SKPD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Hasil analisis dan kajian sampai dengan perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD ini disampaikan kepada Bappeda sebagai bahan/masukan bagi penajaman substansi yang dihasilkan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD. Tim penyusun RPJMD selanjutnya menggunakan hasil analisis/kajian dan rumusan dari tim penyusun Renstra SKPD ini dalam:

1. Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah;
2. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
3. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
4. Penentuan indikator keluaran program;
5. Penentuan pagu per SKPD.

#### C.1.10. Mempelajari Surat Edaran Kepala Daerah perihal Penyusunan Rancangan Renstra SKPD (dilampiri rancangan awal RPJMD dengan indikator keluaran program dan pagu per SKPD)

Setelah surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD diterima, maka SKPD perlu mencermati:

1. Jadwal penyampaian rancangan Renstra SKPD;
2. Muatan rancangan awal RPJMD (analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun tahun mendatang, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan); dan
3. Indikator keluaran program dan pagu indikatif per SKPD;

#### C.1.11. Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah SKPD

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan

pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

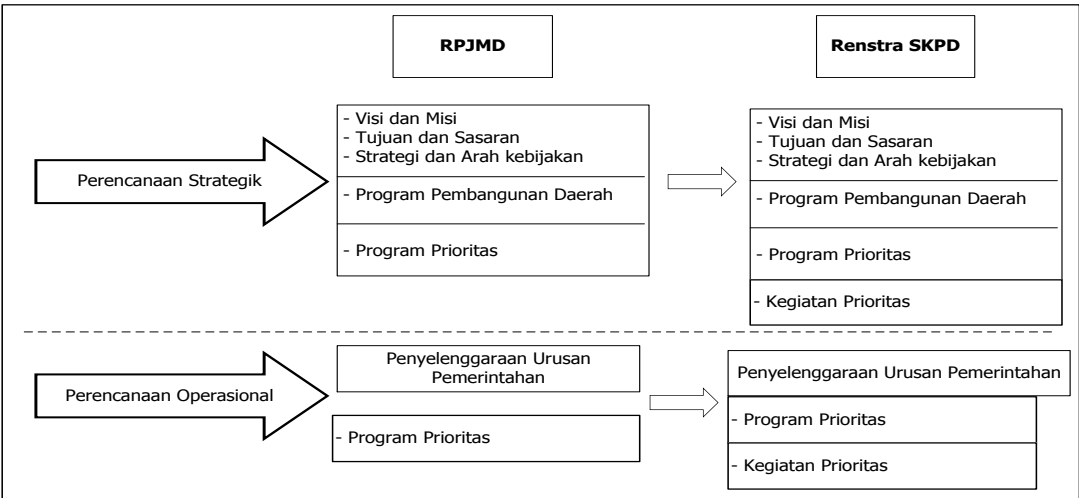
Perumusan Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Keterhubungan Renstra Strategis

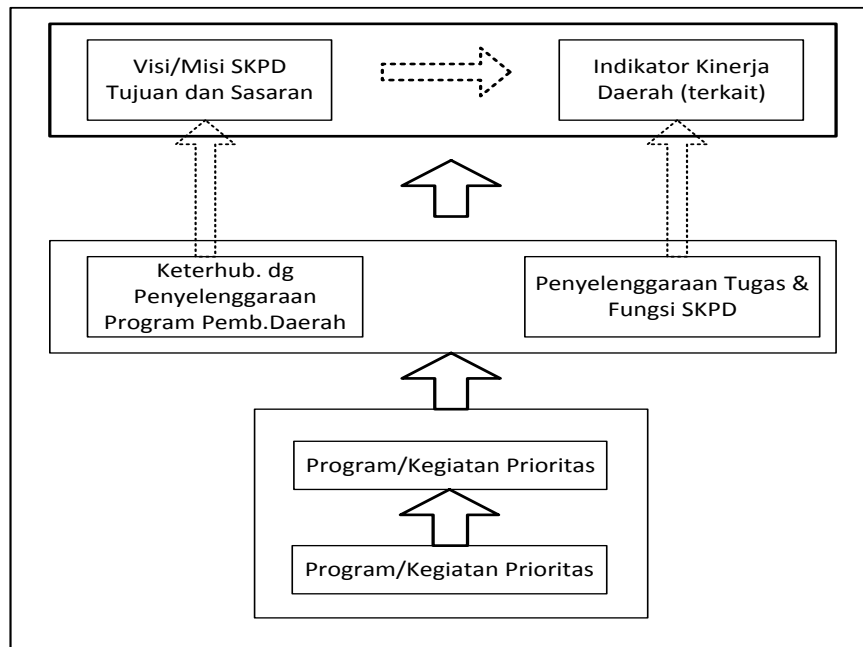
Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar.G-III.C.1  
Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD



Berdasarkan dari arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dibagi menjadi 2 (dua) perencanaan strategis dan opsional, maka SKPD diharapkan dalam merencanakan program dan kegiatannya dapat memecahkan permasalahan pembangunan daerah (*visi, misi tujuan dan sasaran SKPD*) dan permasalahan urusan pemerintahan daerah (*indikator kinerja Daerah*), seperti dijelaskan pada kerangka fikir pada gambar dibawah ini:

Gambar.G-III.C.2  
Kerangka Fikir Keterhubungan Antarkinerja



Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan adalah:

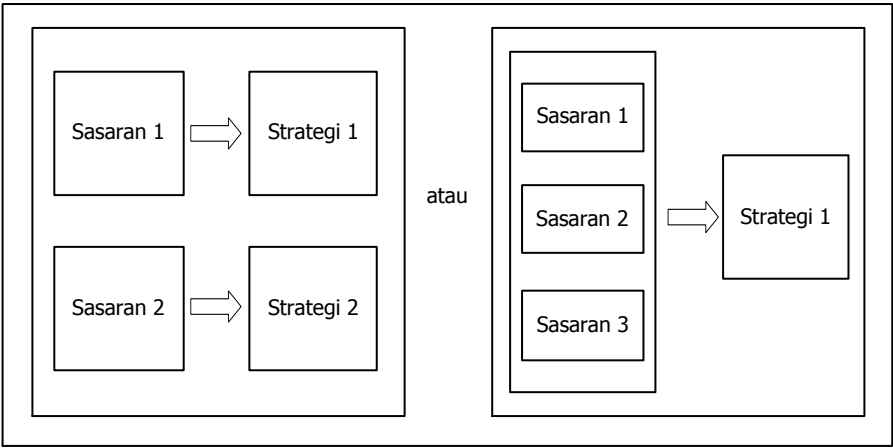
1. Menerjemahkan strategi kedalam bentuk yang operasional;
2. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah;
3. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi;
4. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan
5. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik.

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran SKPD dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal SKPD; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis sebagaimana bagan berikut:

Gambar.G-III.C.3  
Keterkaitan Sasaran Dengan Strategi



Dari gambar di atas, jelas bahwa perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD.

Perumusan strategi pada Renstra SKPD dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weaknesses*, peluang/*opportunities*, dan tantangan/*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a) Menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran kedalam berbagai tabel, dengan salah satu contoh sebagai berikut:

Tabel.T-IV.C.25  
Penentuan Alternatif Strategi  
Pencapaian Indikator Sasaran:.....

| <div>Faktor Eksternal</div> <div>Faktor Internal</div> | Peluang :<br>1. ....<br>2. ....<br>3. dst ...               | Tantangan:<br>1. ....<br>2. ....<br>3. dst ...              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kekuatan :<br>1. ....<br>2. ....<br>3. dst .....       | Alternatif Strategi :<br>1. ....<br>2. ....<br>3. dst ..... | Alternatif Strategi :<br>1. ....<br>2. ....<br>3. dst ..... |
| Kelemahan:<br>1. ....<br>2. ....<br>3. dst .....       | Alternatif Strategi :<br>1. ....<br>2. ....<br>3. dst ..... | Alternatif Strategi :<br>1. ....<br>2. ....<br>3. dst ..... |

- b) Pemilihan strategi yang paling tepat (efektif dan efisien) diantara berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui metode SWOT, dapat dilakukan melalui:
  - 1) Dibahas kembali melalui *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman di bidang manajemen strategik;



- 2) Menggunakan metode pembobotan dengan cara seperti yang dilakukan terhadap penentuan isu-isu strategis;
- 3) Menggunakan metode *Balanced Score Card*; dan
- 4) Menggunakan kombinasi antara FGD dengan metode lainnya untuk obyektivitas pemilihan strategi.

c) Alternatif strategi yang dipilih selanjutnya diuraikan kedalam tabel berikut:

Tabel.T-IV.C.26  
Penentuan Strategi  
(Contoh Pencapaian Indikator Sasaran: Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SLTP)

| No. | Sasaran                                                     | Indikator Kinerja Sasaran                                                                                                              | Strategi |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (1) | (2)                                                         | (3)                                                                                                                                    | (4)      |
| 1.  | Meningkatnya APM SD                                         | - APM SD                                                                                                                               |          |
| 2.  | Merata dan meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah | - Rasio guru terhadap murid di kota dan desa<br>- Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis di kota dan desa |          |
| 3.  | Dst .....                                                   | -                                                                                                                                      |          |

Cara Pengisian Tabel.T-IV.C.26:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai kebutuhan  
Kolom (2) diisi dengan uraian sasaran jangka menengah pelayanan SKPD sebagaimana hasil perumusan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD  
Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja setiap uraian sasaran  
Kolom (4) diisi dengan hasil pemilihan alternatif strategi yang dirumuskan pada Tabel.T-IV.C.25

d) Keempat, untuk menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan kegiatan yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan (*strategy mapping*), agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif:

1. Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya.
2. Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*).
3. Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang.
4. Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).

Perumusan Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Langkah-langkah perumusan kebijakan adalah:

1. Merumuskan rancangan kebijakan dari setiap strategi dengan mempertimbangkan:
  - a) Besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi; dan
  - b) Keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan
2. Menguji rumusan rancangan kebijakan apakah dapat menghasilkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dan telah mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran;
3. Menguji apakah rancangan kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel.T-IV.C.27  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

|                                                                                            |                                               |                                                   |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| VISI : Terwujudnya sumber daya manusia Provinsi/Kabupaten/Kota .....yang cerdas dan handal |                                               |                                                   |                                                   |
| MISI I : .....                                                                             |                                               |                                                   |                                                   |
| Tujuan                                                                                     | Sasaran                                       | Strategi                                          | Kebijakan                                         |
| Tujuan 1                                                                                   | 1. Sasaran 1.1<br>2. Sasaran 1.2<br>3. Dst... | 1. Strategi 1.1<br>2. Strategi 1.2<br>3. Dst..... | 1. Kebijakan 1.1<br>2. Kebijakan 1.2<br>3. Dst... |
| Tujuan 2                                                                                   | 1. Sasaran 2.1<br>2. Sasaran 2.2<br>3. Dst... | 1. Strategi 2.1<br>2. Strategi 2.2<br>3. Dst..... | 1. Kebijakan 2.1<br>2. Kebijakan 2.2<br>3. Dst... |
| Dst.....                                                                                   | Dst.....                                      | Dst.....                                          | Dst.....                                          |
| MISI II : .....                                                                            |                                               |                                                   |                                                   |
| Tujuan                                                                                     | Sasaran                                       | Strategi                                          | Kebijakan                                         |
| Tujuan 1                                                                                   | 1. Sasaran 1.1<br>2. Sasaran 1.2<br>3. Dst... | 1. Strategi 1.1<br>2. Strategi 1.2<br>3. Dst..... | 1. Kebijakan 1.1<br>2. Kebijakan 1.2<br>3. Dst... |
| Tujuan 2                                                                                   | 1. Sasaran 2.1<br>2. Sasaran 2.2<br>3. Dst... | 1. Strategi 2.1<br>2. Strategi 2.2<br>3. Dst..... | 1. Kebijakan 2.1<br>2. Kebijakan 2.2<br>3. Dst... |
| Dst.....                                                                                   | Dst.....                                      | Dst.....                                          | Dst.....                                          |
| Dst ....                                                                                   |                                               |                                                   |                                                   |

Tabel.T-IV.C.27 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Jika terdapat pernyataan strategi atau kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan kebijakan tersebut.

C.1.12. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan SKPD.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Review kembali rancangan awal RPJMD, yaitu pada:

- a. isu-isu strategis;
  - b. visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang,
  - c. strategi dan arah kebijakan;
  - d. kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
  - e. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
2. Periksa apakah visi, misi, tujuan, dan sasaran SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang, strategi, dan kebijakan dalam rancangan Renstra SKPD telah relevan dan sinergis dengan rancangan awal RPJMD. Lakukan penyesuaian jika diperlukan;
  3. Perhatikan indikator program dan pagu per SKPD;
  4. Berdasarkan (2) dan (3), rumuskan target *outcome* program SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan;
  5. Lakukan perumusan target *output*/keluaran yang akan dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target *outcome* program SKPD;
  6. Lakukan perumusan kegiatan;
  7. Hitunglah biaya kegiatan untuk mencapai target *output* kegiatan;
  8. Hitunglah biaya program untuk mencapai target *outcome*;
  9. Periksa apakah total biaya program sesuai dengan pagu SKPD. Jika melebihi pagu SKPD, lakukan pemeringkatan prioritas program dan kegiatan sehingga sesuai dengan pagu SKPD. Daftar urutan prioritas program dan kegiatan ini menjadi salah satu bahan yang akan dibahas dalam forum SKPD penyusunan Renstra SKPD;
  10. Susunlah rincian target *outcome* program kedalam target tahunan; dan
  11. Berdasarkan target *outcome* tahunan pada langkah (10), susunlah perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program pertahun

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada Tabel.T-IV.C.28 berikut ini.

Tabel.T-IV.C.28 merupakan tabel yang harus ditampilkan dalam dokumen Renstra SKPD.

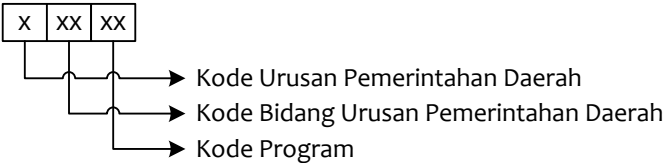
Tabel.T-IV.C.28  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD.....\*)  
Provinsi/ Kabupaten/Kota.....\*\*)

| Tujuan   | Sasaran   | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |         |      |         |      |         |      |         |      |                                                 |      | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|----------|-----------|-------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------------------------------------------------|------|---------------------------------|--------|
|          |           |                   |      |                      |                                                           |                                          | Tahun-1                                       |     | Tahun-2 |      | Tahun-3 |      | Tahun-4 |      | Tahun-5 |      | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD |      |                                 |        |
|          |           |                   |      |                      |                                                           |                                          | target                                        | Rp  | target  | Rp   | target  | Rp   | target  | Rp   | target  | Rp   | target                                          | Rp   |                                 |        |
| (1)      | (2)       | (3)               | (4)  | (5)                  | (6)                                                       | (7)                                      | (8)                                           | (9) | (10)    | (11) | (12)    | (13) | (14)    | (15) | (16)    | (17) | (18)                                            | (19) | (20)                            | (21)   |
| Tujuan 1 | Sasaran 1 |                   |      |                      | Program .....                                             |                                          |                                               |     |         |      |         |      |         |      |         |      |                                                 |      |                                 |        |
|          |           |                   |      |                      | Kegiatan.....                                             |                                          |                                               |     |         |      |         |      |         |      |         |      |                                                 |      |                                 |        |
| Tujuan 1 | Sasaran 2 |                   |      |                      | Program .....                                             |                                          |                                               |     |         |      |         |      |         |      |         |      |                                                 |      |                                 |        |
|          |           |                   |      |                      | Kegiatan.....                                             |                                          |                                               |     |         |      |         |      |         |      |         |      |                                                 |      |                                 |        |
|          |           |                   |      |                      | Dst .....                                                 |                                          |                                               |     |         |      |         |      |         |      |         |      |                                                 |      |                                 |        |
| Tujuan 2 | Sasaran 1 |                   |      |                      | Program .....                                             |                                          |                                               |     |         |      |         |      |         |      |         |      |                                                 |      |                                 |        |
|          |           |                   |      |                      | Kegiatan.....                                             |                                          |                                               |     |         |      |         |      |         |      |         |      |                                                 |      |                                 |        |
|          |           |                   |      |                      | Program .....                                             |                                          |                                               |     |         |      |         |      |         |      |         |      |                                                 |      |                                 |        |
|          |           |                   |      |                      |                                                           |                                          |                                               |     |         |      |         |      |         |      |         |      |                                                 |      |                                 |        |

\*) diisi dengan nama SKPD  
\*\*) diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Cara pengisiannya Tabel.T-IV.C.28:

- Kolom (1) diisi dengan pernyataan tujuan jangka menengah sebagaimana tercantum dalam Tabel.T-IV.C.24.
- Kolom (2) diisi dengan pernyataan sasaran dari setiap pernyataan tujuan. Pernyataan sasaran dari setiap tujuan sebagaimana tercantum dalam Tabel.T-IV.C.24
- Kolom (3) diisi dengan indikator sasaran dari setiap pernyataan sasaran. Pernyataan indikator sasaran dari setiap sasaran sebagaimana tercantum dalam Tabel.T-IV.C.24.
- Kolom (4) diisi dengan kode urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah/ Program.



- Kolom (5) Uraian nama program dan uraian nama kegiatan yang dirancang untuk setiap sasaran jangka menengah
- Kolom (6) Indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) diisi dengan uraian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Untuk urusan wajib yang berbasis pada pelayanan dasar diwajibkan menggunakan indikator SPM.
- Kolom (7) Data capaian pada tahun awal perencanaan diisi dengan data capaian pada awal tahun perencanaan untuk setiap indikator kinerja yang akan dijadikan titik tolak periode perencanaan jangka menengah SKPD
- Kolom *Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan* untuk setiap baris program, diisi sebagai berikut:

Kolom Tahun-1 adalah tahun pertama periode Renstra SKPD, demikian seterusnya sampai dengan Kolom Tahun-5 adalah tahun kelima periode Renstra SKPD

Kolom target diisi dengan jumlah/besaran target kinerja program (*outcome*) dan kinerja kegiatan (*output*) yang akan dicapai pada tahun berkenaan untuk masing-masing program dan kegiatan

Kolom Rp diisi dengan jumlah pendanaan yang dibutuhkan pada tahun berkenaan guna mencapai target kinerja program (*outcome*) dan target kinerja kegiatan (*output*) pada tahun tersebut.

Kolom *Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD*:

- Kolom (18) diisi dengan jumlah/besaran target kinerja program (*outcome*) yang akan dicapai pada akhir periode Renstra SKPD untuk setiap program berkenaan.
- Kolom (19) diisi dengan total jumlah pendanaan yang dibutuhkan untuk mendanai program, mulai dari tahun-1 sampai dengan tahun-5, guna mencapai target akhir kinerja program (*outcome*) yang ditetapkan pada akhir periode Renstra SKPD.
- Kolom (20) diisi dengan nama unit kerja SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan berkenaan.
- Kolom (21) diisi dengan indikasi lokasi pelaksanaan program dan kegiatan berkenaan.

C.1.13. Perumusan Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) *Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD;*
- 2) *Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan*

- 3) Identifikasi indikator dan target kinerja SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disusun dalam Tabel.T-IV.C.29 berikut. Tabel.T-IV.C.29 adalah tabel yang harus dimuat dalam dokumen Renstra SKPD.

Tabel.T-IV.C.29  
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Contoh: SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

| NO  | Indikator                                                       | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |         |         |         |         | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------|
|     |                                                                 | Tahun 0                                 | Tahun 1                     | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |                                          |
| (1) | (2)                                                             | (3)                                     | (4)                         | (5)     | (6)     | (7)     | (8)     | (9)                                      |
| 1   | Angka Rata-rata Lama Bersekolah                                 |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
| 2   | Angka Melek Huruf                                               |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
| 3   | Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI                       |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
| 4   | Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS                     |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
| 5   | Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA                  |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
| 6   | Pembinaan Guru jenjang SD/MI                                    |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
| 7   | Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS                                  |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
| 8   | Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA                               |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
| 9   | Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
| 10  | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
| 11  | Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
| 12  | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A                     |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
| 13  | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B                   |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
| 14  | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C                |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
| 15  | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI                                 |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
| 16  | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs                               |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
| 17  | Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA                            |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
| 18  | Angka Kelulusan (AL) SD/MI                                      |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
| 19  | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs                                    |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
| 20  | Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA                                 |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
| 21  | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs                    |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
| 22  | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA               |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
| 23  | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV                          |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |

- Cara pengisian Tabel.T-IV.C.29:
- Kolom (1) diisi dengan nomor urutan pengisian indikator.
- Kolom (2) diisi dengan uraian indikator kinerja SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD
- Kolom (3) diisi dengan data capaian pada awal tahun periode RPJMD untuk setiap indikator kinerja
- Kolom (4) sampai dengan kolom (8) diisikan dengan besaran yang ditargetkan untuk setiap indikator kinerja pada masing-masing tahun berkenaan
- Kolom (9) diisi dengan besaran yang ditargetkan tercapai pada akhir tahun periode RPJMD untuk setiap indikator kinerja SKPD

C.1.14. Pelaksanaan Forum SKPD

Forum SKPD dalam rangka penyusunan Renstra SKPD adalah forum para pemangku kepentingan pelayanan SKPD untuk membahas rancangan Renstra SKPD dibawah koordinasi kepala SKPD untuk mendapatkan masukan bagi penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra SKPD.

Forum SKPD penyusunan Renstra SKPD merupakan forum penting guna membantu memastikan bahwa isu strategis pelayanan, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dimuat dalam dokumen Renstra SKPD mampu merespon kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan pelayanan SKPD tersebut. Forum ini menjadi semacam uji publik atas rancangan kebijakan pelayanan SKPD dalam menangani dinamika kebutuhan dan aspirasi pelayanan para pemangku kepentingan SKPD tersebut untuk 5 (lima) tahun mendatang. Forum ini juga menjadi media komunikasi antara SKPD dengan para pemangku kepentingannya untuk menyepakati apa yang dapat dilakukan dan apa yang belum dapat dilakukan SKPD melalui Renstra SKPD tahun rencana.

Tujuan penyelenggaraan forum SKPD adalah untuk:

1. Mengkomunikasikan hasil analisis/kajian oleh SKPD atas kebutuhan pelayanan SKPD untuk lima tahun mendatang
2. Memperoleh penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan penyepakatan tentang:
  - a. Isu strategis (pelayanan) SKPD untuk ditangani dalam 5 (lima) tahun mendatang;
  - b. Tujuan dan sasaran pelayanan SKPD jangka menengah;
  - c. Strategi dan kebijakan pelayanan;
  - d. Program dan kegiatan prioritas SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang; dan
  - e. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Kesepakatan yang dihasilkan oleh forum SKPD ini menjadi acuan bagi tim penyusun Renstra SKPD dalam penyempurnaan materi rancangan Renstra SKPD.

Keluaran yang harus dihasilkan oleh forum SKPD penyusunan Renstra SKPD adalah materi kesepakatan dengan para pemangku kepentingan pelayanan SKPD tentang masukan-masukan bagi penyempurnaan substansi rancangan Renstra SKPD. Rancangan Renstra SKPD yang telah disempurnakan ini kemudian disampaikan kepada Bappeda sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala Daerah perihal Penyusunan Rancangan Renstra SKPD. Dengan demikian, forum SKPD penyusunan Renstra SKPD dilaksanakan untuk mempertajam dan menyempurnakan muatan rancangan Renstra SKPD sebelum disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan forum SKPD dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan.

#### C.1.14.1. Materi yang Perlu Disiapkan

Materi yang perlu disiapkan bagi pembahasan forum SKPD ini sekurang-kurangnya adalah:

1. Ringkasan hasil kajian/analisis dan hasil perumusan substansi Rancangan Renstra SKPD yang dihasilkan oleh Tim Penyusun Renstra SKPD;
2. Ringkasan Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota, digunakan untuk pembahasan forum SKPD provinsi;
3. Ringkasan Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, digunakan untuk pembahasan forum SKPD kabupaten/kota; dan
4. Rancangan Awal RPJMD.

#### C.1.14.2. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Forum SKPD Penyusunan Renstra SKPD

##### C.1.14.2.1. Peserta

Peserta forum SKPD adalah pihak-pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam forum SKPD melalui pembahasan yang disepakati bersama. Peserta forum SKPD berfungsi sebagai pengambil keputusan melalui pembahasan yang disepakati bersama. Peserta forum SKPD terdiri dari:



1. Kelompok sasaran pelayanan SKPD;
2. Kelompok yang memperoleh manfaat/dampak tidak langsung dari pelayanan SKPD;
3. SKPD yang bersangkutan; dan
4. SKPD yang memperoleh manfaat/dampak langsung/tidak langsung dari pelayanan SKPD.

#### C.1.14.2.2. Narasumber

Narasumber forum SKPD berfungsi memberikan informasi yang perlu diketahui peserta untuk proses pengambilan keputusan hasil forum SKPD. Informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan.

#### C.1.14.2.3. Fasilitator

Fasilitator yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi. Fasilitator bertanggungjawab terhadap kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap kelompok diskusi.

#### C.1.14.2.4. Tim Penyelenggara Forum

Tim penyelenggara forum SKPD adalah tim penyusun Renstra SKPD. Tugas Tim Penyelenggara forum SKPD adalah:

1. Menyiapkan materi yang diperlukan bagi pembahasan forum SKPD;
2. Menyusun jadwal, agenda dan daftar kebutuhan logistik/kelengkapan Forum SKPD;
3. Mengidentifikasi fasilitator yang akan memandu pembahasan;
4. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat penyelenggaraan Forum SKPD
5. Menerima pendaftaran peserta forum SKPD;
6. Merangkum berita acara kesepakatan hasil penyelenggaraan forum SKPD;
7. Menyusun hasil penyempurnaan substansi rancangan Renstra SKPD berdasarkan hasil forum SKPD; dan
8. Menyampaikan kepada Bappeda dan DPRD rancangan Renstra SKPD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil forum SKPD

#### C.1.14.3. Pelaksanaan Forum SKPD

Tahapan pelaksanaan forum SKPD terdiri dari:

1. Tahap persiapan;
2. Tahap diskusi dan pembahasan; dan
3. Tahap perumusan kesepakatan.

##### C.1.14.3.1. Tahap Persiapan Forum SKPD

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah:

- 1) Menyiapkan materi yang akan digunakan sebagai bahan pembahasan dalam forum SKPD;
- 2) Menyiapkan jadwal, agenda, tempat dan logistik pelaksanaan forum SKPD;
- 3) Menyiapkan tata cara pelaksanaan forum SKPD meliputi peserta, narasumber, fasilitator yang akan terlibat, agenda acara, pembagian diskusi kelompok, kriteria prioritas program SKPD jangka menengah, dan perumusan kesepakatan dan berita acara;
- 4) Mengumumkan secara terbuka minimal 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan forum SKPD tentang jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan forum SKPD;
- 5) Mempublikasikan pokok-pokok substansi rancangan Renstra SKPD melalui media masa, minimal 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan forum SKPD. Pokok-pokok substansi rancangan Renstra SKPD sedikitnya memuat:
  - a) Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada periode sebelumnya;
  - b) Isu-isu strategis pelayanan SKPD untuk ditangani pada 5 tahun mendatang ;
  - c) Visi dan misi pelayanan SKPD;
  - d) Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD;
  - e) Strategi dan kebijakan pelayanan jangka menengah SKPD;
  - f) Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; dan

- g) Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- 6) Mengundang fasilitator yang dinilai memenuhi kualifikasi berikut: memiliki pemahaman yang memadai atas substansi yang akan dibahas dalam forum SKPD, dan memiliki pengalaman yang memadai dalam memfasilitasi diskusi dan penyepakatan hasil;
- 7) Mengundang narasumber yang telah dipilih berdasarkan kompetensi atas bidang pelayanan SKPD;
- 8) Menyusun tata tertib pembahasan forum SKPD;
- 9) Menerima pendaftaran peserta forum SKPD sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan forum SKPD. Saat mendaftar, peserta menginformasikan pada kelompok diskusi yang mana dia akan bergabung; dan
- 10) Menyusun daftar pembagian peserta berdasarkan butir (9).

#### C.1.14.3.2. Tahap Diskusi dan Pembahasan Forum SKPD

Tahap diskusi dan pembahasan forum SKPD terdiri dari:

1. Pembukaan oleh Kepala SKPD;
2. Sidang Pleno I meliputi:
  - a) Pemaparan tentang pokok-pokok materi rancangan awal RPJMD yang sekurang-kurangnya meliputi isu strategis pembangunan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah, indikasi rencana program prioritas daerah, indikator keluaran program, dan pagu indikatif SKPD yang bersangkutan;
  - b) Pemaparan pokok-pokok materi rancangan Renstra SKPD
  - c) Pemaparan materi lainnya sesuai kebutuhan; dan
  - d) Tanggapan umum peserta atas materi yang dipaparkan
3. Sidang kelompok diskusi membahas:
  - a) kriteria prioritas program SKPD jangka menengah, isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif SKPD, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dalam upaya mewujudkan visi dan misi SKPD dan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah.
  - b) Pembahasan untuk memperoleh saran, tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari peserta kelompok diskusi. Tabel.T-IV.C.24, Tabel.T-IV.C.27, Tabel.T-IV.C.28, dan Tabel.T-IV.C.29.
  - c) Pengambilan keputusan ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kelompok diskusi.
  - d) Materi yang disepakati kelompok diskusi diformulasikan kedalam rancangan rumusan hasil keputusan/kesepakatan kelompok diskusi.
4. Sidang Pleno II berisikan pemaparan rancangan hasil sidang kelompok antara lain:
  - a) Hasil penajaman isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif SKPD, serta indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
  - b) Berdasarkan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta forum SKPD terhadap materi hasil diskusi kelompok, diambil keputusan untuk disepakati menjadi keputusan sidang pleno II atas setiap materi kelompok diskusi pada Forum SKPD.
5. Perumusan rancangan kesepakatan hasil forum SKPD yaitu:
  - a) Merangkum seluruh tanggapan dan saran serta keputusan atas penajaman, dan klarifikasi terkait dengan aspek keterpaduan, keselarasan, dan keterkaitan antar program dalam sidang pleno II. Dalam kaitan ini dapat dibentuk tim perumus yang berunsurkan fasilitator, wakil-wakil kelompok, narasumber, sesuai dengan kebutuhan.

- b) Rangkuman hasil keputusan sidang pleno II dirumuskan kedalam rancangan berita acara hasil kesepakatan forum SKPD
- 6. Penutupan mencakup:
  - a) Pembacaan rumusan rancangan berita acara hasil forum SKPD
  - b) Meminta tanggapan akhir dari peserta terhadap rumusan rancangan berita acara kesepakatan hasil forum SKPD yang dibacakan untuk pengambilan keputusan kesepakatan.
  - c) Pengambilan keputusan ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta.

C.1.14.3.3. Tahap Perumusan Hasil

Perumusan hasil dilakukan dengan sebagai berikut:

- 1. Tim perumus merangkum seluruh hasil pembahasan materi pada sidang pleno I, kelompok diskusi, sidang pleno II, dan sidang pleno III sebagai lampiran dari berita acara hasil kesepakatan forum SKPD.
- 2. Berita acara hasil kesepakatan forum SKPD yang telah disetujui ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD.
- 3. Berita acara hasil kesepakatan forum SKPD yang telah ditandatangani beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Renstra SKPD yang akan disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi.
- 4. Format berita acara hasil kesepakatan forum SKPD beserta lampirannya terdiri dari:
  - a. Rancangan berita acara hasil kesepakatan forum SKPD;
  - b. Daftar hadir peserta forum SKPD;
  - c. Rekapitulasi hasil pembahasan kelompok forum SKPD terhadap isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Renstra SKPD;
  - d. Rekapitulasi hasil pembahasan sidang-sidang kelompok forum SKPD terhadap program dan kegiatan prioritas Renstra SKPD;
  - e. Rekapitulasi hasil pembahasan sidang-sidang kelompok forum SKPD terhadap indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD;
  - f. Hasil kesepakatan sidang kelompok forum SKPD.dengan contoh format sebagai berikut:

a. Format Rancangan Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD

BERITA ACARA  
HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD.....  
PENYUSUNAN RENSTRA SKPD.....  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \*).....

Pada hari .....tanggal..... sampai dengan hari ..... tanggal bulan .....tahun .....telah diselenggarakan forum SKPD Penyusunan Renstra SKPD ..... yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi..... (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum SKPD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : .....  
J a m : .....  
Tempat : .....

forum SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ..... :

MENYEPAKATI

- KESATU : Isu strategis (pelayanan) SKPD, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra SKPD..... provinsi/kabupaten/kota\*)... ..Tahun .... - .... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas SKPD..... provinsi/kabupaten/kota\*) ... Tahun .... - .... yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA : Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok forum SKPD..... provinsi/kabupaten/kota\*) ..... Tahun....-.... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD..... Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .. ..... Tahun .....-.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal .....  
Kepala SKPD  
selaku pimpinan sidang Forum SKPD.....  
Tanda tangan  
( Nama)

Mewakili Peserta Forum SKPD Penyusunan Renstra SKPD..... Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....

| NO    | Nama | Lembaga/instansi | Jabatan/Alamat | Tanda Tangan |
|-------|------|------------------|----------------|--------------|
| 1.    |      |                  |                |              |
| 2.    |      |                  |                |              |
| 3.    |      |                  |                |              |
| 4.    |      |                  |                |              |
| Dst.. |      |                  |                |              |

Catatan:  
\*) coret yang tidak perlu

b. Format Daftar Hadir Peserta Forum SKPD

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD  
NOMOR :  
TANGGAL :  
\_\_\_\_\_

Tabel.T-IV.C.30  
Daftar Hadir Peserta Forum SKPD.....  
Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....  
Tanggal : .....  
Tempat : .....

| No    | Nama | Lembaga/Instansi | Alamat & no Telp. | Tanda tangan |
|-------|------|------------------|-------------------|--------------|
| 1.    |      |                  |                   |              |
| 2.    |      |                  |                   |              |
| 3.    |      |                  |                   |              |
| 4.    |      |                  |                   |              |
| 5.    |      |                  |                   |              |
| 6.    |      |                  |                   |              |
| Dst.. |      |                  |                   |              |

c.     Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum SKPD terhadap Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra SKPD

LAMPIRAN II       :   BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD  
                              NOMOR        :  
                              TANGGAL     :  
\_\_\_\_\_

Tabel.T-IV.C.31  
Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum SKPD..... terhadap  
Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra SKPD..... Tahun ....-....  
Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....  
Tanggal            : .....  
Tempat             : .....

|                                   |                                               |                                                   |                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ISU STRATEGIS:<br>1.<br>2.<br>dst |                                               |                                                   |                                                   |
| VISI        :                     |                                               |                                                   |                                                   |
| MISI I     : .....                |                                               |                                                   |                                                   |
| Tujuan                            | Sasaran                                       | Strategi                                          | Kebijakan                                         |
| Tujuan 1                          | 1. Sasaran 1.1<br>2. Sasaran 1.2<br>3. Dst... | 1. Strategi 1.1<br>2. Strategi 1.2<br>3. Dst..... | 1. Kebijakan 1.1<br>2. Kebijakan 1.2<br>3. Dst... |
| Tujuan 2                          | 1. Sasaran 2.1<br>2. Sasaran 2.2<br>3. Dst... | 1. Strategi 2.1<br>2. Strategi 2.2<br>3. Dst..... | 1. Kebijakan 2.1<br>2. Kebijakan 2.2<br>3. Dst... |
| Dst.....                          | Dst.....                                      | Dst.....                                          | Dst.....                                          |
| MISI II    : .....                |                                               |                                                   |                                                   |
| Tujuan                            | Sasaran                                       | Strategi                                          | Kebijakan                                         |
| Tujuan 1                          | 1. Sasaran 1.1<br>2. Sasaran 1.2<br>3. Dst... | 1. Strategi 1.1<br>2. Strategi 1.2<br>3. Dst..... | 1. Kebijakan 1.1<br>2. Kebijakan 1.2<br>3. Dst... |
| Dst.....                          | Dst.....                                      | Dst.....                                          | Dst.....                                          |
| Dst ....                          |                                               |                                                   |                                                   |

d. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-Sidang Kelompok Forum SKPD terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Renstra SKPD

LAMPIRAN III : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD  
NOMOR :  
TANGGAL :

Tabel.T-IV.C.32

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum SKPD terhadap  
Program dan Kegiatan Prioritas Renstra SKPD..... Tahun.....— .....  
Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....

Tanggal : .....

Tempat : .....

[illegible]

- e. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum SKPD terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Renstra SKPD

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD  
NOMOR :  
TANGGAL :

Tabel.T-IV.C.33  
Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum SKPD terhadap Indikator kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....  
Tanggal: .....  
Tempat: .....

| NO | Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |         |         |         |         | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------|
|    |                                        | Tahun 0                                 | Tahun 1                     | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |                                          |
|    |                                        |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
|    |                                        |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
|    |                                        |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
|    |                                        |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
|    |                                        |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
|    |                                        |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |

- f. HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK FORUM SKPD

LAMPIRAN V : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD  
NOMOR :  
TANGGAL :

HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK ..... FORUM SKPD.....  
Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....  
Pokok Bahasan: Misi .....  
Tanggal: .....  
Tempat: .....

Tabel.T-IV.C.34

|                |                                               |                                                   |                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ISU STRATEGIS: |                                               |                                                   |                                                   |
| VISI : .....   |                                               |                                                   |                                                   |
| MISI : .....   |                                               |                                                   |                                                   |
| Tujuan         | Sasaran                                       | Strategi                                          | Kebijakan                                         |
| Tujuan 1       | 1. Sasaran 1.1<br>2. Sasaran 1.2<br>3. Dst... | 1. Strategi 1.1<br>2. Strategi 1.2<br>3. Dst..... | 1. Kebijakan 1.1<br>2. Kebijakan 1.2<br>3. Dst... |
| Tujuan 2       | 1. Sasaran 2.1<br>2. Sasaran 2.2<br>3. Dst... | 1. Strategi 2.1<br>2. Strategi 2.2<br>3. Dst..... | 1. Kebijakan 2.1<br>2. Kebijakan 2.2<br>3. Dst... |
| Dst.....       | Dst.....                                      | Dst.....                                          | Dst.....                                          |



Tabel.T-IV.C.35  
Program dan Kegiatan Prioritas Renstra SKPD..... Tahun.....— .....  
Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....  
terkait dengan pokok bahasan Misi .....

| Tujuan   | Sasaran   | Indikator<br>Sasaran | Kode | Program dan<br>Kegiatan | Indikator<br>Kinerja Program<br>(outcome) dan<br>Kegiatan (output) | Data Capaian pada<br>Tahun Awal<br>Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |         |      |         |      |         |      |         |      |                                                    |      | Unit Kerja SKPD<br>Penanggunjiawab | Lokasi |    |  |
|----------|-----------|----------------------|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|----------------------------------------------------|------|------------------------------------|--------|----|--|
|          |           |                      |      |                         |                                                                    |                                                | Tahun-1                                       |     | Tahun-2 |      | Tahun-3 |      | Tahun-4 |      | Tahun-5 |      | Kondisi Kinerja pada akhir<br>periode Renstra SKPD |      |                                    |        |    |  |
|          |           |                      |      |                         |                                                                    |                                                | target                                        | Rp  | target  | Rp   | target  | Rp   | target  | Rp   | target  | Rp   | target                                             |      |                                    |        | Rp |  |
| (1)      | (2)       | (3)                  | (4)  | (5)                     | (6)                                                                | (7)                                            | (8)                                           | (9) | (10)    | (11) | (12)    | (13) | (14)    | (15) | (16)    | (17) | (18)                                               | (19) | (20)                               | (21)   |    |  |
| Tujuan 1 | Sasaran 1 |                      |      |                         | Program .....                                                      |                                                |                                               |     |         |      |         |      |         |      |         |      |                                                    |      |                                    |        |    |  |
|          |           |                      |      |                         | Kegiatan.....                                                      |                                                |                                               |     |         |      |         |      |         |      |         |      |                                                    |      |                                    |        |    |  |
| Tujuan 1 | Sasaran 2 |                      |      |                         | Program .....                                                      |                                                |                                               |     |         |      |         |      |         |      |         |      |                                                    |      |                                    |        |    |  |
|          |           |                      |      |                         | Kegiatan.....                                                      |                                                |                                               |     |         |      |         |      |         |      |         |      |                                                    |      |                                    |        |    |  |
|          |           |                      |      |                         | Dst .....                                                          |                                                |                                               |     |         |      |         |      |         |      |         |      |                                                    |      |                                    |        |    |  |
| Tujuan 2 | Sasaran 1 |                      |      |                         | Program ....                                                       |                                                |                                               |     |         |      |         |      |         |      |         |      |                                                    |      |                                    |        |    |  |
|          |           |                      |      |                         | Kegiatan.....                                                      |                                                |                                               |     |         |      |         |      |         |      |         |      |                                                    |      |                                    |        |    |  |
|          |           |                      |      |                         | Program ....                                                       |                                                |                                               |     |         |      |         |      |         |      |         |      |                                                    |      |                                    |        |    |  |

Tabel.T-IV.C.36  
Indikator kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....  
terkait dengan Pokok Bahasan Misi ....

| NO | Indikator<br>Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Kondisi<br>Kinerja pada awal periode<br>RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |         |         |         |         | Kondisi Kinerja pada akhir<br>periode RPJMD |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------------|
|    |                                           | Tahun 0                                       | Tahun 1                     | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |                                             |
|    |                                           |                                               |                             |         |         |         |         |                                             |
|    |                                           |                                               |                             |         |         |         |         |                                             |
|    |                                           |                                               |                             |         |         |         |         |                                             |

Tabel.T-IV.C.37  
Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok

| No      | Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok |
|---------|-----------------------------------|
| 1.      |                                   |
| 2.      |                                   |
| 3.      |                                   |
| 4.      |                                   |
| Dst.... |                                   |

..... (nama daerah) (Tanggal/Bulan/Tahun)

Tabel.T-IV.C.38  
Daftar Anggota Sidang Kelompok.....  
Forum SKPD Provinsi.....  
Tahun ....-....

| NO  | Nama | Lembaga/instansi | Jabatan Dalam Sidang Kelompok | Tanda Tangan |
|-----|------|------------------|-------------------------------|--------------|
| 1.  |      |                  |                               |              |
| 2.  |      |                  |                               |              |
| 3.  |      |                  |                               |              |
| 4.  |      |                  |                               |              |
| 5.  |      |                  |                               |              |
| dst |      |                  |                               |              |

C.2 Tahap Penyajian Rancangan Renstra SKPD

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra SKPD yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra SKPD, dengan sistematika penulisan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

### 2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan SKPD ini mengacu pada hasil kerja bagian B.2.1.2. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel.T-IV.C.2 dan Tabel.T-IV.C.3 dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD \*).....  
Provinsi/Kabupaten/Kota .....

| NO  | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- |     |     |     |      | Realisasi Capaian Tahun ke- |      |      |      |      | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
|     |                                                |            |            |                          | 1                             | 2   | 3   | 4   | 5    | 1                           | 2    | 3    | 4    | 5    | 1                            | 2    | 3    | 4    | 5    |
| (1) | (2)                                            | (3)        | (4)        | (5)                      | (6)                           | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)                        | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)                         | (17) | (18) | (19) | (20) |
|     |                                                |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
|     |                                                |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
|     |                                                |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
|     |                                                |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
|     |                                                |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
|     |                                                |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
|     |                                                |            |            |                          |                               |     |     |     |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |

....., 20....  
Kepala SKPD .. ..

Tabel 2.2  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD\* ... ..  
Provinsi/Kabupaten/Kota\*\*).. ..

| Uraian ***) | Anggaran pada Tahun ke- |     |     |     |     | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |     |     |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |      |      |      |      | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|-------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|-----|-----|------|------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
|             | 1                       | 2   | 3   | 4   | 5   | 1                                 | 2   | 3   | 4    | 5    | 1                                             | 2    | 3    | 4    | 5    | Anggaran              | Realisasi |
| (1)         | (2)                     | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)                               | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)                                          | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)                  | (18)      |
|             |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
|             |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
|             |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |
|             |                         |     |     |     |     |                                   |     |     |      |      |                                               |      |      |      |      |                       |           |

\*) diisikan dengan nama SKPD  
\*\*) diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota  
\*\*\*) disesuaikan dengan kewenangan SKPD

....., 20....  
Kepala SKPD .. ..

Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut.

Setelah penyajian Tabel.2.1, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Setelah penyajian Tabel 2.2, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan SKPD.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel.T-IV.C.9 yang telah dilakukan pada C.1.2 (Analisis Gambaran Pelayanan SKPD)

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD (Tabel.T-IV.C.9), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut (hasil pengisian Tabel.T-IV.C.11). Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

#### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

#### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

- 1. gambaran pelayanan SKPD;
- 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- 3. sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota;
- 4. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan
- 5. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD sebagaimana dihasilkan pada B.2.1.7

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada C.1.8 (Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD) dan C.1.9 (Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD) dan dikemukakan dalam Tabel.T-IV.C.24.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- |     |     |     |     |
|-----|--------|---------|-------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|     |        |         |                   | 1                                     | 2   | 3   | 4   | 5   |
| (1) | (2)    | (3)     | (4)               | (5)                                   | (6) | (7) | (8) | (9) |
|     |        |         |                   |                                       |     |     |     |     |
|     |        |         |                   |                                       |     |     |     |     |
|     |        |         |                   |                                       |     |     |     |     |
|     |        |         |                   |                                       |     |     |     |     |
|     |        |         |                   |                                       |     |     |     |     |

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada C1.11, yaitu dari Tabel.T-IV.C.27.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari C.1.12. (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 5.1 yang bersumber dari Tabel.T-IV.C.28.

Tabel 5.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif  
SKPD.....\*)  
Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*\*)

| Tujuan   | Sasaran   | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |         |      |         |      |         |      |         |      |                                                 |      | Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab | Lokasi |
|----------|-----------|-------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------|
|          |           |                   |      |                      |                                                           |                                          | Tahun-1                                       |     | Tahun-2 |      | Tahun-3 |      | Tahun-4 |      | Tahun-5 |      | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD |      |                                   |        |
|          |           |                   |      |                      |                                                           |                                          | target                                        | Rp  | target  | Rp   | target  | Rp   | target  | Rp   | target  | Rp   | target                                          | Rp   |                                   |        |
| (1)      | (2)       | (3)               | (4)  | (5)                  | (6)                                                       | (7)                                      | (8)                                           | (9) | (10)    | (11) | (12)    | (13) | (14)    | (15) | (16)    | (17) | (18)                                            | (19) | (20)                              | (21)   |
| Tujuan 1 | Sasaran 1 |                   |      |                      | Program .....                                             |                                          |                                               |     |         |      |         |      |         |      |         |      |                                                 |      |                                   |        |
|          |           |                   |      |                      | Kegiatan.....                                             |                                          |                                               |     |         |      |         |      |         |      |         |      |                                                 |      |                                   |        |
| Tujuan 1 | Sasaran 2 |                   |      |                      | Program .....                                             |                                          |                                               |     |         |      |         |      |         |      |         |      |                                                 |      |                                   |        |
|          |           |                   |      |                      | Kegiatan.....                                             |                                          |                                               |     |         |      |         |      |         |      |         |      |                                                 |      |                                   |        |
|          |           |                   |      |                      | Dst ....                                                  |                                          |                                               |     |         |      |         |      |         |      |         |      |                                                 |      |                                   |        |
| Tujuan 2 | Sasaran 1 |                   |      |                      | Program .....                                             |                                          |                                               |     |         |      |         |      |         |      |         |      |                                                 |      |                                   |        |
|          |           |                   |      |                      | Kegiatan.....                                             |                                          |                                               |     |         |      |         |      |         |      |         |      |                                                 |      |                                   |        |
|          |           |                   |      |                      |                                                           |                                          |                                               |     |         |      |         |      |         |      |         |      |                                                 |      |                                   |        |

\*) diisi dengan nama SKPD  
\*\*) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel.T-IV.C.29.

Tabel 6.1  
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| NO  | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |         |         |         |         | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------|
|     |           | Tahun 0                                 | Tahun 1                     | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |                                          |
| (1) | (2)       | (3)                                     | (4)                         | (5)     | (6)     | (7)     | (8)     | (9)                                      |
|     |           |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
|     |           |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
|     |           |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |

Naskah rancangan Renstra SKPD ini selanjutnya disampaikan kepala SKPD kepada Bappeda untuk di verifikasi.

#### D. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA SKPD.

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan atas Rancangan Renstra SKPD yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan Rancangan Renstra SKPD bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Penyusunan rancangan akhir ini dilakukan melalui dua tahap yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:

1. Tahap perumusan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan akhir Renstra SKPD.

##### D.1. Tahap Perumusan Rancangan Akhir Renstra SKPD

Setelah RPJMD disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka sebagai konsekuensinya rancangan Renstra SKPD harus disesuaikan dengan RPJMD tersebut.

Perumusan isi dan substansi rancangan akhir Renstra SKPD ini dilakukan melalui rangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Penajaman visi dan misi.
2. Penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.

##### D.1.1. Penajaman visi dan misi

Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD menjadi rancangan akhir Renstra SKPD dilakukan oleh tim penyusun Renstra SKPD berdasarkan hasil kajian terhadap RPJMD provinsi yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah. Hal pertama yang dilakukan dalam penyempurnaan ini adalah penajaman visi dan misi.

Visi dan misi SKPD yang telah dirumuskan semula pada rancangan Renstra SKPD dipertajam dan disesuaikan dengan visi dan misi sebagaimana dalam RPJMD. Ini merupakan bagian penting, karena visi dan misi ini akan menjadi arahan bagi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD.

##### D.1.2. Penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

Tahap ini bertujuan untuk menyelaraskan rancangan Renstra SKPD dengan isi RPJMD. Penyelarasan ini mencakup:

1. Penajaman kembali rumusan tujuan SKPD berdasarkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD;
2. Penyesuaian rumusan sasaran dan strategi serta kebijakan berdasarkan RPJMD;
3. Penyesuaian program prioritas SKPD yang disertai dengan indikasi kebutuhan pendanaan;
4. Penajaman indikator kinerja urusan (sesuai tugas dan fungsi);
5. Perumusan kaidah transisi dan kaidah pelaksanaan; dan
6. Penyusunan rancangan Keputusan Gubernur/Keputusan Bupati/Walikota tentang Renstra SKPD.

Setelah perumusan rancangan akhir Renstra SKPD diselesaikan, maka tim penyusun Renstra SKPD membahas rancangan akhir Renstra SKPD dengan seluruh unit kerja SKPD.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, tim menyempurnakan rancangan akhir Renstra SKPD



D.2. Penyajian Rancangan Akhir Renstra SKPD.

Penyajian rancangan akhir Renstra SKPD disusun menurut sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

**1.2 Landasan Hukum**

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

**1.3 Maksud dan Tujuan**

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD**

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

**2.2 Sumber Daya SKPD**

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

**2.3 Kinerja Pelayanan SKPD**

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

**2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

**BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

**3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

**3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

**3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

**3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**4.1 Visi dan Misi SKPD**

**4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

**4.3 Strategi dan Kebijakan**

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sama dengan isi Rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

**BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

E. **PENETAPAN RENSTRA SKPD**

1. Rancangan akhir Renstra SKPD disampaikan kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah.
2. Sebelum Bappeda mengajukan kepada kepala daerah untuk disahkan, terlebih dahulu melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra SKPD
3. Verifikasi akhir antara lain bertujuan untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.
4. Pengesahan Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah
5. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.
6. Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
7. Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh kepala daerah.

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**GAMAWAN FAUZI**

TABEL 8.1  
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                 |                                                                        | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                                                                |                                                                      | SATUAN           | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |                 |        |          |         |          |         |          |         |          |         |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|------------------------------|----------|-----------------------|
|    |                                                                              |                                                                        |                                                                                                            |                                                                      |                  |                     | 2016                                          |                 | 2017   |          | 2018    |          | 2019    |          | 2020    |          | 2021    |          |                              |          |                       |
|    |                                                                              |                                                                        | TAHUN 2016                                                                                                 | TAHUN 2017-2021                                                      |                  |                     | TAHUN 2016                                    | TAHUN 2017-2021 | Target | Rp. (Jt) | Target  | Rp. (Jt) | Target  | Rp. (Jt) | Target  | Rp. (Jt) | Target  | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                       |
|    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                              |                                                                        |                                                                                                            |                                                                      |                  |                     | 88,572                                        |                 | 98,418 |          | 104,672 |          | 112,433 |          | 120,834 |          | 129,930 |          | 129,930                      |          |                       |
|    | URUSAN PENDIDIKAN                                                            |                                                                        |                                                                                                            |                                                                      |                  |                     | 82,093                                        |                 | 96,685 |          | 102,812 |          | 110,414 |          | 118,642 |          | 127,550 |          | 127,550                      |          |                       |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                           | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi dan operasional kantor                                      | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                        | %                | 100                 | 100                                           | 5,190           | 100    | 5,450    | 100     | 5,722    | 100     | 6,008    | 100     | 6,309    | 100     | 6,624    | 100                          | 6,624    | Dinas Dikbud          |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur                                                       | Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur                   | %                | 100                 | 100                                           | 2,163           | 100    | 2,271    | 100     | 2,385    | 100     | 2,504    | 100     | 2,629    | 100     | 2,761    | 100                          | 2,761    | Dinas Dikbud          |
|    |                                                                              |                                                                        |                                                                                                            | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)               | zona             |                     | hijau                                         |                 | hijau  |          | hijau   |          | hijau   |          | hijau   |          | hijau   |          | hijau                        |          |                       |
|    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                                | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Meningkatnya Disiplin Aparatur                                                                             | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas                  | %                | 100                 | 100                                           | 262             | 100    | 275      | 100     | 289      | 100     | 303      | 100     | 319      | 100     | 335      | 100                          | 335      | Dinas Dikbud          |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                   | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur                                                                        | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                               | JPL/orang/ tahun |                     | 10                                            | 280             | 15     | 294      | 20      | 309      | 30      | 324      | 40      | 340      | 50      | 357      | 50                           | 357      | Dinas Dikbud          |
|    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan       | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan Kinerja SKPD                                    | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD  | %                | 100                 | 100                                           | 1,112           | 100    | 1,168    | 100     | 1,226    | 100     | 1,288    | 100     | 1,352    | 100     | 1,420    | 100                          | 1,420    | Dinas Dikbud          |
|    |                                                                              |                                                                        |                                                                                                            | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD  | Predikat         |                     | BB                                            |                 | BB     |          | BB      |          | A       |          | A       |          | A       |          | A                            |          |                       |
|    |                                                                              |                                                                        |                                                                                                            | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan | %                | 100                 | 100                                           |                 | 100    |          | 100     |          | 100     |          | 100     |          | 100     |          | 100                          |          |                       |
|    |                                                                              |                                                                        |                                                                                                            | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD               | %                | 100                 | 100                                           |                 | 100    |          | 100     |          | 100     |          | 100     |          | 100     |          | 100                          |          |                       |
|    |                                                                              |                                                                        |                                                                                                            | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                      | %                | 100                 | 100                                           |                 | 100    |          | 100     |          | 100     |          | 100     |          | 100     |          | 100                          |          |                       |
|    | Peningkatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Informal (PAUDNI) | —                                                                      | Tersedia dan terjangkau layanan PAUDNI bermutu dan berkesetaraan di semua kab/kota                         | —                                                                    | %                | 67,27 (2014)        | 68,15                                         | 7,827           |        | -        |         | -        |         | -        |         | -        |         | -        |                              | -        | Dinas Dikbud          |
|    | Peningkatan Akses Pendidikan Dasar                                           | —                                                                      | Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan dasar yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua kab/kota | —                                                                    | %                | 100                 | 8,997                                         |                 | -      |          | -       |          | -       |          | -       |          | -       |          | -                            |          | Dinas Dikbud          |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN |                                                                  | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                                                                      |                                                                                                                  | SATUAN     | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUN G JAWAB |        |              |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|------------------------|--------|--------------|
|    |                                                              |                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                  |            |                     | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          |                              |          |                        | 2021   |              |
|    | TAHUN 2016                                                   | TAHUN 2017-2021                                                  | TAHUN 2016                                                                                                       | TAHUN 2017-2021                                                                                                  |            |                     | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                        | Target | Rp. (Jt)     |
|    | Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan Menengah    | Peningkatan Akses, Pemerataan dan Mutu Sekolah Menengah Atas     | Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua kab/kota | APK SMA/SMK/MA/ SMALB Paket C                                                                                    | %          | 96,64 (2014)        | 96.88                                         | 48,471   | 97.11  | 44,417   | 97.34  | 46,937   | 97.57  | 50,114   | 97.8   | 53,541   | 98.03                        | 57,240   | 98.03                  | 57,240 | Dinas Dikbud |
|    |                                                              |                                                                  |                                                                                                                  | APM SMA/SMK/MA/ SMALB Paket C                                                                                    | %          | 73,08 (2014)        | 73.35                                         |          | 73.60  |          | 73.85  |          | 74.10  |          | 74.35  |          | 74.6                         |          | 74.6                   |        |              |
|    |                                                              |                                                                  |                                                                                                                  | Angka Putus SMA                                                                                                  | %          | 0,95 (2015)         | 0.83                                          |          | 0.78   |          | 0.73   |          | 0.68   |          | 0.63   |          | 0.58                         |          | 0.58                   |        |              |
|    |                                                              |                                                                  |                                                                                                                  | Angka Kelulusan SMA/MA/ SMALB Paket C                                                                            | %          | 99,95 (2015)        | 97.21                                         |          | 97.35  |          | 97.42  |          | 97.57  |          | 98.25  |          | 99.15                        |          | 99.15                  |        |              |
|    |                                                              |                                                                  |                                                                                                                  | Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi                                                       | %          | 41.32 (2015)        | 42.98                                         |          | 45.23  |          | 46.75  |          | 48.00  |          | 50.00  |          | 52.05                        |          | 52.05                  |        |              |
|    |                                                              |                                                                  |                                                                                                                  | Angka tidak melanjutkan dari SMP ke Sekolah Menengah                                                             | %          | 4,44 (2015)         | 4.02                                          |          | 3.60   |          | 3.18   |          | 2.76   |          | 2.74   |          | 1.92                         |          | 1.92                   |        |              |
|    | –                                                            | Peningkatan Akses, Pemerataan dan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan | –                                                                                                                | Angka kelulusan SMK                                                                                              | %          | 99,74 (2015)        | 97.12                                         | -        | 97.3   | 28,275   | 97.35  | 30,345   | 97.52  | 32,939   | 98.15  | 35,766   | 99.12                        | 38,845   | 99.12                  | 38,845 | Dinas Dikbud |
|    |                                                              |                                                                  |                                                                                                                  | Angka Putus SMK                                                                                                  | %          | 0.95 (2015)         | 0.92                                          |          | 0.88   |          | 0.83   |          | 0.78   |          | 0.73   |          | 0.68                         |          | 0.68                   |        |              |
|    |                                                              |                                                                  |                                                                                                                  | Lulusan SMK yang diterima di dunia usaha dan industri (DUDI)                                                     | %          | 25 (2015)           | 28                                            |          | 32     |          | 37     |          | 43     |          | 50     |          | 58                           |          | 58                     |        |              |
|    | –                                                            | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan          | –                                                                                                                | Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)                                                                                  | Skor 1-100 | 54,68 (2015)        | 59.93                                         | -        | 65.18  | 755      | 70.43  | 811      | 75.68  | 880      | 80.93  | 956      | 86.18                        | 1,038    | 86.18                  | 1,038  | Dinas Dikbud |
|    |                                                              |                                                                  |                                                                                                                  | Kompetensi Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, Laboran, Pustakawan dan Pegawai TU Sekolah) | Skor 1-100 | 0                   | 16.67                                         |          | 19.17  |          | 22.05  |          | 25.35  |          | 33.53  |          | 38.56                        |          | 38.56                  |        |              |
|    |                                                              |                                                                  |                                                                                                                  | Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru SMA, SMK dan PLB)                                                               | Skor 1-100 | 54.68               | 59.93                                         |          | 65.18  |          | 70.43  |          | 75.68  |          | 80.93  |          | 86.18                        |          | 86.18                  |        |              |
|    | Manajemen Pelayanan Pendidikan                               | Manajemen Pelayanan Pendidikan                                   | Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan                                                                    | Sekolah Menengah/SLB Terakreditasi Minimal B                                                                     | %          | 70,81 (2015)        | 72.23                                         | 3,063    | 73.67  | 8,455    | 75.14  | 9,074    | 76.65  | 9,850    | 78.18  | 10,695   | 79.74                        | 11,616   | 79.74                  | 11,616 | Dinas Dikbud |
|    |                                                              |                                                                  |                                                                                                                  | APK PAUD                                                                                                         | %          | 67,27 (2014)        | 68.15                                         |          | 70.25  |          | 72.18  |          | 74.6   |          | 76.2   |          | 77.5                         |          | 77.5                   |        |              |
|    |                                                              |                                                                  |                                                                                                                  | APM SD/SDLB/Paket A/MI                                                                                           | %          | 95,92 (2014)        | 99.58                                         |          | 99.59  |          | 99.6   |          | 99.61  |          | 99.62  |          | 100                          |          | 100                    |        |              |
|    |                                                              |                                                                  |                                                                                                                  | APM SMP/ /MTs/ SMPLB/ Paket B                                                                                    | %          | 79,57 (2014)        | 81.2                                          |          | 81.25  |          | 81.3   |          | 81.35  |          | 81.5   |          | 81.55                        |          | 81.55                  |        |              |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN |                                                                            | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                                                             |                                                                                      | SATUAN           | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUN G JAWAB |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|------------------------|
|    |                                                              |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                      |                  |                     | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          | Target                       | Rp. (Jt) |                        |
|    | TAHUN 2016                                                   | TAHUN 2017-2021                                                            | TAHUN 2016                                                                                              | TAHUN 2017-2021                                                                      |                  |                     | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) |                              |          |                        |
|    | Pelayanan Pendidikan Berkarakter                             | Pendidikan Berkarakter                                                     | Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan karakter yang bermutu dan berkesetaraan di semua kab/kota | Indeks Integritas siswa                                                              | Skor 1-100       | 58 (2015)           | 66                                            | 1,620    | 68     | 273      | 70     | 293      | 80     | 318      | 82     | 345      | 85     | 375      | 85                           | 375      | Dinas Dikbud           |
|    |                                                              |                                                                            |                                                                                                         | Persentase guru BK paham terkait pencegahan narkoba                                  | %                |                     | 4.3                                           |          | 5.38   |          | 6.72   |          | 10.5   |          | 13.12  |          | 16.4   |          | 16.4                         |          |                        |
|    |                                                              |                                                                            |                                                                                                         | Persentase Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya bagi peserta didik | % sekolah        | NA                  | 7.57                                          |          | 9.08   |          | 10.9   |          | 13.08  |          | 15.7   |          | 18.84  |          | 18.84                        |          |                        |
|    |                                                              |                                                                            |                                                                                                         | Sekolah Menengah dengan system boarding school yang bermuansa islami                 | Sekolah          | 3                   | 3                                             |          | 7      |          | 9      |          | 9      |          | 10     |          | 11     |          | 11                           |          |                        |
|    |                                                              |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                      | % lulusan Tahfiz | 6.9                 | 7.07                                          |          | 7.25   |          | 7.43   |          | 7.61   |          | 7.8    |          | 8.01   |          | 8.01                         |          |                        |
|    |                                                              |                                                                            |                                                                                                         | Sekolah Menengah yang bermuansa islami                                               | Sekolah          | 3                   | 3                                             |          | 5      |          | 8      |          | 12     |          | 15     |          | 19     |          | 19                           |          |                        |
|    |                                                              |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                      | % lulusan Tahfiz | 5.67                | 5.81                                          |          | 5.95   |          | 6.1    |          | 6.25   |          | 6.41   |          | 6.57   |          | 6.57                         |          |                        |
|    | Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus                         | Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus                                       | Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan karakter yang bermutu dan berkesetaraan di semua kab/kota | Persentase peningkatan pelayanan pendidikan khusus dan layanan khusus                | %                | 63.16               | 68.42                                         | 3,108    | 73.68  | 5,052    | 78.95  | 5,422    | 84.21  | 5,886    | 89.47  | 6,391    | 100    | 6,941    | 100                          | 6,941    | Dinas Dikbud           |
|    |                                                              |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                      |                  |                     |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |
|    | URUSAN KEBUDAYAAN                                            |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                      |                  |                     |                                               | 6,478    |        | 1,733    |        | 1,860    |        | 2,019    |        | 2,192    |        | 2,381    |                              | 2,381    |                        |
|    | Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya            | Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya | Berkembangnya kapasitas kelembagaan adat, seni dan budaya                                               | Berkembangnya Kapasitas Kelembagaan Adat, Seni dan Budaya                            | %                | 3                   | 20%                                           | 1,057    | 40%    | 283      | 60%    | 303      | 80%    | 329      | 100%   | 358      | 100%   | 388      | 100%                         | 388      | Dinas Dikbud           |
|    |                                                              |                                                                            |                                                                                                         | Meingkatnya kualitas lembaga dan kompetensi pemangku adat                            | Nagari           | 18                  | 18                                            |          | 54     |          | 72     |          | 108    |          | 138    |          | 138    |          | 138                          |          |                        |
|    | Pengembangan Pendidikan Budaya                               | Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya                               | Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya                                                         | Meningkatnya pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya                            | %                | 30                  | 20%                                           | 2,747    | 40%    | 735      | 60%    | 789      | 80%    | 856      | 100%   | 930      | 100%   | 1,010    | 100%                         | 1,010    | Dinas Dikbud           |
|    |                                                              |                                                                            |                                                                                                         | Meningkatnya pelaksanaan pendidikan Muatan Lokal ABS SBK                             | Sekolah          | NN                  | 5                                             |          | 19     |          | 38     |          | 150    |          | 356    |          | 356    |          | 356                          |          |                        |
|    | Pengelolaan Kekayaan Budaya                                  | Pengelolaan Kekayaan Budaya                                                | Meningkatnya jumlah pengelola kekayaan budaya yang difasilitasi                                         | Tersedianya pengelolaan kekayaan Budaya                                              | Kali             | 7                   | 20%                                           | 2,024    | 40%    | 541      | 60%    | 581      | 80%    | 631      | 100%   | 685      | 100%   | 744      | 100%                         | 744      | Dinas Dikbud           |
|    |                                                              |                                                                            |                                                                                                         | Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (intagible) yang ditetapkan oleh Pemerintah          | jenis            | 5                   | 10                                            |          | 15     |          | 20     |          | 25     |          | 30     |          | 30     |          | 30                           |          |                        |
|    |                                                              |                                                                            |                                                                                                         | Meningkatnya jumlah warian budaya benda (tangible) yang ditetapkan pemerintah        | jenis            | NN                  | NN                                            |          | 10     |          | 15     |          | 20     |          | 25     |          | 25     |          | 25                           |          |                        |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN |                                                          | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                                                                                             |                                                                                                                       | SATUAN                                                    | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUNG JAWAB |        |                     |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|-----------------------|--------|---------------------|
|    |                                                              |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                           |                     | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          |                              |          |                       | 2021   |                     |
|    | TAHUN 2016                                                   | TAHUN 2017-2021                                          | TAHUN 2016                                                                                                                              | TAHUN 2017-2021                                                                                                       |                                                           |                     | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                       | Target | Rp. (Jt)            |
|    | Pengembangan Nilai-Nilai Budaya                              | Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya                  | Berkembangnya nilai adat seni dan budaya                                                                                                | Tersedianya Data Pengembangan Nilai-Nilai Budaya                                                                      | %                                                         | NN                  | 20%                                           | 300      | 40%    | 80       | 60%    | 86       | 80%    | 93       | 100%   | 102      | 100%                         | 110      | 100%                  | 110    | Dinas Dikbud        |
|    |                                                              |                                                          |                                                                                                                                         | Meningkatnya kompetensi, keterampilan dan pengamalan nilai-nilai budaya                                               | orang                                                     | NN                  | -                                             |          | 150    |          | 300    |          | 450    |          | 600    |          | 600                          |          | 2100                  |        |                     |
|    | Peningkatan Diplomas Seni dan Budaya                         | Peningkatan Diplomas Seni dan Budaya                     | Terlaksananya temu karya taman budaya tingkat regional dan nasional dan dikenalinya seni budaya Sumatera Barat melalui diplomasi budaya | Tersedianya peningkatan diplomasi seni dan Budaya                                                                     | %                                                         | NN                  | 20%                                           | 350      | 40%    | 94       | 60%    | 100      | 80%    | 109      | 100%   | 118      | 100%                         | 129      | 100%                  | 129    | Dinas Dikbud        |
|    |                                                              |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                           |                     |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                       |        |                     |
|    | SETDA (BIRO BINA SOSIAL)                                     |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                           |                     |                                               | 39,845   |        | 35,979   |        | 39,110   |        | 43,309   |        | 47,801   |                              | 52,923   |                       | 52,923 |                     |
|    | URUSAN PENDIDIKAN                                            |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                           |                     |                                               | 175      |        | 34,807   |        | 37,858   |        | 41,965   |        | 46,368   |                              | 51,397   |                       | 51,397 |                     |
|    | Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan     | Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan | Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi pendidikan                                                                                        | Jumlah guru SMA/SMK yang telah diberi pembinaan pendidikan Agama dan Adat                                             | Jumlah Guru                                               | 75                  | 110                                           | 175      | 115    | 34,807   | 117    | 37,858   | 120    | 41,965   | 125    | 46,368   | 125                          | 51,397   | 125                   | 51,397 | Setda (Biro Binsos) |
|    |                                                              |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                           |                     |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                       |        |                     |
|    | URUSAN SOSIAL                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                           |                     |                                               | 740      |        | 442      |        | 483      |        | 529      |        | 570      |                              | 610      |                       | 610    |                     |
|    | Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial                       | Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial                   | -                                                                                                                                       | Rumusan kebijakan penanganan masalah sosial, kesejahteraan sosial sdan rehabilitasi sosial dan penanggulangan bencana | Rumusan Kebijakan                                         | 2                   | 2                                             | 740      | 2      | 442      | 2      | 483      | 2      | 529      | 2      | 570      | 2                            | 610      | 12                    | 610    | Setda (Biro Binsos) |
|    |                                                              |                                                          | Sinkronisasi program Pembangunan kesejahteraan sosial                                                                                   |                                                                                                                       | Kali                                                      | 6                   |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                       |        |                     |
|    |                                                              |                                                          | Terlaksananya program rehabilitasi social pasca bencana alam                                                                            |                                                                                                                       | Kab/ Kota                                                 | 11                  |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                       |        |                     |
|    |                                                              |                                                          | Terlaksananya koordinasi pembinaan penanggulangan gizi masyarakat                                                                       |                                                                                                                       | Kali                                                      | 43                  |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                       |        |                     |
|    |                                                              |                                                          | Meningkatnya pemahaman dan penerapan pola hidup bersih dan sehat terhadap pelaksana dan peserta didik                                   |                                                                                                                       | Penghargaan pemenang LSS 4 jenjang pendidikan di Kab/Kota | 17                  | 18                                            |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                       |        |                     |
|    |                                                              |                                                          | meningkatnya Koordinasi pembinaan dan pengembangan UKS melalui rapat koordinasi daerah tim pembina UKS tingkat Provinsi Sumatera Barat  |                                                                                                                       | Kali                                                      | 0                   | 1                                             |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                       |        |                     |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN |                                                | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                                                                              |                                                                         | SATUAN               | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUN G JAWAB |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|------------------------|
|    |                                                              |                                                |                                                                                                                          |                                                                         |                      |                     | 2016                                          |                 | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                              |          |                        |
|    |                                                              |                                                | TAHUN 2016                                                                                                               | TAHUN 2017-2021                                                         |                      |                     | TAHUN 2016                                    | TAHUN 2017-2021 | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                        |
|    |                                                              |                                                | meningkatnya koordinasi penanganan masalah Sosial                                                                        |                                                                         | %                    | 100                 | 100                                           |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |
|    |                                                              |                                                | meningkatnya pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan dan pencegahan dan penanggulangan AIDS di daerah                |                                                                         | %                    | 100                 | 100                                           |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |
|    |                                                              |                                                | meningkatnya koordinasi di bidang kesejahteraan masyarakat                                                               |                                                                         | %                    | 100                 | 100                                           |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |
|    |                                                              |                                                | Meningkatnya Koordinasi tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit menulah di Provinsi Sumatera Barat                |                                                                         | %                    | 0                   | 100                                           |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |
|    |                                                              |                                                |                                                                                                                          |                                                                         |                      |                     |                                               |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |
|    | URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA                              |                                                |                                                                                                                          |                                                                         |                      |                     |                                               | 350             |        | 122      |        | 130      |        | 144      |        | 159      |        | 176      |                              | 176      |                        |
|    | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga               | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga | Meningkatnya derajat kesehatan PNS di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk mendukung etos kerja yg tinggi | Persentase Jumlah PNS Pemprov yang mengikuti senam pagi                 | %                    |                     | 44                                            | 225             | 44     | 79       | 44     | 83       | 44     | 93       | 44     | 102      | 44     | 113      | 44                           | 113      | Setda (Biro Binsos)    |
|    | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan                   | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan     | Meningkatnya keahlian pemuda dalam berwirausaha serta sinkronisasi dan sinergitas program kepemudaan di sumatera barat   | Jumlah Pemuda yang telah dilakukan pembinaan dalam bidang Kewirausahaan | Jumlah Pemuda        |                     | 90                                            | 125             | 100    | 43       | 110    | 46       | 115    | 51       | 150    | 57       | 155    | 63       | 155                          | 63       | Setda (Biro Binsos)    |
|    |                                                              |                                                |                                                                                                                          |                                                                         |                      |                     |                                               |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |
|    | URUSAN KEBUDAYAAN                                            |                                                |                                                                                                                          |                                                                         |                      |                     |                                               | 7,241           |        | 13,360   |        | 13,725   |        | 13,856   |        | 14,070   |        | 14,065   |                              | 14,065   |                        |
|    | Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya                      | Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya        | Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai budaya di Sumatera Barat                                 | Jumlah Pemangku Adat, pengurus kerapatan Adat Nagari (KAN)              | Jumlah Pemangku Adat | 330                 | 330                                           | 220             | 330    | 37       | 330    | 41       | 330    | 45       | 185    | 50       | 330    | 55       | 1,835                        | 55       | Setda (Biro Binsos)    |
|    |                                                              |                                                |                                                                                                                          | Kompetensi dan kualifikasi pemangku adat (Ketua KAN/Penghulu)           | orang                | NA                  | 108                                           |                 | 108    |          | 108    |          | 108    |          | 108    |          | 108    |          | 648                          |          |                        |
|    | Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat             | Program Pemberdayaan Lembaga Adat              | Meningkatkan hubungan internasional antara pemuka masyarakat provinsi dengan tokoh adat, tokoh agama Kab/Kota            | Jumlah Lembaga Adat yang Telah di Bina                                  | Jumlah Lembaga Adat  | 18                  | 18                                            | 380             | 18     | 31       | 18     | 34       | 18     | 37       | 18     | 41       | 18     | 53       | 108                          | 53       | Setda (Biro Binsos)    |
|    | Program Peningkatan Layanan Kehidupan Beragama               | Program Peningkatan Layanan Kehidupan Beragama | Koprdinasi Pelayanan terhadap pemberangkatan dan pemulangan Haji di Padang                                               | Tingkat Kepuasan Terhadap Pemberangkatan dan Pemulangan Haji            | %                    | 100                 | 100                                           | 1,800           | 100    | 614      | 100    | 668      | 100    | 740      | 100    | 818      | 100    | 795      | 100                          | 795      | Setda (Biro Binsos)    |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                     |                                                                                   | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       | SATUAN                             | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUNG G JAWAB |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|-------------------------|
|    |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                     | 2016                                          |                 | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                              |          |                         |
|    |                                                                                                  |                                                                                   | TAHUN 2016                                                                                           | TAHUN 2017-2021                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                     | TAHUN 2016                                    | TAHUN 2017-2021 | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                         |
|    |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                      | Sentra keagamaan yang repesentatif                                                                                                                                                                                                    | %                                  | 40                  | 45                                            | -               | 50     | 11,989   | 55     | 12,031   | 60     | 12,276   | 65     | 12,190   | 70     | 12,379   | 70                           | 12,379   |                         |
|    | Peningkatan Pemahaman penghayatan, Pengamatan, dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama                | Peningkatan Pemahaman penghayatan, Pengamatan, dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama | Meningkatnya upaya pembinaan terhadap lembaga didikan Subuh se Sumatera Barat oleh Setda Prov Sumbar | Jumlah Lembaga didikan subuh yang terbina                                                                                                                                                                                             | Jumlah LDS                         | 19                  | 19                                            | 4,501           | 19     | 89       | 19     | 97       | 19     | 107      | 19     | 118      | 19     | 131      | 114                          | 131      | Setda (Biro Binsos)     |
|    |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                      | Peringkat Sumatera Barat pada Penyelenggaraan MTQ Nasional                                                                                                                                                                            | peringkat sumbar pada MTQ Nasional | 5                   | 5                                             | -               | -      | -        | 5      | 822      | -      | -        | 3      | 813      | -      | -        | 3                            | -        | Setda (Biro Binsos)     |
|    |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                      | Peringkat Sumatera Barat pada Penyelenggaraan STQ Nasional                                                                                                                                                                            | peringkat sumbar pada STQ Nasional | -                   | -                                             | -               | 10     | 570      | -      | -        | 8      | 614      | -      | -        | 6      | 632      | 6                            | 632      | Setda (Biro Binsos)     |
|    | Pengembangan lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan                   | Pengembangan lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan    | Meningkatnya sinkronisasi dan integrasi keagamaan kab/kota se sumbar                                 | Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan Barang atau Uang pada Rumah Ibadah                                                                                                                                                               | orang                              |                     | 60                                            | 340             | 60     | 31       | 76     | 34       | 76     | 37       | 76     | 41       | 76     | 20       | 424                          | 20       | Setda (Biro Binsos)     |
|    |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                      | Peningkatan kapasitas pengelola manajemen pondok pesantren/al-qur'an dan sekolah agama                                                                                                                                                | %                                  | NA                  | NA                                            |                 | 19.71  |          | 19.71  |          | 20.18  |          | 20.18  |          | 20.18  |          | 20.18                        |          |                         |
|    |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                      | Pondok al-qur'an yang memiliki seluruh cabang ilmu                                                                                                                                                                                    | Pondok Al-Qur'an                   | -                   | 4                                             |                 | 8      |          | 12     |          | 16     |          | 19     |          | 20     |          | 20                           |          |                         |
|    |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                      | Tenaga pengajar cabang ilmu Qur'an yang berkualitas (Tilawah, Tartil, qiraat, hafidzh 1 dan 5 juz, hafidzh 10 juz, 20 juz, 30 juz, tafsir bahasa inggris, tafsir bahasa arab, tafsir bahasa indonesia, syahril qur'an, fahmil qur'an) | orang                              | NA                  | 80                                            |                 | 160    |          | 240    |          | 320    |          | 400    |          | 480    |          | 480                          |          |                         |
|    |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                     |                                               |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                         |
|    | FUNGSI LAINNYA : OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN |                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                     |                                               | 38,580          |        | 608      |        | 639      |        | 671      |        | 704      |        | 740      |                              | 740      |                         |
|    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                       | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                        | Terlaksananya pelayanan administrasi                                                                 | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                                                                                                                                                                                         | %                                  |                     | 100                                           | 406             | 100    | 426      | 100    | 448      | 100    | 470      | 100    | 494      | 100    | 518      | 100                          | 518      | Setda (Biro Binsos)     |
|    | Program Peningkatan Sarana dan sarana Aparatur                                                   | Program Peningkatan Sarana dan sarana Aparatur                                    | Terpenuhinya kebutuhan dan service mobil dinas Biro                                                  | persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur                                                                                                                                                                                 | %                                  |                     | 100                                           | 100             | 100    | 105      | 100    | 110      | 100    | 115      | 100    | 121      | 100    | 127      | 100                          | 127      | Setda (Biro Binsos)     |



| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                   |                                                                                | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                               |                                                                      | SATUAN           | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|-----------------------|
|    |                                                                                |                                                                                |                                                                           |                                                                      |                  |                     | 2016                                          |                 | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                              |          |                       |
|    |                                                                                |                                                                                | TAHUN 2016                                                                | TAHUN 2017-2021                                                      |                  |                     | TAHUN 2016                                    | TAHUN 2017-2021 | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                       |
|    |                                                                                |                                                                                |                                                                           | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)               | Zona             |                     | hijau                                         |                 | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                        |          |                       |
|    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                                  |                                                                                |                                                                           | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas                  | %                |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                       |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                     |                                                                                |                                                                           | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                               | JPL/orang/ tahun |                     | 10                                            |                 | 15     |          | 20     |          | 30     |          | 40     |          | 50     |          | 50                           |          |                       |
|    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Terlaksananya penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan              | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD  | %                |                     | 100                                           | 74              | 100    | 78       | 100    | 81       | 100    | 85       | 100    | 90       | 100    | 94       | 100                          | 94       | Setda (Biro Binsos)   |
|    |                                                                                |                                                                                |                                                                           | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                            | Predikat         |                     | BB                                            |                 | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A      |          | A                            |          |                       |
|    |                                                                                |                                                                                |                                                                           | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan | %                |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                       |
|    |                                                                                |                                                                                |                                                                           | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD               | %                |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                       |
|    |                                                                                |                                                                                |                                                                           | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                      | %                |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                       |
|    | Program Peningkatan Pelayanan Publik                                           | Program Peningkatan Pelayanan Publik                                           | Terselenggaranya lanjutan kegiatan pembangunan masjid raya Sumatera barat |                                                                      |                  |                     | 1                                             | 38,000          | -      | -        | -      | -        | -      | -        | -      | -        | -      | -        | -                            | -        | Setda (Biro Binsos)   |
|    |                                                                                |                                                                                |                                                                           |                                                                      |                  |                     |                                               |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                       |
|    | DINAS KESEHATAN                                                                |                                                                                |                                                                           |                                                                      |                  |                     |                                               | 137,619         |        | 149,803  |        | 159,698  |        | 171,969  |        | 185,271  |        | 199,696  |                              | 199,696  |                       |
|    | URUSAN KESEHATAN                                                               |                                                                                |                                                                           |                                                                      |                  |                     |                                               | 137,619         |        | 149,803  |        | 159,698  |        | 171,969  |        | 185,271  |        | 199,696  |                              | 199,696  |                       |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                             | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                             | Meningkatnya pelayanan administrasi umum perkantoran                      | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                        | %                | 100                 | 100                                           | 6,774           | 100    | 7,113    | 100    | 7,469    | 100    | 9,017    | 100    | 9,919    | 100    | 10,910   | 100                          | 10,910   | Dinas Kesehatan       |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                      | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                      | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur                | %                | 100                 | 100                                           | 3,033           | 100    | 3,184    | 100    | 3,343    | 100    | 4,037    | 100    | 4,441    | 100    | 4,885    | 100                          | 4,885    | Dinas Kesehatan       |
|    |                                                                                |                                                                                |                                                                           | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)               | Zona             |                     | hijau                                         |                 | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                        |          |                       |
|    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                                  | Peningkatan Disiplin Aparatur                                                  | Meningkatnya Disiplin Aparatur                                            | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas                  | %                | 100                 | 100                                           | 243             | 100    | 255      | 100    | 268      | 100    | 323      | 100    | 356      | 100    | 391      | 100                          | 391      | Dinas Kesehatan       |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                                      | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                                      | Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur                               | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                               | JPL/orang/ tahun |                     | 10                                            | 48              | 15     | 50       | 20     | 53       | 30     | 64       | 40     | 77       | 50     | 85       | 50                           | 85       | Dinas Kesehatan       |
|    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan         | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan         | Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD           | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD  | %                | 100                 | 100                                           | 573             | 100    | 602      | 100    | 632      | 100    | 809      | 100    | 978      | 100    | 1,076    | 100                          | 1,076    | Dinas Kesehatan       |
|    |                                                                                |                                                                                |                                                                           | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                            | predikat         |                     | BB                                            |                 | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A      |          | A                            |          |                       |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN |                                               | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                                                                                                                          |                                                                                   | SATUAN    | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUN G JAWAB |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|------------------------|
|    |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                      |                                                                                   |           |                     | 2016                                          |                 | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                              |          |                        |
|    |                                                              |                                               | TAHUN 2016                                                                                                                                                           | TAHUN 2017-2021                                                                   |           |                     | TAHUN 2016                                    | TAHUN 2017-2021 | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                        |
|    |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                      | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan              | %         | 100                 | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                        |
|    |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                      | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD                            | %         | 100                 | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                        |
|    |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                      | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                                   | %         | 100                 | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                        |
|    | Obat dan Pembekalan Kesehatan                                | Obat dan Perbekalan Kesehatan                 | Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan disarana pelayanan kesehatan                                                                                 | Persentase Ketersediaan obat buffer stock dan vaksin di pelayanan kesehatan dasar | %         | 80                  | 80                                            | 5,925           | 83     | 5,684    | 86     | 6,259    | 90     | 6,453    | 93%    | 6,776    | 100%   | 5,822    | 100%                         | 5,822    | Dinas Kesehatan        |
|    | Upaya Kesehatan Masyarakat                                   | Upaya Kesehatan Masyarakat                    | Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui koordinasi pelayanan kesehatan Ibu dan Anak, pelayanan rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya             | Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan                | %         | 87                  | 87                                            | 80,747          | 88     | 7,496    | 89     | 7,978    | 90     | 8,508    | 90%    | 8,934    | 90%    | 7,677    | 90%                          | 7,677    | Dinas Kesehatan        |
|    |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                      | Persentase kunjungan neonatal (KN1)                                               | %         | 76                  | 76                                            |                 | 87     |          | 88     |          | 89     |          | 90     |          | 90%    |          | 90%                          |          |                        |
|    |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                      | Jumlah Puskesmas yang terkareiditasi minimal 1 per kecamatan                      | Puskesmas | 1                   | 1                                             |                 | 56     |          | 96     |          | 131    |          | 156    |          | 195    |          | 195                          |          |                        |
|    |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                      | Jumlah rumah sakit Pemerintah yang terkareiditasi minimal 1 per Kab.kota          | RS        | 1                   | 2                                             |                 | 3      |          | 4      |          | 4      |          | 4      |          | 5      |          | 5                            |          |                        |
|    |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                      | Kasus narkoba yang dilayani                                                       | %         | 100                 | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                        |
|    |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                      | Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)                                            | Jumlah    | 21                  | 22                                            |                 | 23     |          | 24     |          | 25     |          | 26     |          | 27     |          | 27                           |          |                        |
|    |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                      | IPWL Kabupaten/Kota                                                               | Kab/Kota  | 16                  | 17                                            |                 | 17     |          | 18     |          | 18     |          | 19     |          | 19     |          | 19                           |          |                        |
|    | Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat                | Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Meningkatnya upaya kesehatan bersumber daya masyarakat melalui penyediaan sarana promosi, pertemuan, pelatihan dan gerakan generasi muda dalam pembangunan kesehatan | Persentase Kab/Kota yang memiliki kebijakan PHBS                                  | %         | NA                  | 40                                            | 1,727           | 50     | 1,657    | 60     | 1,763    | 70     | 1,881    | 75     | 1,975    | 80     | 1,697    | 80                           | 1,697    | Dinas Kesehatan        |
|    | Perbaikan Gizi Masyarakat                                    | Perbaikan Gizi Masyarakat                     | Meningkatnya status gizi masyarakat yang diukur dengan prevalensi gizi seimbang Balita dan meningkatnya proporsi keluarga yang mengkonsumsi gizi seimbang            | Prevalensi gizi kurang (Berat Badan/Tinggi Badan)                                 | %         | 4.8                 | 4,75                                          | 1,103           | 4,70   | 1,059    | 4,65   | 1,127    | 4,60   | 1,202    | 4,55   | 1,262    | 4,5    | 1,085    | 4,5                          | 1,085    | Dinas Kesehatan        |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                    |                                                                                                 | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                                                                                                                         |                                                                                             | SATUAN   | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|-----------------------|
|    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                             |          |                     | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                              |          |                       |
|    | TAHUN 2016                                                                                      | TAHUN 2017-2021                                                                                 | TAHUN 2016                                                                                                                                                          | TAHUN 2017-2021                                                                             |          |                     | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                       |
|    | Pengembangan Lingkungan Sehat                                                                   | Pengembangan Lingkungan Sehat                                                                   | Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat                                                                                                               | Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan masyarakat                            | %        | 47.25               | 50                                            | 530      | 45     | 508      | 54     | 542      | 56     | 578      | 58     | 607      | 60     | 521      | 60                           | 521      | Dinas Kesehatan       |
|    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | Persentase rumah sakit Provinsi yang melakukan pengolahan limbah medis sesuai standar       | %        | 0                   | 25                                            |          | 50     |          | 70     |          | 75     |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                       |
|    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat                                 | Kab/Kota | 17                  | 17                                            |          | 18     |          | 18     |          | 19     |          | 19     |          | 19     |          | 19                           |          |                       |
|    | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular                                    | Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular                  | Menurunnya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular melalui pembinaan, monitoring dan peningkatan SDM Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota | Persentase anak 0-18 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap                            | %        | 74,1                | 91                                            | 2.579    | 91,5   | 2.474    | 92     | 2.634    | 92,5   | 2.809    | 93     | 2.949    | 95     | 2.534    | 95                           | 2.534    | Dinas Kesehatan       |
|    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | Jumlah Kab/Kota dengan API (Annual Parasite Indeks) <1 per 1000 penduduk                    | Kab/Kota | 17                  | 18                                            |          | 18     |          | 18     |          | 19     |          | 19     |          | 19     |          | 19                           |          |                       |
|    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | Persentase Kab/Kota dengan Incidence Rate DBD < 49 per 100.000 penduduk                     | %        | 42                  | 42                                            |          | 64     |          | 66     |          | 68     |          | 70     |          | 72     |          | 72                           |          |                       |
|    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | Persentase Kab/Kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA Positif (Success Rate) | %        | 87.06               | 87.06                                         |          | 81     |          | 85     |          | 87     |          | 90     |          | 93     |          | 93                           |          |                       |
|    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | Persentase kasus HIV yang diobati                                                           | %        | 100                 | 100                                           |          | 45     |          | 47     |          | 50     |          | 52     |          | 55     |          | 55                           |          |                       |
|    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | Persentase Puskesmas menyelenggarakan pengendalian penyakit tidak menular (PTM) terpadu     | %        | 10                  | 10                                            |          | 30     |          | 40     |          | 50     |          | 60     |          | 70     |          | 70                           |          |                       |
|    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | Persentase RSUD Rujukan Regional yang menyelenggarakan layanan kesehatan jiwa/Psikiatry     | %        | 25                  | 25                                            |          | 50     |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                       |
|    | Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru/ RS. Mata | Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru/ RS. Mata | Peningkatan sarana dan prasarana di UPTD                                                                                                                            | Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan                                    | %        | 100                 | 20                                            | 30,884   | 40     | 45,857   | 60     | 49,004   | 80     | 52,278   | 100    | 58,922   | 100    | 50,726   | 100                          | 50,726   | Dinas Kesehatan       |
|    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | Persentase pencapaian standar prasarana pelayanan kesehatan                                 | %        | 100                 | 20                                            |          | 40     |          | 60     |          | 80     |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                       |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                          |                                                                                                       | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                                                                                             |                                                                                              | SATUAN             | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |                 |        |          |           |          |           |          |           |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUN G JAWAB |         |                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|------------------------------|----------|------------------------|---------|-----------------|
|    |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                              |                    |                     | 2016                                          |                 | 2017   |          | 2018      |          | 2019      |          | 2020      |          |                              |          |                        | 2021    |                 |
|    |                                                                                                       |                                                                                                       | TAHUN 2016                                                                                                                              | TAHUN 2017-2021                                                                              |                    |                     | TAHUN 2016                                    | TAHUN 2017-2021 | Target | Rp. (Jt) | Target    | Rp. (Jt) | Target    | Rp. (Jt) | Target    | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                        | Target  | Rp. (Jt)        |
|    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata | Terpeliharanya sarana dan prasarana di UPTD(BP4,Labkes, BKMM)                                                                           | Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang berfungsi dengan baik               | %                  | 100                 | 20                                            | 307             | 40     | 294      | 60        | 313      | 80        | 334      | 100       | 351      | 100                          | 301      | 100                    | 301     | Dinas Kesehatan |
|    | Peningkatan Sumber Daya Kesehatan                                                                     | Peningkatan Sumber Daya Kesehatan                                                                     | Meningkatnya mutu diklat tenaga kesehatan, meningkatnya pemerataan dan pendayagunaan tenaga kesehatan di Kab Kota dan RS serta Provinsi | Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat sertifikat pelatihan terakreditasi                     | Orang              | 100                 | 500                                           | 2,381           | 600    | 2,821    | 700       | 3,013    | 800       | 3,365    | 900       | 3,394    | 1000                         | 2,916    | 1000                   | 2,916   | Dinas Kesehatan |
|    | Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan                                                         | Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan                                                         | Meningkatnya perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan melalui pembangunan kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota                  | Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan ketersediaan data yang lengkap dan valid | %                  |                     | 89%                                           | 765             | 90     | 556      | 91        | 592      | 92        | 632      | 93        | 664      | 94                           | 570      | 94                     | 570     | Dinas Kesehatan |
|    | Penanggulangan Kemiskinan                                                                             | Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin                                                                   | -                                                                                                                                       | Pembiayaan kepesertaan PBI APBN                                                              | %                  | 29.4                | 31,31                                         |                 | 31,31  | 70,192   | 34,31     | 74,708   | 40        | 79,680   | 40        | 83,668   | 40                           | 108,500  | 40                     | 108,500 | Dinas Kesehatan |
|    |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                         | Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan                                         | %                  | 12.46               | 12.46                                         |                 | 12.46  |          | 9.45      |          | 3.76      |          | 3.76      |          | 3.76                         |          | 3.76                   |         |                 |
|    |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                         | Cakupan Jaminan Kesehatan Pekerja                                                            | %                  | 15.98               | 16,02                                         |                 | 16,42  |          | 16,55     |          | 16,80     |          | 16,80     |          | 16,80                        |          | 16,80                  |         |                 |
|    |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                         | Cakupan Jaminan Kesehatan Mandiri                                                            | %                  | 8.36                | 13.99                                         |                 | 21.53  |          | 29.17     |          | 39.44     |          | 39.44     |          | 39.44                        |          | 39.44                  |         |                 |
|    |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                         | Total Coverage                                                                               | %                  | 66,20               | 73,96                                         |                 | 81,72  |          | 89,48     |          | 100       |          | 100       |          | 100                          |          | 100                    |         |                 |
|    |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                              |                    |                     |                                               |                 |        |          |           |          |           |          |           |          |                              |          |                        |         |                 |
|    | RSUD PARIAMAN                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                              |                    |                     |                                               | 79,277          |        | 83,071   |           | 88,956   |           | 96,247   |           | 104,171  |                              | 112,785  |                        | 112,785 |                 |
|    | URUSAN KESEHATAN                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                              |                    |                     |                                               | 79,277          |        | 83,071   |           | 88,956   |           | 96,247   |           | 104,171  |                              | 112,785  |                        | 112,785 |                 |
|    | Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata      | Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata      | Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan kesehatan RS                                                                | Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan                                     | %                  | 60                  | 75                                            | 32,426          | 75     | 37,179   | 75        | 39,481   | 75        | 42,717   | 75        | 46,234   | 75                           | 50,057   | 75                     | 50,057  | RSUD Pariaman   |
|    |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                         | Persentase pencapaian standar prasarana pelayanan kesehatan                                  | %                  | 60                  | 75                                            |                 | 75     |          | 75        |          | 75        |          | 75        |          | 75                           |          | 75                     |         |                 |
|    | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan                                                              | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan *)_ khusus DAK                                               | Terwujudnya standarisasi Rumah Sakit sesuai versi standar Akreditasi Rumah Sakt Versi 2012                                              | Akreditasi rumah sakit                                                                       | Tingkat Akreditasi | NA                  |                                               | 426             | madya  | 556      | Paripurna | 590      | Paripurna | 638      | Paripurna | 691      | Paripurna                    | 748      | Paripurna              | 748     | RSUD Pariaman   |
|    | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin                                                           | -                                                                                                     | Meningkatnya pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin                                                                                  | -                                                                                            |                    |                     |                                               | 1,425           |        |          |           |          |           |          |           |          |                              |          |                        |         |                 |
|    | Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD                                                               | Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD                                                               | Terpenuhinya pelayanan BLUD RSUD Pariaman                                                                                               | AvLOS (Avarage Long of Stay)                                                                 | Hari               | 5                   | 6                                             | 45,000          | 6      | 45,336   | 6         | 48,885   | 6         | 52,892   | 6         | 57,246   | 6                            | 61,980   | 6                      | 61,980  | RSUD Pariaman   |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                             |                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                        |                                                             | SATUAN             | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |                 |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUN G JAWAB |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|------------------------------|----------|------------------------|
|    |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                    |                                                             |                    |                     | 2016                                          |                 | 2017      |          | 2018      |          | 2019      |          | 2020      |          | 2021      |          |                              |          |                        |
|    |                                                                                                          |                                                                                                          | TAHUN 2016                                                         | TAHUN 2017-2021                                             |                    |                     | TAHUN 2016                                    | TAHUN 2017-2021 | Target    | Rp. (Jt) | Target    | Rp. (Jt) | Target    | Rp. (Jt) | Target    | Rp. (Jt) | Target    | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                        |
|    |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                    | Respond Time IGD (≤ 5 menit)                                | % pasien dilayani  | 100                 | 100                                           |                 | 100       |          | 100       |          | 100       |          | 100       |          | 100       |          | 100                          |          |                        |
|    |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                    | IKM                                                         | %                  | 78,46               | 79                                            |                 | 79,5      |          | 79,8      |          | 80        |          | 81        |          | 82        |          | 82                           |          |                        |
|    |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                    | Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD                           | %                  | 46                  | 46                                            |                 | 46        |          | 48        |          | 49        |          | 50        |          | 51        |          | 51                           |          |                        |
|    |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                    |                                                             |                    |                     |                                               |                 |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |                              |          |                        |
|    | RSUD ACHMAD MUCHTAR                                                                                      |                                                                                                          |                                                                    |                                                             |                    |                     |                                               | 183,804         |           | 192,547  |           | 206,246  |           | 223,149  |           | 241,489  |           | 261,493  |                              | 261,493  |                        |
|    | URUSAN KESEHATAN                                                                                         |                                                                                                          |                                                                    |                                                             |                    |                     |                                               | 183,804         |           | 192,547  |           | 206,246  |           | 223,149  |           | 241,489  |           | 261,493  |                              | 261,493  |                        |
|    | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata | Tercapainya pengadaan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit | Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan    | %                  | 100                 | 10                                            | 33,378          | 30        | 32,937   | 50        | 111,159  | 70        | 33,038   | 80        | 140,320  | 100       | 114,173  | 100                          | 114,173  | RS Achmad Muchtar      |
|    |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                    | Persentase pencapaian standar prasarana pelayanan kesehatan | %                  | 100                 | 20                                            |                 | 40        |          | 60        |          | 60        |          | 80        |          | 100       |          | 100                          |          |                        |
|    | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan                                                                 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan                                                                 | Terwujudnya standarisasi RS Versi 2012                             | Akreditasi rumah sakit                                      | Tingkat Akreditasi | Penuh               | Paripurna                                     | 426             | Paripurna | -        | Paripurna | -        | Paripurna | 308      | Paripurna | -        | Paripurna | -        | Paripurna                    | -        | RS Achmad Muchtar      |
|    | Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD                                                                  | Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD                                                                  | Tercapainya peningkatan pelayanan BLUD RSAM Bukittinggi            | AvLOS (Avarage Long of Stay) (Standar RSU)                  | Hari               | 5.62                | 5.30                                          | 150,000         | 5.10      | 159,610  | 5.00      | 95,086   | 4.90      | 189,803  | 4.80      | 101,170  | 4.60      | 147,320  | 4.60                         | 147,320  | RS Achmad Muchtar      |
|    |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                    | Respond Time IGD (≤ 5 menit)                                | % pasien dilayani  | 100                 | 100                                           |                 | 100       |          | 100       |          | 100       |          | 100       |          | 100       |          | 100                          |          |                        |
|    |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                    | IKM                                                         | %                  | 81,56               | 81                                            |                 | 82        |          | 84        |          | 86        |          | 88        |          | 90        |          | 90                           |          |                        |
|    |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                    | Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD                           | %                  | 62.22               | 64                                            |                 | 64        |          | 40        |          | 65        |          | 36        |          | 46        |          | 46                           |          |                        |
|    |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                    |                                                             |                    |                     |                                               |                 |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |                              |          |                        |
|    | RSUD SOLOK                                                                                               |                                                                                                          |                                                                    |                                                             |                    |                     |                                               | 101,325         |           | 106,174  |           | 113,696  |           | 123,015  |           | 133,142  |           | 144,152  |                              | 144,152  |                        |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                             |                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                |                                                                        | SATUAN             | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUN G JAWAB |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|------------------------------|----------|------------------------|
|    |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                            |                                                                        |                    |                     | 2016                                          |          | 2017      |          | 2018      |          | 2019      |          | 2020      |          | 2021      |          |                              |          |                        |
|    | TAHUN 2016                                                                                               | TAHUN 2017-2021                                                                                          | TAHUN 2016                                                 | TAHUN 2017-2021                                                        |                    |                     | Target                                        | Rp. (Jt) | Target    | Rp. (Jt) | Target    | Rp. (Jt) | Target    | Rp. (Jt) | Target    | Rp. (Jt) | Target    | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                        |
|    | URUSAN KESEHATAN                                                                                         |                                                                                                          |                                                            |                                                                        |                    |                     |                                               | 101,325  |           | 106,174  |           | 113,696  |           | 123,015  |           | 133,142  |           | 144,152  |                              | 144,152  |                        |
|    | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan                                                                 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan                                                                 | Terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan             | Akreditasi rumah sakit                                                 | Tingkat Akreditasi | 1                   | Madya                                         | 426      | Paripurna | 446      | Paripurna | 478      | Paripurna | 517      | Paripurna | 560      | Paripurna | 606      | Paripurna                    | 606      | RSUD Solok             |
|    | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata | Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit | Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan               | %                  | 55                  | 60                                            | 30,899   | 65        | 32,378   | 70        | 34,672   | 75        | 37,514   | 80        | 40,602   | 85        | 43,960   | 85                           | 43,960   | RSUD Solok             |
|    |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                            | Persentase pencapaian standar prasarana pelayanan rumah sakit          | %                  | 65                  | 70                                            |          | 75        |          | 78        |          | 80        |          | 85        |          | 90        |          | 90                           |          |                        |
|    | Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD                                                                  | Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD                                                                          | Peningkatan pelayanan BLUD                                 | AvLOS (Avarage Long of Stay)                                           | hari               | 6                   | 6                                             | 70,000   | 6         | 73,350   | 6         | 78,547   | 6         | 84,984   | 6         | 91,980   | 6         | 99,587   | 6                            | 99,587   | RSUD Solok             |
|    |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                            | Respond Time IGD (≤ 5 menit)                                           | % pasien dilayani  | 100                 | 100                                           |          | 100       |          | 100       |          | 100       |          | 100       |          | 100       |          | 100                          |          |                        |
|    |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                            | IKM                                                                    | %                  | 75                  | 77                                            |          | 79        |          | 81        |          | 83        |          | 85        |          | 87        |          | 87                           |          |                        |
|    |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                            | Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD                                      | %                  | 55                  | 60                                            |          | 65        |          | 70        |          | 75        |          | 80        |          | 85        |          | 85                           |          |                        |
|    |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                            |                                                                        |                    |                     |                                               |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |                              |          |                        |
|    | RSJ HB SAANIN                                                                                            |                                                                                                          |                                                            |                                                                        |                    |                     |                                               | 34,744   |           | 36,716   |           | 39,317   |           | 42,540   |           | 46,042   |           | 49,849   |                              | 49,849   |                        |
|    | URUSAN KESEHATAN                                                                                         |                                                                                                          |                                                            |                                                                        |                    |                     |                                               | 34,744   |           | 36,716   |           | 39,317   |           | 42,540   |           | 46,042   |           | 49,849   |                              | 49,849   |                        |
|    | Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata         | Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata         | Terlaksananya peningkatan sarana rumah sakit               | Persentase pencapaian standar sarana dan prasarana pelayanan kesehatan | %                  | 100                 | 20                                            | 10,854   | 40        | 12,759   | 50        | 14,425   | 70        | 13,073   | 90        | 14,155   | 100       | 15,093   | 100                          | 15,093   | RSJ HB Saanin          |
|    | Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin                                                                      | Pelayanan Kesehatan Pasien Gangguan Jiwa Terlantar                                                       | Tercapainya pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin      | Persentase pasien gangguan jiwa terlantar yang terlayani               | %                  | 100                 | 20                                            | 1,890    | 40        | 1,848    | 50        | 2,001    | 70        | 2,504    | 90        | 2,719    | 100       | 3,166    | 100                          | 3,166    | RSJ HB Saanin          |
|    | -                                                                                                        | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan                                                                 | -                                                          | Akreditasi rumah sakit                                                 | Tingkat Akreditasi | NA                  | NA                                            |          | Utama     |          | Utama     |          | Utama     |          | Paripurna |          | Paripurna |          | Paripurna                    |          |                        |
|    | -                                                                                                        | Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba                                           | -                                                          | Persentase kenaikan penanganan rehabilitasi narkoba                    | % rawat jalan      | -                   | -                                             | -        | 20        | -        | 20        | -        | 20        | -        | 20        | -        | 20        | -        | 20                           | -        | RSJ HB Saanin          |
|    |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                            | % rawat inap                                                           |                    |                     |                                               |          | 5         |          | 5         |          | 5         |          | 5         |          | 5         |          | 5                            |          |                        |
|    | Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD                                                                          | Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD                                                                          | Terlaksananya Program BLUD                                 | AvLOS (Avarage Long of Stay) ( Standar RSJ < 42 Hari)                  | Hari               | 45                  | 45                                            | 22.000   | 44        | 22,109   | 43        | 22,891   | 43        | 26,963   | 42        | 29,168   | 42        | 31,590   | 42                           | 31,590   | RSJ HB Saanin          |
|    |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                            | Respond Time IGD (≤ 5 menit)                                           | % pasien dilayani  | 99                  | 100                                           |          | 100       |          | 100       |          | 100       |          | 100       |          | 100       |          | 100                          |          |                        |
|    |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                            | IKM                                                                    | %                  | 86                  | 86                                            |          | 87        |          | 88        |          | 89        |          | 90        |          | 91        |          | 91                           |          |                        |
|    |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                            | Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD                                      | %                  | 38                  | 38                                            |          | 40        |          | 42        |          | 44        |          | 46        |          | 48        |          | 48                           |          |                        |
|    |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                            |                                                                        |                    |                     |                                               |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |                              |          |                        |
|    |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                            |                                                                        |                    |                     |                                               |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |                              |          |                        |
|    | BADAN KESBANG POL                                                                                        |                                                                                                          |                                                            |                                                                        |                    |                     |                                               | 4,506    |           | 4,722    |           | 5,056    |           | 5,471    |           | 5,921    |           | 6,411    |                              | 6,411    |                        |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN           |                                                                        | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                                                                    |                                                                      | SATUAN                    | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |                 |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUN G JAWAB |        |                      |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|------------------------|--------|----------------------|
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                |                                                                      |                           |                     | 2016                                          |                 | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          |                              |          |                        | 2021   |                      |
|    |                                                                        |                                                                        | TAHUN 2016                                                                                                     | TAHUN 2017-2021                                                      |                           |                     | TAHUN 2016                                    | TAHUN 2017-2021 | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                        | Target | Rp. (Jt)             |
|    | URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT       |                                                                        |                                                                                                                |                                                                      |                           |                     |                                               | 4,506           |        | 4,722    |        | 5,056    |        | 5,471    |        | 5,921    |                              | 6,411    |                        | 6,411  |                      |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi dan operasional kantor                                          | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                        | %                         | 100                 | 100                                           | 909             | 100    | 954      | 100    | 1,002    | 100    | 1,052    | 100    | 1,104    | 100                          | 1,160    | 100                    | 1,160  | Badan Kesbang Linmas |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur                                                           | Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur                   | %                         | 100                 | 100                                           | 132             | 100    | 139      | 100    | 145      | 100    | 153      | 100    | 160      | 100                          | 168      | 100                    | 168    | Badan Kesbang Linmas |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)               | Zona                      |                     | hijau                                         |                 | hijau  | -        | hijau  | -        | hijau  | -        | hijau  | -        | hijau                        | -        | hijau                  | -      |                      |
|    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Meningkatnya Disiplin Aparatur                                                                                 | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas                  | %                         | 100                 | 100                                           | 30              | 100    | 31       | 100    | 33       | 100    | 34       | 100    | 36       | 100                          | 38       | 100                    | 38     | Badan Kesbang Linmas |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur                                                                            | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                               | JPL/orang/ tahun          |                     | 10                                            | 30              | 15     | 32       | 20     | 33       | 30     | 35       | 40     | 36       | 50                           | 38       | 50                     | 38     | Badan Kesbang Linmas |
|    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan Kinerja SKPD                                        | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD  | %                         | 100                 | 100                                           | 161             | 100    | 169      | 100    | 177      | 100    | 186      | 100    | 195      | 100                          | 205      | 100                    | 205    | Badan Kesbang Linmas |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                            | predikat                  |                     | BB                                            |                 | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A                            |          | A                      |        |                      |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan | %                         | 100                 | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                    |        |                      |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD               | %                         | 100                 | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                    |        |                      |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                      | %                         | 100                 | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                    |        |                      |
|    | Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan                         | Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan                         | Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan                                                                | Konflik Sosial                                                       | kasus                     | 23                  | 23                                            | 910             | 23     | 923      | 23     | 995      | 23     | 1,091    | 23     | 1,195    | 23                           | 1,308    | 23                     | 1,308  | Badan Kesbang Linmas |
|    | Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan                              | Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan                              | Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara                                        | Konflik SARA                                                         | konflik                   | 0                   | 0                                             | 787             | 0      | 798      | 0.0    | 860      | 0      | 943      | 0      | 1,034    | 0                            | 1,132    | 0                      | 1,132  | Badan Kesbang Linmas |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                | Koordinasi antar pemuka dan tokoh umat beragama                      | Rakor/Pertemuan per tahun | 2                   | 2                                             |                 | 2      |          | 2      |          | 2      |          | 2      |          | 2                            |          | 2                      |        |                      |
|    | Pendidikan Politik Masyarakat                                          | Pendidikan Politik Masyarakat                                          | Terwujudnya sistem dan budaya politik yang demokratis serta mantapnya hubungan supra dan infrastruktur politik | Peningkatan capaian indikator demokrasi Indonesia (IDI)              | %                         | 64.61               | 65.22                                         | 1,348           | 65.84  | 1,367    | 66.46  | 1,474    | 67.07  | 1,615    | 67.69  | 1,771    | 68.31                        | 1,938    | 68.31                  | 1,938  | Badan Kesbang Linmas |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN |                                                                | INDIKATOR KINERJA (Outcome) |                                                                 | SATUAN | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUN G JAWAB |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|------------------------|
|    |                                                              |                                                                |                             |                                                                 |        |                     | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                              |          |                        |
|    | TAHUN 2016                                                   | TAHUN 2017-2021                                                | TAHUN 2016                  | TAHUN 2017-2021                                                 |        |                     | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                        |
|    | Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)        | Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)          |                             | Menurunnya kasus penyakit masyarakat                            | %      | -                   | 50                                            | 200      | 50     | 203      | 50     | 219      | 60     | 240      | 70     | 263      | 70     | 288      | 70                           | 288      | Badan Kesbang Linmas   |
|    |                                                              |                                                                |                             | Pemahaman-aparatur-dan-pihak-terkait-terhadap-perbuatan-maksiet |        |                     |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |
|    | -                                                            | Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba | -                           | Pemahaman aparatur dan pihak terkait terhadap bahaya narkoba    | %      | -                   | -                                             | -        | 50     | 107      | 50     | 118      | 50     | 122      | 70     | 125      | 70     | 136      | 70                           | 136      | Badan Kesbang Linmas   |
|    |                                                              |                                                                |                             |                                                                 |        |                     |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |
|    | SATPOL PP                                                    |                                                                |                             |                                                                 |        |                     |                                               | 6,262    |        | 6,561    |        | 7,026    |        | 7,602    |        | 8,228    |        | 8,908    |                              | 8,908    |                        |



| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN           |                                                                        | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                                  |                                                                                                | SATUAN           | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUN G JAWAB |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|------------------------|
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                              |                                                                                                |                  |                     | 2016                                          |                 | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                              |          |                        |
|    |                                                                        |                                                                        | TAHUN 2016                                                                   | TAHUN 2017-2021                                                                                |                  |                     | TAHUN 2016                                    | TAHUN 2017-2021 | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                        |
|    | URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT       |                                                                        |                                                                              |                                                                                                |                  |                     |                                               | 6,262           |        | 6,561    |        | 7,026    |        | 7,602    |        | 8,228    |        | 8,908    |                              | 8,908    |                        |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran                               | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                                                  | %                |                     | 100                                           | 1,735           | 100    | 1,822    | 100    | 1,913    | 100    | 2,008    | 100    | 2,109    | 100    | 2,214    | 100                          | 2,214    | Satpol PP              |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Pelayanan Pemeliharaan                                                       | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur                                          | %                |                     | 100                                           | 388             | 100    | 408      | 100    | 428      | 100    | 449      | 100    | 472      | 100    | 495      | 100                          | 495      | Satpol PP              |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                              | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)                                         | Zona             |                     | hijau                                         |                 | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                        |          |                        |
|    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Peningkatan disiplin aparatur                                                | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas                                            | %                |                     | 100                                           | 376             | 100    | 394      | 100    | 414      | 100    | 435      | 100    | 457      | 100    | 479      | 100                          | 479      | Satpol PP              |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur                                          | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                                                         | JPL/orang/ tahun |                     | 10                                            | 72              | 15     | 75       | 20     | 79       | 30     | 83       | 40     | 87       | 50     | 92       | 50                           | 92       | Satpol PP              |
|    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi keuangan                                    | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD                            | %                |                     | 100                                           | 310             | 100    | 326      | 100    | 342      | 100    | 359      | 100    | 377      | 100    | 396      | 100                          | 396      | Satpol PP              |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                              | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                                                      | predikat         |                     | BB                                            |                 | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A      |          | A                            |          |                        |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                              | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan                           | %                |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                        |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                              | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD                                         | %                |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                        |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                              | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                                                | %                |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                        |
|    | Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat                                   | Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat                                   | Menurunnya perbuatan maksiat                                                 | Persentase kabupaten/kota yang dapat difasilitasi untuk operasi gabungan pemberantasan maksiat | Kasus            |                     | 60                                            | 207             | 70     | 197      | 70     | 215      | 90     | 238      | 90     | 266      | 100    | 292      | 100                          | 292      | Sat Pol PP             |
|    |                                                                        |                                                                        | Persentase partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum |                                                                                                | %                |                     |                                               |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          | Sat Pol PP             |
|    |                                                                        |                                                                        | Jumlah perda yang ditegakkan                                                 |                                                                                                | Perda            | 2                   |                                               |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          | Satpol PP              |
|    | Peningkatan Perlindungan Masyarakat                                    | Peningkatan Perlindungan Masyarakat                                    | Meningkatnya perlindungan masyarakat                                         | Rasio jumlah satuan linmas per RT atau sebutan lainnya                                         | Rasio            | 19                  | 0.3                                           | 279             | 0.35   | 266      | 0.4    | 290      | 0.45   | 321      | 0.5    | 358      | 0.55   | 393      | 0.55                         | 393      | Satpol PP              |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                   |                                                                                | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                   |                                                                                                             | SATUAN           | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUN G JAWAB |        |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|------------------------|--------|--------------|
|    |                                                                                |                                                                                |                                                               |                                                                                                             |                  |                     | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          |                              |          |                        | 2021   |              |
|    | TAHUN 2016                                                                     | TAHUN 2017-2021                                                                | TAHUN 2016                                                    | TAHUN 2017-2021                                                                                             |                  |                     | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                        | Target | Rp. (Jt)     |
|    | Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentrman Masyarakat                         | Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentrman Masyarakat                         | Meningkatkan ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat        | Persentase kabupaten/kota yang dapat difasilitasi dalam patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat | %                | 19                  | 60                                            | 2,665    | 70     | 2,542    | 70     | 2,767    | 90     | 3,067    | 90     | 3,420    | 100                          | 3,759    | 100                    | 3,759  | Satpol PP    |
|    | Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS                   | Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS                   | Peningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS | Persentase kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan                                                  | %                |                     | 50                                            | 230      | 60     | 220      | 70     | 239      | 80     | 266      | 90     | 296      | 90                           | 326      | 90                     | 326    | Satpol PP    |
|    | -                                                                              | Program Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur                         | -                                                             | Persentase diklat aparatur yang dapat diselenggarakan sesuai rencana                                        |                  |                     |                                               |          | 100    | 312      | 100    | 339      | 100    | 376      | 100    | 387      | 100                          | 461      | 100                    | 461    | Satpol PP    |
|    |                                                                                |                                                                                |                                                               |                                                                                                             |                  |                     |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |        |              |
|    |                                                                                |                                                                                |                                                               |                                                                                                             |                  |                     |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |        |              |
|    | DINAS SOSIAL                                                                   |                                                                                |                                                               |                                                                                                             |                  |                     |                                               | 32,990   |        | 34,568   |        | 37,018   |        | 40,051   |        | 43,349   |                              | 46,933   |                        | 46,933 |              |
|    | URUSAN SOSIAL                                                                  |                                                                                |                                                               |                                                                                                             |                  |                     |                                               | 32,990   |        | 34,568   |        | 37,018   |        | 40,051   |        | 43,349   |                              | 46,933   |                        | 46,933 |              |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                             | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                             | Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang baik      | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                                                               | %                | 60                  | 100                                           | 4,781    | 100    | 5,020    | 100    | 5,271    | 100    | 5,534    | 100    | 5,811    | 100                          | 6,102    | 100                    | 6,102  | Dinas Sosial |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                      | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                      | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur         | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur                                                       | %                | 5                   | 100                                           | 6,939    | 100    | 7,286    | 100    | 7,651    | 100    | 8,033    | 100    | 8,435    | 100                          | 8,857    | 100                    | 8,857  | Dinas Sosial |
|    |                                                                                |                                                                                |                                                               | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)                                                      | zona             |                     | hijau                                         |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                        |          | hijau                  |        |              |
|    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                                  | Peningkatan Disiplin Aparatur                                                  | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur                     | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas                                                         | %                | 5                   | 100                                           | 137      | 100    | 144      | 100    | 151      | 100    | 159      | 100    | 167      | 100                          | 175      | 100                    | 175    | Dinas Sosial |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                     | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                     | Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja   | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                                                                      | JPL/orang/ tahun | 5                   | 10                                            | 18       | 15     | 19       | 20     | 20       | 30     | 21       | 40     | 22       | 50                           | 23       | 50                     | 23     | Dinas Sosial |
|    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja   | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD                                         | %                | 5                   | 100                                           | 629      | 100    | 660      | 100    | 693      | 100    | 728      | 100    | 764      | 100                          | 802      | 100                    | 802    | Dinas Sosial |
|    |                                                                                |                                                                                |                                                               | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                                                                   | predikat         |                     | BB                                            |          | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A                            |          | A                      |        |              |
|    |                                                                                |                                                                                |                                                               | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan                                        | %                |                     | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                    |        |              |
|    |                                                                                |                                                                                |                                                               | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD                                                      | %                |                     | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                    |        |              |
|    |                                                                                |                                                                                |                                                               | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                                                             | %                |                     | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                    |        |              |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                                         |                                                                                                                      | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                                                                                      |                                                                                               | SATUAN       | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |                 |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUN G JAWAB |        |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|------------------------|--------|--------------|
|    |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                               |              |                     | 2016                                          |                 | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          |                              |          |                        | 2021   |              |
|    |                                                                                                                      |                                                                                                                      | TAHUN 2016                                                                                                                       | TAHUN 2017-2021                                                                               |              |                     | TAHUN 2016                                    | TAHUN 2017-2021 | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                        | Target | Rp. (Jt)     |
|    | Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)                  | Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, dan Penyakit Sosial Lainnya)           | Terwujudnya pembinaan eks penyandang penyakit sosial                                                                             | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Wanita Tuna Susila) yang mendapatkan pembinaan       | orang        | 40                  | 40                                            | 987             | 40     | 1,035    | 40     | 1,115    | 40     | 1,232    | 40     | 1,361    | 40                           | 1,500    | 240                    | 1,500  | Dinas Sosial |
|    | Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Terwujudnya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberdayakan :                            | Orang        | 6.000 (K)           | 4,650                                         | 4,863           | 4500   | 4,037    | 4500   | 4,587    | 4500   | 5,102    | 4500   | 5,643    | 4500                         | 6,208    | 4500                   | 6,208  | Dinas Sosial |
|    |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                  | - Komunitas Adat Terpencil                                                                    | Orang        | 30                  | 30                                            |                 | 30     |          | 35     |          | 40     |          | 45     |          | 50                           |          | 230                    |        | Dinas Sosial |
|    |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                  | - Anak Panti (bantuan beras)                                                                  | Orang        | 4400                | 4,400                                         |                 | 4400   |          | 4400   |          | 4400   |          | 4400   |          | 4400                         |          | 26,400                 |        | Dinas Sosial |
|    |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                  | - Kredit Usaha Bersama (KUBE)                                                                 | Kelompok     | 0                   | 0                                             |                 | 10     |          | 30     |          | 40     |          | 50     |          | 60                           |          | 60                     |        | Dinas Sosial |
|    |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                  | - Wanita Rawan Sosial Ekonomi                                                                 | Orang        | 200                 | 200                                           |                 | 300    |          | 300    |          | 300    |          | 300    |          | 300                          |          | 300                    |        | Dinas Sosial |
|    | Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial                                                                        | Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial                                                                        | Terwujudnya Peningkatan Kelembagaan Kesos                                                                                        | Lembaga sosial yang terareditasi                                                              | Lembaga      | 0                   | 10                                            | 2,145           | 10     | 2,249    | 10     | 2,422    | 15     | 2,678    | 15     | 2,956    | 20                           | 3,259    | 20                     | 3,259  | Dinas Sosial |
|    |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                  | Keterampilan PSKS                                                                             | %            | 0                   | 5                                             |                 | 5      |          | 10     |          | 15     |          | 20     |          | 25                           |          | 25                     |        | Dinas Sosial |
|    | Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                                                                      | Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                                                                      | Terwujudnya Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan sosial                                                                      | Pelayanan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (Disabilitas)                               | %            | 100                 | 100                                           | 143             | 100    | 150      | 100    | 161      | 100    | 178      | 100    | 197      | 100                          | 217      | 100                    | 217    | Dinas Sosial |
|    | Pembinaan Anak Terlantar                                                                                             | Pembinaan Anak Terlantar                                                                                             | Terwujudnya pembinaan terhadap anak terlantar                                                                                    | Pelayanan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat keterampilan (anak terlantar) | Jumlah Panti | 2                   | 2                                             | 4,842           | 3      | 5,076    | 3      | 5,468    | 3      | 6,044    | 3      | 6,673    | 3                            | 7,355    | 3                      | 7,355  | Dinas Sosial |
|    | Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma                                                                       | Pembinaan Para Penyandang Dissabilitas dan Eks Trauma                                                                | Terwujudnya pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma                                                                       | Pelayanan penyandang Disabilitas (Netra dan Grahita)                                          | Jumlah Panti | 2                   | 2                                             | 2,682           | 2      | 2,811    | 2      | 3,028    | 2      | 3,347    | 2      | 3,696    | 2                            | 4,074    | 2                      | 4,074  | Dinas Sosial |
|    |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                               | Orang        | 150                 | 150                                           |                 | 150    |          | 150    |          | 150    |          | 150    |          | 150                          |          | 150                    |        |              |
|    | Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo                                                                                 | Pembinaan Panti Asuhan / Panti Lansia                                                                                | terwujudnya Pembinaan Panti Asuhan / Jumpo                                                                                       | Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lanjut Usia Terlantar)                     | Jumlah Panti | 2                   | 2                                             | 4,823           | 2      | 5,057    | 2      | 5,447    | 2      | 6,020    | 2      | 6,648    | 2                            | 7,327    | 2                      | 7,327  | Dinas Sosial |
|    |                                                                                                                      |                                                                                                                      | - Anak asuh yang menamatkan pendidikan SLTA                                                                                      | Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Anak asuh yang mendapat pendidikan)        | Orang        | 155                 | 155                                           |                 | 155    |          | 155    |          | 155    |          | 155    |          | 155                          |          | 155                    |        |              |
|    | -                                                                                                                    | Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba                                                       | -                                                                                                                                | Penjangkauan Pengguna Narkoba                                                                 | %            | 15.59               | 15.59                                         |                 | 16.59  | 69       | 16.59  | 65       | 16.59  | 64       | 16.59  | 62       | 16.59                        | 60       | 16.59                  | 60     | Dinas Sosial |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN           |                                                                        | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                    |                                                                          | SATUAN           | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |                 |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUN G JAWAB |        |               |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|------------------------|--------|---------------|
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                |                                                                          |                  |                     | 2016                                          |                 | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          |                              |          |                        | 2021   |               |
|    |                                                                        |                                                                        | TAHUN 2016                                                     | TAHUN 2017-2021                                                          |                  |                     | TAHUN 2016                                    | TAHUN 2017-2021 | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                        | Target | Rp. (Jt)      |
|    | -                                                                      | Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial                      | -                                                              | Persentase korban bencana provinsi yang terlayani dalam pemulihan trauma | %                | 75                  | 75                                            |                 | 75     | 956      | 75%    | 938      | 75     | 911      | 75     | 914      | 75                           | 976      | 75                     | 976    | Dinas Sosial  |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                | Persentase penanganan konflik sosial                                     | %                | 0                   | 0                                             |                 | 35     |          | 40%    |          | 40     |          | 45     |          | 45                           |          | 45                     |        |               |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                |                                                                          |                  |                     |                                               |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |        |               |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                |                                                                          |                  |                     |                                               |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |        |               |
|    | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                    |                                                                        |                                                                |                                                                          |                  |                     |                                               | 16,403          |        | 17,188   |        | 18,406   |        | 19,914   |        | 21,554   |                              | 23,336   |                        | 23,336 |               |
|    | URUSAN TENAGA KERJA                                                    |                                                                        |                                                                |                                                                          |                  |                     |                                               | 16,403          |        | 17,188   |        | 18,406   |        | 19,914   |        | 21,554   |                              | 23,336   |                        | 23,336 |               |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran                 | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                            | %                | 85                  | 100                                           | 2,554           | 100    | 2,682    | 100    | 2,816    | 100    | 2,957    | 100    | 3,104    | 100                          | 3,260    | 100                    | 3,260  | Disnakertrans |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Meningkatnya pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur           | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur                    | %                | 85                  | 100                                           | 4,492           | 100    | 4,716    | 100    | 4,952    | 100    | 5,200    | 100    | 5,459    | 100                          | 5,732    | 100                    | 5,732  | Disnakertrans |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)                   | zona             |                     | hijau                                         |                 | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                        |          | hijau                  |        |               |
|    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Meningkatnya disiplin dan etos kerja aparatur                  | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas                      | %                | 85                  | 100                                           | 133             | 100    | 140      | 100    | 147      | 100    | 154      | 100    | 162      | 100                          | 170      | 100                    | 170    | Disnakertrans |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Meningkatnya Wawasan dan kemampuan / kapasitas SDM aparatur    | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                                   | JPL/orang/ tahun | 85                  | 10                                            | 13              | 15     | 14       | 20     | 15       | 30     | 16       | 40     | 16       | 50                           | 17       | 50                     | 17     | Disnakertrans |
|    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya capaian kinerja dan sistem pelaporan kinerja SKPD | Tingkat kesesuaian laporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD        | %                | 85                  | 100                                           | 611             | 100    | 642      | 100    | 674      | 100    | 708      | 100    | 743      | 100                          | 780      | 100                    | 780    | Disnakertrans |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                                | predikat         |                     | BB                                            |                 | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A                            |          | A                      |        |               |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan     | %                |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                    |        |               |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD                   | %                |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                    |        |               |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                          | %                |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                    |        |               |
|    | Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja                    | Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja                    | Persentase tenaga kerja yang berkompeten                       | Persentase tenaga kerja yang berkompeten                                 | %                | 90.91               | 66.15                                         | 5,384           | 68.46  | 3,678    | 70.39  | 4,279    | 73.73  | 4,760    | 75.56  | 5,331    | 77.4                         | 5,875    | 77.4                   | 5,875  | Disnakertrans |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                | Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Terakreditasi                   | %                | -                   | 11.36                                         |                 | 12.00  |          | 24.00  |          | 31.00  |          | 27.00  |          | 36.00                        |          | 36.00                  |        | Disnakertrans |
|    | Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha                   | Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha                   | Persentase serapan tenaga kerja sektor formal                  | Persentase serapan tenaga kerja sektor Formal                            | Orang            | 8.79                | 17.43                                         | 1,030           | 19.04  | 1,556    | 19.17  | 1,593    | 19.32  | 1,772    | 19.46  | 1,985    | 19.61                        | 2,187    | 19.61                  | 2,187  | Disnakertrans |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                    |                                                                                                 | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                                                            |                                                                                                                | SATUAN     | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUN G JAWAB |       |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|------------------------|-------|---------------|
|    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                |            |                     | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021                         |          |                        |       |               |
|    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                |            |                     | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                        |       |               |
|    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                        | Persentase serapan tenaga kerja sektor In Formal                                                               | %          | 55.71               | 87.20                                         |          | 87.33  |          | 87.46  |          | 87.59  |          | 87.72  |          | 87.85                        |          | 87.85                  |       | Disnakertrans |
|    | Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan                                               | Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan                                               | Berkurangnya jumlah kasus perselisihan hubungan industrial                                             | Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial                                                 | %          | 14 kasus            | 4.87                                          | 745      | 4.73   | 549      | 4.59   | 1,153    | 4.45   | 1,283    | 4.31   | 1,437    | 4.17                         | 1,583    | 4.17                   | 1,583 | Disnakertrans |
|    |                                                                                                 |                                                                                                 | Jumlah pekerja buruh yang menjadi peserta program BPJS Naker                                           | Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan.                         | %          | 103.184 org         | 6.86                                          |          | 7.07   |          | 7.28   |          | 7.49   |          | 7.72   |          | 7.94                         |          | 7.94                   |       | Disnakertrans |
|    | Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja                                    | Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja                                    | Persentase perusahaan yang melakukan peraturan per undang-undangan ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 | Persentase kepatuhan perusahaan yang melakukan peraturan per undang-undangan ketenagakerjaan                   | %          | 25.29               | 48.82                                         | 152      | 48.92  | 1,347    | 49.11  | 235      | 49.39  | 262      | 49.59  | 293      | 49.59                        | 323      | 49.59                  | 323   | Disnakertrans |
|    | Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium                                       | Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium                                       | Meningkatnya sarana dan prasarana laboratorium                                                         | Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana laboratorium                                                          | Unit       | -                   | -                                             | 415      | -      | -        | 14     | 358      | 10     | 374      | 6      | 402      | 5                            | 412      | 35                     | 412   | Disnakertrans |
|    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                        | Persentase terpenuhi-standarisasi-sarana dan-prasarana-laboratorium                                            | %          |                     |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |       |               |
|    | Gerakan Terpadu Pensejahteraan Fakir Miskin                                                     | Gerakan Terpadu Pensejahteraan Fakir Miskin                                                     | Persentase serapan tenaga kerja sektor informal                                                        | Persentase serapan tenaga kerja sektor informal                                                                | Orang      | 240                 | 240                                           | 72       | 240    | 564      | 250    | 657      | 260    | 731      | 275    | 719      | 285                          | 901      | 1,550                  | 901   | Disnakertrans |
|    | -                                                                                               | Gerakan Terpadu Pariwisata                                                                      | -                                                                                                      | Jumlah tenaga kerja yang berkompeten                                                                           | Orang      | -                   | -                                             | -        | 32     | 292      | 32     | 340      | 48     | 378      | 48     | 423      | 48                           | 466      | 208                    | 466   |               |
|    | Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal | Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal | Besaran transmigrans yang akan dibina                                                                  | Persentase kawasan transmigrasi yang memenuhi sarana dan prasaraa dan pengembangan masyarakat sesuai ketentuan | %          | 50                  | 75                                            | 650      | 80     | 830      | 60     | 953      | 60     | 1,060    | 60     | 1,187    | 60                           | 1,308    | 60                     | 1,308 | Disnakertrans |
|    | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                        | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                        | Meningkatnya jumlah perusahaan yang diperiksa                                                          | Persentase retribusi perusahaan yang diperiksa                                                                 | Perusahaan | 40                  | 40                                            | 152      | 40     | 178      | 40     | 234      | 40     | 261      | 40     | 292      | 40                           | 322      | 40                     | 322   | Dinas Sosial  |
|    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                |            |                     |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |       |               |
|    | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB                                                             |                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                |            |                     |                                               | 4,298    |        | 4,589    |        | 4,823    |        | 5,218    |        | 5,648    |                              | 6,115    |                        | 6,115 |               |
|    | URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                             |                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                |            |                     |                                               | 3,638    |        | 3,581    |        | 3,737    |        | 4,032    |        | 4,360    |                              | 4,698    |                        | 4,698 |               |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                              | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                              | Terlaksananya pelayanan administrai perkantoran                                                        | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                                                                  | %          |                     | 100                                           | 654      | 100    | 686      | 100    | 721      | 100    | 757      | 100    | 794      | 100                          | 834      | 100                    | 834   | BPPR dan KB   |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                       | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                       | Terlaksananya peningkatan sarana prasarana aparatur                                                    | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur                                                          | %          |                     | 100                                           | 176      | 100    | 185      | 100    | 194      | 100    | 204      | 100    | 214      | 100                          | 224      | 100                    | 224   | BPPR dan KB   |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN           |                                                                        | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                              |                                                                                                         | SATUAN           | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUN G JAWAB |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|------------------------|
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                          |                                                                                                         |                  |                     | 2016                                          |                 | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                              |          |                        |
|    |                                                                        |                                                                        | TAHUN 2016                                                               | TAHUN 2017-2021                                                                                         |                  |                     | TAHUN 2016                                    | TAHUN 2017-2021 | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                        |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                          | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)                                                  | zona             |                     | hijau                                         |                 | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                        |          |                        |
|    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Meningkatnya disiplin aparatur                                           | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas                                                     | %                |                     | 100                                           | 25              | 100    | 27       | 100    | 28       | 100    | 29       | 100    | 31       | 100    | 32       | 100                          | 32       | BPPR dan KB            |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur                                      | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                                                                  | JPL/orang/ tahun |                     | 10                                            | 29              | 15     | 31       | 20     | 32       | 30     | 34       | 40     | 35       | 50     | 37       | 50                           | 37       | BPPR dan KB            |
|    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Terlaksananya pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD                                     | %                |                     | 100                                           | 204             | 100    | 215      | 100    | 225      | 100    | 236      | 100    | 248      | 100    | 261      | 100                          | 261      | BPPR dan KB            |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                          | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                                                               | predikat         |                     | BB                                            |                 | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A      |          | A                            |          |                        |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                          | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan                                    | %                |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                        |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                          | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD                                                  | %                |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                        |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                          | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                                                         | %                |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                        |
|    | Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak           | -                                                                      | Persentase Lembaga Layanan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Aktif        | -                                                                                                       | %                | 70                  | 72                                            | 300             | -      | -        | -      | -        | -      | -        | -      | -        | -      | -        | -                            | -        |                        |
|    |                                                                        |                                                                        | Persentase penurunan kasus korban kekerasan terhadap perempuan           |                                                                                                         | %                | 1.30                | 1.26                                          |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |
|    | -                                                                      | Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan                                   | -                                                                        | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                                                         | %                | 94,04               |                                               | -               | 94,44  | 227      | 94,64  | 244      | 94,84  | 267      | 95,04  | 290      | 95,24  | 319      | 95,24                        | 319      | BPPR dan KB            |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                          | Indeks Pemberdayaann Gender                                                                             | %                | 61,86               |                                               |                 | 62,02  | 192      | 62,10  | 207      | 62,18  | 226      | 62,26  | 245      | 62,34  | 270      | 62,34                        | 270      |                        |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                          | Persentase organisasi perempuan yang aktif                                                              | %                | 91,14               |                                               |                 | 94,93  | 157      | 96,20  | 169      | 97,46  | 185      | 98,73  | 200      | 100    | 221      | 100                          | 221      |                        |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                          | Persentase SKPD yang menerapkan anggaran berbasis gender                                                | %                | 87,79               |                                               |                 | 91,83  | 122      | 93,87  | 131      | 95,91  | 144      | 97,95  | 156      | 100    | 172      | 100                          | 172      |                        |
|    | Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan        | -                                                                      | Persentase SKPD yang menerapkan anggaran berbasis gender                 | -                                                                                                       | %                | 71,43               | 89,79                                         | 1,057           | -      | -        | -      | -        | -      | -        | -      | -        | -      | -        | -                            | -        | BPPR dan KB            |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                          | Indeks perberdayaan gender                                                                              | %                | 61,86               | 61,94                                         |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                          | Persentase organisasi perempuan yang aktif                                                              | %                | 91,14               | 92,40                                         |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |
|    | -                                                                      | Peningkatan perlindungan perempuan                                     | -                                                                        | Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun keatas ditingkat provinsi | Ratio            | 50                  |                                               |                 | 48     | 401      | 47     | 432      | 46     | 472      | 45     | 512      | 44     | 564      | 44                           | 564      |                        |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN |                                                      | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                                                               |                                                                                     | SATUAN   | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |                                      |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |             | SKPD PENANGGUN G JAWAB |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|-------------|------------------------|
|    |                                                              |                                                      |                                                                                                           |                                                                                     |          |                     | 2016                                          |          | 2017                                 |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                              |             |                        |
|    | TAHUN 2016                                                   | TAHUN 2017-2021                                      | TAHUN 2016                                                                                                | TAHUN 2017-2021                                                                     |          |                     | Target                                        | Rp. (Jt) | Target                               | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt)    |                        |
|    | Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak        | -                                                    | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                                                           | -                                                                                   | %        | 94,04               | 94,24                                         | 802      | Peningkatan Kualitas-Hidup-Perempuan |          | -      |          | -      |          | -      |          | -      |          | -                            | BPPR dan KB |                        |
|    |                                                              |                                                      | Persentase SKPD yang memiliki data terpilah                                                               |                                                                                     | %        | 79,59               | 89,79                                         |          |                                      |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |             |                        |
|    |                                                              |                                                      | Persentase kelembagaan anak yang aktif                                                                    |                                                                                     | %        | 65                  | 75                                            |          |                                      |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |             |                        |
|    | -                                                            | Peningkatan Kualitas Keluarga                        |                                                                                                           | Persentase Penyediaan Layanan bagi keluarga mewujudkan KG dan Hak Anak              | %        | 50                  |                                               | 60       | 192                                  | 70       | 207    | 80       | 226    | 90       | 245    | 100      | 270    | 100      | 270                          |             |                        |
|    | Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan        | -                                                    | Rasio Perempuan Korban Kekerasan Per 100.000 Penduduk Perempuan usia 18 Tahun ke atas di tingkat Provinsi | -                                                                                   | Ratio    | 50                  | 50                                            | 90       |                                      |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              | BPPR dan KB |                        |
|    | -                                                            | Peningkatan Sistem data Gender dan Anak              |                                                                                                           | Persentase SKPD yang memiliki data terpilah                                         | %        | 50                  |                                               | -        | 91,83                                | 192      | 93,87  | 206      | 95,91  | 226      | 97,95  | 245      | 100    | 270      | 100                          | 270         |                        |
|    | Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak              | Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak      | Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak di Tingkat Provinsi                       | Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak di Tingkat Provinsi | Ratio    | 394                 | 392                                           | 300      | 390                                  | 85       | 388    |          | 386    |          | 384    |          | 382    |          | 382                          | BPPR dan KB |                        |
|    |                                                              |                                                      | Persentase penurunan kasus korban kekerasan terhadap anak                                                 | Persentase penurunan kasus korban kekerasan terhadap anak                           | %        | 1,20                | 1,15                                          |          |                                      |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |             |                        |
|    |                                                              |                                                      | Persentase Kabutapan dan Kota Layak Anak                                                                  | Jumlah Kabutapan dan Kota Layak Anak                                                | Kab Kota | 6                   | 7                                             |          | 8                                    |          | 9      |          | 10     |          | 11     |          | 12     |          | 12                           |             |                        |
|    |                                                              |                                                      | Persentase Anak yang memiliki Akte Kelahiran                                                              | Persentase Anak yang memiliki Akte Kelahiran                                        | %        | 70,00               | 75,50                                         |          |                                      |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |             |                        |
|    | -                                                            | Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak | -                                                                                                         | Persentase Kabupaten dan Kota Layak Anak                                            | %        | 31,57               |                                               |          | 42,1                                 | 436      | 47,36  | 470      | 52,63  | 513      | 57,89  | 587      | 63,15  | 613      | 63,15                        | 613         |                        |
|    | -                                                            | Peningkatan Perlindungan Khusus Anak                 | -                                                                                                         | Ratio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak di tingkat Provinsi | Ratio    | 394                 |                                               | -        | 390                                  | 436      | 388    | 470      | 386    | 513      | 384    | 557      | 382    | 613      | 382                          | 613         |                        |
|    |                                                              |                                                      |                                                                                                           |                                                                                     |          |                     |                                               |          |                                      |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |             |                        |
|    | URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA          |                                                      |                                                                                                           |                                                                                     |          |                     |                                               | 660      |                                      | 1,008    |        | 1,086    |        | 1,186    |        | 1,287    |        | 1,416    |                              | 1,416       |                        |
|    | Keluarga Berencana                                           | -                                                    | Laju Pertumbuhan Penduduk                                                                                 | -                                                                                   | %        | 1,25                | 1,22                                          | 76       |                                      |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              | BPPR dan KB |                        |
|    |                                                              |                                                      | Jumlah akseptor KB                                                                                        |                                                                                     | PUS      | 151.693             | 151.713                                       |          |                                      |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |             |                        |
|    | Kesehatan Reproduksi Remaja                                  | Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi            | Persentase PIK Remaja yang dilatih                                                                        | Persentase PIK Remaja yang dilatih                                                  | %        | 60                  | 70                                            | 281      | 77                                   | 112      | 82     | 120      | 90     | 131      | 95     | 142      | 100    | 157      | 100                          | 157         | BPPR dan KB            |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN           |                                                                        | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                                  |                                                                     | SATUAN           | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |                 |        |          |         |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUN G JAWAB |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|---------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|------------------------|
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                              |                                                                     |                  |                     | 2016                                          |                 | 2017   |          | 2018    |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                              |          |                        |
|    |                                                                        |                                                                        | TAHUN 2016                                                                   | TAHUN 2017-2021                                                     |                  |                     | TAHUN 2016                                    | TAHUN 2017-2021 | Target | Rp. (Jt) | Target  | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                        |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                              | ASFR (Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur) 15-19 tahun            | Ratio            | 23,40               | 21,00                                         |                 | 18,90  | 60       | 18,90   | 64       | 17,00  | 70       | 13,60  | 76       | 11,90  | 84       | 11,90                        | 84       |                        |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                              | Kehamilan yang tidak diinginkan                                     | %                | 13,9                | 12,4                                          |                 | 11,00  | 79       | 11,00   | 86       | 9,70   | 94       | 7,30   | 101      | 6,10   | 112      | 6,10                         | 112      |                        |
|    | Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak                                   | Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak                                   | Persentase Ibu, Bayi dan Anak yang Terlayani                                 | Persentase Ibu, Bayi dan Anak yang Terlayani                        | %                | 60                  | 70                                            | 229             | 77     | 91       | 82      | 98       | 90     | 107      | 95     | 116      | 100    | 128      | 100                          | 128      |                        |
|    | Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS             |                                                                        | Meningkatnya pemahaman atas penanggulangan narkoba dan PMS termasuk HIV/AIDS |                                                                     | Kali             | 1                   | 2                                             | 74              |        |          |         |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |
|    |                                                                        | Pelayanan Kontrasepsi                                                  |                                                                              | Jumlah Akseptor KB                                                  | PUS              | 151,693             |                                               |                 | 151733 | 70       | 151,753 | 75       | 151773 | 82       | 151793 | 89       | 151813 | 98       | 151,813                      | 98       | BPPR dan KB            |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                              | CPR (Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi)                              | %                | 51,30               | 52,5                                          |                 | 53,90  | 79       | 53,90   | 86       | 55,40  | 94       | 58,60  | 101      | 60,20  | 112      | 60,20                        | 112      |                        |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                              | Umnet Need (Kebutuhan berKB)                                        | %                | 9,10                | 8,3                                           |                 | 7,60   | 60       | 7,60    | 64       | 7,00   | 70       | 6,20   | 76       | 5,80   | 84       | 5,80                         | 84       |                        |
|    |                                                                        | Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga                     |                                                                              | Persentase tersedianya tenaga pendamping kelompok bina keluarga     | %                | 50                  |                                               |                 | 70     | 70       | 80      | 75       | 90     | 82       | 95     | 89       | 100    | 98       | 100                          | 98       |                        |
|    | -                                                                      | Peningkatan Pengendalian Penduduk                                      | -                                                                            | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)                                     | %                | 1,25                |                                               |                 | 1,18   | 296      | 1,14    | 319      | 1,10   | 349      | 1,06   | 379      | 1,02   | 417      | 1,02                         | 417      | BPPR dan KB            |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                              | Total Fertility Rate (TFR)                                          | %                | 2,70                | 2,61                                          |                 | 2,53   | 91       | 2,53    | 98       | 2,42   | 108      | 2,36   | 117      | 2,33   | 128      | 2,33                         | 128      |                        |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                              |                                                                     |                  |                     |                                               |                 |        |          |         |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |
|    | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT                                          |                                                                        |                                                                              |                                                                     |                  |                     |                                               | 18,219          |        | 19,091   |         | 20,444   |        | 22,119   |        | 23,941   |        | 25,920   |                              | 25,920   |                        |
|    | URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                |                                                                        |                                                                              |                                                                     |                  |                     |                                               | 18,219          |        | 19,091   |         | 20,444   |        | 22,119   |        | 23,941   |        | 25,920   |                              | 25,920   |                        |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran                              | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                       | %                | 100                 | 100                                           | 1,619           | 100    | 1,700    | 100     | 1,785    | 100    | 1,874    | 100    | 1,968    | 100    | 2,067    | 100                          | 2,067    | BPM                    |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai                                | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur               | %                | 100                 | 100                                           | 1,568           | 100    | 1,647    | 100     | 1,729    | 100    | 1,816    | 100    | 1,906    | 100    | 2,002    | 100                          | 2,002    | BPM                    |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                              | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)              | Zona             |                     | hijau                                         |                 | hijau  |          | hijau   |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                        |          |                        |
|    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Meningkatnya disiplin aparatur                                               | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas                 | %                | 100                 | 100                                           | 31              | 100    | 32       | 100     | 34       | 100    | 36       | 100    | 37       | 100    | 39       | 100                          | 39       | BPM                    |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Meningkatnya kemampuan dan SDM aparatur BPM                                  | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                              | JPL/orang/ tahun |                     | 10                                            | 45              | 15     | 47       | 20      | 50       | 30     | 52       | 40     | 55       | 50     | 57       | 50                           | 57       | BPM                    |
|    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya pelaksanaan penatausahaan Keuangan SKPD                         | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD | %                | 100                 | 100                                           | 279             | 100    | 293      | 100     | 308      | 100    | 323      | 100    | 339      | 100    | 356      | 100                          | 356      | BPM                    |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                              | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                           | Predikat         |                     | BB                                            |                 | BB     |          | BB      |          | A      |          | A      |          | A      |          | A                            |          |                        |



| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN  |                                                               | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                                                                                              |                                                                                           | SATUAN | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUN G JAWAB |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|------------------------|
|    |                                                               |                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                           |        |                     | 2016                                          |                 | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                              |          |                        |
|    |                                                               |                                                               | TAHUN 2016                                                                                                                               | TAHUN 2017-2021                                                                           |        |                     | TAHUN 2016                                    | TAHUN 2017-2021 | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                        |
|    |                                                               |                                                               |                                                                                                                                          | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan                      | %      | 100                 | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                        |
|    |                                                               |                                                               |                                                                                                                                          | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD                                    | %      | 100                 | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                        |
|    |                                                               |                                                               |                                                                                                                                          | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                                           | %      | 100                 | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                        |
|    | Pengendalian Terpadu Penanganan Kemiskinan                    | Penanggulangan Kemiskinan                                     | Tercapainya efektifitas dan efisiensi penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat                                                        | Tingkat Kemiskinan di Sumatea Barat                                                       | %      | 6.71                | 6.43                                          | 1,797           | 6.15   | 1,882    | 5.87   | 2,025    | 5.59   | 2,206    | 5.31   | 2,404    | 5.69   | 2,620    | 5.69                         | 2,620    | BPM                    |
|    | Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan / Nagari         | Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan / Nagari         | Meningkatnya peran masyarakat dalam berbagai program/kegiatan pembangunan                                                                | Jumlah Desa mandiri                                                                       | Kab    | 7                   | 13                                            | 4,659           | 25     | 4,879    | 37     | 5,249    | 49     | 5,719    | 61     | 6,232    | 73     | 6,792    | 85                           | 6,792    | BPM                    |
|    | Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha          | Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha          | Tercapainya kesejahteraan serta berkurangnya jumlah Kepala Keluarga Miskin secara bertahap                                               | Persentase Usaha Mikro dan Kecil Aktif.                                                   | %      | 35                  | 40                                            | 265             | 45     | 278      | 50     | 299      | 55     | 326      | 60     | 355      | 65     | 387      | 65                           | 387      | BPM                    |
|    |                                                               |                                                               |                                                                                                                                          | Badan Usaha Milik Desa/ Nagari yang terbentuk di Sumatera Barat. (Kumulatif)              | Unit   | 166                 | 308                                           |                 | 450    |          | 592    |          | 734    |          | 876    |          | 880    |          | 880                          |          |                        |
|    | Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat          | Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya             | Terciptanya upaya masyarakat untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat bagi kelangsungan pembangunan | Persentase Kelembagaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang Aktif.                            | %      | NA                  | 35                                            | 1,350           | 40     | 1,414    | 45     | 1,521    | 50     | 1,657    | 55     | 1,806    | 60     | 1,968    | 60                           | 1,968    | BPM                    |
|    | Pengembangan Teknologi Tepat Guna                             | Pengembangan Teknologi Tepat Guna                             | Terpenuhinya kebutuhan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat/nagari desa dan kelurahan                                       | Jenis Inovasi Teknologi Tepat Guna yang di Adopsi dan dimanfaatkan Masyarakat.            | Jenis  | 5                   | 60                                            | 870             | 65     | 911      | 70     | 980      | 75     | 1,068    | 80     | 1,164    | 85     | 1,268    | 85                           | 1,268    | BPM                    |
|    |                                                               |                                                               |                                                                                                                                          | Persentase Posyantek di Sumatera Barat                                                    | Unit   | 31                  | 15                                            |                 | 30     |          | 45     |          | 60     |          | 75     |          | 90     |          | 90                           |          |                        |
|    | Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Meningkatnya partisipasi masyarakat dan perantau dalam pembangunan Nagari/Desa danKelurahan                                              | Persentase LPM yang Kelembagaannya kuat.                                                  | Unit   | NA                  | 60                                            | 5,736           | 65     | 6,008    | 70     | 6,464    | 75     | 7,042    | 80     | 7,674    | 85     | 8,363    | 85                           | 8,363    | BPM                    |
|    |                                                               |                                                               |                                                                                                                                          | Persentase Parisipasi masyarakat dalam bulan bhakti Gotong royong masyarakat di Perdesaan | %      | NA                  | 70                                            |                 | 75     |          | 80     |          | 85     |          | 90     |          | 95     |          | 95                           |          |                        |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                     |                                                                        | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                             |                                                                                  | SATUAN                 | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |                 |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUNG G JAWAB |        |                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|-------------------------|--------|---------------------------|
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                         |                                                                                  |                        |                     | 2016                                          |                 | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          |                              |          |                         | 2021   |                           |
|    |                                                                                                  |                                                                        | TAHUN 2016                                                              | TAHUN 2017-2021                                                                  |                        |                     | TAHUN 2016                                    | TAHUN 2017-2021 | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                         | Target | Rp. (Jt)                  |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                         |                                                                                  |                        |                     |                                               |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                         |        |                           |
|    | BIRO PEMERINTAHAN                                                                                |                                                                        |                                                                         |                                                                                  |                        |                     |                                               | 7,663           |        | 8,030    |        | 8,599    |        | 9,303    |        | 10,069   |                              | 10,902   |                         | 10,902 |                           |
|    | URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT                                                                   |                                                                        |                                                                         |                                                                                  |                        |                     |                                               | 1,655           |        | 1,539    |        | 1,641    |        | 1,776    |        | 1,898    |                              | 2,095    |                         | 2,095  |                           |
|    | Penataan Keuangan dan Aset Pemerintahan nagari                                                   | Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Nagari                              | Peningkatan peran dan kualitas kelembagaan pada Pemneg.                 | SOTK Pem. Nagari/Desa sesuai Permendagri 84 Tahun 2015                           | Nagari/Desa            | NA                  | NA                                            | 425             | 40     | 395      | 80     | 421      | 120    | 456      | 140    | 487      | 160                          | 538      | 160                     | 538    | Setda (Biro Pemerintahan) |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                         | Produk Hukum Nagari sesuai Permendagri 111 Tahun 2015                            | Nagari/Desa            | NA                  | NA                                            |                 | 40     |          | 80     |          | 120    |          | 140    |          | 160                          |          | 160                     |        |                           |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                         | Nagari/Desa Definitif                                                            | Nagari/Desa            | 880                 | 880                                           |                 | 928    |          | 948    |          | 998    |          | 1,068  |          | 1,122                        |          | 1,122                   |        |                           |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                         | Pem Nagari/Desa Tertib Aset sesuai Permendagri 1 tahun 2016                      | Nagari/Desa            | NA                  | NA                                            |                 | 40     |          | 80     |          | 120    |          | 140    |          | 160                          |          | 160                     |        |                           |
|    | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari                                               | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari                     | Peningkatan peran dan kualitas kelembagaan pada Pemneg.                 | Persentase Kepuasan Wali Nagari/Kepala Desa terhadap kinerja perangkat           | %                      | NA                  | NA                                            | 1,230           | 65     | 1,144    | 70     | 1,220    | 75     | 1,320    | 80     | 1,411    | 85                           | 1,557    | 85                      | 1,557  | Setda (Biro Pemerintahan) |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                         | Persentase pemahaman aparatur terhadap Tupokis masing-masing Lembaga Nagari/Desa | %                      | NA                  | NA                                            |                 | 65     |          | 70     |          | 75     |          | 80     |          | 85                           |          | 85                      |        |                           |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                         | Kompetensi Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah sesuai Pergub 13 tahun 2016         | Nagari/Desa/ Kelurahan | 19                  | 38                                            |                 | 57     |          | 76     |          | 95     |          | 114    |          | 133                          |          | 133                     |        |                           |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                         |                                                                                  |                        |                     |                                               |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                         |        |                           |
|    | FUNGSI LAINNYA : OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN |                                                                        |                                                                         |                                                                                  |                        |                     |                                               | 6,008           |        | 6,491    |        | 6,958    |        | 7,528    |        | 8,171    |                              | 8,807    |                         | 8,807  |                           |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                               | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi dan operasional kantor   | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                                    | %                      | 12                  | 100                                           | 489             | 100    | 513      | 100    | 539      | 100    | 566      | 100    | 594      | 100                          | 624      | 100                     | 624    | Setda (Biro Pemerintahan) |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                        | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur                    | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur                            | %                      |                     | 100                                           | 112             | 100    | 117      | 100    | 123      | 100    | 129      | 100    | 136      | 100                          | 142      | 100                     | 142    | Setda (Biro Pemerintahan) |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                         | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)                           | Zona                   |                     | hijau                                         |                 | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                        |          | hijau                   |        |                           |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                       | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur                                     | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas                              | JPL/orang/ tahun       |                     | 10                                            | 46              | 15     | 48       | 20     | 51       | 30     | 53       | 40     | 56       | 50                           | 59       | 50                      | 59     | Setda (Biro Pemerintahan) |
|    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                           | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan Kinerja SKPD | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD              | %                      |                     | 100                                           | 90              | 100    | 94       | 100    | 99       | 100    | 104      | 100    | 109      | 100                          | 114      | 100                     | 114    | Setda (Biro Pemerintahan) |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                         | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                                        | Predikat               |                     | BB                                            |                 | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A                            |          | A                       |        |                           |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN |                                              | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                                                                                                              |                                                                                                                          | SATUAN    | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUNG JAWAB     |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|---------------------------|
|    |                                                              |                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |           |                     | 2016                                          |                 | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                              |          |                           |
|    |                                                              |                                              | TAHUN 2016                                                                                                                                               | TAHUN 2017-2021                                                                                                          |           |                     | TAHUN 2016                                    | TAHUN 2017-2021 | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                           |
|    |                                                              |                                              |                                                                                                                                                          | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan                                                     | %         |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                           |
|    |                                                              |                                              |                                                                                                                                                          | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD                                                                   | %         |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                           |
|    |                                                              |                                              |                                                                                                                                                          | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                                                                          | %         |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                           |
|    | Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah                 | Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya kepastian hukum pada wilayah administrasi pemerintahan khususnya pada daerah perbatasan Prov. Sumbang dan Provinsi tetangga                 | Segmen Batas Daerah yang diusulkan penegasannya                                                                          | Segmen    | 6                   | 6                                             | 684             | 6      | 635      | 6      | 678      | 6      | 733      | 6      | 784      | 4      | 865      | 34                           | 865      | Setda (Biro Pemerintahan) |
|    |                                                              |                                              |                                                                                                                                                          | Nama Rupa Bumi yang diusulkan pembakuannya                                                                               | buku      | 1                   | 1                                             |                 | 1      |          | 1      |          | 1      |          | 1      |          | 1      |          | 6                            |          |                           |
|    | Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik                      | Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik      | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                                                           | Pelaksanaan Pelayanan Publik sesuai SOP                                                                                  | %         | NA                  | 70                                            | 50              | 75     | 46       | 78     | 50       | 80     | 54       | 83     | 57       | 85     | 63       | 85                           | 63       | Setda (Biro Pemerintahan) |
|    | Kerjasama Pembangunan                                        | Kerjasama Pembangunan                        | Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan menyempurnakan ketatalaksanaan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien | MoU/perjanjian kerjasama pembangunan antar lembaga pemerintahan, swasta dan organisasi berbadan hukum                    | Kerjasama | 20                  | 25                                            | 140             | 25     | 130      | 30     | 139      | 30     | 150      | 30     | 161      | 30     | 177      | 170                          | 177      | Setda (Biro Pemerintahan) |
|    | Pengelolaan Otonomi Daerah                                   | Pengelolaan Otonomi Daerah                   | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah menerapkan prinsip pemerintahan yang baik dalam koridor rechtmatigheid dan doelmatigheid                 | Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD)                                                             | Skor 0-4  | 2.46                | 2.46                                          | 1,722           | 2.6    | 1,600    | 2.7    | 1,707    | 2.8    | 1,847    | 2.9    | 1,974    | 3      | 2,179    | 3                            | 2,179    | Setda (Biro Pemerintahan) |
|    | Koordinasi Pemerintahan                                      | Koordinasi Pemerintahan                      | Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien                                                                                  | Kebijakan Pemerintah dan Program Pembangunan antar Pemerintah dan Pemerintah daerah serta Intansi Vertikal yang sinergis | %         | 75                  | 78                                            | 579             | 80     | 538      | 83     | 574      | 85     | 621      | 88     | 664      | 90     | 733      | 90                           | 733      | Setda (Biro Pemerintahan) |
|    | Penyusunan Profil Kependudukan                               | Penataan Administrasi Kependudukan           | Tersedianya sistem informasi dan administrasi kependudukan yang akurat                                                                                   | Database kependudukan yang akurat                                                                                        | Kab/Kota  | 19                  | -                                             | 661             | 19     | 1,431    | 19     | 1,574    | 19     | 1,728    | 19     | 1,988    | 19     | 2,030    | 19                           | 2,030    | Setda (Biro Pemerintahan) |
|    |                                                              |                                              |                                                                                                                                                          | Kepemilikan Akte pencatatan sipil (Usia 0 - 18 tahun)                                                                    | %         | 75                  | 78                                            |                 | 80     |          | 83     |          | 85     |          | 88     |          | 90     |          | 90                           |          |                           |



| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                     |                                                                        | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                                                         |                                                                      | SATUAN           | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUN G JAWAB |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|------------------------|
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                     |                                                                      |                  |                     | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                              |          |                        |
|    | TAHUN 2016                                                                                       | TAHUN 2017-2021                                                        | TAHUN 2016                                                                                          | TAHUN 2017-2021                                                      |                  |                     | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                        |
|    | Pengembangan Komunikasi dan Informatika                                                          | -                                                                      | Tersebar nya informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk diakses masyarakat | -                                                                    | orang            | NA                  | -                                             | 2,091    | -      | -        | -      | -        | -      | -        | -      | -        | -      | -        | -                            | -        | Setda (Biro Humas)     |
|    | Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah                                                       | Pengelolaan e-Government Provinsi Sumatera Barat                       | Persentase peningkatan implementasi e-Government di lingkungan Pemprov                              | Indeks e-Government Indonesia                                        | Indeks           | 2.01                | 2.2                                           | 2,463    | 2.4    | 4,770    | 2.6    | 5,131    | 2.8    | 5,589    | 2.9    | 6,089    | 3      | 6,635    | 3                            | 6,635    | Setda (Biro Humas)     |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                     |                                                                      |                  |                     |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |
|    | FUNGSI LAINNYA : OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN |                                                                        |                                                                                                     |                                                                      |                  |                     |                                               | 1,734    |        | 1,820    |        | 1,912    |        | 2,007    |        | 2,107    |        | 2,213    |                              | 2,213    |                        |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                               | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran                                                      | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                        | %                |                     | 100                                           | 1,306    | 100    | 1,372    | 100    | 1,440    | 100    | 1,512    | 100    | 1,588    | 100    | 1,667    | 100                          | 1,667    | Setda (Biro Humas)     |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                        | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Pelayanan Pemeliharaan                                                                              | Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur                   | %                |                     | 100                                           | 251      | 100    | 264      | 100    | 277      | 100    | 291      | 100    | 305      | 100    | 320      | 100                          | 320      | Setda (Biro Humas)     |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                     | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)               | Zona             |                     | hijau                                         |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                        |          |                        |
|    | Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                                                              | Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                                    | Peningkatan disiplin aparatur                                                                       | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas                  | %                |                     | 100                                           | 69       | 100    | 72       | 100    | 76       | 100    | 79       | 100    | 83       | 100    | 87       | 100                          | 87       | Setda (Biro Humas)     |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                       | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur                                                                 | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                               | JPL/orang/ tahun |                     | 10                                            | 17       | 15     | 18       | 20     | 19       | 30     | 20       | 40     | 21       | 50     | 22       | 50                           | 22       | Setda (Biro Humas)     |
|    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                           | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi keuangan                                                           | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD  | %                |                     | 100                                           | 91       | 100    | 95       | 100    | 100      | 100    | 105      | 100    | 110      | 100    | 116      | 100                          | 116      | Setda (Biro Humas)     |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                     | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                            | predikat         |                     | BB                                            |          | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A      |          | A                            |          |                        |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                     | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan | %                |                     | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                        |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                     | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD               | %                |                     | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                        |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                     | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                      | %                |                     | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                        |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                     |                                                                      |                  |                     |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |
|    | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA                                                                       |                                                                        |                                                                                                     |                                                                      |                  |                     |                                               | 19,317   |        | 20,241   |        | 21,676   |        | 23,452   |        | 25,383   |        | 27,482   |                              | 27,482   |                        |
|    | URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA                                                                  |                                                                        |                                                                                                     |                                                                      |                  |                     |                                               | 19,317   |        | 20,241   |        | 21,676   |        | 23,452   |        | 25,383   |        | 27,482   |                              | 27,482   |                        |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN           |                                                                        | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                                                                      |                                                                      | SATUAN           | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |                 |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUN G JAWAB |        |          |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|------------------------|--------|----------|
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                  |                                                                      |                  |                     | 2016                                          |                 | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          |                              |          |                        | 2021   |          |
|    |                                                                        |                                                                        | TAHUN 2016                                                                                                       | TAHUN 2017-2021                                                      |                  |                     | TAHUN 2016                                    | TAHUN 2017-2021 | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                        | Target | Rp. (Jt) |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi dan operasional kantor                                            | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                        | %                | 100                 | 100                                           | 2,195           | 100    | 2,305    | 100    | 2,420    | 100    | 2,541    | 100    | 2,668    | 100                          | 2,801    | 100                    | 2,801  | Dispora  |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                                            | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur                | %                | 100                 | 100                                           | 880             | 100    | 924      | 100    | 970      | 100    | 1,019    | 100    | 1,070    | 100                          | 1,123    | 100                    | 1,123  | Dispora  |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                  | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)               | Zona             |                     | hijau                                         |                 | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                        |          | hijau                  |        |          |
|    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur                                                                        | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas                  | %                | 100                 | 100                                           | 76              | 100    | 80       | 100    | 84       | 100    | 88       | 100    | 92       | 100                          | 97       | 100                    | 97     | Dispora  |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur                                                                              | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                               | JPL/orang/ tahun | -                   | -                                             | -               | 6      | 80       | 8      | 84       | 10     | 88       | 12     | 93       | 14                           | 97       | 14                     | 97     | Dispora  |
|    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan kinerja SKPD                               | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD  | %                | 100                 | 100                                           | 452             | 100    | 475      | 100    | 498      | 100    | 523      | 100    | 549      | 100                          | 577      | 100                    | 577    | Dispora  |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                  | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                            | Predikat         |                     | BB                                            |                 | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A                            |          | A                      |        |          |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                  | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan | %                | 100                 | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                    |        |          |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                  | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD               | %                | 100                 | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                    |        |          |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                  | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                      | %                | 100                 | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                    |        |          |
|    | Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga                                  | Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga                                  | Meningkatnya budaya olahraga, kesehatan jasmani, mental, rohani masyarakat serta potensi olahraga Sumatera Barat | Persentase Peningkatan budaya masyarakat melaksanakan olahraga       | %                | 100                 | 20                                            | 7,891           | 40     | 9,321    | 60     | 10,808   | 80     | 9,682    | 90     | 11,645   | 100                          | 12,502   | 100                    | 12,502 | Dispora  |
|    |                                                                        |                                                                        | Meningkatnya pemasyarakatan, pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga Sumatera Barat                          | Persentase jumlah atlet dan pelatih yang berprestasi                 | %                | 76                  | 76                                            |                 | 79.45  |          | 81.66  |          | 83.73  |          | 84.27  |          | 90                           |          | 90                     |        |          |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                  | Persentase peningkatan klub olahraga                                 | %                | -                   | -                                             |                 | 38     |          | 40     |          | 42     |          | 42     |          | 42                           |          | 42                     |        |          |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga                              | Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga                              | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana olahraga                                                            | Persentase sarana olahraga pada PPLP yang lengkap (15 cabor)         | %                | 30                  | 30                                            | 3,044           | -      | 1,854    | 40     | 1,783    | 50     | 2,124    | 60     | 2,192    | 70                           | 2,505    | 70                     | 2,505  | Dispora  |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                  | Persentase prasarana olahraga pada PPLP (15 cabor)                   | %                | 80                  | 80                                            |                 | 80     |          | 86     |          | 93     |          | 93     |          | 100                          |          | 100                    |        |          |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                  | Persentase sarana olahraga untuk persiapan PON Tahun 2024 (36 cabor) | %                | n/a                 | -                                             |                 | -      |          | 20     |          | 40     |          | 50     |          | 60                           |          | 60                     |        |          |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN |                                                        | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                                  |                                                                                          | SATUAN                    | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |        | SKPD PENANGGUNG G JAWAB |        |                         |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|
|    |                                                              |                                                        |                                                                              |                                                                                          |                           |                     | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          |                              |        |                         | 2021   |                         |
|    |                                                              |                                                        |                                                                              |                                                                                          |                           |                     | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) |                              |        |                         | Target | Rp. (Jt)                |
|    |                                                              |                                                        |                                                                              | Persentase prasarana olahraga untuk persiapan PON Tahun 2024 (36 cabor)                  | %                         | n/a                 | -                                             |          | -      |          | 20     |          | 40     |          | 50     |          | 60                           |        | 60                      |        |                         |
|    | Peningkatan Peran Serta Kepemudaan                           | Peningkatan Peran Serta Kepemudaan                     | Meningkatnya peran serta kepemudaan                                          | Persentase jumlah pemuda yang berprestasi                                                | %                         | 100                 | 20                                            | 2,669    | 40     | 2,746    | 60     | 2,642    | 80     | 2,722    | 90     | 2,629    | 100                          | 2,823  | 100                     | 2,823  | Dispora                 |
|    |                                                              |                                                        |                                                                              | Organisasi kepemudaan yang aktif                                                         | %                         | 10                  | 12                                            |          | 14     |          | 16     |          | 18     |          | 20     |          | 22                           |        | 22                      |        |                         |
|    |                                                              |                                                        |                                                                              | Wirausaha muda                                                                           | Orang                     | -                   | 36                                            |          | 40     |          | 45     |          | 50     |          | 55     |          | 60                           |        | 60                      |        |                         |
|    | -                                                            | Peningkatan Wawasan dan Kreativitas Seni Budaya Pemuda | -                                                                            | Persentase Pemuda Sumatera Barat yang memiliki Wawasan dan Kreativitas Seni Budaya       | %                         | 100                 | 20                                            | -        | 40     | 161      | 60     | 90       | 80     | 156      | 90     | 94       | 100                          | 169    | 100                     | 169    | Dispora                 |
|    | Peningkatan Penyadaran Kepemudaan                            | Peningkatan Penyadaran Kepemudaan                      | meningkatnya penyadaran kepemudaan                                           | Peningkatan jumlah pemuda yang mandiri dan berkapasitas                                  | orang                     | 550                 | 825                                           | 697      | 825    | 424      | 855    | 408      | 895    | 486      | 1,045  | 502      | 1,045                        | 573    | 1,045                   | 573    | Dispora                 |
|    | Pengembangan Organisasi Pemuda dan Manajemen Olahraga        | Pengembangan Organisasi Pemuda dan Manajemen Olahraga  | Meningkatnya kemandirian organisasi pemuda & olahraga                        | Peningkatan jumlah pemuda yang berkapasitas dalam organisasi kepemudaan dan keolahragaan | Orang                     | 380                 | 120                                           | 1,063    | 240    | 1,659    | 560    | 1,682    | 890    | 3,779    | 1,310  | 3,596    | 1,480                        | 3,926  | 1,480                   | 3,926  | Dispora                 |
|    |                                                              |                                                        | Meningkatnya persiapan atlet disabilitas Sumbar menuju event nasional        | Peningkatan pembinaan jumlah olahragawan disabilitas.                                    | Keg/Org/ Lemb             | 250                 | 300                                           |          | 300    |          | 300    |          | 450    |          | 400    |          | 450                          |        | 450                     |        | Dispora                 |
|    | Manajemen Layanan Teknis Lainnya                             | Manajemen Layanan Teknis Lainnya                       | Terwujudnya peningkatan manajemen layanan teknis kepemudaan dan keolahragaan | Peningkatan pembinaan jumlah olahragawan disabilitas.                                    | 19 Kab/Kota               |                     | 19                                            | 350      | 19     | 213      | 19     | 205      | 19     | 244      | 19     | 252      | 19                           | 288    | 19                      | 288    | Dispora                 |
|    |                                                              |                                                        |                                                                              |                                                                                          |                           |                     |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |        |                         |        |                         |
|    |                                                              |                                                        |                                                                              |                                                                                          |                           |                     |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |        |                         |        |                         |
|    | BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                             |                                                        |                                                                              |                                                                                          |                           |                     |                                               | 9,609    |        | 10,069   |        | 10,782   |        | 11,666   |        | 12,626   |                              | 13,670 |                         | 13,670 |                         |
|    | URUSAN PERPUSTAKAAN                                          |                                                        |                                                                              |                                                                                          |                           |                     |                                               | 2,509    |        | 2,525    |        | 2,688    |        | 2,963    |        | 3,205    |                              | 3,444  |                         | 3,444  |                         |
|    | Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan          | Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan    | Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca                                  | Jumlah koleksi perpustakaan                                                              | Eksemplar                 | 13,000              | 13,000                                        | 2,509    | 13,000 | 2,525    | 13,000 | 2,688    | 13,000 | 2,963    | 13,000 | 3,205    | 13,000                       | 3,444  | 78,000                  | 3,444  | Badan Pustaka & Arsip   |
|    |                                                              |                                                        |                                                                              | Kenaikan Kunjungan perpustakaan                                                          | Rata-rata kenaikan/ orang | 1,000               | 1,000                                         |          | 1,000  |          | 1,000  |          | 1,000  |          | 1,000  |          | 1,000                        |        | 1,000                   |        |                         |
|    |                                                              |                                                        |                                                                              |                                                                                          |                           |                     |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |        |                         |        |                         |
|    | URUSAN KEARSIPAN                                             |                                                        |                                                                              |                                                                                          |                           |                     |                                               | 7,100    |        | 7,544    |        | 8,095    |        | 8,703    |        | 9,422    |                              | 10,227 |                         | 10,227 |                         |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                           | Pelayanan Administrasi Perkantoran                     | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran                   | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                                            | %                         |                     | 100                                           | 2,856    | 100    | 2,999    | 100    | 3,149    | 100    | 3,306    | 100    | 3,472    | 100                          | 3,645  | 100                     | 3,645  | Badan Pustaka dan Arsip |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur              | Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur                                   | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur                                    | %                         |                     | 100                                           | 2,359    | 100    | 2,477    | 100    | 2,601    | 100    | 2,731    | 100    | 2,867    | 100                          | 3,010  | 100                     | 3,010  | Badan Pustaka dan Arsip |
|    |                                                              |                                                        |                                                                              | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)                                   | Zona                      |                     | hijau                                         |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                        |        | hijau                   |        |                         |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                     |                                                                                      | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                               |                                                                      | SATUAN                  | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |                 |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUNG G JAWAB |        |                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|-------------------------|--------|-------------------------|
|    |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                           |                                                                      |                         |                     | 2016                                          |                 | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021                         |          |                         |        |                         |
|    |                                                                                                  |                                                                                      | TAHUN 2016                                                                | TAHUN 2017-2021                                                      |                         |                     | TAHUN 2016                                    | TAHUN 2017-2021 | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                         | Target | Rp. (Jt)                |
|    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                                                    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                                        | Meningkatnya disiplin dan etos kerja aparatur                             | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas                  | %                       |                     | 100                                           | 68              | 100    | 71       | 100    | 74       | 100    | 78       | 100    | 82       | 100                          | 86       | 100                     | 86     | Badan Pustaka dan Arsip |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                       | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                           | Terciptanya peningkatan SDM Aparatur                                      | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                               | JPL/orang/ tahun        |                     | 10                                            | 231             | 15     | 242      | 20     | 254      | 30     | 267      | 40     | 280      | 50                           | 294      | 50                      | 294    | Badan Pustaka dan Arsip |
|    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                           | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan               | Meningkatnya tertib administrasi keuangan                                 | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD  | %                       |                     | 100                                           | 650             | 100    | 683      | 100    | 717      | 100    | 752      | 100    | 790      | 100                          | 830      | 100                     | 830    | Badan Pustaka dan Arsip |
|    |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                           | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                            | Predikat                |                     | BB                                            |                 | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A                            |          | A                       |        |                         |
|    |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                           | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan | %                       |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                     |        |                         |
|    |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                           | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD               | %                       |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                     |        |                         |
|    |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                           | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                      | %                       |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                     |        |                         |
|    | Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan                                               | Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan                                   | Peningkatan Pelayanan Kualitas Sistem Informasi Kearsipan                 | Peningkatan kualitas dan kuantitas khasanah kearsipan                | SKPD                    | 42                  |                                               | 577             |        | 661      |        | 800      |        | 966      |        | 1,189    |                              | 1,454    |                         | 1,454  | Badan Pustaka dan Arsip |
|    |                                                                                                  | Pelindungan dan Penyelamatan Arsip                                                   |                                                                           | Meningkatnya jumlah khasanah (daftar inventaris) arsip               | dokumen                 | 20                  | 4                                             |                 | 4      |          | 4      |          | 4      |          | 4      |          | 4                            |          | 44                      |        | Badan Pustaka dan Arsip |
|    | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sistem Kearsipan             | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sistem Kearsipan | Terbina dan meningkatnya kapasitas SDM dalam pengelolaan Sistem Kearsipan | Tertib arsip                                                         | Jumlah SKPD (Kumulatif) | 8                   | 2                                             | 360             | 2      | 412      | 2      | 499      | 2      | 603      | 2      | 742      | 2                            | 907      | 20                      | 907    | Badan Pustaka dan Arsip |
|    |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                           |                                                                      |                         |                     |                                               |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                         |        |                         |
|    | SETDA (BIRO ORGANISASI)                                                                          |                                                                                      |                                                                           |                                                                      |                         |                     |                                               | 3,824           |        | 4,007    |        | 4,291    |        | 4,642    |        | 5,025    |                              | 5,440    |                         | 5,440  |                         |
|    | FUNGSI LAINNYA : OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN |                                                                                      |                                                                           |                                                                      |                         |                     |                                               | 3,824           |        | 4,007    |        | 4,291    |        | 4,642    |        | 5,025    |                              | 5,440    |                         | 5,440  |                         |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                               | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                   | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi dan operasional kantor     | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                        | %                       |                     | 100                                           | 225             | 100    | 236      | 100    | 248      | 100    | 260      | 100    | 273      | 100                          | 287      | 100                     | 287    | Setda (Biro Organisasi) |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                        | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                            | Persentase inventaris kantor dalam kondisi siap pakai                     | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur                | %                       |                     | 100                                           | 97              | 100    | 101      | 100    | 106      | 100    | 112      | 100    | 117      | 100                          | 123      | 100                     | 123    | Setda (Biro Organisasi) |
|    |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                           | persenartase kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)  | Zona                    |                     | hijau                                         |                 | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                        |          | hijau                   |        |                         |



| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                        |                                                                             | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                               |                                                                                                  | SATUAN           | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |                 |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUN G JAWAB |        |                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|------------------------|--------|-------------------------|
|    |                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                                                  |                  |                     | 2016                                          |                 | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          |                              |          |                        | 2021   |                         |
|    |                                                                                     |                                                                             | TAHUN 2016                                                                | TAHUN 2017-2021                                                                                  |                  |                     | TAHUN 2016                                    | TAHUN 2017-2021 | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                        | Target | Rp. (Jt)                |
|    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                  | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                  | Persentase PNS yang mengikuti BinteK                                      | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                                                           | JPL/orang/ tahun |                     | 10                                            | 15              | 15     | 16       | 20     | 17       | 30     | 18       | 40     | 18       | 50                           | 19       | 50                     | 19     | Setda (Biro Organisasi) |
|    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan              | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan      | Persentase kewajiban pelaporan biro terpenuhi                             | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD                              | %                |                     | 100                                           | 149             | 100    | 156      | 100    | 164      | 100    | 172      | 100    | 181      | 100                          | 190      | 100                    | 190    | Setda (Biro Organisasi) |
|    |                                                                                     |                                                                             |                                                                           | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                                                        | predikat         |                     | B                                             |                 | B      |          | B      |          | B      |          | B      |          | BB                           |          | BB                     |        |                         |
|    |                                                                                     |                                                                             |                                                                           | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan                             | %                |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                    |        |                         |
|    |                                                                                     |                                                                             |                                                                           | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD                                           | %                |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                    |        |                         |
|    |                                                                                     |                                                                             |                                                                           | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                                                  | %                |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                    |        |                         |
|    | Peningkatan Manajemen SDM Aparatur                                                  | Peningkatan Manajemen SDM Aparatur                                          | Persentase PNS sekretariat daerah Provinsi Sumatera Barat                 | Persentase kesesuaian akurasi data PNS Setda dan Pemerintah Prov. Sumbar                         | %                |                     | 50                                            | 594             | 60     | 578      | 70     | 669      | 80     | 745      | 90     | 837      | 95                           | 930      | 95                     | 930    | Setda (Biro Organisasi) |
|    |                                                                                     |                                                                             |                                                                           | Persentase PNS yang dikembangkan karirnya di lingkungan Pemprov. Sumbar                          | %                |                     | 40                                            |                 | 50     |          | 60     |          | 70     |          | 80     |          | 90                           |          | 90                     |        |                         |
|    | Program peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan SKPD Provinsi Sumatera Barat | Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan SKPD Provinsi Sumatera Barat | Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah            | Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor hasil evaluasi AKIP)                                    | Predikat         |                     | BB                                            | 485             | BB     | 472      | BB     | 546      | BB     | 609      | A      | 684      | A                            | 760      | A                      | 760    | Setda (Biro Organisasi) |
|    |                                                                                     |                                                                             | Persentase SKPD dengan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ≥ 70-80 | Persentase SKPD yang telah mendapatkan nilai hasil evaluasi AKIP >=70                            | %                |                     | 70.00                                         |                 | 70     |          | 75     |          | 75     |          | 80     |          | 80                           |          | 80                     |        | Setda (Biro Organisasi) |
|    | Program Peningkatan Pemahaman Tentang Reformasi Birokrasi                           | Manajemen Perubahan                                                         | Indeks Reformasi Birokrasi pemerintah provinsi sumatera barat             | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                       | Skor 1-100       |                     | 60-70                                         | 166             | 60-70  | 161      | 60-70  | 186      | 65-75  | 208      | 65-75  | 233      | 75-80                        | 259      | 75-80                  | 259    | Setda (Biro Organisasi) |
|    | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                                       | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                                       | Persentase UKPP Provinsi yang dilakukan pengukuran IKM nya                | Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat (74 Unit kerja pelayanan publik)                            | %                | 70                  | 70.00                                         | 236             | 75     | 229      | 75     | 265      | 75     | 296      | 75     | 332      | 80                           | 369      | 80                     | 369    | Setda (Biro Organisasi) |
|    |                                                                                     |                                                                             |                                                                           | Persentase Kepatuhan seluruh SKPD Provinsi terhadap Pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau) | %                | 100                 | 100.00                                        |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                    |        |                         |
|    | Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah                                          | Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah                                  | Persentase SKPD Standar operasional prosedur yang telah di evaluasi       | Persentase SKPD yang menerapkan SOP secara baik                                                  | %                |                     | 8.16                                          | 358             | 10     | 348      | 12     | 403      | 12     | 449      | 15     | 504      | 15                           | 560      | 15                     | 560    | Setda (Biro Organisasi) |
|    | Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah                                       | Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah                               | Persentase SKPD Provinsi yang direstrukturisasi                           | Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai urusan                                            | %                |                     | 50.00                                         | 1,501           | 60     | 1,708    | 70     | 1,686    | 80     | 1,775    | 90     | 1,844    | 100                          | 1,942    | 100                    | 1,942  | Setda (Biro Organisasi) |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                     |                                                                        | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                                                    |                                                                                                                                 | SATUAN           | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |                 |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUN G JAWAB |        |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|------------------------|--------|--------------------|
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                |                                                                                                                                 |                  |                     | 2016                                          |                 | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          |                              |          |                        | 2021   |                    |
|    |                                                                                                  |                                                                        | TAHUN 2016                                                                                     | TAHUN 2017-2021                                                                                                                 |                  |                     | TAHUN 2016                                    | TAHUN 2017-2021 | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                        | Target | Rp. (Jt)           |
|    |                                                                                                  |                                                                        | Persentase SKPD Provinsi yang ditetapkan rincian tugas pokok dan                               | Persentase penurunan rincian tupoksi yang tumpang tindih                                                                        |                  |                     | 30.00                                         |                 | 25     |          | 20     |          | 15     |          | 5      |          | 0                            |          | 0                      |        |                    |
|    |                                                                                                  |                                                                        | Persentase kabupaten atau kota yang besaran OPD nya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku | Persentase kab/kota yang besaran OPD-nya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku                                             |                  |                     | 30.00                                         |                 | 25     |          | 20     |          | 15     |          | 5      |          | 0                            |          | 0                      |        |                    |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                |                                                                                                                                 |                  |                     |                                               |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |        |                    |
|    | SETDA (BIRO HUKUM)                                                                               |                                                                        |                                                                                                |                                                                                                                                 |                  |                     |                                               | 3,021           |        | 3,165    |        | 3,389    |        | 3,667    |        | 3,969    |                              | 4,297    |                        | 4,297  |                    |
|    | FUNGSI LAINNYA : OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN |                                                                        |                                                                                                |                                                                                                                                 |                  |                     |                                               | 3,021           |        | 3,165    |        | 3,389    |        | 3,667    |        | 3,969    |                              | 4,297    |                        | 4,297  |                    |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                               | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi dan operasional kantor                          | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                                                                                   | %                |                     | 100                                           | 253             | 100    | 266      | 100    | 279      | 100    | 293      | 100    | 308      | 100                          | 323      | 100                    | 323    | Setda (Biro Hukum) |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                        | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur                                           | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur                                                                           | %                |                     | 100                                           | 53              | 100    | 55       | 100    | 58       | 100    | 61       | 100    | 64       | 100                          | 67       | 100                    | 67     | Setda (Biro Hukum) |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)                                                                          | Zona             |                     | hijau                                         |                 | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                        |          | hijau                  |        |                    |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                       | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur                                                            | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                                                                                          | JPL/orang/ tahun |                     | 10                                            | 56              | 15     | 59       | 20     | 62       | 30     | 65       | 40     | 68       | 50                           | 71       | 50                     | 71     | Setda (Biro Hukum) |
|    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                           | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan Kinerja SKPD                        | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD                                                             | %                |                     | 100                                           | 111             | 100    | 117      | 100    | 123      | 100    | 129      | 100    | 135      | 100                          | 142      | 100                    | 142    | Setda (Biro Hukum) |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                                                                                       | predikat         |                     | BB                                            |                 | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A                            |          | A                      |        |                    |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan                                                            | %                |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                    |        |                    |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD                                                                          | %                |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                    |        |                    |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                                                                                 | %                |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                    |        |                    |
|    | Pembangunan Materi Hukum                                                                         | Pembangunan Materi Hukum                                               | Terwujudnya pembangunan materi hukum                                                           | Persentase produk hukum provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum | Jml Perda        | 21                  | 15                                            | 1,080           | 15     | 1,078    | 17     | 1,181    | 17     | 1,296    | 15     | 1,725    | 15                           | 1,564    | 15                     | 1,564  | Setda (Biro Hukum) |
|    | Peningkatan Budaya Hukum                                                                         | Peningkatan Budaya Hukum                                               | Meningkatnya budaya hukum                                                                      | Persentase peningkatan budaya sadar dan taat hukum di masyarakat                                                                | %                | 95                  | 50                                            | 48              | 50     | 41       | 50     | 42       | 50     | 43       | 50     | 53       | 50                           | 48       | 50                     | 48     | Setda (Biro Hukum) |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                     |                                                                        | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                                |                                                                                                         | SATUAN           | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |                 |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUNG G JAWAB |         |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|-------------------------|---------|--------------------|
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                            |                                                                                                         |                  |                     | 2016                                          |                 | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          |                              |          |                         | 2021    |                    |
|    |                                                                                                  |                                                                        | TAHUN 2016                                                                 | TAHUN 2017-2021                                                                                         |                  |                     | TAHUN 2016                                    | TAHUN 2017-2021 | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                         | Target  | Rp. (Jt)           |
|    | Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM                                                 | Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM                       | Terwujudnya Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM               | Jumlah perkara sengketa hukum pemerintah provinsi yang dapat ditangani                                  | Jumlah           | 95                  | 3                                             | 505             | 3      | 584      | 3      | 597      | 3      | 610      | 3      | 75       | 3                            | 684      | 18                      | 684     | Setda (Biro Hukum) |
|    | Sarana dan Informasi Hukum                                                                       | Sarana dan Informasi Hukum                                             | Terwujudnya sarana dan informasi hukum                                     | Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang dapat diakses pada perpustakaan dan portal website JDIH | %                | 45                  | 100                                           | 226             | 100    | 301      | 100    | 307      | 100    | 345      | 100    | 427      | 100                          | 387      | 100                     | 387     | Setda (Biro Hukum) |
|    | Peningkatan Penataan Perundang-undangan                                                          | Peningkatan Penataan Perundang-undangan                                | Terwujudnya Peningkatan Penataan Perundang-undangan                        | Persentase rekomendasi kajian materi/substansi Perda Kab/Kota yang ditindaklanjuti oleh Kab/Kota        | %                | 75                  | 80                                            | 688             | 80     | 665      | 85     | 740      | 85     | 825      | 90     | 1,114    | 90                           | 1,010    | 90                      | 1,010   | Setda (Biro Hukum) |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                            |                                                                                                         |                  |                     |                                               |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                         |         |                    |
|    | SEKRETARIAT DPRD                                                                                 |                                                                        |                                                                            |                                                                                                         |                  |                     |                                               | 87,181          |        | 91,353   |        | 97,825   |        | 105,843  |        | 114,557  |                              | 124,030  |                         | 124,030 |                    |
|    | FUNGSI LAINNYA : OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN |                                                                        |                                                                            |                                                                                                         |                  |                     |                                               | 87,181          |        | 91,353   |        | 97,825   |        | 105,843  |        | 114,557  |                              | 124,030  |                         | 124,030 |                    |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                               | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran                           | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                                                           | %                | 92,90               | 100                                           | 14,293          | 100    | 15,007   | 100    | 15,758   | 100    | 16,546   | 100    | 17,373   | 100                          | 18,241   |                         | 18,241  | Sekretariat DPRD   |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                        | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur untuk mendukung Kelancaran Tugas | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur                                                   | %                | 89,75               | 100                                           | 27,882          | 100    | 29,276   | 100    | 30,740   | 100    | 32,277   | 100    | 33,891   | 100                          | 35,585   | 100                     | 35,585  | Sekretariat DPRD   |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                            | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)                                                  | Zona             |                     | hijau                                         |                 | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                        |          | 100                     |         |                    |
|    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                                                    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Meningkatkan disiplin dan etos kerja Aparatur                              | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas                                                     | %                | 98,53               | 100                                           | 763             | 100    | 801      | 100    | 841      | 100    | 884      | 100    | 928      | 100                          | 974      | hijau                   | 974     | Sekretariat DPRD   |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                       | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber Daya Aparatur                   | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                                                                  | JPL/orang/ tahun | 63,67               | 10                                            | 724             | 15     | 760      | 20     | 798      | 30     | 838      | 40     | 880      | 50                           | 924      | 100                     | 924     | Sekretariat DPRD   |
|    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                           | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Terlaksananya Tertib Administrasi Capaian Kinerja Keuangan                 | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD                                     | %                | 82,31               | 100                                           | 434             | 100    | 455      | 100    | 478      | 100    | 502      | 100    | 527      | 100                          | 553      | 50                      | 553     | Sekretariat DPRD   |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                            | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                                                               | Predikat         |                     | BB                                            |                 | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A                            |          | 100                     |         |                    |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                            | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan                                    | %                |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | A                       |         |                    |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                            | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD                                                  | %                |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                     |         |                    |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                            | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                                                         | %                |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                     |         |                    |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                     |                                                                        | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                            |                                                                                          | SATUAN           | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUN G JAWAB |        |                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|------------------------|--------|----------------------|
|    | TAHUN 2016                                                                                       | TAHUN 2017-2021                                                        | TAHUN 2016                                                             | TAHUN 2017-2021                                                                          |                  |                     | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021                         |          |                        |        |                      |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                        |                                                                                          |                  |                     | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                        |        |                      |
|    | Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah                                           | Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah                 | Meningkatkan pemahaman Anggota DPRD terhadap tugas pokok dan fungsinya | Terlaksananya Pemahaman dan Penetapan rancangan APBD tepat waktu                         | Kali             | 20                  | 20                                            | 43,085   | 20     | 45,053   | 20     | 49,210   | 20     | 54,797   | 20     | 60,958   | 20                           | 67,751   | 120                    | 67,751 | Sekretariat DPRD     |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                        | Jumlah Perda yang disetujui                                                              | Perda            | 13                  | 19                                            |          | 19     |          | 19     |          | 19     |          | 19     |          | 19                           |          | 114                    |        |                      |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                        | Jumlah Rekomendasi yang diberikan DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Rekomendasi      | 2                   | 3                                             |          | 3      |          | 3      |          | 3      |          | 3      |          | 3                            |          | 18                     |        |                      |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                        |                                                                                          |                  |                     |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |        |                      |
|    | INSPEKTORAT PROVINSI                                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                          |                  |                     |                                               | 8,209    |        | 8,602    |        | 9,211    |        | 9,966    |        | 10,787   |                              | 11,679   |                        | 11,679 |                      |
|    | FUNGSI LAINNYA : OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN |                                                                        |                                                                        |                                                                                          |                  |                     |                                               | 8,209    |        | 8,602    |        | 9,211    |        | 9,966    |        | 10,787   |                              | 11,679   |                        | 11,679 |                      |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                               | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran                         | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                                            | %                | 100                 | 100                                           | 1,458    | 100    | 1,531    | 100    | 1,608    | 100    | 1,688    | 100    | 1,773    | 100                          | 1,861    | 100                    | 1,861  | Inspektorat Provinsi |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                        | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Pelayanan Pemeliharaan                                                 | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur                                    | %                | 100                 | 100                                           | 304      | 100    | 319      | 100    | 335      | 100    | 352      | 100    | 369      | 100                          | 388      | 100                    | 388    | Inspektorat Provinsi |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                        | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)                                   | Zona             |                     | hijau                                         |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                        |          | hijau                  |        |                      |
|    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                                                    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Peningkatan disiplin aparatur                                          | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas                                      | %                | 100                 | 100                                           | 52       | 100    | 54       | 100    | 57       | 100    | 60       | 100    | 63       | 100                          | 66       | 100                    | 66     | Inspektorat Provinsi |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                       | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur                                    | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                                                   | JPL/orang/ tahun | 100                 | 10                                            | 85       | 15     | 90       | 20     | 94       | 30     | 99       | 40     | 104      | 50                           | 109      | 50                     | 109    | Inspektorat Provinsi |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                        | Tingkat Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)                           | Level 1-5        | 1                   | 2                                             |          | 2      |          | 2      |          | 3      |          | 3      |          | 3                            |          | 3                      |        |                      |
|    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                           | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi keuangan                              | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD                      | %                | 100                 | 100                                           | 86       | 100    | 90       | 100    | 94       | 100    | 99       | 100    | 104      | 100                          | 109      | 100                    | 109    | Inspektorat Provinsi |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                        | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                                                | Predikat         |                     | BB                                            |          | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A                            |          | A                      |        |                      |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                        | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan                     | %                | 100                 | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                    |        |                      |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                        | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD                                   | %                | 100                 | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                    |        |                      |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                                                                        | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                                          | %                | 100                 | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                    |        |                      |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                     |                                                                    | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                          |                                                                                                           | SATUAN           | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUN G JAWAB |        |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|------------------------|--------|-------------------|
|    |                                                                                                  |                                                                    |                                                      |                                                                                                           |                  |                     | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          |                              |          |                        | 2021   |                   |
|    | TAHUN 2016                                                                                       | TAHUN 2017-2021                                                    | TAHUN 2016                                           | TAHUN 2017-2021                                                                                           |                  |                     | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                        | Target | Rp. (Jt)          |
|    | Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum                                                | Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum                  | Kualitas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)   | Penurunan nilai kerugian daerah                                                                           | %                | 9,8                 | 9                                             | 6,024    | 85     | 6,308    | 8      | 6,797    | 7,8    | 7,422    | 7,5    | 8,105    | 7                            | 8,851    | 7                      | 8,851  | Inspektorat       |
|    |                                                                                                  |                                                                    |                                                      | Rekomendasi atas LHP yang ditindaklanjuti                                                                 | %                |                     | 70                                            |          | 70     |          | 70     |          | 75     |          | 75     |          | 75                           |          | 75                     |        |                   |
|    |                                                                                                  |                                                                    |                                                      | Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (Sistem Pengawasan Intern Pemerintah)                                | Level 1-5        | 1                   | 2                                             |          | 2      |          | 2      |          | 3      |          | 3      |          | 3                            |          | 3                      |        |                   |
|    |                                                                                                  |                                                                    |                                                      | Perangkat Daerah Provinsi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) | Perangkat Daerah | 2                   | 2                                             |          | 3      |          | 4      |          | 6      |          | 8      |          | 10                           |          | 10                     |        |                   |
|    | Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat                                                     | Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat                       | Persentase Pengaduan masyarakat yang dapat ditangani | Pengaduan masyarakat yang dapat ditangani                                                                 | %                | 100                 | 100                                           | 200      | 100    | 210      | 100    | 226      | 100    | 247      | 100    | 269      | 100                          | 294      | 100                    | 294    | Inspektorat       |
|    |                                                                                                  |                                                                    |                                                      |                                                                                                           |                  |                     |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |        |                   |
|    | KANTOR PENGHUBUNG                                                                                |                                                                    |                                                      |                                                                                                           |                  |                     |                                               | 5,269    |        | 5,521    |        | 5,912    |        | 6,397    |        | 6,924    |                              | 7,496    |                        | 7,496  |                   |
|    | FUNGSI LAINNYA : OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN |                                                                    |                                                      |                                                                                                           |                  |                     |                                               | 5,269    |        | 5,521    |        | 5,912    |        | 6,397    |        | 6,924    |                              | 7,496    |                        | 7,496  |                   |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                               | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran      | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                                                             | %                |                     | 100                                           | 1,411    | 100    | 1,482    | 100    | 1,556    | 100    | 1,634    | 100    | 1,715    | 100                          | 1,801    |                        | 1,801  | Kantor Penghubung |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                        | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | Pelayanan Pemeliharaan                               | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur                                                     | %                |                     | 100                                           | 1,300    | 100    | 1,365    | 100    | 1,434    | 100    | 1,505    | 100    | 1,581    | 100                          | 1,660    |                        | 1,660  | Kantor Penghubung |
|    |                                                                                                  |                                                                    |                                                      | persentase kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)                                         | Zona             |                     | hijau                                         |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                        |          |                        |        |                   |
|    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                                                    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | Peningkatan disiplin aparatur                        | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas                                                       | %                |                     | 100                                           | 36       | 100    | 37       | 100    | 39       | 100    | 41       | 100    | 43       | 100                          | 45       |                        | 45     | Kantor Penghubung |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                                                        | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                          | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur                  | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                                                                    | JPL/orang/ tahun |                     |                                               | 98       |        | 103      |        | 108      |        | 113      |        | 119      |                              | 125      |                        | 125    | Kantor Penghubung |
|    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan                               | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi keuangan            | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD                                       | %                |                     | 100                                           | 145      | 100    | 153      | 100    | 160      | 100    | 168      | 100    | 177      | 100                          | 186      |                        | 186    | Kantor Penghubung |
|    |                                                                                                  |                                                                    |                                                      | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                                                                 | Skor             |                     | BB                                            |          | BB     |          | BB     |          | BB     |          | A      |          | A                            |          |                        |        |                   |
|    |                                                                                                  |                                                                    |                                                      | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan                                      | %                |                     | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                        |        |                   |
|    |                                                                                                  |                                                                    |                                                      | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD                                                    | %                |                     | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                        |        |                   |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                                     |                                                                            | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                 |                                                                     | SATUAN           | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |                 |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUN G JAWAB |                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|
|    |                                                                                                  |                                                                            |                                                             |                                                                     |                  |                     | 2016                                          |                 | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          |                              |          |                        | 2021                    |
|    |                                                                                                  |                                                                            | TAHUN 2016                                                  | TAHUN 2017-2021                                                     |                  |                     | TAHUN 2016                                    | TAHUN 2017-2021 | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                        | Target                  |
|    |                                                                                                  |                                                                            |                                                             | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                     | %                |                     | 100                                           |                 | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                        |                         |
|    | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan                                                          | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan                                    |                                                             |                                                                     |                  |                     |                                               | 650             |        | 680      |        | 746      |        | 838      |        | 939      |                              | 1,050    |                        | 1,050                   |
|    | Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah                       | Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah |                                                             |                                                                     |                  |                     |                                               | 1,109           |        | 1,159    |        | 1,273    |        | 1,428    |        | 1,600    |                              | 1,791    |                        | 1,791 Kantor Penghubung |
|    | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                                                      | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                                |                                                             |                                                                     |                  |                     |                                               | 41              |        | 43       |        | 47       |        | 53       |        | 60       |                              | 67       |                        | 67                      |
|    | Program Pengembangan Data dan Informasi                                                          | Program Pengembangan Data dan Informasi                                    |                                                             |                                                                     |                  |                     |                                               | 45              |        | 47       |        | 51       |        | 57       |        | 64       |                              | 72       |                        | 72                      |
|    | Program Peningkatan Pelayanan Publik                                                             | Program Peningkatan Pelayanan Publik                                       |                                                             |                                                                     |                  |                     |                                               | 434             |        | 453      |        | 498      |        | 558      |        | 626      |                              | 700      |                        | 700                     |
|    |                                                                                                  | Pengembangan Nilai-Nilai Budaya                                            |                                                             |                                                                     |                  |                     |                                               |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |                         |
|    |                                                                                                  | Partisipasi ..... atau Kerjasama Pembangunan                               |                                                             |                                                                     |                  |                     |                                               |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |                         |
|    |                                                                                                  |                                                                            |                                                             |                                                                     |                  |                     |                                               |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |                         |
|    | KORPRI                                                                                           |                                                                            |                                                             |                                                                     |                  |                     |                                               | 1,257           |        | 1,317    |        | 1,410    |        | 1,526    |        | 1,652    |                              | 1,788    |                        | 1,788                   |
|    | FUNGSI LAINNYA : OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN |                                                                            |                                                             |                                                                     |                  |                     |                                               | 1,257           |        | 1,317    |        | 1,410    |        | 1,526    |        | 1,652    |                              | 1,788    |                        | 1,788                   |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                               | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                         | Tersedianya administrasi perkantoran Set DP Korpri          | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                       | %                |                     | 100                                           | 534             | 100    | 561      | 100    | 589      | 100    | 618      | 100    | 649      | 100                          | 682      | 100                    | 682 KORPRI              |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                        | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                  | Meningkatnya sarana dan prasarana Sekretariat DP KORPRI     | Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur                  | %                | 100                 | 100                                           | 289             | 100    | 304      | 100    | 319      | 100    | 335      | 100    | 351      | 100                          | 369      | 100                    | 369 KORPRI              |
|    |                                                                                                  |                                                                            |                                                             | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)              | Zona             |                     | hijau                                         |                 | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                        |          | hijau                  |                         |
|    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                                                    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                              | Terlaksananya disiplin aparatur dilingkungan Set DP KORPRI  | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas                 | %                | 100                 | 100                                           | 10              | 100    | 10       | 100    | 11       | 100    | 11       | 100    | 12       | 100                          | 12       | 100                    | 12 KORPRI               |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                       |                                                                            |                                                             | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                              | JPL/orang/ tahun |                     | 10                                            |                 | 15     | 25       | 20     | 27       | 30     | 32       | 40     | 37       | 50                           | 44       | 50                     | 44 KORPRI               |
|    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                           | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan     | Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD | %                | 100                 | 100                                           | 98              | 100    | 103      | 100    | 108      | 100    | 114      | 100    | 119      | 100                          | 125      | 100                    | 125 KORPRI              |
|    |                                                                                                  |                                                                            |                                                             | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                           | predikat         |                     | BB                                            |                 | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A                            |          | A                      |                         |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN           |                                                                        | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                            |                                                                                                                                    | SATUAN            | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |        | SKPD PENANGGUN G JAWAB |        |          |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|--------|------------------------|--------|----------|
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                    |                   |                     | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          |                              |        |                        | 2021   |          |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                    |                   |                     | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) |                              |        |                        | Target | Rp. (Jt) |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                        | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan                                                               | %                 |                     | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |        |                        |        |          |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                        | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD                                                                             | %                 |                     | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |        |                        |        |          |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                        | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                                                                                    | %                 |                     | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |        |                        |        |          |
|    | Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)                   |                                                                        | Terlaksananya pemerintahan yang baik di Sekretariat DP KORPRI          | <del>Terlaksananya- pemerintahan-yang-baik-di-Sekretariat-DP-KORPRI</del>                                                          | Laporan dan Orang |                     | 1 Laporan (65 Orang) Peserta                  | 19       |        | -        |        | -        |        | -        |        | -        |                              | -      | KORPRI                 |        |          |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | <del>Peningkatan-Kapasitas-Sumber-Daya-Aparatur</del>                  | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur Set. DP. KORPRI                    | <del>Meningkatnya-wawasan-dan-kemampuan/kapasitas-Sumber-Daya-Aparatur-Melalui-Bimbingan-Teknis-Peraturan-Perundang-undangan</del> | Orang             |                     | 3                                             | 15       | -      | -        | -      | -        | -      | -        | -      | -        | -                            | -      | KORPRI                 |        |          |
|    | Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                                    | Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                                    | Terpenuhinya program pembinaan dan pengembangan aparatur               | Jumlah Penghargaan Penilaian Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan                                                                  |                   |                     |                                               | 292      |        | 315      |        | 357      |        | 416      |        | 483      |                              | 556    | KORPRI                 |        |          |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                    |                   |                     |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |        |                        |        |          |
|    | BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN                                           |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                    |                   |                     |                                               | 13,676   |        | 14,331   |        | 15,346   |        | 16,604   |        | 17,971   |                              | 19,457 |                        |        |          |
|    | FUNGSI KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                      |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                    |                   |                     |                                               | 13,676   |        | 14,331   |        | 15,346   |        | 16,604   |        | 17,971   |                              | 19,457 |                        |        |          |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran                        | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                                                                                      | %                 | 100                 | 100                                           | 3,998    | 100    | 4,197    | 100    | 4,407    | 100    | 4,628    | 100    | 4,859    | 100                          | 5,102  | Badan Diklat           |        |          |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Meningkatnya sarana prasarana aparatur                                 | Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur                                                                                 | %                 | 100                 | 100                                           | 2,547    | 100    | 2,674    | 100    | 2,808    | 100    | 2,948    | 100    | 3,095    | 100                          | 3,250  | Badan Diklat           |        |          |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                        | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)                                                                             | Zona              |                     | hijau                                         |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                        |        |                        |        |          |
|    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Meningkatnya Disiplin Berpakaian Dinas bagi Aparatur                   | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas                                                                                | %                 | 100                 | 100                                           | 55       | 100    | 57       | 100    | 60       | 100    | 63       | 100    | 66       | 100                          | 70     | Badan Diklat           |        |          |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Meningkatnya kapasitas Sumberdaya aparatur                             | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                                                                                             | JPL/orang/ tahun  | 100                 | 10                                            | 37       | 15     | 38       | 20     | 40       | 30     | 42       | 40     | 44       | 50                           | 47     | Badan Diklat           |        |          |
|    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Menigkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan kinerja SKPD | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD                                                                | %                 | 100                 | 100                                           | 249      | 100    | 261      | 100    | 274      | 100    | 288      | 100    | 302      | 100                          | 317    | Badan Diklat           |        |          |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                        | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                                                                                          | Predikat          |                     | BB                                            |          | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A                            |        |                        |        |          |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN           |                                                                        | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                                                                                      |                                                                      | SATUAN           | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |         |          |         |          |         |          |         |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUN G JAWAB |        |              |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|------------------------------|----------|------------------------|--------|--------------|
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                      |                  |                     | 2016                                          |          | 2017    |          | 2018    |          | 2019    |          | 2020    |          | 2021                         |          |                        |        |              |
|    | TAHUN 2016                                                             | TAHUN 2017-2021                                                        | TAHUN 2016                                                                                                                       | TAHUN 2017-2021                                                      |                  |                     | Target                                        | Rp. (Jt) | Target  | Rp. (Jt) | Target  | Rp. (Jt) | Target  | Rp. (Jt) | Target  | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                        | Target | Rp. (Jt)     |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                  | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan | %                |                     | 100                                           |          | 100     |          | 100     |          | 100     |          | 100     |          | 100                          |          | 100                    |        |              |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                  | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD               | %                |                     | 100                                           |          | 100     |          | 100     |          | 100     |          | 100     |          | 100                          |          | 100                    |        |              |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                  | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                      | %                |                     | 100                                           |          | 100     |          | 100     |          | 100     |          | 100     |          | 100                          |          | 100                    |        |              |
|    | Pendidikan Kedinasan                                                   | Pendidikan Kedinasan                                                   | Meningkatnya Sumberdaya dan Kinerja Aparatur Melalui Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional | Aparatur mengikuti diklat sesuai tupoksi dan persyaratan jabatan     | %                | 90                  | 90                                            | 5,977    | 90      | 4,175    | 90      | 4,559    | 90      | 5,076    | 90      | 5,645    | 90                           | 6,273    | 90                     | 6,273  | Badan Diklat |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                  | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                               | JPL/orang/ tahun | 100                 | 10                                            | -        | 15      | 2,296    | 20      | 2,507    | 30      | 2,790    | 40      | 3,104    | 50                           | 3,449    | 50                     | 3,449  |              |
|    | Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                                    | Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                                    | Meningkatnya Kinerja Aparatur, kualitas, dan kapabilitas sumberdaya aparatur daerah                                              | Akreditasi Lembaga Penyelenggaraan Diklat                            | Nilai            | B                   | B                                             | 815      | BB      | 569      | BB      | 621      | BB      | 692      | A       | 769      | A                            | 855      | A                      | 855    | Badan Diklat |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                  | Sertifikasi SMM ISO                                                  | Standar          | SMM ISO             | SMM ISO                                       |          | SMM ISO | 63       | SMM ISO | 69       | SMM ISO | 77       | SMM ISO | 85       | SMM ISO                      | 95       | SMM ISO                | 95     |              |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                      |                  |                     |                                               |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                              |          |                        |        |              |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                      |                  |                     |                                               |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                              |          |                        |        |              |
|    | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                                               |                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                      |                  |                     |                                               | 7,534    |         | 7,894    |         | 8,453    |         | 9,146    |         | 9,899    |                              | 10,718   |                        | 10,718 |              |
|    | FUNGSI KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                      |                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                      |                  |                     |                                               | 7,534    |         | 7,894    |         | 8,453    |         | 9,146    |         | 9,899    |                              | 10,718   |                        | 10,718 |              |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang prima                                                                      | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                        | %                |                     | 100                                           | 2,697    | 100     | 2,832    | 100     | 2,973    | 100     | 3,122    | 100     | 3,278    | 100                          | 3,442    | 100                    | 3,442  | BKD          |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur                                                                             | Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur                   | %                |                     | 100                                           | 999      | 100     | 1,049    | 100     | 1,102    | 100     | 1,157    | 100     | 1,214    | 100                          | 1,275    | 100                    | 1,275  | BKD          |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                  | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)               | Zona             |                     | hijau                                         |          | hijau   |          | hijau   |          | hijau   |          | hijau   |          | hijau                        |          | hijau                  |        |              |
|    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Meningkatnya disiplin apartaur                                                                                                   | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas                  | %                |                     | 100                                           | 46       | 100     | 48       | 100     | 51       | 100     | 53       | 100     | 56       | 100                          | 59       | 100                    | 59     | BKD          |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur                                                                                              | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                               | JPL/orang/ tahun |                     | 10                                            | 25       | 15      | 26       | 20      | 27       | 30      | 29       | 40      | 30       | 50                           | 32       | 50                     | 32     | BKD          |
|    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan dan kegiatan                                                              | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD  | %                |                     | 100                                           | 268      | 100     | 282      | 100     | 296      | 100     | 310      | 100     | 326      | 100                          | 342      | 100                    | 342    | BKD          |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                  | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                            | Predikat         |                     | BB                                            |          | BB      |          | BB      |          | A       |          | A       |          | A                            |          | A                      |        |              |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                  | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan | %                |                     | 100                                           |          | 100     |          | 100     |          | 100     |          | 100     |          | 100                          |          | 100                    |        |              |



| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN           |                                                                        | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                                    |                                                                         | SATUAN           | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUNG JAWAB |        |          |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|-----------------------|--------|----------|
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                         |                  |                     | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021                         |          |                       |        |          |
|    | TAHUN 2016                                                             | TAHUN 2017-2021                                                        | TAHUN 2016                                                                     | TAHUN 2017-2021                                                         |                  |                     | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                       | Target | Rp. (Jt) |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD                  | %                |                     | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                   |        |          |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                         | %                |                     | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                   |        |          |
|    | Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                                    | Peningkatan Manajemen SDM Aparatur                                     | Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur                               | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                                  | JPL/orang/ tahun |                     |                                               | 3,499    | 15     | 3,658    | 20     | 4,005    | 30     | 4,475    | 40     | 4,995    | 50                           | 5,568    | 50                    | 5,568  | BKD      |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                | Persentase SKPD yang ketersediaan pegawainya sesuai formasi minimal 70% | %                |                     |                                               |          | 85     |          | 88     |          | 91     |          | 93     |          | 95                           |          | 95                    |        |          |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                         |                  |                     |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                       |        |          |
|    | BAPPEDA                                                                |                                                                        |                                                                                |                                                                         |                  |                     |                                               | 15,890   |        | 16,650   |        | 17,830   |        | 19,291   |        | 20,879   |                              | 22,606   |                       | 22,606 |          |
|    | FUNGSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN                                         |                                                                        |                                                                                |                                                                         |                  |                     |                                               | 15,890   |        | 16,650   |        | 17,830   |        | 19,291   |        | 20,879   |                              | 22,606   |                       | 22,606 |          |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Meningkatnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran                | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                           | %                | 100                 | 100                                           | 3,028    | 100    | 3,179    | 100    | 3,338    | 100    | 3,505    | 100    | 3,681    | 100                          | 3,865    | 100                   | 3,865  | BAPPEDA  |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Meningkatnya kualitas gedung perkantoran dan operasional Bappeda dan UPTB LPSE | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur                   | %                | 100                 | 100                                           | 689      | 100    | 723      | 100    | 759      | 100    | 797      | 100    | 837      | 100                          | 879      | 100                   | 879    | BAPPEDA  |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)                  | zona             |                     | hijau                                         |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                        |          | hijau                 |        |          |
|    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Meningkatnya kualitas kinerja aparatur                                         | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas                     | %                | 100                 | 100                                           | 68       | 100    | 71       | 100    | 74       | 100    | 78       | 100    | 82       | 100                          | 86       | 100                   | 86     | BAPPEDA  |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Meningkatnya kualitas SDM aparatur Bappeda                                     | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                                  | JPL/orang/ tahun | 100                 | 10                                            | 116      | 15     | 122      | 20     | 128      | 30     | 134      | 40     | 141      | 50                           | 148      | 50                    | 148    | BAPPEDA  |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                | Fungsional Perencana Pertama pada Bappeda Provinsi                      | orang            | 1                   | 1                                             |          | 3      |          | 5      |          | 7      |          | 8      |          | 9                            |          | 9                     |        |          |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                | Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Provinsi                         | orang            | 1                   | 1                                             |          | 2      |          | 3      |          | 4      |          | 5      |          | 6                            |          | 6                     |        |          |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                | Fungsional Perencana Madya pada Bappeda Provinsi                        | orang            | 1                   | 1                                             |          | 1      |          | 2      |          | 2      |          | 2      |          | 3                            |          | 3                     |        |          |
|    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi keuangan                                      | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD     | %                | 100                 | 100                                           | 521      | 100    | 547      | 100    | 575      | 100    | 603      | 100    | 634      | 100                          | 665      | 100                   | 665    | BAPPEDA  |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                               | Predikat         |                     | BB                                            |          | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A                            |          | A                     |        |          |
|    |                                                                        |                                                                        |                                                                                | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan    | %                | 100                 | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          | 100                   |        |          |

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN                   |                                                                                | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  | SATUAN | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | SKPD PENANGGUN G JAWAB |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|------------------------|
|    |                                                                                |                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |        |                     | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                              |          |                        |
|    | TAHUN 2016                                                                     | TAHUN 2017-2021                                                                | TAHUN 2016                                                                                                          | TAHUN 2017-2021                                                                                                                                                                                  |        |                     | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |                        |
|    |                                                                                |                                                                                |                                                                                                                     | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD                                                                                                                                           | %      | 100                 | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                        |
|    |                                                                                |                                                                                |                                                                                                                     | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                                                                                                                                                  | %      | 100                 | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |                        |
|    | Perencanaan Pembangunan Daerah                                                 | Perencanaan Pembangunan Daerah                                                 | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah                                                                  | Persentase kesesuaian sasaran dan insikator sasaran antara RPJMD Provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, Renstra SKPD Provinsi dengan Renja SKPD Provinsi dan RPJMD Provinsi dengan RKPD Provinsi | %      | 24                  | 100%                                          | 4,067    | 100%   | 4,258    | 100%   | 4,595    | 100%   | 5,026    | 100%   | 5,499    | 100%   | 6,016    | 100%                         | 6,016    | BAPPEDA                |
|    |                                                                                |                                                                                |                                                                                                                     | Persentase kesesuaian proiritas pembangunan pada RKPD kabupaten/kota dengan RKPD Provinsi                                                                                                        | %      | NA                  | 90                                            |          | 90     |          | 90     |          | 90     |          | 90     |          | 100    |          | 100                          |          |                        |
|    | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                      | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                      | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah                                                                | Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan terget dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi                                                                            | %      | NA                  | 90                                            | 4,014    | 90     | 4,202    | 90     | 4,534    | 90     | 4,960    | 90     | 5,426    | 100    | 5,937    | 100                          | 5,937    | BAPPEDA                |
|    | Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan                                    | Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan                                    | Terbangunnya dan terhimpunnya data/informasi yang akurat serta tersebarnya informasi pembangunan kepada stakeholder | Persentase Kelengkapan Data Pendukung untuk Pengukuran Kinerja Sasaran Pembangunan yang tercapaian pada RPJMD Provinsi                                                                           | %      | NA                  | 90                                            | 1,214    | 90     | 1,271    | 90     | 1,371    | 90     | 1,500    | 90     | 1,641    | 100    | 1,795    | 100                          | 1,795    | BAPPEDA                |
|    |                                                                                |                                                                                |                                                                                                                     | Persentase Kelengkapan Data Pendukung untuk Proses Perencanaan Pembangunan                                                                                                                       | %      | NA                  | 60                                            |          | 65     |          | 70     |          | 75     |          | 80     |          | 100    |          | 100                          |          |                        |
|    |                                                                                |                                                                                |                                                                                                                     | Persentase kualitas kesesuaian antara rencana (RKPD Provinsi) dengan hasil pelaksanaan pembangunan (SIPKD dan EKPD)                                                                              | %      | 70                  | 75                                            |          | 80     |          | 85     |          | 90     |          | 95     |          | 100    |          | 100                          |          |                        |
|    | Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan | Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan | Jumlah penelitian dan pengembangan terapan                                                                          | Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Pengembangan dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah                                                                                                 | Judul  | 34                  | 65%                                           | 1,000    | 65%    | 1,047    | 70%    | 1,130    | 75%    | 1,236    | 80%    | 1,352    | 80%    | 1,479    | 80%                          | 1,479    | BAPPEDA                |
|    | Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik                                        | Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik                                        | Meningkatnya presentase tender melalui tender elektronik (e-procurement)                                            | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                                                                       | Skor   |                     | 83                                            | 1,173    | >83    | 1,229    | >83    | 1,326    | >83    | 1,450    | >83    | 1,586    | >83    | 1,736    | >83                          | 1,736    | BAPPEDA                |
|    |                                                                                |                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |        |                     |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                              |          |                        |

TABEL 8.1  
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

| NO | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS                       | INDIKATOR KINERJA (Outcome)                                          | SATUAN           | KONDISI AWAL (2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                        |                                                                      |                  |                     | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                              |          |         |
|    |                                                                        |                                                                      |                  |                     | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                       | Rp. (Jt) |         |
|    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                        |                                                                      |                  |                     |                                               | 71,748   |        | 98,418   |        | 104,672  |        | 112,433  |        | 120,834  |        | 129,930  |                              | 129,930  |         |
|    | URUSAN PENDIDIKAN                                                      |                                                                      |                  |                     |                                               | 65,270   |        | 96,685   |        | 102,812  |        | 110,414  |        | 118,642  |        | 127,550  |                              | 127,550  |         |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                        | %                | 100                 | 100                                           | 5,190    | 100    | 5,450    | 100    | 5,722    | 100    | 6,008    | 100    | 6,309    | 100    | 6,624    | 100                          | 6,624    |         |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur                | %                | 100                 | 100                                           | 2,163    | 100    | 2,271    | 100    | 2,385    | 100    | 2,504    | 100    | 2,629    | 100    | 2,761    | 100                          | 2,761    |         |
|    |                                                                        | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)               | zona             |                     | hijau                                         |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                        |          |         |
|    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas                  | %                | 100                 | 100                                           | 262      | 100    | 275      | 100    | 289      | 100    | 303      | 100    | 319      | 100    | 335      | 100                          | 335      |         |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                               | JPL/orang/ tahun |                     | 10                                            | 280      | 15     | 294      | 20     | 309      | 30     | 324      | 40     | 340      | 50     | 357      | 50                           | 357      |         |
|    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD  | %                | 100                 | 100                                           | 1,112    | 100    | 1,168    | 100    | 1,226    | 100    | 1,288    | 100    | 1,352    | 100    | 1,420    | 100                          | 1,420    |         |
|    |                                                                        | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                            | Predikat         |                     | BB                                            |          | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A      |          | A                            |          |         |
|    |                                                                        | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan | %                | 100                 | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |         |
|    |                                                                        | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD               | %                | 100                 | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |         |
|    |                                                                        | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                      | %                | 100                 | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                          |          |         |
|    | Peningkatan Akses, Pemerataan dan Mutu Sekolah Menengah Atas           | APK SMA/SMK/MA/ SMALB Paket C                                        | %                | 96,64 (2014)        | 96,88                                         | 48,471   | 97,11  | 44,417   | 97,34  | 46,937   | 97,57  | 50,114   | 97,8   | 53,541   | 98,03  | 57,240   | 98,03                        | 57,240   |         |
|    |                                                                        | APM SMA/SMK/MA/ SMALB Paket C                                        | %                | 73,08 (2014)        | 73,35                                         |          | 73,60  |          | 73,85  |          | 74,10  |          | 74,35  |          | 74,6   |          | 74,6                         |          |         |
|    |                                                                        | Angka Putus SMA                                                      | %                | 0,95 (2015)         | 0,83                                          |          | 0,78   |          | 0,73   |          | 0,68   |          | 0,63   |          | 0,58   |          | 0,58                         |          |         |
|    |                                                                        | Angka Kelulusan SMA/MA/ SMALB Paket C                                | %                | 99,95 (2015)        | 97,21                                         |          | 97,35  |          | 97,42  |          | 97,57  |          | 98,25  |          | 99,15  |          | 99,15                        |          |         |
|    |                                                                        | Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi           | %                | 41,32 (2015)        | 42,98                                         |          | 45,23  |          | 46,75  |          | 48,00  |          | 50,00  |          | 52,05  |          | 52,05                        |          |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS           | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                                                                   | SATUAN           | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |        | CATATAN |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------------------------------|--------|---------|
|    |                                                                  | 2016                                                                                                             |                  |                           | 2017                                          |        | 2018     |        | 2019     |        | 2020     |        | 2021     |        |          |        |                                 |        |         |
|    |                                                                  | TAHUN 2017-2021                                                                                                  |                  |                           | TAHUN 2017-2021                               | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt)                        | Target |         |
|    |                                                                  | Angka tidak melanjutkan dari SMP ke Sekolah Menengah                                                             | %                | 4,44 (2015)               | 4.02                                          |        | 3.60     |        | 3.18     |        | 2.76     |        | 2.74     |        | 1.92     |        | 1.92                            |        |         |
|    | Peningkatan Akses, Pemerataan dan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan | Angka kelulusan SMK                                                                                              | %                | 99,74 (2015)              | 97.12                                         | -      | 97.3     | 28,275 | 97.35    | 30,345 | 97.52    | 32,939 | 98.15    | 35,766 | 99.12    | 38,845 | 99.12                           | 38,845 |         |
|    |                                                                  | Angka Putus SMK                                                                                                  | %                | 0,95 (2015)               | 0.92                                          |        | 0.88     |        | 0.83     |        | 0.78     |        | 0.73     |        | 0.68     |        | 0.68                            |        |         |
|    |                                                                  | Lulusan SMK yang diterima di dunia usaha dan industri (DUDI)                                                     | %                | 25 (2015)                 | 28                                            |        | 32       |        | 37       |        | 43       |        | 50       |        | 58       |        | 58                              |        |         |
|    | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan          | Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)                                                                                  | Skor 1-100       | 54,68 (2015)              | 59.93                                         | -      | 65.18    | 755    | 70.43    | 811    | 75.68    | 880    | 80.93    | 956    | 86.18    | 1,038  | 86.18                           | 1,038  |         |
|    |                                                                  | Kompetensi Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, Laboran, Pustakawan dan Pegawai TU Sekolah) | Skor 1-100       | 0                         | 16.67                                         |        | 19.17    |        | 22.05    |        | 25.35    |        | 33.53    |        | 38.56    |        | 38.56                           |        |         |
|    |                                                                  | Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru SMA, SMK dan PLB)                                                               | Skor 1-100       | 54.68                     | 59.93                                         |        | 65.18    |        | 70.43    |        | 75.68    |        | 80.93    |        | 86.18    |        | 86.18                           |        |         |
|    | Manajemen Pelayanan Pendidikan                                   | Sekolah Menengah/SLB Terakreditasi Minimal B                                                                     | %                | 70,81 (2015)              | 72.23                                         | 3,063  | 73.67    | 8,455  | 75.14    | 9,074  | 76.65    | 9,850  | 78.18    | 10,695 | 79.74    | 11,616 | 79.74                           | 11,616 |         |
|    |                                                                  | APK PAUD                                                                                                         | %                | 67,27 (2014)              | 68.15                                         |        | 70.25    |        | 72.18    |        | 74.6     |        | 76.2     |        | 77.5     |        | 77.5                            |        |         |
|    |                                                                  | APM SD/SDLB/Paket A/MI                                                                                           | %                | 95,92 (2014)              | 99.58                                         |        | 99.59    |        | 99.6     |        | 99.61    |        | 99.62    |        | 100      |        | 100                             |        |         |
|    |                                                                  | APM SMP/ MTs/ SMP/PLB/ Paket B                                                                                   | %                | 79,57 (2014)              | 81.2                                          |        | 81.25    |        | 81.3     |        | 81.35    |        | 81.5     |        | 81.55    |        | 81.55                           |        |         |
|    | Pendidikan Berkarakter                                           | Indeks Integritas siswa                                                                                          | Skor 1-100       | 58 (2015)                 | 66                                            | 1,620  | 68       | 273    | 70       | 293    | 80       | 318    | 82       | 345    | 85       | 375    | 85                              | 375    |         |
|    |                                                                  | Persentase guru BK paham terkait pencegahan narkoba                                                              | %                |                           | 4.3                                           |        | 5.38     |        | 6.72     |        | 10.5     |        | 13.12    |        | 16.4     |        | 16.4                            |        |         |
|    |                                                                  | Persentase Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya bagi peserta didik                             | % sekolah        | NA                        | 7.57                                          |        | 9.08     |        | 10.9     |        | 13.08    |        | 15.7     |        | 18.84    |        | 18.84                           |        |         |
|    |                                                                  | Sekolah Menengah dengan system boarding school yang bernuansa islami                                             | Sekolah          | 3                         | 3                                             |        | 7        |        | 9        |        | 9        |        | 10       |        | 11       |        | 11                              |        |         |
|    |                                                                  |                                                                                                                  | % lulusan Tahfiz | 6.9                       | 7.07                                          |        | 7.25     |        | 7.43     |        | 7.61     |        | 7.8      |        | 8.01     |        | 8.01                            |        |         |
|    |                                                                  | Sekolah Menengah yang bernuansa islami                                                                           | Sekolah          | 3                         | 3                                             |        | 5        |        | 8        |        | 12       |        | 15       |        | 19       |        | 19                              |        |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                     | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                               | SATUAN           | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                            |                                                                              |                  |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                                            |                                                                              |                  |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    |                                                                            | demokrasi Islam                                                              | % lulusan Tahfiz | 5.67                      | 5.81                                          |          | 5.95   | 6.1      |        | 6.25     |        | 6.41     |        | 6.57     |        | 6.57     |                                 |          |         |
|    | Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus                                       | Persentase peningkatan pelayanan pendidikan khusus dan layanan khusus        | %                | 63.16                     | 68.42                                         | 3,108    | 73.68  | 5,052    | 78.95  | 5,422    | 84.21  | 5,886    | 89.47  | 6,391    | 100    | 6,941    | 100                             | 6,941    |         |
|    |                                                                            |                                                                              |                  |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |
|    | URUSAN KEBUDAYAAN                                                          |                                                                              |                  |                           |                                               | 6,478    |        | 1,733    |        | 1,860    |        | 2,019    |        | 2,192    |        | 2,381    |                                 | 2,381    |         |
|    | Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya | Berkembangnya Kapasitas Kelembagaan Adat, Seni dan Budaya                    | %                | 3                         | 20%                                           | 1,057    | 40%    | 283      | 60%    | 303      | 80%    | 329      | 100%   | 358      | 100%   | 388      | 100%                            | 388      |         |
|    |                                                                            | Mingkatkanya kualitas lembaga dan kompetensi pemangku adat                   | Nagari           | 18                        | 18                                            |          | 54     |          | 72     |          | 108    |          | 138    |          | 138    |          | 138                             |          |         |
|    | Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya                               | Meningkatnya pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya                    | %                | 30                        | 20%                                           | 2,747    | 40%    | 735      | 60%    | 789      | 80%    | 856      | 100%   | 930      | 100%   | 1,010    | 100%                            | 1,010    |         |
|    |                                                                            | Meningatnya pelaksanaan pendidikan Muatan Lokal ABS SBK                      | Sekolah          | NN                        | 5                                             |          | 19     |          | 38     |          | 150    |          | 356    |          | 356    |          | 356                             |          |         |
|    | Pengelolaan Kekayaan Budaya                                                | Tersedianya pengelolaan kekayaan Budaya                                      | Kali             | 7                         | 20%                                           | 2,024    | 40%    | 541      | 60%    | 581      | 80%    | 631      | 100%   | 685      | 100%   | 744      | 100%                            | 744      |         |
|    |                                                                            | Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (intagible) yang ditetapkan oleh Pemerintah  | jenis            | 5                         | 10                                            |          | 15     |          | 20     |          | 25     |          | 30     |          | 30     |          | 30                              |          |         |
|    |                                                                            | Meningkatnya jumlah warian budaya benda (tangible) yang ditetapkan pemerntah | jenis            | NN                        | NN                                            |          | 10     |          | 15     |          | 20     |          | 25     |          | 25     |          | 25                              |          |         |
|    | Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya                                    | Tersedianya Data Pengembangan Nilai-Nilai Budaya                             | %                | NN                        | 20%                                           | 300      | 40%    | 80       | 60%    | 86       | 80%    | 93       | 100%   | 102      | 100%   | 110      | 100%                            | 110      |         |
|    |                                                                            | Meningkatnya kompetensi, keterampilan dan pengamalan nilai-nilai budaya      | orang            | NN                        | -                                             |          | 150    |          | 300    |          | 450    |          | 600    |          | 600    |          | 2100                            |          |         |
|    | Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya                                      | Tersedianya peningkatan diplomasi seni dan Budaya                            | %                | NN                        | 20%                                           | 350      | 40%    | 94       | 60%    | 100      | 80%    | 109      | 100%   | 118      | 100%   | 129      | 100%                            | 129      |         |
|    |                                                                            |                                                                              |                  |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                            | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                                                                        | SATUAN               | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                                   |                                                                                                                       |                      |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                                                   |                                                                                                                       |                      |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    | SETDA (BIRO BINA SOSIAL)                                                          |                                                                                                                       |                      |                           |                                               | 39,845   |        | 35,979   |        | 39,110   |        | 43,309   |        | 47,801   |        | 52,923   |                                 | 52,923   |         |
|    | URUSAN PENDIDIKAN                                                                 |                                                                                                                       |                      |                           |                                               | 175      |        | 34,807   |        | 37,858   |        | 41,965   |        | 46,368   |        | 51,397   |                                 | 51,397   |         |
|    | Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas Pendidikan                           | Jumlah guru SMA/SMK yang telah diberi pembinaan pendidikan Agama dan Adat                                             | Jumlah Guru          | 75                        | 110                                           | 175      | 115    | 34,807   | 117    | 37,858   | 120    | 41,965   | 125    | 46,368   | 125    | 51,397   | 125                             | 51,397   |         |
|    |                                                                                   |                                                                                                                       |                      |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |
|    | URUSAN SOSIAL                                                                     |                                                                                                                       |                      |                           |                                               | 740      |        | 442      |        | 483      |        | 529      |        | 570      |        | 610      |                                 | 610      |         |
|    | Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial                                            | Rumusan kebijakan penanganan masalah sosial, kesejahteraan sosial sdan rehabilitasi sosial dan penanggulangan bencana | Rumusan Kebijakan    | 2                         | 2                                             | 740      | 2      | 442      | 2      | 483      | 2      | 529      | 2      | 570      | 2      | 610      | 12                              | 610      |         |
|    |                                                                                   |                                                                                                                       |                      |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |
|    | URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA                                                   |                                                                                                                       |                      |                           |                                               | 350      |        | 122      |        | 130      |        | 144      |        | 159      |        | 176      |                                 | 176      |         |
|    | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga                                    | Persentase Jumlah PNS Pemprov yang mengikuti senam pagi                                                               | %                    |                           | 44                                            | 225      | 44     | 79       | 44     | 83       | 44     | 93       | 44     | 102      | 44     | 113      | 44                              | 113      |         |
|    | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan                                        | Jumlah Pemuda yang telah dilakukan pembinaan dalam bidang Kewirausahaan                                               | Jumlah Pemuda        |                           | 90                                            | 125      | 100    | 43       | 110    | 46       | 115    | 51       | 150    | 57       | 155    | 63       | 155                             | 63       |         |
|    |                                                                                   |                                                                                                                       |                      |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |
|    | URUSAN KEBUDAYAAN                                                                 |                                                                                                                       |                      |                           |                                               | 7,241    |        | 13,360   |        | 13,725   |        | 13,856   |        | 14,070   |        | 14,065   |                                 | 14,065   |         |
|    | Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya                                           | Jumlah Pemangku Adat, pengurus kerapatam Adat Nagari (KAN)                                                            | Jumlah Pemangku Adat | 330                       | 330                                           | 220      | 330    | 37       | 330    | 41       | 330    | 45       | 185    | 50       | 330    | 55       | 1,835                           | 55       |         |
|    |                                                                                   | Kompetensi dan kualifikasi pemangku adat (Ketua KAN/Penghulu)                                                         | orang                | NA                        | 108                                           |          | 108    |          | 108    |          | 108    |          | 108    |          | 108    |          | 648                             |          |         |
|    | Program Pemberdayaan Lembaga Adat                                                 | Jumlah Lembaga Adat yang Telah di Bina                                                                                | Jumlah Lembaga Adat  | 18                        | 18                                            | 380      | 18     | 31       | 18     | 34       | 18     | 37       | 18     | 41       | 18     | 53       | 108                             | 53       |         |
|    | Program Peningkatan Layanan Kehidupan Beragama                                    | Tingkat Kepuasan Terhadap Pemberangkatan dan Pemulangan Haji                                                          | %                    | 100                       | 100                                           | 1,800    | 100    | 614      | 100    | 668      | 100    | 740      | 100    | 818      | 100    | 795      | 100                             | 795      |         |
|    |                                                                                   | Sentra keagamaan yang representatif                                                                                   | %                    | 40                        | 45                                            | -        | 50     | 11,989   | 55     | 12,031   | 60     | 12,276   | 65     | 12,190   | 70     | 12,379   | 70                              | 12,379   |         |
|    | Peningkatan Pemahaman penghayatan, Pengamatan, dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama | Jumlah Lembaga didikan subuh yang terbina                                                                             | Jumlah LDS           | 19                        | 19                                            | 4,501    | 19     | 89       | 19     | 97       | 19     | 107      | 19     | 118      | 19     | 131      | 114                             | 131      |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                                              | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                                                                                                                                                                                        | SATUAN                             | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    |                                                                                                     | Peringkat Sumatera Barat pada Penyelenggaraan MTQ Nasional                                                                                                                                                                            | peringkat sumbar pada MTQ Nasional | 5                         | 5                                             | -        | -      | -        | 5      | 822      | -      | -        | 3      | 813      | -      | -        | 3                               | -        |         |
|    |                                                                                                     | Peringkat Sumatera Barat pada Penyelenggaraan STQ Nasional                                                                                                                                                                            | peringkat sumbar pada STQ Nasional | -                         | -                                             | -        | 10     | 570      | -      | -        | 8      | 614      | -      | -        | 6      | 632      | 6                               | 632      |         |
|    | Pengembangan lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan                      | Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan Barang atau Uang pada Rumah Ibadah Keagamaan                                                                                                                                                     | orang                              |                           | 60                                            | 340      | 60     | 31       | 76     | 34       | 76     | 37       | 76     | 41       | 76     | 20       | 424                             | 20       |         |
|    |                                                                                                     | Peningkatan kapasitas pengelola manajemen pondok pesantren/al-qur'an dan sekolah agama                                                                                                                                                | %                                  | NA                        | NA                                            |          | 19.71  |          | 19.71  |          | 20.18  |          | 20.18  |          | 20.18  |          | 20.18                           |          |         |
|    |                                                                                                     | Pondok al-qur'an yang memiliki seluruh cabang ilmu                                                                                                                                                                                    | Pondok Al-Qur'an                   | -                         | 4                                             |          | 8      |          | 12     |          | 16     |          | 19     |          | 20     |          | 20                              |          |         |
|    |                                                                                                     | Tenaga pengajar cabang ilmu Qur'an yang berkualitas (Tilawah, Tartil, qiraat, hafidzh 1 dan 5 juz, hafidzh 10 juz, 20 juz, 30 juz, tafsir bahasa inggris, tafsir bahasa arab, tafsir bahasa indonesia, syahril qur'an, fahmil qur'an) | orang                              | NA                        | 80                                            |          | 160    |          | 240    |          | 320    |          | 400    |          | 480    |          | 480                             |          |         |
|    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |
|    | FUNGSI LAINNYA :<br>OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM. KEU. DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN |                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                           |                                               | 38,580   |        | 608      |        | 639      |        | 671      |        | 704      |        | 740      |                                 | 740      |         |
|    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                          | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                                                                                                                                                                                         | %                                  |                           | 100                                           | 406      | 100    | 426      | 100    | 448      | 100    | 470      | 100    | 494      | 100    | 518      | 100                             | 518      |         |
|    | Program Peningkatan Sarana dan sarana Aparatur                                                      | persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur                                                                                                                                                                                 | %                                  |                           | 100                                           | 100      | 100    | 105      | 100    | 110      | 100    | 115      | 100    | 121      | 100    | 127      | 100                             | 127      |         |
|    |                                                                                                     | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)                                                                                                                                                                                | Zona                               |                           | hijau                                         |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                           |          |         |
|    |                                                                                                     | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas                                                                                                                                                                                   | %                                  |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                         | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                       | SATUAN           | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |        | CATATAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------------------------------|--------|---------|
|    |                                                                                |                                                                      |                  |                           | 2016                                          |        | 2017     |        | 2018     |        | 2019     |        | 2020     |        | 2021     |        |                                 |        |         |
|    |                                                                                | TAHUN 2017-2021                                                      |                  |                           | TAHUN 2017-2021                               | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt)                        | Target |         |
|    |                                                                                | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                               | JPL/orang/ tahun |                           | 10                                            |        | 15       |        | 20       |        | 30       |        | 40       |        | 50       |        | 50                              |        |         |
|    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD  | %                |                           | 100                                           | 74     | 100      | 78     | 100      | 81     | 100      | 85     | 100      | 90     | 100      | 94     | 100                             | 94     |         |
|    |                                                                                | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                            | Predikat         |                           | BB                                            |        | BB       |        | BB       |        | A        |        | A        |        | A        |        | A                               |        |         |
|    |                                                                                | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan | %                |                           | 100                                           |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100                             |        |         |
|    |                                                                                | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD               | %                |                           | 100                                           |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100                             |        |         |
|    |                                                                                | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                      | %                |                           | 100                                           |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100                             |        |         |
|    | Program Peningkatan Pelayanan Publik                                           |                                                                      |                  |                           | 1                                             | 38,000 | -        | -      | -        | -      | -        | -      | -        | -      | -        | -      | -                               | -      |         |
|    |                                                                                |                                                                      |                  |                           |                                               |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |                                 |        |         |



| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                 | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                                    | SATUAN           | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                        |                                                                                   |                  |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                                        |                                                                                   |                  |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    | DINAS KESEHATAN                                                        |                                                                                   |                  |                           |                                               | 137,619  |        | 149,803  |        | 159,698  |        | 171,969  |        | 185,271  |        | 199,696  |                                 | 199,696  |         |
|    | URUSAN KESEHATAN                                                       |                                                                                   |                  |                           |                                               | 137,619  |        | 149,803  |        | 159,698  |        | 171,969  |        | 185,271  |        | 199,696  |                                 | 199,696  |         |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                                     | %                | 100                       | 100                                           | 6,774    | 100    | 7,113    | 100    | 7,469    | 100    | 9,017    | 100    | 9,919    | 100    | 10,910   | 100                             | 10,910   |         |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur                                | %                | 100                       | 100                                           | 3,033    | 100    | 3,184    | 100    | 3,343    | 100    | 4,037    | 100    | 4,441    | 100    | 4,885    | 100                             | 4,885    |         |
|    |                                                                        | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)                            | Zona             |                           | hijau                                         |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                           |          |         |
|    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas                               | %                | 100                       | 100                                           | 243      | 100    | 255      | 100    | 268      | 100    | 323      | 100    | 356      | 100    | 391      | 100                             | 391      |         |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                              | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                                            | JPL/orang/ tahun |                           | 10                                            | 48       | 15     | 50       | 20     | 53       | 30     | 64       | 40     | 77       | 50     | 85       | 50                              | 85       |         |
|    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD               | %                | 100                       | 100                                           | 573      | 100    | 602      | 100    | 632      | 100    | 809      | 100    | 978      | 100    | 1,076    | 100                             | 1,076    |         |
|    |                                                                        | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                                         | predikat         |                           | BB                                            |          | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A      |          | A                               |          |         |
|    |                                                                        | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan              | %                | 100                       | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                        | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD                            | %                | 100                       | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                        | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                                   | %                | 100                       | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    | Obat dan Perbekalan Kesehatan                                          | Persentase Ketersediaan obat buffer stock dan vaksin di pelayanan kesehatan dasar | %                | 80                        | 80                                            | 5,925    | 83     | 5,684    | 86     | 6,259    | 90     | 6,453    | 93%    | 6,776    | 100%   | 5,822    | 100%                            | 5,822    |         |
|    | Upaya Kesehatan Masyarakat                                             | Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan                | %                | 87                        | 87                                            | 80,747   | 88     | 7,496    | 89     | 7,978    | 90     | 8,508    | 90%    | 8,934    | 90%    | 7,677    | 90%                             | 7,677    |         |
|    |                                                                        | Persentase kunjungan neonatal (KN1)                                               | %                | 76                        | 76                                            |          | 87     |          | 88     |          | 89     |          | 90     |          | 90%    |          | 90%                             |          |         |
|    |                                                                        | Jumlah Puskesmas yang terakreditasi minimal 1 per kecamatan                       | Puskesmas        | 1                         | 1                                             |          | 56     |          | 96     |          | 131    |          | 156    |          | 195    |          | 195                             |          |         |
|    |                                                                        | Jumlah rumah sakit Pemerintah yang terakreditasi minimal 1 per Kab.kota           | RS               | 1                         | 2                                             |          | 3      |          | 4      |          | 4      |          | 4      |          | 5      |          | 5                               |          |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                         | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                                              | SATUAN   | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                                |                                                                                             |          |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                                                |                                                                                             |          |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    |                                                                                | Kasus narkoba yang dilayani                                                                 | %        | 100                       | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          |                                 |          |         |
|    |                                                                                | Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)                                                       | Jumlah   | 21                        | 22                                            |          | 23     |          | 24     |          | 25     |          | 26     |          | 27     |          | 27                              |          |         |
|    |                                                                                | IPWL Kabupaten/Kota                                                                         | Kab/Kota | 16                        | 17                                            |          | 17     |          | 18     |          | 18     |          | 19     |          | 19     |          | 19                              |          |         |
|    | Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat                                  | Persentase Kab/Kota yang memiliki kebijakan PHBS                                            | %        | NA                        | 40                                            | 1,727    | 50     | 1,657    | 60     | 1,763    | 70     | 1,881    | 75     | 1,975    | 80     | 1,697    | 80                              | 1,697    |         |
|    | Perbaikan Gizi Masyarakat                                                      | Prevalensi gizi kurang (Berat Badan/Tinggi Badan)                                           | %        | 4.8                       | 4,75                                          | 1,103    | 4,70   | 1,059    | 4,65   | 1,127    | 4,60   | 1,202    | 4,55   | 1,262    | 4,5    | 1,085    | 4,5                             | 1,085    |         |
|    | Pengembangan Lingkungan Sehat                                                  | Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan                                       | %        | 47.25                     | 50                                            | 530      | 45     | 508      | 54     | 542      | 56     | 578      | 58     | 607      | 60     | 521      | 60                              | 521      |         |
|    |                                                                                | Persentase rumah sakit Provinsi yang melakukan pengolahan limbah medis sesuai standar       | %        | 0                         | 25                                            |          | 50     |          | 70     |          | 75     |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                                | Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat                                 | Kab/Kota | 17                        | 17                                            |          | 18     |          | 18     |          | 19     |          | 19     |          | 19     |          | 19                              |          |         |
|    | Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Persentase anak 0-18 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap                            | %        | 74,1                      | 91                                            | 2,579    | 91,5   | 2,474    | 92     | 2,634    | 92,5   | 2,809    | 93     | 2,949    | 95     | 2,534    | 95                              | 2,534    |         |
|    |                                                                                | Jumlah Kab/Kota dengan API (Annual Parasite Indeks) <1 per 1000 penduduk                    | Kab/Kota | 17                        | 18                                            |          | 18     |          | 18     |          | 19     |          | 19     |          | 19     |          | 19                              |          |         |
|    |                                                                                | Persentase Kab/Kota dengan Incidence Rate DBD < 49 per 100.000 penduduk                     | %        | 42                        | 42                                            |          | 64     |          | 66     |          | 68     |          | 70     |          | 72     |          | 72                              |          |         |
|    |                                                                                | Persentase Kab/Kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA Positif (Success Rate) | %        | 87.06                     | 87.06                                         |          | 81     |          | 85     |          | 87     |          | 90     |          | 93     |          | 93                              |          |         |
|    |                                                                                | Persentase kasus HIV yang diobati                                                           | %        | 100                       | 100                                           |          | 45     |          | 47     |          | 50     |          | 52     |          | 55     |          | 55                              |          |         |
|    |                                                                                | Persentase Puskesmas menyelenggarakan pengendalian penyakit tidak menular (PTM) terpadu     | %        | 10                        | 10                                            |          | 30     |          | 40     |          | 50     |          | 60     |          | 70     |          | 70                              |          |         |
|    |                                                                                | Persentase RSUD Rujukan Regional yang menyelenggarakan layanan kesehatan jiwa/Psikiatri     | %        | 25                        | 25                                            |          | 50     |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                                                | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                                               | SATUAN | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                                                       |                                                                                              |        |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                                                                       |                                                                                              |        |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    | Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru/ RS. Mata       | Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan                                     | %      | 100                       | 20                                            | 30,884   | 40     | 45,857   | 60     | 49,004   | 80     | 52,278   | 100    | 58,922   | 100    | 50,726   | 100                             | 50,726   |         |
|    |                                                                                                       | Persentase pencapaian standar prasarana pelayanan kesehatan                                  | %      | 100                       | 20                                            |          | 40     |          | 60     |          | 80     |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata | Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang berfungsi dengan baik               | %      | 100                       | 20                                            | 307      | 40     | 294      | 60     | 313      | 80     | 334      | 100    | 351      | 100    | 301      | 100                             | 301      |         |
|    | Peningkatan Sumber Daya Kesehatan                                                                     | Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat sertifikat pelatihan terakreditasi                     | Orang  | 100                       | 500                                           | 2,381    | 600    | 2,821    | 700    | 3,013    | 800    | 3,365    | 900    | 3,394    | 1000   | 2,916    | 1000                            | 2,916    |         |
|    | Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan                                                         | Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan ketersediaan data yang lengkap dan valid | %      |                           | 89%                                           | 765      | 90     | 556      | 91     | 592      | 92     | 632      | 93     | 664      | 94     | 570      | 94                              | 570      |         |
|    | Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin                                                                   | Pembiayaan kepesertaan PBI APBN                                                              | %      | 29.4                      | 31,31                                         |          | 31,31  | 70,192   | 34,31  | 74,708   | 40     | 79,680   | 40     | 83,668   | 40     | 108,500  | 40                              | 108,500  |         |
|    |                                                                                                       | Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan                                         | %      | 12.46                     | 12.46                                         |          | 12.46  |          | 9.45   |          | 3.76   |          | 3.76   |          | 3.76   |          | 3.76                            |          |         |
|    |                                                                                                       | Cakupan Jaminan Kesehatan Pekerja                                                            | %      | 15.98                     | 16,02                                         |          | 16,42  |          | 16,55  |          | 16,80  |          | 16,80  |          | 16,80  |          | 16,80                           |          |         |
|    |                                                                                                       | Cakupan Jaminan Kesehatan Mandiri                                                            | %      | 8.36                      | 13,99                                         |          | 21,53  |          | 29,17  |          | 39,44  |          | 39,44  |          | 39,44  |          | 39,44                           |          |         |
|    |                                                                                                       | Total Coverage                                                                               | %      | 66,20                     | 73,96                                         |          | 81,72  |          | 89,48  |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                                                       |                                                                                              |        |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                                           | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                              | SATUAN             | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |                 |        |          |           |          |           |          |           |          |           |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                                                  |                                                             |                    |                           | 2016                                          |                 | 2017   |          | 2018      |          | 2019      |          | 2020      |          | 2021      |          |                                 |          |         |
|    |                                                                                                  |                                                             |                    |                           | TAHUN 2017-2021                               | TAHUN 2017-2021 | Target | Rp. (Jt) | Target    | Rp. (Jt) | Target    | Rp. (Jt) | Target    | Rp. (Jt) | Target    | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    | RSUD PARIAMAN                                                                                    |                                                             |                    |                           |                                               | 77,852          |        | 83,071   |           | 88,956   |           | 96,247   |           | 104,171  |           | 112,785  |                                 | 112,785  |         |
|    | URUSAN KESEHATAN                                                                                 |                                                             |                    |                           |                                               | 77,852          |        | 83,071   |           | 88,956   |           | 96,247   |           | 104,171  |           | 112,785  |                                 | 112,785  |         |
|    | Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata | Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan    | %                  | 60                        | 75                                            | 32,426          | 75     | 37,179   | 75        | 39,481   | 75        | 42,717   | 75        | 46,234   | 75        | 50,057   | 75                              | 50,057   |         |
|    |                                                                                                  | Persentase pencapaian standar prasarana pelayanan kesehatan | %                  | 60                        | 75                                            |                 | 75     |          | 75        |          | 75        |          | 75        |          | 75        |          | 75                              |          |         |
|    | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan *) khusus DAK                                           | Akreditasi rumah sakit                                      | Tingkat Akreditasi | NA                        |                                               | 426             | madya  | 556      | Paripurna | 590      | Paripurna | 638      | Paripurna | 691      | Paripurna | 748      | Paripurna                       | 748      |         |
|    | Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD                                                          | AvLOS (Avarage Long of Stay)                                | Hari               | 5                         | 6                                             | 45,000          | 6      | 45,336   | 6         | 48,885   | 6         | 52,892   | 6         | 57,246   | 6         | 61,980   | 6                               | 61,980   |         |
|    |                                                                                                  | Respond Time IGD (≤ 5 menit)                                | % pasien dilayani  | 100                       | 100                                           |                 | 100    |          | 100       |          | 100       |          | 100       |          | 100       |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                                                  | IKM                                                         | %                  | 78,46                     | 79                                            |                 | 79,5   |          | 79,8      |          | 80        |          | 81        |          | 82        |          | 82                              |          |         |
|    |                                                                                                  | Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD                           | %                  | 46                        | 46                                            |                 | 46     |          | 48        |          | 49        |          | 50        |          | 51        |          | 51                              |          |         |
|    |                                                                                                  |                                                             |                    |                           |                                               |                 |        |          |           |          |           |          |           |          |           |          |                                 |          |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                                                               | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                    | SATUAN                | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                                                                      |                                                                   |                       |                           | 2016                                          |          | 2017      |          | 2018      |          | 2019      |          | 2020      |          | 2021      |          |                                 |          |         |
|    |                                                                                                                      |                                                                   |                       |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target    | Rp. (Jt) | Target    | Rp. (Jt) | Target    | Rp. (Jt) | Target    | Rp. (Jt) | Target    | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    | RSUD ACHMAD MUCHTAR                                                                                                  |                                                                   |                       |                           |                                               | 183,804  |           | 192,547  |           | 206,246  |           | 223,149  |           | 241,489  |           | 261,493  |                                 | 261,493  |         |
|    | URUSAN KESEHATAN                                                                                                     |                                                                   |                       |                           |                                               | 183,804  |           | 192,547  |           | 206,246  |           | 223,149  |           | 241,489  |           | 261,493  |                                 | 261,493  |         |
|    | Program Pengadaan,<br>Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Rumah Sakit /<br>Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru<br>/ RS. Mata | Persentase pencapaian<br>standar sarana pelayanan<br>kesehatan    | %                     | 100                       | 10                                            | 33,378   | 30        | 32,937   | 50        | 111,159  | 70        | 33,038   | 80        | 140,320  | 100       | 114,173  | 100                             | 114,173  |         |
|    |                                                                                                                      | Persentase pencapaian<br>standar prasarana pelayanan<br>kesehatan | %                     | 100                       | 20                                            |          | 40        |          | 60        |          | 60        |          | 80        |          | 100       |          | 100                             |          |         |
|    | Program Standarisasi<br>Pelayanan Kesehatan                                                                          | Akreditasi rumah sakit                                            | Tingkat<br>Akreditasi | Penuh                     | Paripurna                                     | 426      | Paripurna | -        | Paripurna | -        | Paripurna | 308      | Paripurna | -        | Paripurna | -        | Paripurna                       | -        |         |
|    | Program Peningkatan<br>Pelayanan BLUD RSUD                                                                           | AvLOS (Avarage Long of<br>Stay) (Standar RSU)                     | Hari                  | 5.62                      | 5.30                                          | 150,000  | 5.10      | 159,610  | 5.00      | 95,086   | 4.90      | 189,803  | 4.80      | 101,170  | 4.60      | 147,320  | 4.60                            | 147,320  |         |
|    |                                                                                                                      | Respond Time IGD (≤ 5<br>menit)                                   | % pasien<br>dilayani  | 100                       | 100                                           |          | 100       |          | 100       |          | 100       |          | 100       |          | 100       |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                                                                      | IKM                                                               | %                     | 81.56                     | 81                                            |          | 82        |          | 84        |          | 86        |          | 88        |          | 90        |          | 90                              |          |         |
|    |                                                                                                                      | Tingkat Kemandirian<br>Keuangan BLUD                              | %                     | 62.22                     | 64                                            |          | 64        |          | 40        |          | 65        |          | 36        |          | 46        |          | 46                              |          |         |
|    |                                                                                                                      |                                                                   |                       |                           |                                               |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |                                 |          |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                                                   | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                | SATUAN             | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |         |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |         | CATATAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------------------------------|---------|---------|
|    |                                                                                                          |                                                               |                    |                           | 2016                                          |         | 2017      |         | 2018      |         | 2019      |         | 2020      |         | 2021      |         |                                 |         |         |
|    |                                                                                                          | TAHUN 2017-2021                                               |                    |                           | TAHUN 2017-2021                               | Target  | Rp. (Jt)  | Target  | Rp. (Jt)  | Target  | Rp. (Jt)  | Target  | Rp. (Jt)  | Target  | Rp. (Jt)  | Target  | Rp. (Jt)                        | Target  |         |
|    | RSUD SOLOK                                                                                               |                                                               |                    |                           |                                               | 101,325 |           | 106,174 |           | 113,696 |           | 123,015 |           | 133,142 |           | 144,152 |                                 | 144,152 |         |
|    | URUSAN KESEHATAN                                                                                         |                                                               |                    |                           |                                               | 101,325 |           | 106,174 |           | 113,696 |           | 123,015 |           | 133,142 |           | 144,152 |                                 | 144,152 |         |
|    | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan                                                                 | Akreditasi rumah sakit                                        | Tingkat Akreditasi | 1                         | Madya                                         | 426     | Paripurna | 446     | Paripurna | 478     | Paripurna | 517     | Paripurna | 560     | Paripurna | 606     | Paripurna                       | 606     |         |
|    | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata | Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan      | %                  | 55                        | 60                                            | 30,899  | 65        | 32,378  | 70        | 34,672  | 75        | 37,514  | 80        | 40,602  | 85        | 43,960  | 85                              | 43,960  |         |
|    |                                                                                                          | Persentase pencapaian standar prasarana pelayanan rumah sakit | %                  | 65                        | 70                                            |         | 75        |         | 78        |         | 80        |         | 85        |         | 90        |         | 90                              |         |         |
|    | Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD                                                                          | AvLOS (Avarage Long of Stay)                                  | hari               | 6                         | 6                                             | 70,000  | 6         | 73,350  | 6         | 78,547  | 6         | 84,984  | 6         | 91,980  | 6         | 99,587  | 6                               | 99,587  |         |
|    |                                                                                                          | Respond Time IGD (≤ 5 menit)                                  | % pasien dilayani  | 100                       | 100                                           |         | 100       |         | 100       |         | 100       |         | 100       |         | 100       |         | 100                             |         |         |
|    |                                                                                                          | IKM                                                           | %                  | 75                        | 77                                            |         | 79        |         | 81        |         | 83        |         | 85        |         | 87        |         | 87                              |         |         |
|    |                                                                                                          | Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD                             | %                  | 55                        | 60                                            |         | 65        |         | 70        |         | 75        |         | 80        |         | 85        |         | 85                              |         |         |
|    |                                                                                                          |                                                               |                    |                           |                                               |         |           |         |           |         |           |         |           |         |           |         |                                 |         |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                                           | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                         | SATUAN             | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |           |          |           |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                                                  |                                                                        |                    |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020      |          | 2021      |          |                                 |          |         |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                    |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target    | Rp. (Jt) | Target    | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    | RSJ HB SAAININ                                                                                   |                                                                        |                    |                           |                                               | 34,744   |        | 36,716   |        | 39,317   |        | 42,540   |           | 46,042   |           | 49,849   |                                 | 49,849   |         |
|    | URUSAN KESEHATAN                                                                                 |                                                                        |                    |                           |                                               | 34,744   |        | 36,716   |        | 39,317   |        | 42,540   |           | 46,042   |           | 49,849   |                                 | 49,849   |         |
|    | Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata | Persentase pencapaian standar sarana dan prasarana pelayanan kesehatan | %                  | 100                       | 20                                            | 10,854   | 40     | 12,759   | 50     | 14,425   | 70     | 13,073   | 90        | 14,155   | 100       | 15,093   | 100                             | 15,093   |         |
|    | Pelayanan Kesehatan Pasien Gangguan Jiwa Terlantar                                               | Persentase pasien gangguan jiwa terlantar yang terlayani               | %                  | 100                       | 20                                            | 1,890    | 40     | 1,848    | 50     | 2,001    | 70     | 2,504    | 90        | 2,719    | 100       | 3,166    | 100                             | 3,166    |         |
|    | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan                                                         | Akreditasi rumah sakit                                                 | Tingkat Akreditasi | NA                        | NA                                            |          | Utama  |          | Utama  |          | Utama  |          | Paripurna |          | Paripurna |          | Paripurna                       |          |         |
|    | Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba                                   | Persentase kenaikan penanganan rehabilitasi narkoba                    | % rawat jalan      | -                         | -                                             | -        | 20     | -        | 20     | -        | 20     | -        | 20        | -        | 20        | -        | 20                              | -        |         |
|    |                                                                                                  |                                                                        | % rawat inap       |                           |                                               |          | 5      |          | 5      |          | 5      |          | 5         |          | 5         |          | 5                               |          |         |
|    | Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD                                                                  | AvLOS (Avarage Long of Stay) ( Standar RSJ < 42 Hari)                  | Hari               | 45                        | 45                                            | 22,000   | 44     | 22,109   | 43     | 22,891   | 43     | 26,963   | 42        | 29,168   | 42        | 31,590   | 42                              | 31,590   |         |
|    |                                                                                                  | Respond Time IGD (≤ 5 menit)                                           | % pasien dilayani  | 99                        | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100       |          | 100       |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                                                  | IKM                                                                    | %                  | 86                        | 86                                            |          | 87     |          | 88     |          | 89     |          | 90        |          | 91        |          | 91                              |          |         |
|    |                                                                                                  | Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD                                      | %                  | 38                        | 38                                            |          | 40     |          | 42     |          | 44     |          | 46        |          | 48        |          | 48                              |          |         |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                    |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |           |          |           |          |                                 |          |         |
|    |                                                                                                  |                                                                        |                    |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |           |          |           |          |                                 |          |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                       | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                             | SATUAN                        | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                              |                                                                            |                               |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                                              |                                                                            |                               |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    | BADAN KESBANG POL                                                            |                                                                            |                               |                           |                                               | 4,506    |        | 4,722    |        | 5,056    |        | 5,471    |        | 5,921    |        | 6,411    |                                 | 6,411    |         |
|    | URUSAN<br>KETENTERAMAN,<br>KETERTIBAN UMUM DAN<br>PERLINDUNGAN<br>MASYARAKAT |                                                                            |                               |                           |                                               | 4,506    |        | 4,722    |        | 5,056    |        | 5,471    |        | 5,921    |        | 6,411    |                                 | 6,411    |         |
|    | Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran                                        | Persentase pelayanan<br>administrasi perkantoran                           | %                             | 100                       | 100                                           | 909      | 100    | 954      | 100    | 1,002    | 100    | 1,052    | 100    | 1,104    | 100    | 1,160    | 100                             | 1,160    |         |
|    | Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Aparatur                                 | Persentase berfungsinya<br>sarana dan prasarana<br>aparatur                | %                             | 100                       | 100                                           | 132      | 100    | 139      | 100    | 145      | 100    | 153      | 100    | 160      | 100    | 168      | 100                             | 168      |         |
|    |                                                                              | Kepatuhan pelaksanaan UU<br>pelayanan publik (zona hijau)                  | Zona                          |                           | hijau                                         |          | hijau  | -        | hijau  | -        | hijau  | -        | hijau  | -        | hijau  | -        | hijau                           | -        |         |
|    | Peningkatan Disiplin<br>Aparatur                                             | Persentase disiplin aparatur<br>dalam berpakaian dinas                     | %                             | 100                       | 100                                           | 30       | 100    | 31       | 100    | 33       | 100    | 34       | 100    | 36       | 100    | 38       | 100                             | 38       |         |
|    | Peningkatan Kapasitas<br>Sumber Daya Aparatur                                | Rata-rata lamanya PNS<br>mengikuti diklat                                  | JPL/orang/<br>tahun           |                           | 10                                            | 30       | 15     | 32       | 20     | 33       | 30     | 35       | 40     | 36       | 50     | 38       | 50                              | 38       |         |
|    | Peningkatan Pengembangan<br>Sistem Pelaporan Capaian<br>Kinerja dan Keuangan | Tingkat kesesuaian pelaporan<br>capaian kinerja pada unit<br>kinerja SKPD  | %                             | 100                       | 100                                           | 161      | 100    | 169      | 100    | 177      | 100    | 186      | 100    | 195      | 100    | 205      | 100                             | 205      |         |
|    |                                                                              | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                                  | predikat                      |                           | BB                                            |          | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A      |          | A                               |          |         |
|    |                                                                              | Tingkat akurasi, kecepatan<br>dan kecermatan dalam<br>pengelolaan keuangan | %                             | 100                       | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                              | Persentase kesesuaian<br>usulan Renja dengan Renstra<br>SKPD               | %                             | 100                       | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                              | Persentase kesesuaian<br>usulan Renja dengan RPJMD                         | %                             | 100                       | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    | Peningkatan Keamanan dan<br>Kenyamanan Lingkungan                            | Konflik Sosial                                                             | kasus                         | 23                        | 23                                            | 910      | 23     | 923      | 23     | 995      | 23     | 1,091    | 23     | 1,195    | 23     | 1,308    | 23                              | 1,308    |         |
|    | Kemitraan Pengembangan<br>Wawasan Kebangsaan                                 | Konflik SARA                                                               | konflik                       | 0                         | 0                                             | 787      | 0      | 798      | 0.0    | 860      | 0      | 943      | 0      | 1,034    | 0      | 1,132    | 0                               | 1,132    |         |
|    |                                                                              | Koordinasi antar pemuka dan<br>tokoh umat beragama                         | Rakor/Pertem<br>uan per tahun | 2                         | 2                                             |          | 2      |          | 2      |          | 2      |          | 2      |          | 2      |          | 2                               |          |         |
|    | Pendidikan Politik<br>Masyarakat                                             | Peningkatan capaian indikator<br>demokrasi Indonesia (IDI)                 | %                             | 64.61                     | 65.22                                         | 1,348    | 65.84  | 1,367    | 66.46  | 1,474    | 67,07  | 1,615    | 67,69  | 1,771    | 68,31  | 1,938    | 68,31                           | 1,938    |         |



| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS         | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                | SATUAN | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                |                                                               |        |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                                |                                                               |        |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    | Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)          | Menurunnya kasus penyakit masyarakat                          | %      | -                         | 50                                            | 200      | 50     | 203      | 50     | 219      | 60     | 240      | 70     | 263      | 70     | 288      | 70                              | 288      |         |
|    |                                                                | Pemahaman aparat dan pihak terkait terhadap perbuatan maksiat |        |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |
|    | Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba | Pemahaman aparat dan pihak terkait terhadap bahaya narkoba    | %      | -                         | -                                             | -        | 50     | 107      | 50     | 118      | 50     | 122      | 70     | 125      | 70     | 136      | 70                              | 136      |         |
|    |                                                                |                                                               |        |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                       | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                                                                       | SATUAN              | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                              |                                                                                                                      |                     |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                                              |                                                                                                                      |                     |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    | SATPOL PP                                                                    |                                                                                                                      |                     |                           |                                               | 6,262    |        | 6,561    |        | 7,026    |        | 7,602    |        | 8,228    |        | 8,908    |                                 | 8,908    |         |
|    | URUSAN<br>KETENTERAMAN,<br>KETERTIBAN UMUM DAN<br>PERLINDUNGAN<br>MASYARAKAT |                                                                                                                      |                     |                           |                                               | 6,262    |        | 6,561    |        | 7,026    |        | 7,602    |        | 8,228    |        | 8,908    |                                 | 8,908    |         |
|    | Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran                                        | Persentase pelayanan<br>administrasi perkantoran                                                                     | %                   |                           | 100                                           | 1,735    | 100    | 1,822    | 100    | 1,913    | 100    | 2,008    | 100    | 2,109    | 100    | 2,214    | 100                             | 2,214    |         |
|    | Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Aparatur                                 | Persentase berfungsi<br>sarana dan prasarana<br>aparatur                                                             | %                   |                           | 100                                           | 388      | 100    | 408      | 100    | 428      | 100    | 449      | 100    | 472      | 100    | 495      | 100                             | 495      |         |
|    |                                                                              | Kepatuhan pelaksanan UU<br>pelayanan publik (zona hijau)                                                             | Zona                |                           | hijau                                         |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                           |          |         |
|    | Peningkatan Disiplin<br>Aparatur                                             | Persentase disiplin aparat<br>dalam berpakaian dinas                                                                 | %                   |                           | 100                                           | 376      | 100    | 394      | 100    | 414      | 100    | 435      | 100    | 457      | 100    | 479      | 100                             | 479      |         |
|    | Peningkatan Kapasitas<br>Sumber Daya Aparatur                                | Rata-rata lamanya PNS<br>mengikuti diklat                                                                            | JPL/orang/<br>tahun |                           | 10                                            | 72       | 15     | 75       | 20     | 79       | 30     | 83       | 40     | 87       | 50     | 92       | 50                              | 92       |         |
|    | Peningkatan Pengembangan<br>Sistem Pelaporan Capaian<br>Kinerja dan Keuangan | Tingkat kesesuaian pelaporan<br>capaian kinerja pada unit<br>kinerja SKPD                                            | %                   |                           | 100                                           | 310      | 100    | 326      | 100    | 342      | 100    | 359      | 100    | 377      | 100    | 396      | 100                             | 396      |         |
|    |                                                                              | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                                                                            | predikat            |                           | BB                                            |          | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A      |          | A                               |          |         |
|    |                                                                              | Tingkat akurasi, kecepatan<br>dan kecermatan dalam<br>pengelolaan keuangan                                           | %                   |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                              | Persentase kesesuaian<br>usulan Renja dengan Renstra<br>SKPD                                                         | %                   |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                              | Persentase kesesuaian<br>usulan Renja dengan RPJMD                                                                   | %                   |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    | Pencegahan dan<br>Pemberantasan Maksiat                                      | Persentase kabupaten/kota<br>yang dapat difasilitasi untuk<br>operasi gabungan<br>pemberantasan maksiat              | Kasus               |                           | 60                                            | 207      | 70     | 197      | 70     | 215      | 90     | 238      | 90     | 266      | 100    | 292      | 100                             | 292      |         |
|    | Peningkatan Perlindungan<br>Masyarakat                                       | Rasio jumlah satuan linmas<br>per RT atau sebutan lainnya                                                            | Rasio               | 19                        | 0.3                                           | 279      | 0.35   | 266      | 0.4    | 290      | 0.45   | 321      | 0.5    | 358      | 0.55   | 393      | 0.55                            | 393      |         |
|    | Pemeliharaan Ketertiban<br>Umum dan Ketentrman<br>Masyarakat                 | Persentase kabupaten/kota<br>yang dapat difasilitasi dalam<br>patroli ketertiban umum dan<br>ketenteraman masyarakat | %                   | 19                        | 60                                            | 2,665    | 70     | 2,542    | 70     | 2,767    | 90     | 3,067    | 90     | 3,420    | 100    | 3,759    | 100                             | 3,759    |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS       | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                       | SATUAN | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                              |                                                                      |        |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                              |                                                                      |        |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    | Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS | Persentase kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan           | %      |                           | 50                                            | 230      | 60     | 220      | 70     | 239      | 80     | 266      | 90     | 296      | 90     | 326      | 90                              | 326      |         |
|    | Program Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur       | Persentase diklat aparatur yang dapat diselenggarakan sesuai rencana |        |                           |                                               |          | 100    | 312      | 100    | 339      | 100    | 376      | 100    | 387      | 100    | 461      | 100                             | 461      |         |
|    |                                                              |                                                                      |        |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                                                               | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                                          | SATUAN           | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                                                                      |                                                                                         |                  |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                                                                                      |                                                                                         |                  |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    | DINAS SOSIAL                                                                                                         |                                                                                         |                  |                           |                                               | 32,990   |        | 34,568   |        | 37,018   |        | 40,051   |        | 43,349   |        | 46,933   |                                 | 46,933   |         |
|    | URUSAN SOSIAL                                                                                                        |                                                                                         |                  |                           |                                               | 32,990   |        | 34,568   |        | 37,018   |        | 40,051   |        | 43,349   |        | 46,933   |                                 | 46,933   |         |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                   | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                                           | %                | 60                        | 100                                           | 4,781    | 100    | 5,020    | 100    | 5,271    | 100    | 5,534    | 100    | 5,811    | 100    | 6,102    | 100                             | 6,102    |         |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                                            | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur                                   | %                | 5                         | 100                                           | 6,939    | 100    | 7,286    | 100    | 7,651    | 100    | 8,033    | 100    | 8,435    | 100    | 8,857    | 100                             | 8,857    |         |
|    |                                                                                                                      | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)                                  | zona             |                           | hijau                                         |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                           |          |         |
|    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                                                                        | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas                                     | %                | 5                         | 100                                           | 137      | 100    | 144      | 100    | 151      | 100    | 159      | 100    | 167      | 100    | 175      | 100                             | 175      |         |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                                           | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                                                  | JPL/orang/ tahun | 5                         | 10                                            | 18       | 15     | 19       | 20     | 20       | 30     | 21       | 40     | 22       | 50     | 23       | 50                              | 23       |         |
|    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                                       | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD                     | %                | 5                         | 100                                           | 629      | 100    | 660      | 100    | 693      | 100    | 728      | 100    | 764      | 100    | 802      | 100                             | 802      |         |
|    |                                                                                                                      | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                                               | predikat         |                           | BB                                            |          | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A      |          | A                               |          |         |
|    |                                                                                                                      | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan                    | %                |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                                                                      | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD                                  | %                |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                                                                      | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                                         | %                |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    | Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, dan Penyakit Sosial Lainnya)           | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Wanita Tuna Susila) yang mendapatkan pembinaan | orang            | 40                        | 40                                            | 987      | 40     | 1,035    | 40     | 1,115    | 40     | 1,232    | 40     | 1,361    | 40     | 1,500    | 240                             | 1,500    |         |
|    | Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberdayakan :                      | Orang            | 6.000 (K)                 | 4,650                                         | 4,863    | 4500   | 4,037    | 4500   | 4,587    | 4500   | 5,102    | 4500   | 5,643    | 4500   | 6,208    | 4500                            | 6,208    |         |
|    |                                                                                                                      | - Komunitas Adat Terpencil                                                              | Orang            | 30                        | 30                                            |          | 30     |          | 35     |          | 40     |          | 45     |          | 50     |          | 230                             |          |         |
|    |                                                                                                                      | - Anak Panti (bantuan beras)                                                            | Orang            | 4400                      | 4,400                                         |          | 4400   |          | 4400   |          | 4400   |          | 4400   |          | 4400   |          | 26,400                          |          |         |
|    |                                                                                                                      | - Kredit Usaha Bersama (KUBE)                                                           | Kelompok         | 0                         | 0                                             |          | 10     |          | 30     |          | 40     |          | 50     |          | 60     |          | 60                              |          |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS               | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                                                          | SATUAN       | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                      |                                                                                                         |              |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                                      |                                                                                                         |              |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    |                                                                      | - Wanita Rawan Sosial<br>Ekonomi                                                                        | Orang        | 200                       | 200                                           |          | 300    |          | 300    |          | 300    |          | 300    |          | 300    |          | 300                             |          |         |
|    | Pemberdayaan<br>Kelembagaan Kesejahteraan<br>Sosial                  | Lembaga sosial yang<br>terareditasi                                                                     | Lembaga      | 0                         | 10                                            | 2,145    | 10     | 2,249    | 10     | 2,422    | 15     | 2,678    | 15     | 2,956    | 20     | 3,259    | 20                              | 3,259    |         |
|    |                                                                      | Keterampilan PSKS                                                                                       | %            | 0                         | 5                                             |          | 5      |          | 10     |          | 15     |          | 20     |          | 25     |          | 25                              |          |         |
|    | Pelayanan dan Rehabilitasi<br>Kesejahteraan Sosial                   | Pelayanan penyangdang<br>masalah Kesejahteraan<br>Sosial (Disabilitas)                                  | %            | 100                       | 100                                           | 143      | 100    | 150      | 100    | 161      | 100    | 178      | 100    | 197      | 100    | 217      | 100                             | 217      |         |
|    | Pembinaan Anak Terlantar                                             | Pelayanan penyangdang<br>masalah Kesejahteraan<br>Sosial yang mendapat<br>keterampilan (anak terlantar) | Jumlah Panti | 2                         | 2                                             | 4,842    | 3      | 5,076    | 3      | 5,468    | 3      | 6,044    | 3      | 6,673    | 3      | 7,355    | 3                               | 7,355    |         |
|    | Pembinaan Para<br>Penyangdang Dissabilitas dan<br>Eks Trauma         | Pelayanan penyangdang<br>Disabilitas (Netra dan Grahita)                                                | Jumlah Panti | 2                         | 2                                             | 2,682    | 2      | 2,811    | 2      | 3,028    | 2      | 3,347    | 2      | 3,696    | 2      | 4,074    | 2                               | 4,074    |         |
|    |                                                                      |                                                                                                         | Orang        | 150                       | 150                                           |          | 150    |          | 150    |          | 150    |          | 150    |          | 150    |          | 150                             |          |         |
|    | Pembinaan Panti Asuhan /<br>Panti Lansia                             | Pelayanan Penyangdang<br>Masalah Kesejahteraan<br>Sosial (Lanjut Usia Terlantar)                        | Jumlah Panti | 2                         | 2                                             | 4,823    | 2      | 5,057    | 2      | 5,447    | 2      | 6,020    | 2      | 6,648    | 2      | 7,327    | 2                               | 7,327    |         |
|    |                                                                      | Pelayanan Penyangdang<br>Masalah Kesejahteraan<br>Sosial (Anak asuh yang<br>mendapat pendidikan)        | Orang        | 155                       | 155                                           |          | 155    |          | 155    |          | 155    |          | 155    |          | 155    |          | 155                             |          |         |
|    | Pencegahan, Penanganan<br>dan Rehabilitasi<br>Penyalahgunaan Narkoba | Penjangkauan Pengguna<br>Narkoba                                                                        | %            | 15.59                     | 15.59                                         |          | 16.59  | 69       | 16.59  | 65       | 16.59  | 64       | 16.59  | 62       | 16.59  | 60       | 16.59                           | 60       |         |
|    | Penanganan Korban<br>Bencana Alam dan Bencana<br>Sosial              | Persentase korban bencana<br>provinsi yang terlayani dalam<br>pemulihan trauma                          | %            | 75                        | 75                                            |          | 75     | 956      | 75%    | 938      | 75     | 911      | 75     | 914      | 75     | 976      | 75                              | 976      |         |
|    |                                                                      | Persentase penanganan<br>konflik sosial                                                                 | %            | 0                         | 0                                             |          | 35     |          | 40%    |          | 40     |          | 45     |          | 45     |          | 45                              |          |         |
|    |                                                                      |                                                                                                         |              |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                       | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                             | SATUAN              | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |        | CATATAN |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|--------|---------|
|    |                                                                              |                                                                            |                     |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |        |         |
|    |                                                                              |                                                                            |                     |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) |                                 |        |         |
|    | DINAS TENAGA KERJA<br>DAN TRANSMIGRASI                                       |                                                                            |                     |                           |                                               | 16,403   |        | 17,188   |        | 18,406   |        | 19,914   |        | 21,554   |        | 23,336   |                                 | 23,336 |         |
|    | URUSAN TENAGA KERJA                                                          |                                                                            |                     |                           |                                               | 16,403   |        | 17,188   |        | 18,406   |        | 19,914   |        | 21,554   |        | 23,336   |                                 | 23,336 |         |
|    | Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran                                        | Persentase pelayanan<br>administrasi perkantoran                           | %                   | 85                        | 100                                           | 2,554    | 100    | 2,682    | 100    | 2,816    | 100    | 2,957    | 100    | 3,104    | 100    | 3,260    | 100                             | 3,260  |         |
|    | Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Aparatur                                 | Persentase berfungsinya<br>sarana dan prasarana<br>aparatur                | %                   | 85                        | 100                                           | 4,492    | 100    | 4,716    | 100    | 4,952    | 100    | 5,200    | 100    | 5,459    | 100    | 5,732    | 100                             | 5,732  |         |
|    |                                                                              | Kepatuhan pelaksanaan UU<br>pelayanan publik (zona hijau)                  | zona                |                           | hijau                                         |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                           |        |         |
|    | Peningkatan Disiplin<br>Aparatur                                             | Persentase disiplin aparatur<br>dalam berpakaian dinas                     | %                   | 85                        | 100                                           | 133      | 100    | 140      | 100    | 147      | 100    | 154      | 100    | 162      | 100    | 170      | 100                             | 170    |         |
|    | Peningkatan Kapasitas<br>Sumber Daya Aparatur                                | Rata-rata lamanya PNS<br>mengikuti diklat                                  | JPL/orang/<br>tahun | 85                        | 10                                            | 13       | 15     | 14       | 20     | 15       | 30     | 16       | 40     | 16       | 50     | 17       | 50                              | 17     |         |
|    | Peningkatan Pengembangan<br>Sistem Pelaporan Capaian<br>Kinerja dan Keuangan | Tingkat kesesuaian pelaporan<br>capaian kinerja pada unit<br>kinerja SKPD  | %                   | 85                        | 100                                           | 611      | 100    | 642      | 100    | 674      | 100    | 708      | 100    | 743      | 100    | 780      | 100                             | 780    |         |
|    |                                                                              | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                                  | predikat            |                           | BB                                            |          | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A      |          | A                               |        |         |
|    |                                                                              | Tingkat akurasi, kecepatan<br>dan kecermatan dalam<br>pengelolaan keuangan | %                   |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |        |         |
|    |                                                                              | Persentase kesesuaian<br>usulan Renja dengan Renstra<br>SKPD               | %                   |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |        |         |
|    |                                                                              | Persentase kesesuaian<br>usulan Renja dengan RPJMD                         | %                   |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |        |         |
|    | Peningkatan Kualitas dan<br>Produktivitas Tenaga Kerja                       | Persentase tenaga kerja yang<br>berkompeten                                | %                   | 90.91                     | 66.15                                         | 5,384    | 68.46  | 3,678    | 70.39  | 4,279    | 73.73  | 4,760    | 75.56  | 5,331    | 77.4   | 5,875    | 77.4                            | 5,875  |         |
|    |                                                                              | Persentase Lembaga<br>Pelatihan Kerja (LPK)<br>Terakreditasi               | %                   | -                         | 11.36                                         |          | 12.00  |          | 24.00  |          | 31.00  |          | 27.00  |          | 36.00  |          | 36.00                           |        |         |
|    | Peningkatan Kesempatan<br>Kerja dan Diversifikasi Usaha                      | Persentase serapan tenaga<br>kerja sektor Formal                           | Orang               | 8.79                      | 17.43                                         | 1,030    | 19.04  | 1,556    | 19.17  | 1,593    | 19.32  | 1,772    | 19.46  | 1,985    | 19.61  | 2,187    | 19.61                           | 2,187  |         |
|    |                                                                              | Persentase serapan tenaga<br>kerja sektor In Formal                        | %                   | 55.71                     | 87.20                                         |          | 87.33  |          | 87.46  |          | 87.59  |          | 87.72  |          | 87.85  |          | 87.85                           |        |         |
|    | Perlindungan<br>Pengembangan Lembaga<br>Ketenagakerjaan                      | Persentase Penyelesaian<br>Kasus Perselisihan Hubungan<br>Industrial       | %                   | 14 kasus                  | 4.87                                          | 745      | 4.73   | 549      | 4.59   | 1,153    | 4.45   | 1,283    | 4.31   | 1,437    | 4.17   | 1,583    | 4.17                            | 1,583  |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                                          | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                                                                 | SATUAN     | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                                                 |                                                                                                                |            |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                                                                 |                                                                                                                |            |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    |                                                                                                 | Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan.                         | %          | 103.184<br>org            | 6.86                                          |          | 7.07   |          | 7.28   |          | 7.49   |          | 7.72   |          | 7.94   |          | 7.94                            |          |         |
|    | Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja                                    | Persentase kepatuhan perusahaan yang melakukan peraturan per undang-undangan ketenagakerjaan                   | %          | 25.29                     | 48.82                                         | 152      | 48.92  | 1,347    | 49.11  | 235      | 49.39  | 262      | 49.59  | 293      | 49.59  | 323      | 49.59                           | 323      |         |
|    | Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium                                       | Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana laboratorium                                                          | Unit       | -                         | -                                             | 415      | -      | -        | 14     | 358      | 10     | 374      | 6      | 402      | 5      | 412      | 35                              | 412      |         |
|    |                                                                                                 | Persentase terpenuhi-standarisasi sarana dan-prasarana laboratorium                                            | %          |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |
|    | Gerakan Terpadu Pensejahteraan Fakir Miskin                                                     | Persentase serapan tenaga kerja sektor informal                                                                | Orang      | 240                       | 240                                           | 72       | 240    | 564      | 250    | 657      | 260    | 731      | 275    | 719      | 285    | 901      | 1,550                           | 901      |         |
|    | Gerakan Terpadu Pariwista                                                                       | Jumlah tenaga kerja yang berkompeten                                                                           | Orang      | -                         | -                                             | -        | 32     | 292      | 32     | 340      | 48     | 378      | 48     | 423      | 48     | 466      | 208                             | 466      |         |
|    | Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal | Persentase kawasan transmigrasi yang memenuhi sarana dan prasaraa dan pengembangan masyarakat sesuai ketentuan | %          | 50                        | 75                                            | 650      | 80     | 830      | 60     | 953      | 60     | 1,060    | 60     | 1,187    | 60     | 1,308    | 60                              | 1,308    |         |
|    | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                        | Persentase retribusi perusahaan yang diperiksa                                                                 | Perusahaan | 40                        | 40                                            | 152      | 40     | 178      | 40     | 234      | 40     | 261      | 40     | 292      | 40     | 322      | 40                              | 322      |         |
|    |                                                                                                 |                                                                                                                |            |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                 | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                       | SATUAN           | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                        |                                                                      |                  |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                                        |                                                                      |                  |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB                                    |                                                                      |                  |                           |                                               | 1,898    |        | 4,589    |        | 4,823    |        | 5,218    |        | 5,648    |        | 6,115    |                                 | 6,115    |         |
|    | URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                    |                                                                      |                  |                           |                                               | 1,388    |        | 3,581    |        | 3,737    |        | 4,032    |        | 4,360    |        | 4,698    |                                 | 4,698    |         |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                        | %                |                           | 100                                           | 654      | 100    | 686      | 100    | 721      | 100    | 757      | 100    | 794      | 100    | 834      | 100                             | 834      |         |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Persentase fungsinya sarana dan prasarana aparatur                   | %                |                           | 100                                           | 176      | 100    | 185      | 100    | 194      | 100    | 204      | 100    | 214      | 100    | 224      | 100                             | 224      |         |
|    |                                                                        | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)               | zona             |                           | hijau                                         |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                           |          |         |
|    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas                  | %                |                           | 100                                           | 25       | 100    | 27       | 100    | 28       | 100    | 29       | 100    | 31       | 100    | 32       | 100                             | 32       |         |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                               | JPL/orang/ tahun |                           | 10                                            | 29       | 15     | 31       | 20     | 32       | 30     | 34       | 40     | 35       | 50     | 37       | 50                              | 37       |         |
|    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD  | %                |                           | 100                                           | 204      | 100    | 215      | 100    | 225      | 100    | 236      | 100    | 248      | 100    | 261      | 100                             | 261      |         |
|    |                                                                        | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                            | predikat         |                           | BB                                            |          | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A      |          | A                               |          |         |
|    |                                                                        | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan | %                |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                        | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD               | %                |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                        | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                      | %                |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    | Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan                                   | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                      | %                | 94,04                     |                                               | -        | 94,44  | 227      | 94,64  | 244      | 94,84  | 267      | 95,04  | 290      | 95,24  | 319      | 95,24                           | 319      |         |
|    |                                                                        | Indeks Pemberdayaann Gender                                          | %                | 61,86                     |                                               |          | 62,02  | 192      | 62,10  | 207      | 62,18  | 226      | 62,26  | 245      | 62,34  | 270      | 62,34                           | 270      |         |
|    |                                                                        | Persentase organisasi perempuan yang aktif                           | %                | 91,14                     |                                               |          | 94,93  | 157      | 96,20  | 169      | 97,46  | 185      | 98,73  | 200      | 100    | 221      | 100                             | 221      |         |
|    |                                                                        | Persentase SKPD yang menerapkan anggaran berbasis gender             | %                | 87,79                     |                                               |          | 91,83  | 122      | 93,87  | 131      | 95,91  | 144      | 97,95  | 156      | 100    | 172      | 100                             | 172      |         |



| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                                                          | SATUAN   | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |         |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|---------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                        |                                                                                                         |          |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018    |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                        |                                                                                                         |          |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target  | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    | Peningkatan perlindungan perempuan                     | Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun keatas ditingkat provinsi | Ratio    | 50                        |                                               |          | 48     | 401      | 47      | 432      | 46     | 472      | 45     | 512      | 44     | 564      | 44                              | 564      |         |
|    | Peningkatan Kualitas Keluarga                          | Persentase Penyediaan Layanan bagi keluarga mewujudkan KG dan Hak Anak                                  | %        | 50                        |                                               |          | 60     | 192      | 70      | 207      | 80     | 226      | 90     | 245      | 100    | 270      | 100                             | 270      |         |
|    | Peningkatan Sistem data Gender dan Anak                | Persentase SKPD yang memiliki data terpilah                                                             | %        | 50                        |                                               | -        | 91,83  | 192      | 93,87   | 206      | 95,91  | 226      | 97,95  | 245      | 100    | 270      | 100                             | 270      |         |
|    | Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak        | Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak di Tingkat Provinsi                     | Ratio    | 394                       | 392                                           | 300      | 390    | 85       | 388     |          | 386    |          | 384    |          | 382    |          | 382                             |          |         |
|    |                                                        | Persentase penurunan kasus-korban kekerasan terhadap anak-                                              | %        | 1,20                      | 1,15                                          |          |        |          |         |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |
|    |                                                        | Jumlah Kabupaten dan Kota Layak Anak                                                                    | Kab Kota | 6                         | 7                                             |          | 8      |          | 9       |          | 10     |          | 11     |          | 12     |          | 12                              |          |         |
|    |                                                        | Persentase Anak yang memiliki Akte Kelahiran                                                            | %        | 70,00                     | 75,50                                         |          |        |          |         |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |
|    | Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak   | Persentase Kabupaten dan Kota Layak Anak                                                                | %        | 31,57                     |                                               |          | 42,1   | 436      | 47,36   | 470      | 52,63  | 513      | 57,89  | 587      | 63,15  | 613      | 63,15                           | 613      |         |
|    | Peningkatan Perlindungan Khusus Anak                   | Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak di tingkat Provinsi                     | Ratio    | 394                       |                                               | -        | 390    | 436      | 388     | 470      | 386    | 513      | 384    | 557      | 382    | 613      | 382                             | 613      |         |
|    |                                                        |                                                                                                         |          |                           |                                               |          |        |          |         |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |
|    | URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA    |                                                                                                         |          |                           |                                               | 510      |        | 1,008    |         | 1,086    |        | 1,186    |        | 1,287    |        | 1,416    |                                 | 1,416    |         |
|    | Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi              | Persentase PIK Remaja yang dilatih                                                                      | %        | 60                        | 70                                            | 281      | 77     | 112      | 82      | 120      | 90     | 131      | 95     | 142      | 100    | 157      | 100                             | 157      |         |
|    |                                                        | ASFR (Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur) 15-19 tahun                                                | Ratio    | 23,40                     | 21,00                                         |          | 18,90  | 60       | 18,90   | 64       | 17,00  | 70       | 13,60  | 76       | 11,90  | 84       | 11,90                           | 84       |         |
|    |                                                        | Kehamilan yang tidak diinginkan                                                                         | %        | 13,9                      | 12,4                                          |          | 11,00  | 79       | 11,00   | 86       | 9,70   | 94       | 7,30   | 101      | 6,10   | 112      | 6,10                            | 112      |         |
|    | Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak                   | Persentase Ibu, Bayi dan Anak yang Terlayani                                                            | %        | 60                        | 70                                            | 229      | 77     | 91       | 82      | 98       | 90     | 107      | 95     | 116      | 100    | 128      | 100                             | 128      |         |
|    | Pelayanan Kontrasepsi                                  | Jumlah Akseptor KB                                                                                      | PUS      | 151,693                   |                                               |          | 151733 | 70       | 151,753 | 75       | 151773 | 82       | 151793 | 89       | 151813 | 98       | 151,813                         | 98       |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                  | SATUAN | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                        |                                                                 |        |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                        |                                                                 |        |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    |                                                        | CPR (Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi)                          | %      | 51,30                     | 52,5                                          |          | 53,90  | 79       | 53,90  | 86       | 55,40  | 94       | 58,60  | 101      | 60,20  | 112      | 60,20                           | 112      |         |
|    |                                                        | Umnet Need (Kebutuhan berKB)                                    | %      | 9,10                      | 8,3                                           |          | 7,60   | 60       | 7,60   | 64       | 7,00   | 70       | 6,20   | 76       | 5,80   | 84       | 5,80                            | 84       |         |
|    | Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga     | Persentase tersedianya tenaga pendamping kelompok bina keluarga | %      | 50                        |                                               |          | 70     | 70       | 80     | 75       | 90     | 82       | 95     | 89       | 100    | 98       | 100                             | 98       |         |
|    | Peningkatan Pengendalian Penduduk                      | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)                                 | %      | 1,25                      |                                               |          | 1,18   | 296      | 1,14   | 319      | 1,10   | 349      | 1,06   | 379      | 1,02   | 417      | 1,02                            | 417      |         |
|    |                                                        | Total Fertility Rate (TFR)                                      | %      | 2,70                      | 2,61                                          |          | 2,53   | 91       | 2,53   | 98       | 2,42   | 108      | 2,36   | 117      | 2,33   | 128      | 2,33                            | 128      |         |
|    |                                                        |                                                                 |        |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                       | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                                     | SATUAN              | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |        | CATATAN |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------------------------------|--------|---------|
|    |                                                                              | 2016                                                                               |                     |                           | 2017                                          |        | 2018     |        | 2019     |        | 2020     |        | 2021     |        |          |        |                                 |        |         |
|    |                                                                              | TAHUN 2017-2021                                                                    |                     |                           | TAHUN 2017-2021                               | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt)                        | Target |         |
|    | BADAN PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT                                             |                                                                                    |                     |                           |                                               | 18,219 |          | 19,091 |          | 20,444 |          | 22,119 |          | 23,941 |          | 25,920 |                                 | 25,920 |         |
|    | URUSAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN DESA                                |                                                                                    |                     |                           |                                               | 18,219 |          | 19,091 |          | 20,444 |          | 22,119 |          | 23,941 |          | 25,920 |                                 | 25,920 |         |
|    | Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran                                        | Persentase pelayanan<br>administrasi perkantoran                                   | %                   | 100                       | 100                                           | 1,619  | 100      | 1,700  | 100      | 1,785  | 100      | 1,874  | 100      | 1,968  | 100      | 2,067  | 100                             | 2,067  |         |
|    | Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Aparatur                                 | Persentase berfungsi<br>sarana dan prasarana<br>aparatur                           | %                   | 100                       | 100                                           | 1,568  | 100      | 1,647  | 100      | 1,729  | 100      | 1,816  | 100      | 1,906  | 100      | 2,002  | 100                             | 2,002  |         |
|    |                                                                              | Kepatuhan pelaksanaan UU<br>pelayanan publik (zona hijau)                          | Zona                |                           | hijau                                         |        | hijau    |        | hijau    |        | hijau    |        | hijau    |        | hijau    |        | hijau                           |        |         |
|    | Peningkatan Disiplin<br>Aparatur                                             | Persentase disiplin aparatur<br>dalam berpakaian dinas                             | %                   | 100                       | 100                                           | 31     | 100      | 32     | 100      | 34     | 100      | 36     | 100      | 37     | 100      | 39     | 100                             | 39     |         |
|    | Peningkatan Kapasitas<br>Sumber Daya Aparatur                                | Rata-rata lamanya PNS<br>mengikuti diklat                                          | JPL/orang/<br>tahun |                           | 10                                            | 45     | 15       | 47     | 20       | 50     | 30       | 52     | 40       | 55     | 50       | 57     | 50                              | 57     |         |
|    | Peningkatan Pengembangan<br>Sistem Pelaporan Capaian<br>Kinerja dan Keuangan | Tingkat kesesuaian pelaporan<br>capaian kinerja pada unit<br>kinerja SKPD          | %                   | 100                       | 100                                           | 279    | 100      | 293    | 100      | 308    | 100      | 323    | 100      | 339    | 100      | 356    | 100                             | 356    |         |
|    |                                                                              | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                                          | Predikat            |                           | BB                                            |        | BB       |        | BB       |        | A        |        | A        |        | A        |        | A                               |        |         |
|    |                                                                              | Tingkat akurasi, kecepatan<br>dan kecermatan dalam<br>pengelolaan keuangan         | %                   | 100                       | 100                                           |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100                             |        |         |
|    |                                                                              | Persentase kesesuaian<br>usulan Renja dengan Renstra<br>SKPD                       | %                   | 100                       | 100                                           |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100                             |        |         |
|    |                                                                              | Persentase kesesuaian<br>usulan Renja dengan RPJMD                                 | %                   | 100                       | 100                                           |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100                             |        |         |
|    | Penanggulangan Kemiskinan                                                    | Tingkat Kemiskinan di<br>Sumatea Barat                                             | %                   | 6.71                      | 6.43                                          | 1,797  | 6.15     | 1,882  | 5.87     | 2,025  | 5.59     | 2,206  | 5.31     | 2,404  | 5.69     | 2,620  | 5.69                            | 2,620  |         |
|    | Peningkatan Keberdayaan<br>Masyarakat Perdesaan /<br>Nagari                  | Jumlah Desa mandiri                                                                | Kab                 | 7                         | 13                                            | 4,659  | 25       | 4,879  | 37       | 5,249  | 49       | 5,719  | 61       | 6,232  | 73       | 6,792  | 85                              | 6,792  |         |
|    | Peningkatan Kesempatan<br>Kerja dan Diversifikasi Usaha                      | Persentase Usaha Mikro dan<br>Kecil Aktif.                                         | %                   | 35                        | 40                                            | 265    | 45       | 278    | 50       | 299    | 55       | 326    | 60       | 355    | 65       | 387    | 65                              | 387    |         |
|    |                                                                              | Badan Usaha Milik Desa/<br>Nagari yang terbentuk di<br>Sumatera Barat. (Kumulatif) | Unit                | 166                       | 308                                           |        | 450      |        | 592      |        | 734      |        | 876      |        | 880      |        | 880                             |        |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS        | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                                            | SATUAN | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                               |                                                                                           |        |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                               |                                                                                           |        |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    | Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya             | Persentase Kelembagaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang Aktif.                            | %      | NA                        | 35                                            | 1,350    | 40     | 1,414    | 45     | 1,521    | 50     | 1,657    | 55     | 1,806    | 60     | 1,968    | 60                              | 1,968    |         |
|    | Pengembangan Teknologi Tepat Guna                             | Jenis Inovasi Teknologi Tepat Guna yang di Adopsi dan dimanfaatkan Masyarakat.            | Jenis  | 5                         | 60                                            | 870      | 65     | 911      | 70     | 980      | 75     | 1,068    | 80     | 1,164    | 85     | 1,268    | 85                              | 1,268    |         |
|    |                                                               | Persentase Posyantek di Sumatera Barat                                                    | Unit   | 31                        | 15                                            |          | 30     |          | 45     |          | 60     |          | 75     |          | 90     |          | 90                              |          |         |
|    | Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Persentase LPM yang Kelembagaannya kuat.                                                  | Unit   | NA                        | 60                                            | 5,736    | 65     | 6,008    | 70     | 6,464    | 75     | 7,042    | 80     | 7,674    | 85     | 8,363    | 85                              | 8,363    |         |
|    |                                                               | Persentase Paripisipi masyarakat dalam bulan bhakti Gotong royong masyarakat di Perdesaan | %      | NA                        | 70                                            |          | 75     |          | 80     |          | 85     |          | 90     |          | 95     |          | 95                              |          |         |
|    |                                                               |                                                                                           |        |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                                                       | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                                            | SATUAN                    | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                                                              |                                                                                           |                           |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                                                                              |                                                                                           |                           |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    | BIRO PEMERINTAHAN                                                                                            |                                                                                           |                           |                           |                                               | 7,663    |        | 8,030    |        | 8,599    |        | 9,303    |        | 10,069   |        | 10,902   |                                 | 10,902   |         |
|    | URUSAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT                                                                         |                                                                                           |                           |                           |                                               | 1,655    |        | 1,539    |        | 1,641    |        | 1,776    |        | 1,898    |        | 2,095    |                                 | 2,095    |         |
|    | Penguatan Kelembagaan<br>Pemerintahan Nagari                                                                 | SOTK Pem. Nagari/Desa<br>sesuai Permendagri 84 Tahun<br>2015                              | Nagari/Desa               | NA                        | NA                                            | 425      | 40     | 395      | 80     | 421      | 120    | 456      | 140    | 487      | 160    | 538      | 160                             | 538      |         |
|    |                                                                                                              | Produk Hukum Nagari sesuai<br>Permendagri 111 Tahun 2015                                  | Nagari/Desa               | NA                        | NA                                            |          | 40     |          | 80     |          | 120    |          | 140    |          | 160    |          | 160                             |          |         |
|    |                                                                                                              | Nagari/Desa Definitif                                                                     | Nagari/Desa               | 880                       | 880                                           |          | 928    |          | 948    |          | 998    |          | 1,068  |          | 1,122  |          | 1,122                           |          |         |
|    |                                                                                                              | Pem Nagari/Desa Tertib Aset<br>sesuai Permendagri 1 tahun<br>2016                         | Nagari/Desa               | NA                        | NA                                            |          | 40     |          | 80     |          | 120    |          | 140    |          | 160    |          | 160                             |          |         |
|    | Peningkatan Kapasitas<br>Aparatur Pemerintahan<br>Nagari                                                     | Persentase Kepuasan Wali<br>Nagari/Kepala Desa terhadap<br>kinerja perangkat              | %                         | NA                        | NA                                            | 1,230    | 65     | 1,144    | 70     | 1,220    | 75     | 1,320    | 80     | 1,411    | 85     | 1,557    | 85                              | 1,557    |         |
|    |                                                                                                              | Persentase pemahaman<br>aparatur terhadap Tupokis<br>masing-masing Lembaga<br>Nagari/Desa | %                         | NA                        | NA                                            |          | 65     |          | 70     |          | 75     |          | 80     |          | 85     |          | 85                              |          |         |
|    |                                                                                                              | Kompetensi Wali<br>Nagari/Kepala Desa dan<br>Lurah sesuai Pergub 13<br>tahun 2016         | Nagari/Desa/<br>Kelurahan | 19                        | 38                                            |          | 57     |          | 76     |          | 95     |          | 114    |          | 133    |          | 133                             |          |         |
|    |                                                                                                              |                                                                                           |                           |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |
|    | FUNGSI LAINNYA :<br>OTONOMI DAERAH, PEM.<br>UMUM, ADM. KEU. DA,<br>PERANGKAT DAERAH,<br>KEPEG DAN PERSANDIAN |                                                                                           |                           |                           |                                               | 6,008    |        | 6,491    |        | 6,958    |        | 7,528    |        | 8,171    |        | 8,807    |                                 | 8,807    |         |
|    | Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran                                                                        | Persentase pelayanan<br>administrasi perkantoran                                          | %                         | 12                        | 100                                           | 489      | 100    | 513      | 100    | 539      | 100    | 566      | 100    | 594      | 100    | 624      | 100                             | 624      |         |
|    | Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Aparatur                                                                 | Persentase berfungsinya<br>sarana dan prasarana<br>aparatur                               | %                         |                           | 100                                           | 112      | 100    | 117      | 100    | 123      | 100    | 129      | 100    | 136      | 100    | 142      | 100                             | 142      |         |
|    |                                                                                                              | Kepatuhan pelaksanaan UU<br>pelayanan publik (zona hijau)                                 | Zona                      |                           | hijau                                         |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                           |          |         |
|    | Peningkatan Kapasitas<br>Sumber Daya Aparatur                                                                | Persentase disiplin aparatur<br>dalam berpakaian dinas                                    | JPL/orang/<br>tahun       |                           | 10                                            | 46       | 15     | 48       | 20     | 51       | 30     | 53       | 40     | 56       | 50     | 59       | 50                              | 59       |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                 | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                                                                           | SATUAN    | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                        |                                                                                                                          |           |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                                        |                                                                                                                          |           |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD                                                      | %         |                           | 100                                           | 90       | 100    | 94       | 100    | 99       | 100    | 104      | 100    | 109      | 100    | 114      | 100                             | 114      |         |
|    |                                                                        | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                                                                                | Predikat  |                           | BB                                            |          | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A      |          | A                               |          |         |
|    |                                                                        | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan                                                     | %         |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                        | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD                                                                   | %         |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                        | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                                                                          | %         |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    | Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah                           | Segmen Batas Daerah yang diusulkan penegasannya                                                                          | Segmen    | 6                         | 6                                             | 684      | 6      | 635      | 6      | 678      | 6      | 733      | 6      | 784      | 4      | 865      | 34                              | 865      |         |
|    |                                                                        | Nama Rupa Bumi yang diusulkan pembakuannya                                                                               | buku      | 1                         | 1                                             |          | 1      |          | 1      |          | 1      |          | 1      |          | 1      |          | 6                               |          |         |
|    | Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik                                | Pelaksanaan Pelayanan Publik sesuai SOP                                                                                  | %         | NA                        | 70                                            | 50       | 75     | 46       | 78     | 50       | 80     | 54       | 83     | 57       | 85     | 63       | 85                              | 63       |         |
|    | Kerjasama Pembangunan                                                  | MoU/perjanjian kerjasama pembangunan antar lembaga pemerintahan, swasta dan organisasi berbadan hukum                    | Kerjasama | 20                        | 25                                            | 140      | 25     | 130      | 30     | 139      | 30     | 150      | 30     | 161      | 30     | 177      | 170                             | 177      |         |
|    | Pengelolaan Otonomi Daerah                                             | Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD)                                                             | Skor 0-4  | 2.46                      | 2.46                                          | 1,722    | 2.6    | 1,600    | 2.7    | 1,707    | 2.8    | 1,847    | 2.9    | 1,974    | 3      | 2,179    | 3                               | 2,179    |         |
|    | Koordinasi Pemerintahan                                                | Kebijakan Pemerintah dan Program Pembangunan antar Pemerintah dan Pemerintah daerah serta Intansi Vertikal yang sinergis | %         | 75                        | 78                                            | 579      | 80     | 538      | 83     | 574      | 85     | 621      | 88     | 664      | 90     | 733      | 90                              | 733      |         |
|    | Penataan Administrasi Kependudukan                                     | Database kependudukan yang akurat                                                                                        | Kab/Kota  | 19                        | -                                             | 661      | 19     | 1,431    | 19     | 1,574    | 19     | 1,728    | 19     | 1,988    | 19     | 2,030    | 19                              | 2,030    |         |
|    |                                                                        | Kepemilikan Akte pencatatan sipil (Usia 0 - 18 tahun)                                                                    | %         | 75                        | 78                                            |          | 80     |          | 83     |          | 85     |          | 88     |          | 90     |          | 90                              |          |         |
|    | Pengelolaan Pertanahan                                                 | Permasalahan tanah yang difasilitasi                                                                                     | %         | 80                        | 80                                            | 1,180    | 80     | 1,097    | 80     | 1,170    | 80     | 1,266    | 80     | 1,353    | 80     | 1,494    | 80                              | 1,494    |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                                                               | SATUAN               | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                        |                                                                                                              |                      |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                        |                                                                                                              |                      |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    | Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban                  | Angka kriminalitas                                                                                           | % Rata-rata kenaikan | 4                         | 6.77                                          | 258      | 6.77   | 239      | 6.77   | 255      | 6.77   | 276      | 6.77   | 295      | < 6,77 | 326      |                                 | 326      |         |
|    |                                                        | Penanganan tranrib, rabies, penyakit menular yang sesuai standar, terkoordinir dan terpadu di Sumatera Barat | %                    | 50                        | 80                                            |          | 80     |          | 80     |          | 85     |          | 90     |          | 95     |          | 95                              |          |         |
|    |                                                        |                                                                                                              |                      |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |
|    |                                                        |                                                                                                              |                      |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                                                       | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                             | SATUAN              | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                                                              |                                                                            |                     |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                                                                              |                                                                            |                     |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    | BIRO HUMAS                                                                                                   |                                                                            |                     |                           |                                               | 7,051    |        | 9,579    |        | 10,258   |        | 11,099   |        | 12,013   |        | 13,006   |                                 | 13,006   |         |
|    | URUSAN KOMUNIKASI<br>DAN INFORMATIKA                                                                         |                                                                            |                     |                           |                                               | 5,317    |        | 7,759    |        | 8,347    |        | 9,092    |        | 9,905    |        | 10,793   |                                 | 10,793   |         |
|    | Penyebarluasan Informasi<br>penyelenggaraan<br>Pemerintah Daerah                                             | Peringkat produktifitas<br>pemberitaan Provinsi<br>Sumatera Barat          | Ranking             | 60 (k)                    |                                               | 2,033    | 15     | 2,129    | 13     | 2,291    | 11     | 2,495    | 9      | 2,718    | 7      | 2,962    | 7                               | 2,962    |         |
|    |                                                                                                              |                                                                            |                     |                           | 100%                                          |          | 900    |          | 1050   |          | 1200   |          | 1350   |          | 1500   |          |                                 |          |         |
|    |                                                                                                              |                                                                            |                     |                           | 125                                           |          | 0.03   |          | 0.02   |          | 0.018  |          | 0.015  |          | 0.012  |          |                                 |          |         |
|    |                                                                                                              |                                                                            |                     |                           | 38                                            |          | 80-20  |          | 80-20  |          | 80-20  |          | 80-20  |          | 80-20  |          |                                 |          |         |
|    |                                                                                                              |                                                                            |                     |                           | 100                                           |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |
|    |                                                                                                              |                                                                            |                     |                           | 4                                             |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |
|    |                                                                                                              |                                                                            |                     |                           | 44                                            |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |
|    | Informasi dan Komunikasi<br>Publik                                                                           | Indeks Keterbukaan Informasi<br>Publik                                     | Indeks              | 46.97                     | 55                                            | 821      | 60     | 860      | 65     | 925      | 70     | 1,007    | 75     | 1,098    | 80     | 1,196    | 80                              | 1,196    |         |
|    | Pengelolaan e-Government<br>Provinsi Sumatera Barat                                                          | Indeks e-Government<br>Indonesia                                           | Indeks              | 2.01                      | 2.2                                           | 2,463    | 2.4    | 4,770    | 2.6    | 5,131    | 2.8    | 5,589    | 2.9    | 6,089    | 3      | 6,635    | 3                               | 6,635    |         |
|    |                                                                                                              |                                                                            |                     |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |
|    | FUNGSI LAINNYA :<br>OTONOMI DAERAH, PEM.<br>UMUM, ADM. KEU. DA,<br>PERANGKAT DAERAH,<br>KEPEG DAN PERSANDIAN |                                                                            |                     |                           |                                               | 1,734    |        | 1,820    |        | 1,912    |        | 2,007    |        | 2,107    |        | 2,213    |                                 | 2,213    |         |
|    | Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran                                                                        | Persentase pelayanan<br>administrasi perkantoran                           | %                   |                           | 100                                           | 1,306    | 100    | 1,372    | 100    | 1,440    | 100    | 1,512    | 100    | 1,588    | 100    | 1,667    | 100                             | 1,667    |         |
|    | Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Aparatur                                                                 | Persentase berfungsinya<br>sarana dan prasarana<br>aparatur                | %                   |                           | 100                                           | 251      | 100    | 264      | 100    | 277      | 100    | 291      | 100    | 305      | 100    | 320      | 100                             | 320      |         |
|    |                                                                                                              | Kepatuhan pelaksanaan UU<br>pelayanan publik (zona hijau)                  | Zona                |                           | hijau                                         |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                           |          |         |
|    | Pembinaan dan<br>Pengembangan Aparatur                                                                       | Persentase disiplin aparatur<br>dalam berpakaian dinas                     | %                   |                           | 100                                           | 69       | 100    | 72       | 100    | 76       | 100    | 79       | 100    | 83       | 100    | 87       | 100                             | 87       |         |
|    | Peningkatan Kapasitas<br>Sumber Daya Aparatur                                                                | Rata-rata lamanya PNS<br>mengikuti diklat                                  | JPL/orang/<br>tahun |                           | 10                                            | 17       | 15     | 18       | 20     | 19       | 30     | 20       | 40     | 21       | 50     | 22       | 50                              | 22       |         |
|    | Peningkatan Pengembangan<br>Sistem Pelaporan Capaian<br>Kinerja dan Keuangan                                 | Tingkat kesesuaian pelaporan<br>capaian kinerja pada unit<br>kinerja SKPD  | %                   |                           | 100                                           | 91       | 100    | 95       | 100    | 100      | 100    | 105      | 100    | 110      | 100    | 116      | 100                             | 116      |         |
|    |                                                                                                              | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                                  | predikat            |                           | BB                                            |          | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A      |          | A                               |          |         |
|    |                                                                                                              | Tingkat akurasi, kecepatan<br>dan kecermatan dalam<br>pengelolaan keuangan | %                   |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |



| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                               | SATUAN | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |        | CATATAN |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------------------------------|--------|---------|
|    |                                                        |                                                              |        |                           | 2016                                          |        | 2017     |        | 2018     |        | 2019     |        | 2020     |        | 2021     |        |                                 |        |         |
|    |                                                        | TAHUN 2017-2021                                              |        |                           | TAHUN 2017-2021                               | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt)                        | Target |         |
|    |                                                        | Persentase kesesuaian<br>usulan Renja dengan Renstra<br>SKPD | %      |                           | 100                                           |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100                             |        |         |
|    |                                                        | Persentase kesesuaian<br>usulan Renja dengan RPJMD           | %      |                           | 100                                           |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100                             |        |         |
|    |                                                        |                                                              |        |                           |                                               |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |                                 |        |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                       | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                             | SATUAN              | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                              |                                                                            |                     |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                                              |                                                                            |                     |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    | DINAS PEMUDA DAN<br>OLAH RAGA                                                |                                                                            |                     |                           |                                               | 19,317   |        | 20,241   |        | 21,676   |        | 23,452   |        | 25,383   |        | 27,482   |                                 | 27,482   |         |
|    | URUSAN KEPEMUDAAN<br>DAN OLAH RAGA                                           |                                                                            |                     |                           |                                               | 19,317   |        | 20,241   |        | 21,676   |        | 23,452   |        | 25,383   |        | 27,482   |                                 | 27,482   |         |
|    | Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran                                        | Persentase pelayanan<br>administrasi perkantoran                           | %                   | 100                       | 100                                           | 2,195    | 100    | 2,305    | 100    | 2,420    | 100    | 2,541    | 100    | 2,668    | 100    | 2,801    | 100                             | 2,801    |         |
|    | Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Aparatur                                 | Persentase berfungsinya<br>sarana dan prasarana<br>aparatur                | %                   | 100                       | 100                                           | 880      | 100    | 924      | 100    | 970      | 100    | 1,019    | 100    | 1,070    | 100    | 1,123    | 100                             | 1,123    |         |
|    |                                                                              | Kepatuhan pelaksanaan UU<br>pelayanan publik (zona hijau)                  | Zona                |                           | hijau                                         |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                           |          |         |
|    | Peningkatan Disiplin<br>Aparatur                                             | Persentase disiplin aparatur<br>dalam berpakaian dinas                     | %                   | 100                       | 100                                           | 76       | 100    | 80       | 100    | 84       | 100    | 88       | 100    | 92       | 100    | 97       | 100                             | 97       |         |
|    | Peningkatan Kapasitas<br>Sumber Daya Aparatur                                | Rata-rata lamanya PNS<br>mengikuti diklat                                  | JPL/orang/<br>tahun | -                         | -                                             | -        | 6      | 80       | 8      | 84       | 10     | 88       | 12     | 93       | 14     | 97       | 14                              | 97       |         |
|    | Peningkatan Pengembangan<br>Sistem Pelaporan Capaian<br>Kinerja dan Keuangan | Tingkat kesesuaian pelaporan<br>capaian kinerja pada unit<br>kinerja SKPD  | %                   | 100                       | 100                                           | 452      | 100    | 475      | 100    | 498      | 100    | 523      | 100    | 549      | 100    | 577      | 100                             | 577      |         |
|    |                                                                              | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                                  | Predikat            |                           | BB                                            |          | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A      |          | A                               |          |         |
|    |                                                                              | Tingkat akurasi, kecepatan<br>dan kecermatan dalam<br>pengelolaan keuangan | %                   | 100                       | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                              | Persentase kesesuaian<br>usulan Renja dengan Renstra<br>SKPD               | %                   | 100                       | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                              | Persentase kesesuaian<br>usulan Renja dengan RPJMD                         | %                   | 100                       | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    | Pembinaan dan<br>Pemasyarakatan Olahraga                                     | Persentase Peningkatan<br>budaya masyarakat<br>melaksanakan olahraga       | %                   | 100                       | 20                                            | 7,891    | 40     | 9,321    | 60     | 10,808   | 80     | 9,682    | 90     | 11,645   | 100    | 12,502   | 100                             | 12,502   |         |
|    |                                                                              | Persentase jumlah atlet dan<br>pelatih yang berprestasi                    | %                   | 76                        | 76                                            |          | 79.45  |          | 81.66  |          | 83.73  |          | 84.27  |          | 90     |          | 90                              |          |         |
|    |                                                                              | Persentase peningkatan klub<br>olahraga                                    | %                   | -                         | -                                             |          | 38     |          | 40     |          | 42     |          | 42     |          | 42     |          | 42                              |          |         |
|    | Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Olahraga                                 | Persentase sarana olahraga<br>pada PPLP yang lengkap (15<br>cabor)         | %                   | 30                        | 30                                            | 3,044    | -      | 1,854    | 40     | 1,783    | 50     | 2,124    | 60     | 2,192    | 70     | 2,505    | 70                              | 2,505    |         |
|    |                                                                              | Persentase prasarana<br>olahraga pada PPLP (15<br>cabor)                   | %                   | 80                        | 80                                            |          | 80     |          | 86     |          | 93     |          | 93     |          | 100    |          | 100                             |          |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                                           | SATUAN        | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                        |                                                                                          |               |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                        |                                                                                          |               |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    |                                                        | Persentase sarana olahraga untuk persiapan PON Tahun 2024 (36 cabor)                     | %             | n/a                       | -                                             |          | -      |          | 20     |          | 40     |          | 50     |          | 60     |          | 60                              |          |         |
|    |                                                        | Persentase prasarana olahraga untuk persiapan PON Tahun 2024 (36 cabor)                  | %             | n/a                       | -                                             |          | -      |          | 20     |          | 40     |          | 50     |          | 60     |          | 60                              |          |         |
|    | Peningkatan Peran Serta Kepemudaan                     | Persentase jumlah pemuda yang berprestasi                                                | %             | 100                       | 20                                            | 2,669    | 40     | 2,746    | 60     | 2,642    | 80     | 2,722    | 90     | 2,629    | 100    | 2,823    | 100                             | 2,823    |         |
|    |                                                        | Organisasi kepemudaan yang aktif                                                         | %             | 10                        | 12                                            |          | 14     |          | 16     |          | 18     |          | 20     |          | 22     |          | 22                              |          |         |
|    |                                                        | Wirausaha muda                                                                           | Orang         | -                         | 36                                            |          | 40     |          | 45     |          | 50     |          | 55     |          | 60     |          | 60                              |          |         |
|    | Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Seni Budaya Pemuda | Persentase Pemuda Sumatera Barat yang memiliki Wawasan dan Kreatifitas Seni Budaya       | %             | 100                       | 20                                            | -        | 40     | 161      | 60     | 90       | 80     | 156      | 90     | 94       | 100    | 169      | 100                             | 169      |         |
|    | Peningkatan Penyadaran Kepemudaan                      | Peningkatan jumlah pemuda yang mandiri dan berkapasitas                                  | orang         | 550                       | 825                                           | 697      | 825    | 424      | 855    | 408      | 895    | 486      | 1,045  | 502      | 1,045  | 573      | 1,045                           | 573      |         |
|    | Pengembangan Organisasi Pemuda dan Manajemen Olahraga  | Peningkatan jumlah pemuda yang berkapasitas dalam organisasi kepemudaan dan keolahragaan | Orang         | 380                       | 120                                           | 1,063    | 240    | 1,659    | 560    | 1,682    | 890    | 3,779    | 1,310  | 3,596    | 1,480  | 3,926    | 1,480                           | 3,926    |         |
|    |                                                        | Peningkatan pembinaan jumlah olahragawan disabilitas.                                    | Keg/Org/ Lemb | 250                       | 300                                           |          | 300    |          | 300    |          | 450    |          | 400    |          | 450    |          | 450                             |          |         |
|    | Manajemen Layanan Teknis Lainnya                       | Peningkatan pembinaan jumlah olahragawan disabilitas.                                    | 19 Kab/Kota   |                           | 19                                            | 350      | 19     | 213      | 19     | 205      | 19     | 244      | 19     | 252      | 19     | 288      | 19                              | 288      |         |
|    |                                                        |                                                                                          |               |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS    | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)     | SATUAN                          | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                           |                                    |                                 |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                           |                                    |                                 |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | BADAN PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN                       |                                    |                                 |                           |                                               | 9,609    |        | 10,069   |        | 10,782   |        | 11,666   |        | 12,626   |        | 13,670   |                                 | 13,670   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | URUSAN PERPUSTAKAAN                                       |                                    |                                 |                           |                                               | 2,509    |        | 2,525    |        | 2,688    |        | 2,963    |        | 3,205    |        | 3,444    |                                 | 3,444    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Pengembangan Budaya<br>Baca dan Pembinaan<br>Perpustakaan | Jumlah koleksi perpustakaan        | Eksemplar                       | 13,000                    | 13,000                                        | 2,509    | 13,000 | 2,525    | 13,000 | 2,688    | 13,000 | 2,963    | 13,000 | 3,205    | 13,000 | 3,444    | 78,000                          | 3,444    | Badan Perpustakaan dan<br>Kearsipan Baru<br>mengemukakan rencana<br>program namun belum<br>mengemukakan rencana<br>kegiatan, indikator kinerja,<br>kelompok sasaran, dan<br>pendanaan indikatif<br>sebagaimana dihasilkan dari<br>C.1.12. (Perumusan rencana<br>program, kegiatan, indikator<br>kinerja, kelompok sasaran,<br>dan pendanaan indikatif).<br>Adapun penyajiannya<br>menggunakan Tabel 5.1<br>yang bersumber dari Tabel.T-<br>IV.C.28. Harap disesuaikan<br>dengan RPJMD Bab VIII<br>dalam pembuatan Program |
|    |                                                           | Kenaikan Kunjungan<br>perpustakaan | Rata-rata<br>kenaikan/<br>orang | 1,000                     | 1,000                                         |          | 1,000  |          | 1,000  |          | 1,000  |          | 1,000  |          | 1,000  |          | 1,000                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                           |                                    |                                 |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | URUSAN KEARSIPAN                                          |                                    |                                 |                           |                                               | 7,100    |        | 7,544    |        | 8,095    |        | 8,703    |        | 9,422    |        | 10,227   |                                 | 10,227   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                        | SATUAN | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                        |                                                       |        |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                                        |                                                       |        |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                     | Persentase pelayanan administrasi perkantoran         | %      |                           | 100                                           | 2,856    | 100    | 2,999    | 100    | 3,149    | 100    | 3,306    | 100    | 3,472    | 100    | 3,645    | 100                             | 3,645    | Badan Perpustakaan dan Kearsipan Baru mengemukakan rencana program namun belum mengemukakan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari C.1.12. (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 5.1 yang bersumber dari Tabel.T-IV.C.28. Harap sesuaikan dengan RPJMD Bab VIII dalam pembuatan Program |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur              | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur | %      |                           | 100                                           | 2,359    | 100    | 2,477    | 100    | 2,601    | 100    | 2,731    | 100    | 2,867    | 100    | 3,010    | 100                             | 3,010    | Badan Perpustakaan dan Kearsipan Baru mengemukakan rencana program namun belum mengemukakan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari C.1.12. (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 5.1 yang bersumber dari Tabel.T-IV.C.28. Harap sesuaikan dengan RPJMD Bab VIII dalam pembuatan Program |
|    |                                                        | Kepatuhan pelaksanan UU pelayanan publik (zona hijau) | Zona   |                           | hijau                                         |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                      | SATUAN          | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                        |                                                     |                 |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                                        |                                                     |                 |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Peningkatan Disiplin Aparatur                          | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas | %               |                           | 100                                           | 68       | 100    | 71       | 100    | 74       | 100    | 78       | 100    | 82       | 100    | 86       | 100                             | 86       | Badan Perpustakaan dan Kearsipan Baru mengemukakan rencana program namun belum mengemukakan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari C.1.12. (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 5.1 yang bersumber dari Tabel.T-IV.C.28. Harap sesuaikan dengan RPJMD Bab VIII dalam pembuatan Program |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur             | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat              | JPL/orang/tahun |                           | 10                                            | 231      | 15     | 242      | 20     | 254      | 30     | 267      | 40     | 280      | 50     | 294      | 50                              | 294      | Badan Perpustakaan dan Kearsipan Baru mengemukakan rencana program namun belum mengemukakan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari C.1.12. (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 5.1 yang bersumber dari Tabel.T-IV.C.28. Harap sesuaikan dengan RPJMD Bab VIII dalam pembuatan Program |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                 | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                       | SATUAN   | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                        |                                                                      |          |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                                                        |                                                                      |          |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD  | %        |                           | 100                                           | 650      | 100    | 683      | 100    | 717      | 100    | 752      | 100    | 790      | 100    | 830      | 100                             | 830      | Badan Perpustakaan dan Kearsipan Baru mengemukakan rencana program namun belum mengemukakan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari C.1.12. (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 5.1 yang bersumber dari Tabel.T-IV.C.28. Harap disesuaikan dengan RPJMD Bab VIII dalam pembuatan Program |
|    |                                                                        | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                            | Predikat |                           | BB                                            |          | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A      |          | A                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                                                        | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan | %        |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                                                        | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD               | %        |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                                                        | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                      | %        |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                         | SATUAN  | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                        |                                                        |         |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          |                                 |          |         | 2021   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                                        |                                                        |         |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         | Target | Rp. (Jt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan     | Peningkatan kualitas dan kuantitas khasanah kearsipan  | SKPD    | 42                        |                                               | 577      |        | 661      |        | 800      |        | 966      |        | 1,189    |                                 | 1,454    |         | 1,454  | Badan Perpustakaan dan Kearsipan Baru mengemukakan rencana program namun belum mengemukakan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari C.1.12. (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 5.1 yang bersumber dari Tabel.T-IV.C.28. Harap sesuaikan dengan RPJMD Bab VIII dalam pembuatan Program |
|    | Pelindungan dan Penyelamatan Arsip                     | Meningkatnya jumlah khasanah (daftar inventaris) arsip | dokumen | 20                        | 4                                             |          | 4      |          | 4      |          | 4      |          | 4      |          | 4                               |          | 44      |        | Badan Perpustakaan dan Kearsipan Baru mengemukakan rencana program namun belum mengemukakan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari C.1.12. (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 5.1 yang bersumber dari Tabel.T-IV.C.28. Harap sesuaikan dengan RPJMD Bab VIII dalam pembuatan Program |



| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                               | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome) | SATUAN                  | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                      |                                |                         |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                                                                      |                                |                         |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sistem Kearsipan | Tertib arsip                   | Jumlah SKPD (Kumulatif) | 8                         | 2                                             | 360      | 2      | 412      | 2      | 499      | 2      | 603      | 2      | 742      | 2      | 907      | 20                              | 907      | Badan Perpustakaan dan Kearsipan Baru mengemukakan rencana program namun belum mengemukakan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari C.1.12. (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 5.1 yang bersumber dari Tabel.T-IV.C.28. Harap sesuaikan dengan RPJMD Bab VIII dalam pembuatan Program |
|    |                                                                                      |                                |                         |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                                                      | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                           | SATUAN           | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                                                             |                                                                          |                  |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                                                                             |                                                                          |                  |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    | SETDA (BIRO ORGANISASI)                                                                                     |                                                                          |                  |                           |                                               | 3,824    |        | 4,007    |        | 4,291    |        | 4,642    |        | 5,025    |        | 5,440    |                                 | 5,440    |         |
|    | FUNGSI LAINNYA :<br>OTONOMI DAERAH, PEM.<br>UMUM, ADM. KEU_DA,<br>PERANGKAT DAERAH,<br>KEPEG DAN PERSANDIAN |                                                                          |                  |                           |                                               | 3,824    |        | 4,007    |        | 4,291    |        | 4,642    |        | 5,025    |        | 5,440    |                                 | 5,440    |         |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                          | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                            | %                |                           | 100                                           | 225      | 100    | 236      | 100    | 248      | 100    | 260      | 100    | 273      | 100    | 287      | 100                             | 287      |         |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                                   | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur                    | %                |                           | 100                                           | 97       | 100    | 101      | 100    | 106      | 100    | 112      | 100    | 117      | 100    | 123      | 100                             | 123      |         |
|    |                                                                                                             | persenartase kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)      | Zona             |                           | hijau                                         |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                           |          |         |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                                  | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                                   | JPL/orang/ tahun |                           | 10                                            | 15       | 15     | 16       | 20     | 17       | 30     | 18       | 40     | 18       | 50     | 19       | 50                              | 19       |         |
|    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                                      | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD      | %                |                           | 100                                           | 149      | 100    | 156      | 100    | 164      | 100    | 172      | 100    | 181      | 100    | 190      | 100                             | 190      |         |
|    |                                                                                                             | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                                | predikat         |                           | B                                             |          | B      |          | B      |          | B      |          | B      |          | BB     |          | BB                              |          |         |
|    |                                                                                                             | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan     | %                |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                                                             | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD                   | %                |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                                                             | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                          | %                |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    | Peningkatan Manajemen SDM Aparatur                                                                          | Persentase kesesuaian akurasi data PNS Setda dan Pemerintah Prov. Sumbar | %                |                           | 50                                            | 594      | 60     | 578      | 70     | 669      | 80     | 745      | 90     | 837      | 95     | 930      | 95                              | 930      |         |
|    |                                                                                                             | Persentase PNS yang dikembangkan karirnya di lingkungan Pemprov. Sumbar  | %                |                           | 40                                            |          | 50     |          | 60     |          | 70     |          | 80     |          | 90     |          | 90                              |          |         |
|    | Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan SKPD Provinsi Sumatera Barat                                 | Instansi Pemerintah yang Akutabel (Skor hasil evaluasi AKIP)             | Predikat         |                           | BB                                            | 485      | BB     | 472      | BB     | 546      | BB     | 609      | A      | 684      | A      | 760      | A                               | 760      |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                                                   | SATUAN     | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                        |                                                                                                  |            |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                        |                                                                                                  |            |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    |                                                        | Persentase SKPD yang telah mendapatkan nilai hasil evaluasi AKIP >=70                            | %          |                           | 70.00                                         |          | 70     |          | 75     |          | 75     |          | 80     |          | 80     |          | 80                              |          |         |
|    | Manajemen Perubahan                                    | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                       | Skor 1-100 |                           | 60-70                                         | 166      | 60-70  | 161      | 60-70  | 186      | 65-75  | 208      | 65-75  | 233      | 75-80  | 259      | 75-80                           | 259      |         |
|    | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                  | Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat (74 Unit kerja pelayanan publik)                            | %          | 70                        | 70.00                                         | 236      | 75     | 229      | 75     | 265      | 75     | 296      | 75     | 332      | 80     | 369      | 80                              | 369      |         |
|    |                                                        | Persentase Kepatuhan seluruh SKPD Provinsi terhadap Pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau) | %          | 100                       | 100.00                                        |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    | Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah             | Persentase SKPD yang menerapkan SOP secara baik                                                  | %          |                           | 8.16                                          | 358      | 10     | 348      | 12     | 403      | 12     | 449      | 15     | 504      | 15     | 560      | 15                              | 560      |         |
|    | Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah          | Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai urusan                                            | %          |                           | 50.00                                         | 1,501    | 60     | 1,708    | 70     | 1,686    | 80     | 1,775    | 90     | 1,844    | 100    | 1,942    | 100                             | 1,942    |         |
|    |                                                        | Persentase penurunan rincian tupoksi yang tumpang tindih                                         |            |                           | 30.00                                         |          | 25     |          | 20     |          | 15     |          | 5      |          | 0      |          | 0                               |          |         |
|    |                                                        | Persentase kab/kota yang besaran OPD-nya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku              |            |                           | 30.00                                         |          | 25     |          | 20     |          | 15     |          | 5      |          | 0      |          | 0                               |          |         |
|    |                                                        |                                                                                                  |            |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                                                      | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                                                                                                  | SATUAN              | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |        | CATATAN |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------------------------------|--------|---------|----------|
|    |                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                     |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |                                 |        |         |          |
|    |                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                     |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt)                        | Target |         | Rp. (Jt) |
|    | SETDA (BIRO HUKUM)                                                                                          |                                                                                                                                                 |                     |                           |                                               | 3,021    |        | 3,165    |        | 3,389    |        | 3,667    |        | 3,969    |        | 4,297                           |        | 4,297   |          |
|    | FUNGSI LAINNYA :<br>OTONOMI DAERAH, PEM.<br>UMUM, ADM. KEU_DA,<br>PERANGKAT DAERAH,<br>KEPEG DAN PERSANDIAN |                                                                                                                                                 |                     |                           |                                               | 3,021    |        | 3,165    |        | 3,389    |        | 3,667    |        | 3,969    |        | 4,297                           |        | 4,297   |          |
|    | Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran                                                                       | Persentase pelayanan<br>administrasi perkantoran                                                                                                | %                   |                           | 100                                           | 253      | 100    | 266      | 100    | 279      | 100    | 293      | 100    | 308      | 100    | 323                             | 100    | 323     |          |
|    | Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Aparatur                                                                | Persentase berfungsinya<br>sarana dan prasarana<br>aparatur                                                                                     | %                   |                           | 100                                           | 53       | 100    | 55       | 100    | 58       | 100    | 61       | 100    | 64       | 100    | 67                              | 100    | 67      |          |
|    |                                                                                                             | Kepatuhan pelaksanan UU<br>pelayanan publik (zona hijau)                                                                                        | Zona                |                           | hijau                                         |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |                                 | hijau  |         |          |
|    | Peningkatan Kapasitas<br>Sumber Daya Aparatur                                                               | Rata-rata lamanya PNS<br>mengikuti diklat                                                                                                       | JPL/orang/<br>tahun |                           | 10                                            | 56       | 15     | 59       | 20     | 62       | 30     | 65       | 40     | 68       | 50     | 71                              | 50     | 71      |          |
|    | Peningkatan Pengembangan<br>Sistem Pelaporan Capaian<br>Kinerja dan Keuangan                                | Tingkat kesesuaian pelaporan<br>capaian kinerja pada unit<br>kinerja SKPD                                                                       | %                   |                           | 100                                           | 111      | 100    | 117      | 100    | 123      | 100    | 129      | 100    | 135      | 100    | 142                             | 100    | 142     |          |
|    |                                                                                                             | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                                                                                                       | predikat            |                           | BB                                            |          | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A      |                                 | A      |         |          |
|    |                                                                                                             | Tingkat akurasi, kecepatan<br>dan kecermatan dalam<br>pengelolaan keuangan                                                                      | %                   |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |                                 | 100    |         |          |
|    |                                                                                                             | Persentase kesesuaian<br>usulan Renja dengan Renstra<br>SKPD                                                                                    | %                   |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |                                 | 100    |         |          |
|    |                                                                                                             | Persentase kesesuaian<br>usulan Renja dengan RPJMD                                                                                              | %                   |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |                                 | 100    |         |          |
|    | Pembangunan Materi<br>Hukum                                                                                 | Persentase produk hukum<br>provinsi yang sesuai dengan<br>peraturan perundang-<br>undangan dan tidak<br>bertentangan dengan<br>kepentingan umum | Jml Perda           | 21                        | 15                                            | 1,080    | 15     | 1,078    | 17     | 1,181    | 17     | 1,296    | 15     | 1,725    | 15     | 1,564                           | 15     | 1,564   |          |
|    | Peningkatan Budaya Hukum                                                                                    | Persentase peningkatan<br>budaya sadar dan taat hukum<br>di masyarakat                                                                          | %                   | 95                        | 50                                            | 48       | 50     | 41       | 50     | 42       | 50     | 43       | 50     | 53       | 50     | 48                              | 50     | 48      |          |
|    | Peningkatan Supremasi<br>Hukum dan Perlindungan<br>HAM                                                      | Jumlah perkara sengketa<br>hukum pemerintah provinsi<br>yang dapat ditangani                                                                    | Jumlah              | 95                        | 3                                             | 505      | 3      | 584      | 3      | 597      | 3      | 610      | 3      | 75       | 3      | 684                             | 18     | 684     |          |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                                                          | SATUAN | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                        |                                                                                                         |        |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                        |                                                                                                         |        |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    | Sarana dan Informasi Hukum                             | Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang dapat diakses pada perpustakaan dan portal website JDIH | %      | 45                        | 100                                           | 226      | 100    | 301      | 100    | 307      | 100    | 345      | 100    | 427      | 100    | 387      | 100                             | 387      |         |
|    | Peningkatan Penataan Perundang-undangan                | Persentase rekomendasi kajian materi/substansi Perda Kab/Kota yang ditindaklanjuti oleh Kab/Kota        | %      | 75                        | 80                                            | 688      | 80     | 665      | 85     | 740      | 85     | 825      | 90     | 1,114    | 90     | 1,010    | 90                              | 1,010    |         |
|    |                                                        |                                                                                                         |        |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                                                      | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                                                    | SATUAN              | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                                                             |                                                                                                   |                     |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                                                                             |                                                                                                   |                     |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    | SEKRETARIAT DPRD                                                                                            |                                                                                                   |                     |                           |                                               | 87,181   |        | 91,353   |        | 97,825   |        | 105,843  |        | 114,557  |        | 124,030  |                                 | 124,030  |         |
|    | FUNGSI LAINNYA :<br>OTONOMI DAERAH, PEM.<br>UMUM, ADM. KEU_DA,<br>PERANGKAT DAERAH,<br>KEPEG DAN PERSANDIAN |                                                                                                   |                     |                           |                                               | 87,181   |        | 91,353   |        | 97,825   |        | 105,843  |        | 114,557  |        | 124,030  |                                 | 124,030  |         |
|    | Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran                                                                       | Persentase pelayanan<br>administrasi perkantoran                                                  | %                   | 92,90                     | 100                                           | 14,293   | 100    | 15,007   | 100    | 15,758   | 100    | 16,546   | 100    | 17,373   | 100    | 18,241   |                                 | 18,241   |         |
|    | Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Aparatur                                                                | Persentase berfungsinya<br>sarana dan prasarana<br>aparatur                                       | %                   | 89,75                     | 100                                           | 27,882   | 100    | 29,276   | 100    | 30,740   | 100    | 32,277   | 100    | 33,891   | 100    | 35,585   | 100                             | 35,585   |         |
|    |                                                                                                             | Kepatuhan pelaksanaan UU<br>pelayanan publik (zona hijau)                                         | Zona                |                           | hijau                                         |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | 100                             |          |         |
|    | Peningkatan Disiplin<br>Aparatur                                                                            | Persentase disiplin aparatur<br>dalam berpakaian dinas                                            | %                   | 98,53                     | 100                                           | 763      | 100    | 801      | 100    | 841      | 100    | 884      | 100    | 928      | 100    | 974      | hijau                           | 974      |         |
|    | Peningkatan Kapasitas<br>Sumber Daya Aparatur                                                               | Rata-rata lamanya PNS<br>mengikuti diklat                                                         | JPL/orang/<br>tahun | 63,67                     | 10                                            | 724      | 15     | 760      | 20     | 798      | 30     | 838      | 40     | 880      | 50     | 924      | 100                             | 924      |         |
|    | Peningkatan Pengembangan<br>Sistem Pelaporan Capaian<br>Kinerja dan Keuangan                                | Tingkat kesesuaian pelaporan<br>capaian kinerja pada unit<br>kinerja SKPD                         | %                   | 82,31                     | 100                                           | 434      | 100    | 455      | 100    | 478      | 100    | 502      | 100    | 527      | 100    | 553      | 50                              | 553      |         |
|    |                                                                                                             | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                                                         | Predikat            |                           | BB                                            |          | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A      |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                                                             | Tingkat akurasi, kecepatan<br>dan kecermatan dalam<br>pengelolaan keuangan                        | %                   |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | A                               |          |         |
|    |                                                                                                             | Persentase kesesuaian<br>usulan Renja dengan Renstra<br>SKPD                                      | %                   |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                                                             | Persentase kesesuaian<br>usulan Renja dengan RPJMD                                                | %                   |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    | Peningkatan Kapasitas<br>Lembaga Perwakilan Rakyat<br>Daerah                                                | Terlaksananya Pemahaman<br>dan Penetapan rancangan<br>APBD tepat waktu                            | Kali                | 20                        | 20                                            | 43,085   | 20     | 45,053   | 20     | 49,210   | 20     | 54,797   | 20     | 60,958   | 20     | 67,751   | 120                             | 67,751   |         |
|    |                                                                                                             | Jumlah Perda yang disetujui                                                                       | Perda               | 13                        | 19                                            |          | 19     |          | 19     |          | 19     |          | 19     |          | 19     |          | 114                             |          |         |
|    |                                                                                                             | Jumlah Rekomendasi yang<br>diberikan DPRD untuk<br>perbaikan penyelenggaraan<br>Pemerintah Daerah | Rekomendasi         | 2                         | 3                                             |          | 3      |          | 3      |          | 3      |          | 3      |          | 3      |          | 18                              |          |         |
|    |                                                                                                             |                                                                                                   |                     |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                                                      | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                             | SATUAN              | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                                                             |                                                                            |                     |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                                                                             |                                                                            |                     |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    | INSPEKTORAT PROVINSI                                                                                        |                                                                            |                     |                           |                                               | 8,209    |        | 8,602    |        | 9,211    |        | 9,966    |        | 10,787   |        | 11,679   |                                 | 11,679   |         |
|    | FUNGSI LAINNYA :<br>OTONOMI DAERAH, PEM.<br>UMUM, ADM. KEU_DA,<br>PERANGKAT DAERAH,<br>KEPEG DAN PERSANDIAN |                                                                            |                     |                           |                                               | 8,209    |        | 8,602    |        | 9,211    |        | 9,966    |        | 10,787   |        | 11,679   |                                 | 11,679   |         |
|    | Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran                                                                       | Persentase pelayanan<br>administrasi perkantoran                           | %                   | 100                       | 100                                           | 1,458    | 100    | 1,531    | 100    | 1,608    | 100    | 1,688    | 100    | 1,773    | 100    | 1,861    | 100                             | 1,861    |         |
|    | Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Aparatur                                                                | Persentase berfungsinya<br>sarana dan prasarana<br>aparatur                | %                   | 100                       | 100                                           | 304      | 100    | 319      | 100    | 335      | 100    | 352      | 100    | 369      | 100    | 388      | 100                             | 388      |         |
|    |                                                                                                             | Kepatuhan pelaksanan UU<br>pelayanan publik (zona hijau)                   | Zona                |                           | hijau                                         |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                           |          |         |
|    | Peningkatan Disiplin<br>Aparatur                                                                            | Persentase disiplin aparatur<br>dalam berpakaian dinas                     | %                   | 100                       | 100                                           | 52       | 100    | 54       | 100    | 57       | 100    | 60       | 100    | 63       | 100    | 66       | 100                             | 66       |         |
|    | Peningkatan Kapasitas<br>Sumber Daya Aparatur                                                               | Rata-rata lamanya PNS<br>mengikuti diklat                                  | JPL/orang/<br>tahun | 100                       | 10                                            | 85       | 15     | 90       | 20     | 94       | 30     | 99       | 40     | 104      | 50     | 109      | 50                              | 109      |         |
|    |                                                                                                             | Tingkat Kapabilitas APIP<br>(Aparat Pengawasan Intern<br>Pemerintah)       | Level 1-5           | 1                         | 2                                             |          | 2      |          | 2      |          | 3      |          | 3      |          | 3      |          | 3                               |          |         |
|    | Peningkatan Pengembangan<br>Sistem Pelaporan Capaian<br>Kinerja dan Keuangan                                | Tingkat kesesuaian pelaporan<br>capaian kinerja pada unit<br>kinerja SKPD  | %                   | 100                       | 100                                           | 86       | 100    | 90       | 100    | 94       | 100    | 99       | 100    | 104      | 100    | 109      | 100                             | 109      |         |
|    |                                                                                                             | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                                  | Predikat            |                           | BB                                            |          | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A      |          | A                               |          |         |
|    |                                                                                                             | Tingkat akurasi, kecepatan<br>dan kecermatan dalam<br>pengelolaan keuangan | %                   | 100                       | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                                                             | Persentase kesesuaian<br>usulan Renja dengan Renstra<br>SKPD               | %                   | 100                       | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                                                             | Persentase kesesuaian<br>usulan Renja dengan RPJMD                         | %                   | 100                       | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    | Peningkatan Fungsi<br>Pengawasan dan<br>Penegakan Hukum                                                     | Penurunan nilai kerugian<br>daerah                                         | %                   | 9,8                       | 9                                             | 6,024    | 85     | 6,308    | 8      | 6,797    | 7.8    | 7,422    | 7.5    | 8,105    | 7      | 8,851    | 7                               | 8,851    |         |
|    |                                                                                                             | Rekomendasi atas LHP yang<br>ditindaklanjuti                               | %                   |                           | 70                                            |          | 70     |          | 70     |          | 75     |          | 75     |          | 75     |          | 75                              |          |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                                                            | SATUAN           | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                        |                                                                                                           |                  |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                        |                                                                                                           |                  |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    |                                                        | Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (Sistem Pengawasan Intern Pemerintah)                                | Level 1-5        | 1                         | 2                                             |          | 2      |          | 2      |          | 3      |          | 3      |          | 3      |          | 3                               |          |         |
|    |                                                        | Perangkat Daerah Provinsi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) | Perangkat Daerah | 2                         | 2                                             |          | 3      |          | 4      |          | 6      |          | 8      |          | 10     |          | 10                              |          |         |
|    | Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat           | Pengaduan masyarakat yang dapat ditangani                                                                 | %                | 100                       | 100                                           | 200      | 100    | 210      | 100    | 226      | 100    | 247      | 100    | 269      | 100    | 294      | 100                             | 294      |         |
|    |                                                        |                                                                                                           |                  |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |



| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                                                       | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                             | SATUAN              | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                                                              |                                                                            |                     |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                                                                              |                                                                            |                     |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    | KANTOR PENGHUBUNG                                                                                            |                                                                            |                     |                           |                                               | 5,269    |        | 5,521    |        | 5,912    |        | 6,397    |        | 6,924    |        | 7,496    |                                 | 7,496    |         |
|    | FUNGSI LAINNYA :<br>OTONOMI DAERAH, PEM.<br>UMUM, ADM. KEU. DA,<br>PERANGKAT DAERAH,<br>KEPEG DAN PERSANDIAN |                                                                            |                     |                           |                                               | 5,269    |        | 5,521    |        | 5,912    |        | 6,397    |        | 6,924    |        | 7,496    |                                 | 7,496    |         |
|    | Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran                                                                        | Persentase pelayanan<br>administrasi perkantoran                           | %                   |                           | 100                                           | 1,411    | 100    | 1,482    | 100    | 1,556    | 100    | 1,634    | 100    | 1,715    | 100    | 1,801    |                                 | 1,801    |         |
|    | Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Aparatur                                                                 | Persentase berfungsinya<br>sarana dan prasarana<br>aparatur                | %                   |                           | 100                                           | 1,300    | 100    | 1,365    | 100    | 1,434    | 100    | 1,505    | 100    | 1,581    | 100    | 1,660    |                                 | 1,660    |         |
|    |                                                                                                              | persentase kepatuhan<br>pelaksanaan UU pelayanan<br>publik (zona hijau)    | Zona                |                           | hijau                                         |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          |                                 |          |         |
|    | Peningkatan Disiplin<br>Aparatur                                                                             | Persentase disiplin aparatur<br>dalam berpakaian dinas                     | %                   |                           | 100                                           | 36       | 100    | 37       | 100    | 39       | 100    | 41       | 100    | 43       | 100    | 45       |                                 | 45       |         |
|    | Peningkatan Kapasitas<br>Sumberdaya Aparatur                                                                 | Rata-rata lamanya PNS<br>mengikuti diklat                                  | JPL/orang/<br>tahun |                           |                                               | 98       |        | 103      |        | 108      |        | 113      |        | 119      |        | 125      |                                 | 125      |         |
|    | Peningkatan Pengembangan<br>Sistem Pelaporan Capaian<br>Kinerja Keuangan                                     | Tingkat kesesuaian pelaporan<br>capaian kinerja pada unit<br>kinerja SKPD  | %                   |                           | 100                                           | 145      | 100    | 153      | 100    | 160      | 100    | 168      | 100    | 177      | 100    | 186      |                                 | 186      |         |
|    |                                                                                                              | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                                  | Skor                |                           | BB                                            |          | BB     |          | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          |                                 |          |         |
|    |                                                                                                              | Tingkat akurasi, kecepatan<br>dan kecermatan dalam<br>pengelolaan keuangan | %                   |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          |                                 |          |         |
|    |                                                                                                              | Persentase kesesuaian<br>usulan Renja dengan Renstra<br>SKPD               | %                   |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          |                                 |          |         |
|    |                                                                                                              | Persentase kesesuaian<br>usulan Renja dengan RPJMD                         | %                   |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          |                                 |          |         |
|    | Program Peningkatan<br>Pelayanan Kedinasan                                                                   |                                                                            |                     |                           |                                               | 650      |        | 680      |        | 746      |        | 838      |        | 939      |        | 1,050    |                                 | 1,050    |         |
|    | Peningkatan Kinerja<br>Perangkat Daerah dan<br>Ketatalaksanaan Pemerintah<br>Daerah                          |                                                                            |                     |                           |                                               | 1,109    |        | 1,159    |        | 1,273    |        | 1,428    |        | 1,600    |        | 1,791    |                                 | 1,791    |         |
|    | Program Pembinaan dan<br>Pengembangan Aparatur                                                               |                                                                            |                     |                           |                                               | 41       |        | 43       |        | 47       |        | 53       |        | 60       |        | 67       |                                 | 67       |         |
|    | Program Pengembangan<br>Data dan Informasi                                                                   |                                                                            |                     |                           |                                               | 45       |        | 47       |        | 51       |        | 57       |        | 64       |        | 72       |                                 | 72       |         |
|    | Program Peningkatan<br>Pelayanan Publik                                                                      |                                                                            |                     |                           |                                               | 434      |        | 453      |        | 498      |        | 558      |        | 626      |        | 700      |                                 | 700      |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome) | SATUAN | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |        | CATATAN |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------------------------------|--------|---------|
|    |                                                        |                                |        |                           | 2016                                          |        | 2017     |        | 2018     |        | 2019     |        | 2020     |        | 2021     |        |                                 |        |         |
|    |                                                        | TAHUN 2017-2021                |        |                           | TAHUN 2017-2021                               | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt)                        | Target |         |
|    | Pengembangan Nilai-Nilai Budaya                        | .....                          |        |                           |                                               |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |                                 |        |         |
|    | Partisipasi<br>.....<br>atau Kerjasama<br>Pembangunan  |                                |        |                           |                                               |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |                                 |        |         |
|    |                                                        |                                |        |                           |                                               |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |                                 |        |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                                                      | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                                                                                              | SATUAN                 | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                                                             |                                                                                                                                             |                        |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                                                                             |                                                                                                                                             |                        |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    | KORPRI                                                                                                      |                                                                                                                                             |                        |                           |                                               | 1,257    |        | 1,317    |        | 1,410    |        | 1,526    |        | 1,652    |        | 1,788    |                                 | 1,788    |         |
|    | FUNGSI LAINNYA :<br>OTONOMI DAERAH, PEM.<br>UMUM, ADM. KEU_DA,<br>PERANGKAT DAERAH,<br>KEPEG DAN PERSANDIAN |                                                                                                                                             |                        |                           |                                               | 1,257    |        | 1,317    |        | 1,410    |        | 1,526    |        | 1,652    |        | 1,788    |                                 | 1,788    |         |
|    | Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran                                                                       | Persentase pelayanan<br>administrasi perkantoran                                                                                            | %                      |                           | 100                                           | 534      | 100    | 561      | 100    | 589      | 100    | 618      | 100    | 649      | 100    | 682      | 100                             | 682      |         |
|    | Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Aparatur                                                                | Persentase berfungsi<br>sarana dan prasarana<br>aparatur                                                                                    | %                      | 100                       | 100                                           | 289      | 100    | 304      | 100    | 319      | 100    | 335      | 100    | 351      | 100    | 369      | 100                             | 369      |         |
|    |                                                                                                             | Kepatuhan pelaksanan UU<br>pelayanan publik (zona hijau)                                                                                    | Zona                   |                           | hijau                                         |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                           |          |         |
|    | Peningkatan Disiplin<br>Aparatur                                                                            | Persentase disiplin aparatur<br>dalam berpakaian dinas                                                                                      | %                      | 100                       | 100                                           | 10       | 100    | 10       | 100    | 11       | 100    | 11       | 100    | 12       | 100    | 12       | 100                             | 12       |         |
|    |                                                                                                             | Rata-rata lamanya PNS<br>mengikuti diklat                                                                                                   | JPL/orang/<br>tahun    |                           | 10                                            |          | 15     | 25       | 20     | 27       | 30     | 32       | 40     | 37       | 50     | 44       | 50                              | 44       |         |
|    | Peningkatan Pengembangan<br>Sistem Pelaporan Capaian<br>Kinerja dan Keuangan                                | Tingkat kesesuaian pelaporan<br>capaian kinerja pada unit<br>kinerja SKPD                                                                   | %                      | 100                       | 100                                           | 98       | 100    | 103      | 100    | 108      | 100    | 114      | 100    | 119      | 100    | 125      | 100                             | 125      |         |
|    |                                                                                                             | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                                                                                                   | predikat               |                           | BB                                            |          | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A      |          | A                               |          |         |
|    |                                                                                                             | Tingkat akurasi, kecepatan<br>dan kecermatan dalam<br>pengelolaan keuangan                                                                  | %                      |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                                                             | Persentase kesesuaian<br>usulan Renja dengan Renstra<br>SKPD                                                                                | %                      |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                                                             | Persentase kesesuaian<br>usulan Renja dengan RPJMD                                                                                          | %                      |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                                                             | Terlaksananya-<br>kepemrintahan yang baik di-<br>Sekretariat DP-KORPRI                                                                      | Laporan dan-<br>Orang- |                           | 4-<br>Laporan-<br>(66-<br>Orang)-<br>Peserta- | 19-      | -      | -        | -      | -        | -      | -        | -      | -        | -      | -        | -                               | -        |         |
|    | Peningkatan Kapasitas-<br>Sumber Daya Aparatur                                                              | Meningkatnya wawasan dan-<br>kemampuan/kapasitas-<br>Sumber Daya Aparatur-<br>Melalui Bimbingan Teknis-<br>Peraturan Perundang-<br>undangan | Orang                  |                           | 3                                             | 15       | -      | -        | -      | -        | -      | -        | -      | -        | -      | -        | -                               | -        |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                    | SATUAN | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |        |          |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|--------|----------|
|    |                                                        |                                                                   |        |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          |                                 |          |         | 2021   |          |
|    |                                                        |                                                                   |        |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         | Target | Rp. (Jt) |
|    | Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                    | Jumlah Penghargaan Penilaian Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan |        |                           |                                               | 292      |        | 315      |        | 357      |        | 416      |        | 483      |                                 | 556      |         | 556    |          |
|    |                                                        |                                                                   |        |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |        |          |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                 | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                       | SATUAN           | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |        | CATATAN |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------------------------------|--------|---------|
|    |                                                                        | 2016                                                                 |                  |                           | 2017                                          |        | 2018     |        | 2019     |        | 2020     |        | 2021     |        |          |        |                                 |        |         |
|    |                                                                        | TAHUN 2017-2021                                                      |                  |                           | TAHUN 2017-2021                               | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt)                        | Target |         |
|    | BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN                                           |                                                                      |                  |                           |                                               | 13,676 |          | 14,331 |          | 15,346 |          | 16,604 |          | 17,971 |          | 19,457 |                                 | 19,457 |         |
|    | FUNGSI KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                      |                                                                      |                  |                           |                                               | 13,676 |          | 14,331 |          | 15,346 |          | 16,604 |          | 17,971 |          | 19,457 |                                 | 19,457 |         |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                        | %                | 100                       | 100                                           | 3,998  | 100      | 4,197  | 100      | 4,407  | 100      | 4,628  | 100      | 4,859  | 100      | 5,102  | 100                             | 5,102  |         |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur                   | %                | 100                       | 100                                           | 2,547  | 100      | 2,674  | 100      | 2,808  | 100      | 2,948  | 100      | 3,095  | 100      | 3,250  | 100                             | 3,250  |         |
|    |                                                                        | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)               | Zona             |                           | hijau                                         |        | hijau    |        | hijau    |        | hijau    |        | hijau    |        | hijau    |        | hijau                           |        |         |
|    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas                  | %                | 100                       | 100                                           | 55     | 100      | 57     | 100      | 60     | 100      | 63     | 100      | 66     | 100      | 70     | 100                             | 70     |         |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                               | JPL/orang/ tahun | 100                       | 10                                            | 37     | 15       | 38     | 20       | 40     | 30       | 42     | 40       | 44     | 50       | 47     | 50                              | 47     |         |
|    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD  | %                | 100                       | 100                                           | 249    | 100      | 261    | 100      | 274    | 100      | 288    | 100      | 302    | 100      | 317    | 100                             | 317    |         |
|    |                                                                        | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                            | Predikat         |                           | BB                                            |        | BB       |        | BB       |        | A        |        | A        |        | A        |        | A                               |        |         |
|    |                                                                        | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan | %                |                           | 100                                           |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100                             |        |         |
|    |                                                                        | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD               | %                |                           | 100                                           |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100                             |        |         |
|    |                                                                        | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                      | %                |                           | 100                                           |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100      |        | 100                             |        |         |
|    | Pendidikan Kedinasan                                                   | Aparatur mengikuti diklat sesuai tupoksi dan persyaratan jabatan     | %                | 90                        | 90                                            | 5,977  | 90       | 4,175  | 90       | 4,559  | 90       | 5,076  | 90       | 5,645  | 90       | 6,273  | 90                              | 6,273  |         |
|    |                                                                        | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                               | JPL/orang/ tahun | 100                       | 10                                            | -      | 15       | 2,296  | 20       | 2,507  | 30       | 2,790  | 40       | 3,104  | 50       | 3,449  | 50                              | 3,449  |         |
|    | Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                                    | Akreditasi Lembaga Penyelenggaraan Diklat                            | Nilai            | B                         | B                                             | 815    | BB       | 569    | BB       | 621    | BB       | 692    | A        | 769    | A        | 855    | A                               | 855    |         |
|    |                                                                        | Sertifikasi SMM ISO                                                  | Standar          | SMM ISO                   | SMM ISO                                       |        | SMM ISO  | 63     | SMM ISO  | 69     | SMM ISO  | 77     | SMM ISO  | 85     | SMM ISO  | 95     | SMM ISO                         | 95     |         |
|    |                                                                        |                                                                      |                  |                           |                                               |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |                                 |        |         |
|    |                                                                        |                                                                      |                  |                           |                                               |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |                                 |        |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                 | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                          | SATUAN           | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                        |                                                                         |                  |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                                        |                                                                         |                  |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                                               |                                                                         |                  |                           |                                               | 7,534    |        | 7,894    |        | 8,453    |        | 9,146    |        | 9,899    |        | 10,718   |                                 | 10,718   |         |
|    | FUNGSI KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                      |                                                                         |                  |                           |                                               | 7,534    |        | 7,894    |        | 8,453    |        | 9,146    |        | 9,899    |        | 10,718   |                                 | 10,718   |         |
|    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                           | %                |                           | 100                                           | 2,697    | 100    | 2,832    | 100    | 2,973    | 100    | 3,122    | 100    | 3,278    | 100    | 3,442    | 100                             | 3,442    |         |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur                      | %                |                           | 100                                           | 999      | 100    | 1,049    | 100    | 1,102    | 100    | 1,157    | 100    | 1,214    | 100    | 1,275    | 100                             | 1,275    |         |
|    |                                                                        | Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)                  | Zona             |                           | hijau                                         |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                           |          |         |
|    | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas                     | %                |                           | 100                                           | 46       | 100    | 48       | 100    | 51       | 100    | 53       | 100    | 56       | 100    | 59       | 100                             | 59       |         |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                                  | JPL/orang/ tahun |                           | 10                                            | 25       | 15     | 26       | 20     | 27       | 30     | 29       | 40     | 30       | 50     | 32       | 50                              | 32       |         |
|    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD     | %                |                           | 100                                           | 268      | 100    | 282      | 100    | 296      | 100    | 310      | 100    | 326      | 100    | 342      | 100                             | 342      |         |
|    |                                                                        | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                               | Predikat         |                           | BB                                            |          | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A      |          | A                               |          |         |
|    |                                                                        | Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan    | %                |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                        | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD                  | %                |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                        | Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD                         | %                |                           | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    | Peningkatan Manajemen SDM Aparatur                                     | Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat                                  | JPL/orang/ tahun |                           |                                               | 3,499    | 15     | 3,658    | 20     | 4,005    | 30     | 4,475    | 40     | 4,995    | 50     | 5,568    | 50                              | 5,568    |         |
|    |                                                                        | Persentase SKPD yang ketersediaan pegawainya sesuai formasi minimal 70% | %                |                           |                                               |          | 85     |          | 88     |          | 91     |          | 93     |          | 95     |          | 95                              |          |         |
|    |                                                                        |                                                                         |                  |                           |                                               |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                       | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                             | SATUAN              | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                              |                                                                            |                     |                           | 2016                                          |          | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                                              |                                                                            |                     |                           | Target                                        | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    | BAPPEDA                                                                      |                                                                            |                     |                           |                                               | 15,890   |        | 16,650   |        | 17,830   |        | 19,291   |        | 20,879   |        | 22,606   |                                 | 22,606   |         |
|    | FUNGSI PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN                                            |                                                                            |                     |                           |                                               | 15,890   |        | 16,650   |        | 17,830   |        | 19,291   |        | 20,879   |        | 22,606   |                                 | 22,606   |         |
|    | Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran                                        | Persentase pelayanan<br>administrasi perkantoran                           | %                   | 100                       | 100                                           | 3,028    | 100    | 3,179    | 100    | 3,338    | 100    | 3,505    | 100    | 3,681    | 100    | 3,865    | 100                             | 3,865    |         |
|    | Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Aparatur                                 | Persentase berfungsinya<br>sarana dan prasarana<br>aparatur                | %                   | 100                       | 100                                           | 689      | 100    | 723      | 100    | 759      | 100    | 797      | 100    | 837      | 100    | 879      | 100                             | 879      |         |
|    |                                                                              | Kepatuhan pelaksanaan UU<br>pelayanan publik (zona hijau)                  | zona                |                           | hijau                                         |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau  |          | hijau                           |          |         |
|    | Peningkatan Disiplin<br>Aparatur                                             | Persentase disiplin aparatur<br>dalam berpakaian dinas                     | %                   | 100                       | 100                                           | 68       | 100    | 71       | 100    | 74       | 100    | 78       | 100    | 82       | 100    | 86       | 100                             | 86       |         |
|    | Peningkatan Kapasitas<br>Sumber Daya Aparatur                                | Rata-rata lamanya PNS<br>mengikuti diklat                                  | JPL/orang/<br>tahun | 100                       | 10                                            | 116      | 15     | 122      | 20     | 128      | 30     | 134      | 40     | 141      | 50     | 148      | 50                              | 148      |         |
|    |                                                                              | Fungsional Perencana<br>Pertama pada Bappeda<br>Provinsi                   | orang               | 1                         | 1                                             |          | 3      |          | 5      |          | 7      |          | 8      |          | 9      |          | 9                               |          |         |
|    |                                                                              | Fungsional Perencana Muda<br>pada Bappeda Provinsi                         | orang               | 1                         | 1                                             |          | 2      |          | 3      |          | 4      |          | 5      |          | 6      |          | 6                               |          |         |
|    |                                                                              | Fungsional Perencana Madya<br>pada Bappeda Provinsi                        | orang               | 1                         | 1                                             |          | 1      |          | 2      |          | 2      |          | 2      |          | 3      |          | 3                               |          |         |
|    | Peningkatan Pengembangan<br>Sistem Pelaporan Capaian<br>Kinerja dan Keuangan | Tingkat kesesuaian pelaporan<br>capaian kinerja pada unit<br>kinerja SKPD  | %                   | 100                       | 100                                           | 521      | 100    | 547      | 100    | 575      | 100    | 603      | 100    | 634      | 100    | 665      | 100                             | 665      |         |
|    |                                                                              | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD                                                  | Predikat            |                           | BB                                            |          | BB     |          | BB     |          | A      |          | A      |          | A      |          | A                               |          |         |
|    |                                                                              | Tingkat akurasi, kecepatan<br>dan kecermatan dalam<br>pengelolaan keuangan | %                   | 100                       | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                              | Persentase kesesuaian<br>usulan Renja dengan Renstra<br>SKPD               | %                   | 100                       | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                              | Persentase kesesuaian<br>usulan Renja dengan RPJMD                         | %                   | 100                       | 100                                           |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100    |          | 100                             |          |         |

| NO | BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PROGRAM PRIORITAS                         | INDIKATOR KINERJA<br>(Outcome)                                                                                                                                                                   | SATUAN | KONDISI<br>AWAL<br>(2015) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          | KONDISI AKHIR/<br>KINERJA AKHIR |          | CATATAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|----------|---------|
|    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |        |                           | 2016                                          |                 | 2017   |          | 2018   |          | 2019   |          | 2020   |          | 2021   |          |                                 |          |         |
|    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |        |                           | TAHUN 2017-2021                               | TAHUN 2017-2021 | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target | Rp. (Jt) | Target                          | Rp. (Jt) |         |
|    | Perencanaan Pembangunan Daerah                                                 | Persentase kesesuaian sasaran dan insikator sasaran antara RPJMD Provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, Renstra SKPD Provinsi dengan Renja SKPD Provinsi dan RPJMD Provinsi dengan RKPD Provinsi | %      | 24                        | 100%                                          | 4,067           | 100%   | 4,258    | 100%   | 4,595    | 100%   | 5,026    | 100%   | 5,499    | 100%   | 6,016    | 100%                            | 6,016    |         |
|    |                                                                                | Persentase kesesuaian proiritas pembangunan pada RKPD kabupaten/kota dengan RKPD Provinsi                                                                                                        | %      | NA                        | 90                                            |                 | 90     |          | 90     |          | 90     |          | 90     |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                      | Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan terget dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi                                                                            | %      | NA                        | 90                                            | 4,014           | 90     | 4,202    | 90     | 4,534    | 90     | 4,960    | 90     | 5,426    | 100    | 5,937    | 100                             | 5,937    |         |
|    | Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan                                    | Persentase Kelengkapan Data Pendukung untuk Pengukuran Kinerja Sasaran Pembangunan yang tercapaian pada RPJMD Provinsi                                                                           | %      | NA                        | 90                                            | 1,214           | 90     | 1,271    | 90     | 1,371    | 90     | 1,500    | 90     | 1,641    | 100    | 1,795    | 100                             | 1,795    |         |
|    |                                                                                | Persentase Kelengkapan Data Pendukung untuk Proses Perencanaan Pembangunan                                                                                                                       | %      | NA                        | 60                                            |                 | 65     |          | 70     |          | 75     |          | 80     |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    |                                                                                | Persentase kualitas kesesuaian antara rencana (RKPD Provinsi) dengan hasil pelaksanaan pembangunan (SIPKD dan EKPD)                                                                              | %      | 70                        | 75                                            |                 | 80     |          | 85     |          | 90     |          | 95     |          | 100    |          | 100                             |          |         |
|    | Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan | Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Pengembangan dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah                                                                                                 | Judul  | 34                        | 65%                                           | 1,000           | 65%    | 1,047    | 70%    | 1,130    | 75%    | 1,236    | 80%    | 1,352    | 80%    | 1,479    | 80%                             | 1,479    |         |
|    | Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik                                        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                                                                       | Skor   |                           | 83                                            | 1,173           | >83    | 1,229    | >83    | 1,326    | >83    | 1,450    | >83    | 1,586    | >83    | 1,736    | >83                             | 1,736    |         |
|    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |        |                           |                                               |                 |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                                 |          |         |